

# LKJIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



**TAHUN 2023**



**TANAH LAUT**  
BERINTERAKSI

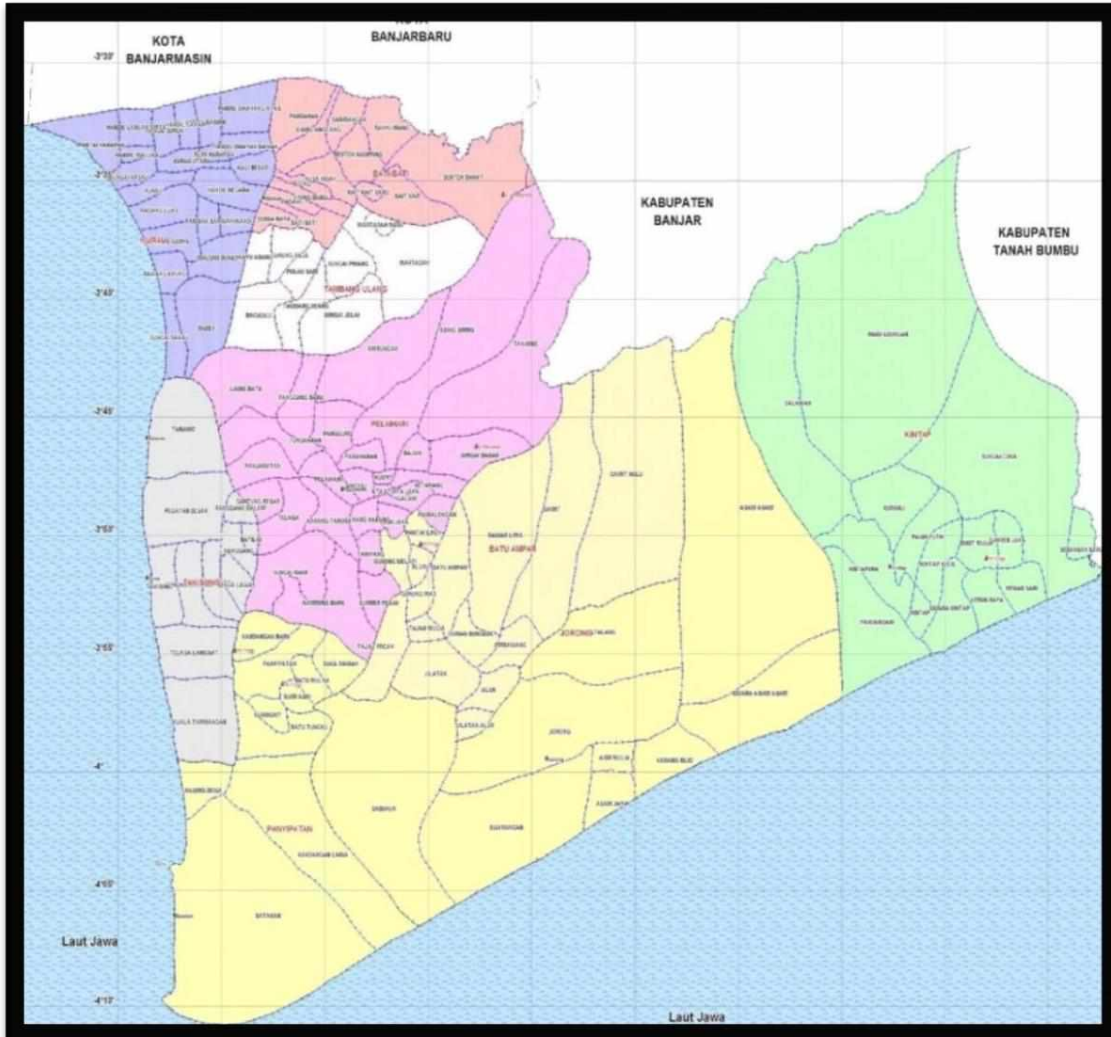


**H. SYAMSIR RAHMAN**  
Pj. Bupati Tanah Laut





# PETA KABUPATEN TANAH LAUT





## LAMBANG DAERAH



## MAKNA LAMBANG DAERAH

1. Lambang berbentuk perisai mengandung pengertian kekuatan mempertahankan daerah ini dari serangan musuh yang ingin mengganggu ketentraman.
2. Warna coklat dan biru pada bagian atas lambang dengan tulisan Tanah Laut melambangkan cakupan wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi wilayah daratan dan lautan.
3. Warna hijau dan kuning pada tubuh lambang, melambangkan Kabupaten Tanah Laut memiliki kesuburan alam dan kekayaan bahan tambang.
4. Garis miring hitam yang membelah pinang pada pertengahan lambang menunjukkan arah angin, yaitu tenggara dan barat laut yang memiliki pengertian bahwa Tanah Laut mengalami dua musim yakni, musim kemarau dan musim hujan, disamping merupakan garis pertautan abadi antara hasil tambang dengan kesuburan alamnya.
5. Belanga yang berada ditengah lambang adalah pedaringan atau tempat beras, yang melambangkan kekayaan alam Tanah Laut yang disimpan di dalam belanga untuk lebih dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat.
6. Bintang bersudut lima berada di atas belanga melambangkan Pancasila, disamping juga melambangkan jumlah kecamatan pada awal pembentukan Kabupaten Tanah laut yang berjumlah lima Kecamatan.



7. Setangkai padi dan seikat purun di dalam lengkungan belanga melambangkan kemakmuran dan persatuan daerah Tanah Laut, yang juga merupakan salah satu hasil daerah yang berbentuk anyaman.
8. Perahu layar dan laut melambangkan bahwa Tanah Laut merupakan daerah nelayan yang kaya dengan hasil laut selain itu lambang ini juga memiliki pengertian ketabahan dalam menghadapi rintangan.





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp ( 0512 ) 21384 Pelaihari

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pelaihari, 6 Maret 2024

Inspektur,  
  
Drs. Joko Wuryanto, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650116 199203 1 008



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat yang semakin mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan tahun kelima atau terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023. Laporan kinerja dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja ini juga menguraikan keberhasilan - keberhasilan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang serta menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcomes*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut ini disusun semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan datang.

Pelaihari,           Maret 2024

Pj. Bupati Tanah Laut,

**H. SYAMSIR RAHMAN**



## IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja kelima RPJMD 2018 – 2023. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 21 sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 31 indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2023 dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2023. Hasil pengukuran





secara mandiri (*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 31 indikator kinerja utama yaitu 142,27% dengan rincian **24 (dua puluh empat)** indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%, **3 (tiga)** indikator dengan tingkat capaian **Memuaskan** dengan rentang capaian di atas 80% s.d 90%, **2 (dua)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik** dengan rentang capaian di atas 70% s.d 80%, **1 (satu)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Baik** dengan rentang capaian di atas 60% s.d 70%, dan **1 (satu)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup** dengan rentang capaian di atas 50% s.d 60%.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2024 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari,       Maret 2024

Pj. Bupati Tanah Laut,



**H. SYAMSIR RAHMAN**



## DAFTAR ISI

<b>MAKNA LAMBANG DAERAH</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut .....	3
C. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah .....	6
D. Aparatur Sipil Negara .....	8
E. Isu Strategis .....	10

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .....	12
B. Indikator Kinerja Utama .....	23

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Akuntabilitas Kinerja .....	43
B. Akuntabilitas Keuangan .....	376

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	398
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	398



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Kabupaten Tanah Laut
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2023
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Daftar Penghargaan Tahun 2023
5. Foto Penerimaan Penghargaan Tahun 2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggungjawab melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Bupati menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah





diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

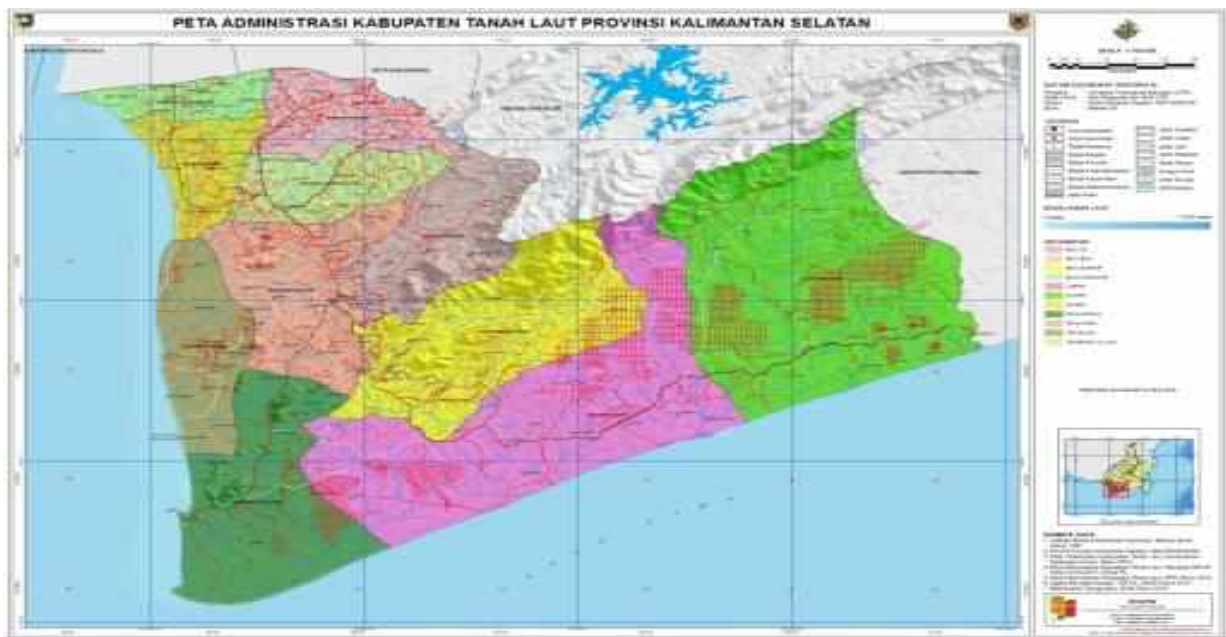
Tujuan pelaporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di bagian selatan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" sampai 115°23'31" Bujur Timur dan 3°30'33" sampai 4°11'38" Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km<sup>2</sup> atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 130 Desa dan 5 Kelurahan.

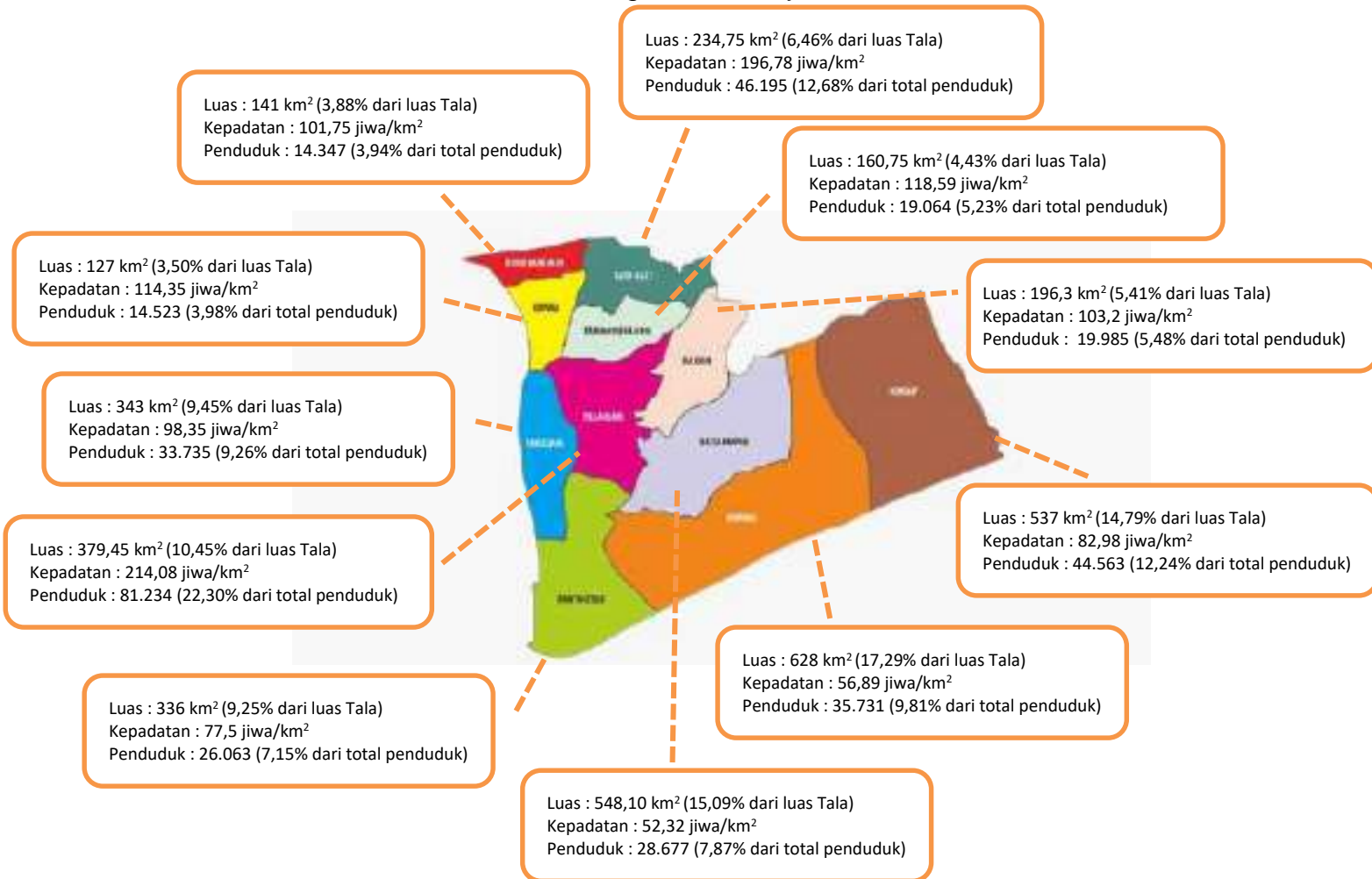
Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km<sup>2</sup>. Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut: Utara Kota Banjarbaru, Selatan Laut Jawa, Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah barat Laut Jawa.

Gambar 1.1  
Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut, 2023



Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau,

Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>.



Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan terdapat 135 desa dan kelurahan, untuk wilayah yang memiliki jumlah Desa dan Kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 Kelurahan), Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap dengan jumlah masing-masing 14 Desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin dengan jumlah masing-masing 9 desa.



Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan November - April dengan curah hujan rata-rata 322,5 dan bulan-bulan relative kering antara bulan Mei - Oktober dengan curah hujan rata-rata 79,16. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut ,rasio jenis kelamin pada tahun 2023 sebesar 103,31 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan atau dari 100 perempuan terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Pelaihari dimana sekitar 22 persen penduduk Kabupaten Tanah Laut tinggal di kecamatan ini. Kecamatan ini juga merupakan kecamatan paling padat penduduk dengan kepadatan sekitar 214 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Bumi Makmur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 14.347 jiwa.





## 1. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tanah Laut mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah melalui pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Untuk melaksanakan urusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

### 1) Susunan Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka pada Tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih tetap menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Umum dan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

Adapun nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1  
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA SKPD	NOMOR PERDA	TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A



2	SEKRETARIAT DPRD	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
5	DINAS KESEHATAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
8	DINAS SOSIAL	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
14	DINAS PARIWISATA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
18	DINAS PERHUBUNGAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B



22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	No. 6 Tahun 2016	Tipe C
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	No. 10 Tahun 2013	-
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	No. 10 Tahun 2013	Tipe B
30	KECAMATAN PELAIHARI	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
31	KECAMATAN KINTAP	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
32	KECAMATAN JORONG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
33	KECAMATAN BARU AMPAR	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
34	KECAMATAN PANYIPATAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
35	KECAMATAN TAKISUNG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
36	KECAMATAN TAMBANG ULANG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
37	KECAMATAN BATI-BATI	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
39	KECAMATAN KURAU	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
40	KECAMATAN BAJUIN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A

Sumber Data : Diolah

## 2) Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Daerah, salah satu unsur terpenting adalah Aparatur Sipil Negara. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Data Simpeg Tahun 2023 adalah 5133 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2004 orang dan perempuan sebanyak 3129 orang.

Tabel 1.2  
Jumlah Aparatur Sipil Negara  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut  
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
1	SD/SEDERAJAT	20	2	22
2	SLTP/SEDERAJAT	33	10	43
3	SLTA/SEDERAJAT	149	74	223
4	DIPLOMA I, II, III, IV	333	642	975
5	STRATA I	1125	2142	3267
6	STRATA II	174	132	306
7	STRATA III	2	0	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>2004</b>	<b>3129</b>	<b>5133</b>

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 1.3  
Jumlah Aparatur Sipil Negara  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut  
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

NO	GOLONGAN/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GOLONGAN I	27	4	31
2	GOLONGAN II	267	250	517
3	GOLONGAN III	1192	2330	3522
4	GOLONGAN IV	518	545	1063
	<b>JUMLAH</b>	<b>2004</b>	<b>3129</b>	<b>5133</b>

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia





### C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Isu strategis Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan RPJMD 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Selain Isu-isu strategis tersebut, Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman yaitu adanya Revolusi Industri 4.0. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Peta Jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Peta Jalan Making Indonesia 4.0 ini akan memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berikut beberapa strategi kedepan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 tersebut :

1. Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 terutama terkait perindustrian, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan



ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian daerah di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan – terutama tenaga kerja perempuan.

2. Mengoptimalkan 5 (lima) Sektor Manufaktur Making Indonesia 4.0 dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai Standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Meningkatkan literasi keuangan petani/nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/modal dan sarana prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
5. Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peran masjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat.
6. Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang adaptif serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri.
7. Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/*technopark* yang ada di daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan menumbuhkembangkan *start up/creative hub* dan menjadikan perguruan tinggi sebagai *center of excellence and innovation*.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA,  
RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI  
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**B E R K A R Y A**

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

**I N O V A S I**

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraaannya.

### **TERTATA**

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

### **RELIGIUS**

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

### **AKTUAL**

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

### **SINERGI**

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan



digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

*Tagline* dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

## 2. Misi

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

- BERKARYA** : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- INOVASI** : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- TERTATA** : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



**RELIGIUS** : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

**AKTUAL dan SINERGI** : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Agenda Pembangunan dan Sasaran**

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Tanah Laut tahun 2018-2023 sebagai salah satu tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025, maka dapat disusun agenda pembangunan sebagai berikut :

Agenda 1 : Penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Agenda 2 : Peningkatan daya saing ekonomi.

Agenda 3 : Reformasi birokrasi

Agenda 4 : Peningkatan religiusitas kehidupan bermasyarakat.

Agenda 5 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **4. Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi serta kriteria pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan sebagai penjabaran atau operasionalisasi dari pernyataan visi dan misi yang bersangkutan yang wajib dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang antara lain terdiri dari :

- 1) Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 2) Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik.
- 5) Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif.



- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 9) Terwujudnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas.
- 10) Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah.
- 11) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 12) Peningkatan upaya membina desa dan menata kota.

## **5. Sasaran**

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
- 2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
- 3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya
- 4) Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga
- 5) Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi
- 6) Meningkatnya inovasi pelayanan publik
- 7) Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian
- 8) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
- 9) Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik
- 10) Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama
- 11) Meningkatnya wawasan kebangsaan
- 12) Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi
- 13) Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
- 14) Menurunnya tingkat pengangguran
- 15) Meningkatnya perlindungan masyarakat
- 16) Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
- 17) Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah
- 18) Meningkatnya ketahanan pangan
- 19) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 20) Meningkatnya pembinaan desa
- 21) Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

Tabel 2.1  
Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Kabupaten Tanah Laut

VISI		"TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)"																		
MISI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	SASARAN STRATEGIS																
				2019			2020			2021			2022			2023				
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)		
1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sosial dan budaya	1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7.97	7.64	95.86	8.06	7.88	97.77	9	7.89	87.67	8.05	7.9	98.14	8,07	7.92	98.14
			Harapan lama sekolah (tahun)	11,82	12.05	11.96	99.25	12.1	12.01	99.26	12.12	12.31	101.57	13.19	12.32	93.40	13,22	12.41	93.87	
	2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,76	68.9	69.31	100.60	69.1	69.45	100.51	69.3	69.59	100.42	69.6	69.86	100.37	69,8	70.11	100.44	
	3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	70	82.73	118.19	75	84.59	112.79	76.5	84.53	110.50	77.5	85.65	110.52	80	87.33	109.16	



		4	Meningkatnya pelestarian /pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah Atlet yang berprestasi	83	62	98	158.06	68	61	89.70	74	128	172.97	81	315	388.89	89	200	224,71	
		5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	1	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	0	1	5	500	2	5	250	2	6	300	2	10	500	2	8	400
		2	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	0	5 Unit Usaha	10	200	10 Unit Usaha	25	250	15 Unit Usaha	103	686.67	20 Unit Usaha	134	670	25 Unit Usaha	188	752



3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	B (60,06)	BB (71,00)	B (64,89)	91,39	BB (74,00)	B(66,88)	90,38	BB (77,00)	B(66,11)	85,85	A (81)	B(67,28)	83,06	BB (70,01)	B(67,52)	96,44
			Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	
		2	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	-	11,9	16	134,45	23,81	54,375	228,37	35,71	55,87	156,45	47,62	58,98	123,86	75	73,70	98,26
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	100	0	3	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
		2	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100



5	Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,64	4.85	3.72	76.70	4,9	-1.95	0.00	3.5	3.47	99.14	4	5.12	128	5,05	4,78	94,65
				Indeks Gini (skor)	0,259	0.257	0.271	94.83	0.256	0.25	102.40	0.255	0.232	109.91	0.254	0.263	96.58	0,225	0,259	86,87
		PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	28,57	31.5	30.4	96.51	33.07	29	88.42	11.6	29.68	255.86	36.81	30.62	83.18	39,02	32,10	82,86		
		2	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	87,75	88.25	86.96	98.54	88.5	87.19	98.52	88.75	86.86	97.87	89,00	87.28	98.07	89,50	87,53	97,79
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3.3	3.41	96.77	3	3.57	84.03	4	3.52	113.64	3.4	4.17	81.53	2,5	3,58	69,83		



	4	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	160 (Tinggi)	150 (Tinggi)	178 (Tinggi)	84.26	135 (Sedang)	178 (Tinggi)	75.84	130 (Sedang)	178 (Tinggi)	73.03	125 (Sedang)	156.33 (Tinggi)	79.95	120 (Sedang)	169,22 (Tinggi)	70,91
			Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	9.5	12.5	4.26	34.08	15	2.54	16.93	20	49.01	245.05	25	13.32	53.28	30,00	29,37	97,9
	1	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70	70.5	51.95	73.69	70.75	53	74.91	71	43.13	60.75	89	58.12	65.30	73,00	60,24	82,52
	1	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor Petanian	3,50	3.5	3.42	97.71	3,51	-0.30	0.00	3.52	1.81	51.42	3.53	2.70	76.49	3,57	2,06	57,70
			Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.56	7.56	2.51	33.20	7,57	-4.27	0.00	7.58	5.01	66.09	7.69	3.86	50.20	7,60	5,33	70,13
			Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (ribu orang)	275	280,000	346,366	123.70	285,000	330,241	115.87	285,000	193,671	67.95	300,000	579,878	193.29	350.000	608.624	202,9





		2	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95	95	83.3	87.68	95	82.8	87.16	95	84.1	88.53	95	90.7	95.47	95,00	89,7	94,42
		1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	-	60	58.06	96.43	60.58	69.82	115.24	60.960	68.7	112.70	71.27	67.78	95.10	68,47	68,65	100,26
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	60,00	70	74.19	105.99	78	82.66	105.97	87	87	100	92	97	105.43	98,00	94,79	96,94
		1	Meningkatnya Pembinaan Desa	Persentase Desa Kategori Maju	16	20	19.23	96.15	22	21.54	97.91	24	33.08	137.83	26	46.15	177.50	28	70,76	252,71
				Jumlah Desa di bina berciri khas	0	5	5	100	5	5	100.00	5	6	120.00	5	7	140.00	5	7	140
		2	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15	12	0.45	2666.667	10	0.44	2272.727	7	0.33	2121.21	3	0.21	1428.571	1,00	0,42	239,58

## 6. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut 126 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1 Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Minimum 0 tahun, maksimal 15 tahun (sesuai standar global)  $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun telah bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun yang mendapatkan ijazah}}$



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
		2 Harapan lama sekolah (tahun)	$HSL_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Keterangan :</p> <p><math>HSL_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p><math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i = Usia (a,a+1,.....,n)</p> <p>FK = Faktor Koreksi Pesantren</p> </div>
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	Rata-rata harapan hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah IKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$
4	Meningkatnya pelestarian/peembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1 Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah budaya daerah yang dikembangkan dan dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya daerah}} \times 100\%$
		2 Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah Atlet yang berprestasi dalam kompetisi minimal kompetisi tingkat provinsi
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1 Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang masuk}} \times 100\%$
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1 Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	Inovasi Pelayanan Publik yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan Publik minimal tingkat provinsi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1 Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun n
		2 Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks keterbukaan informasi publik	Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1 Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik antar umat maupun seagama
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1 Jumlah konflik sosial (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik sosial
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB tahun ke } n - \text{PDRB tahun } (n-1)}{\text{PDRB tahun } (n-1)} \times 100\%$
		2 Indeks Gini (skor)	$G = 1 - \sum_{i=1}^i P_i(Q_i + Q_{i+1})$ <p>Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi = Persentase kumulatif total pendapat atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p>



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
				$G < 0,3 =$ Ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5 =$ Ketimpangan sedang $G > 0,5 =$ Ketimpangan tinggi
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Gender} = \text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	$\text{TPP} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15+) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran</li> <li>- Pengangguran = mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja</li> </ul>
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	Data Indeks Resiko Bencana Kabupaten pada tahun n
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	$\frac{\text{PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh PMKS}} \times 100\%$
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	$\left( \frac{\text{jumlah panjang jalan nasional} + \text{jalan propinsi} + \text{jalan lokal primer dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang jalan keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang irigasi}} \times 35 \right) + \left( \frac{\text{jumlah luas areal yang dilayani irigasi}}{\text{jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi}} \times 20 \right) + \left( \frac{\text{jumlah panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang drainase}} \times 15 \right) + \left( \frac{\text{jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani}}{\text{jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)}} \times 30 \right) + \left( \frac{\text{jumlah gedung kantor dalam kondisi baik}}{\text{jumlah gedung kantor}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{jumlah rumah tangga berakses air bersih}}{\text{jumlah rumah tanggax100\%}} \right) + \left( \frac{\text{jumlah rumah tangga berakses air limbah}}{\text{jumlah rumah x 100\%}} \right) / 2 + \left( \frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh}} \right)$



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
			rumah x 100% )+ (Luas permukiman kumuh yang ditangani/( luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani x 100%))/2)+(((Panjang jalan bertrottoar di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%) + (Panjang jalan berdrainase di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100% ))/2)+(((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksi sampah x 100%)+ (Jumlah taman dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan Taman x 100%))/2))/4)+(((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya adax100%)+'(Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik/Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada x 100%)/2))/5
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1 Pertumbuhan sektor Petanian	$\text{Growth Pertanian} = \frac{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } n - \text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)} \times 100\%$
		2 Pertumbuhan sektor Industri olahan	<p>Pertumbuhan sector industry olahan dalam PDRB Growth Industri Olahan (GIO)</p> $\text{GIO} = \frac{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)} \times 100\%$
		3 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1 Skor PPH Ketersediaan (nilai)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	30 % indeks pencemaran air + 30% indeks pencemaran udara + indeks cakupan lahan



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang Sesuai RTRW}}{\text{Luas Permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa di bina berciri khas
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh di perkotaan}} \times 100\%$

## 8. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1 Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2 Harapan lama sekolah (tahun)	13,22	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	69,8	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1 Indeks kepuasan masyarakat	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1 Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Jumlah Atlet yang berprestasi	89	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1 Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1 Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1 Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (70,01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)



NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Inspektorat
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	5,05	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0,225	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	39,02 (dalam juta)	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,50	Sumber data BPS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30,00	Dinas Sosial Sekretariat Daerah



NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,57	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,60	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (ribu orang)	350 (dalam ribu)	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategori Maju	28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang danPertanahan

Adanya perubahan target tahun 2023 antara di dokumen RPJMD dan RKPD khususnya pada indikator makro seperti ARLS, HLS, Indeks Gini, dll, dikarenakan adanya beberapa indikator yang terealisasi pada Tahun 2022 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan dengan target tahun 2023 dan ada beberapa indikator yang realisasi pada Tahun 2022 masih sangat jauh dengan target tahun 2023. Berikut daftar indikator yang mengalami perubahan target sesuai RKPD Tahun 2023.

Tabel 2.5  
Perubahan Target Kinerja Tahun 2023

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1 Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2 Harapan lama sekolah (tahun)	13,22	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (70,01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
3	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks keterbukaan informasi publik	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Indeks Gini (skor)	0,225	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPSTP Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1 Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan



				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 21 sasaran di atas, Pemerintah kabupaten Tanah Laut didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 2.502.266.740.528,00. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan		159,999,086,247.00
		Program Pengelolaan Pendidikan	158,851,401,107.00
		Program Pembinaan Perpustakaan	772,754,784.00
		Program Pengembangan Kurikulum	374,930,356.00
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan		161,498,515,992.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	25,494,424,413.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134,898,085,829.00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	361,893,945.00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	744,111,805.00
3			9,471,188,334.00





NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Program Pendaftaran Penduduk	250,606,034.00
		Program Pencatatan Sipil	81,266,150.00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	388,191,959.00
		Program Pengendalian Penduduk	327,140,605.00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,043,244,219.00
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,380,739,367.00
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga		32,060,669,424.00
		Program Pengembangan Kebudayaan	936,335,708.00
		Program Pembinaan Sejarah	345,119,464.00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	349,961,862.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,970,750,538.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27,858,501,852.00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	600,000,000.00
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		10,085,029,486.00
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	3,525,009,634.00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	17,685,000.00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32,276,510.00
		Program Aplikasi Informatika	6,510,058,342.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1,012,604,982,458.00
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian		1,837,730,920.00
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	858,871,944.00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80,016,376.00
		Program Hubungan Industrial	898,842,600.00
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik		335,920,576,763.00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38,537,563,532.00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	270,000,377,529.00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	18,600,703,525.00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,192,787,996.00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,142,147,592.00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	738,098,908.00
		Program Kepegawaian Daerah	2,187,269,980.00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,521,627,701.00
9	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik		72,671,720,836.00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38,537,563,532.00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2,116,482,018.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26,837,458,043.00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1,170,848,401.00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	270,601,215.00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,340,718,103.00
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	325,668,521.00
		Program Penatagunaan Tanah	1,907,756,359.00
		Program Pengelolaan Arsip	99,895,200.00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64,729,444.00
10	Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama		45,830,656,363.00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	45,235,758,769.00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	290,120,000.00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	304,777,594.00
11	Meningkatkan Wawasan kebangsaan		20,713,926,599.00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,313,822,756.00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	4,265,910,445.00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15,134,193,398.00
12	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		24,665,528,040.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,152,024,928.00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526,018,244.00
		Program Penyuluhan Pertanian	486,414,193.00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	372,036,290.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	995,244,459.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2,998,281,286.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	414,955,440.00
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	82,080,387.00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31,294,323.00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	137,184,647.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427,799,348.00
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159,232,261.00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211,226,039.00
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	115,196,383.00
		Program Promosi Penanaman Modal	434,828,300.00
13	Meningkatkan Peranan perempuan dalam pembangunan daerah		758,140,528.00
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	517,238,050.00
		Program Perlindungan Perempuan	66,771,180.00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	91,398,340.00
		Program Perlindungan Khusus Anak	82,732,958
14	Menurunnya tingkat pengangguran		7,566,244,528.00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	147,119,845.00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,026,657,988.00
		Program Rehabilitasi Sosial	4,602,406,293.00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	775,126,942
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	14,933,460
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat		15,468,872,851.00
		Program Penanggulangan Bencana	630,685,413.00
		Program Penanganan Bencana	1,862,407,515.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6,803,374,002.00
		Program Rehabilitasi Sosial	4,602,406,293.00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	775,126,942.00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	532,011,202.00
		Program Pemberdayaan Sosial	215,512,058.00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	47,349,426.00
16	Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi		532,290,475,282.00
		Program Penyelenggaraan Jalan	216,167,830,106.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,309,587,356.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,637,200,000.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	25,752,469,834.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	88,539,525,506.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00
		Program Penataan Bangunan Gedung	126,142,920,841.00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	415,000,000.00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,325,961,138.00
		Program Pengelolaan Pelayaran	27,368,000.00
17			15,397,863,216.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
	Meningkat kinerja unit usaha sektor unggulan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	162,468,705.00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,500,379,207.00
		Program Pemasaran Pariwisata	6,226,423,184.00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	115,414,805.00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,116,482,018.00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	112,995,000.00
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	16,320,000.00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2,998,281,286
18	Meningkatkan ketahanan pangan		155,390,906,739.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	218,563,570.00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	650,015,007.00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	68,920,000.00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	125,844,535.00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	910,991,611.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134,898,085,829.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	995,244,459.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,152,024,928.00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526,018,244.00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	372,036,290.00
		Program Penyuluhan Pertanian	486,414,193.00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	544,625,562.00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	289,185,817.00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	64,909,388.00
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	115,414,805.00
19	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		15,195,226,218.00
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	393,534,113.00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,062,336,513.00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,322,000,300.00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	245,666,918.00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	59,464,163.00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74,356,810.00
		Program Pengelolaan Persampahan	6,376,128,764.00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,661,738,637.00





NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
20	Meningkatkan desa membangun		16,184,317,184.00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5,211,588,138.00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	48,892,532.00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	9,037,879,093.00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	910,991,611.00
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	723,433,798.00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	251,532,012.00
21	Meningkatkan cakupan penataan kota		142,796,495,969.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,309,587,356.00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,637,200,000.00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,661,738,637.00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	68,551,856,963.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,803,374,002.00
		Program Pengembangan Perumahan	118,640,000.00
		Program Kawasan Permukiman	6,565,000,000.00



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima RPJMD 2018- 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 terdapat 21 sasaran dengan 31 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Memuaskan** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 142,27%.

## A. AKUNTABILITAS KINERJA

### 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut **Nomor 126 Tahun 2019** tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 2019-2023 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis Misi 1

MISI 1							
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07	7.92	98.14%	Sangat Memuaskan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,22	12.41	93.87%	Sangat Memuaskan
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,8	70.11	100.44%	Sangat Memuaskan
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87.33	109.16%	Sangat Memuaskan
4.	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	100	100	100%	Sangat Memuaskan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	89	200	224,71%	Sangat Memuaskan

5.	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	100%	Sangat Memuaskan
----	--	---	--	-----	-----	------	------------------

Tabel 3.2

Indikator Sasaran Strategis Misi 2

MISI 2							
Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
6.	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	8	400%	Sangat Memuaskan
7.	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	25	188	752%	Sangat Memuaskan

Tabel 3.3

Indikator Sasaran Strategis Misi 3

MISI 3							
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (70,01)	B(67,52)	96,44%	Sangat Memuaskan
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	100%	Sangat Memuaskan
9.	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	75	73,7	98,26%	Sangat Memuaskan

Tabel 3.4  
Indikator Sasaran Strategis Misi 4

MISI 4							
Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
10.	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	100%	Sangat Memuaskan
11.	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	100%	Sangat Memuaskan

Tabel 3.5  
Indikator Sasaran Strategis Misi 5

MISI 5							
Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
12.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	5,05	4,78	94,65%	Sangat Memuaskan
		2	Indeks Gini (skor)	0.225	0,259	86,87%	Memuaskan
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	39,02	32,10	82,26%	Memuaskan
13.	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,50	87,53	97,79	Sangat Memuaskan
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	3,58	69,83%	Baik
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)	169,22 (Tinggi)	70,91%	Sangat Baik



MISI 5							
Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30	29,37	97,9%	Sangat Memuaskan
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73	60,24	82,52%	Memuaskan
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,57	2,06	57,70%	Cukup
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7.60	5,33	70,13%	Sangat Baik
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	350.000	608.624	202,9%	Sangat Memuaskan
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	89,7	94,42%	Sangat Memuaskan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68,47	68,65	100,26%	Sangat Memuaskan
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98,00	94,79	96,94%	Sangat Memuaskan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju (%)	28	70,76	252,71%	Sangat Memuaskan
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	7	140%	Sangat Memuaskan
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00	0,42	239,58%	Sangat Memuaskan

## 2. ANALISA CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2023. Sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 5 (lima) misi. Masing-masing misi dijabarkan lebih lanjut dalam 12 (dua belas) tujuan, selanjutnya tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 21 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 31 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.6

### Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Di atas 80% sampai dengan 90	Memuaskan
III	Di atas 70 sampai dengan 80	Sangat Baik
IV	Di atas 60 sampai dengan 70	Baik
V	Di atas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Di atas 30% sampai dengan 50%	Kurang
VII	Kurang dari 30%	Sangat Kurang

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :



Tabel 3.7  
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	<b>Realisasi</b>  ----- X 100%  <b>Target</b>
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	<b>Target</b>  ----- X 100%  <b>Realisasi</b>
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	<b>Target</b>  ----- X 100%  <b>Realisasi</b>
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Misi adalah sebagai berikut :





**MISI 1**

**Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 3 tujuan untuk misi 1 yaitu:

1. Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2. Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
3. Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.1.1  
Tujuan dan indikator tujuan misi I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	70,10
2	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	70,10
3	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80 (Baik)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan dan bidang pendidikan
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan dan bidang kesehatan
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya
4. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda



dan olahraga

- Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,00	7,89	87,6%	8.05	7.90	98.14%	8.07	7.92	98.14%
2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,12	12,31	101,56%	13.19	12.32	93.40%	13.22	12.41	93.87%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>96.005%</b>

#### a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tanah Laut berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,90 tahun di tahun 2022 menjadi 7,92 tahun di tahun 2023 dengan capaian 98,14% dari target 8,07. Angka 7,92 tahun ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, atau dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP/Sederajat. Angka tersebut juga masih berada dibawah angka provinsi sebesar 8,55 atau terpaut 0,63 tahun dibanding angka Provinsi Kalimantan Selatan dan 0,85 tahun dibawah nasional dengan angka 8,77 tahun.

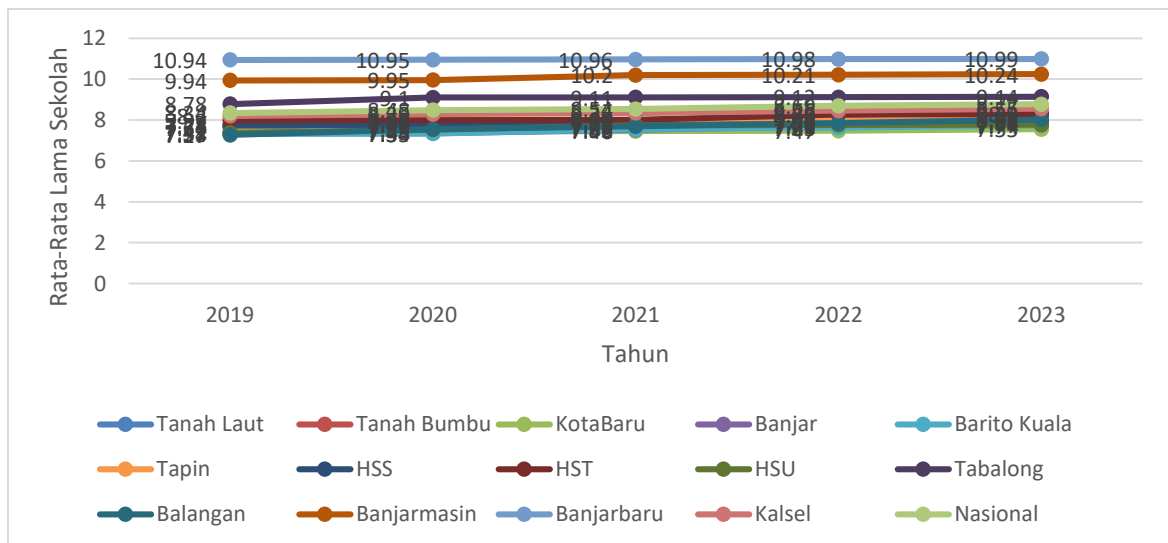
Hal tersebut menunjukkan bahwa penuntasan wajib belajar tingkat dasar dan menengah masih belum selesai, sehingga perlu ada upaya yang lebih intens lagi dari berbagai pihak sehingga minimal wajib belajar 12 tahun dapat tercapai. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan pendidikan diantaranya adalah tersedianya SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai.



Dengan adanya faktor tersebut diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sudah cukup memadai secara kuantitas. Berdasarkan data Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada semester genap tahun ajaran 2023/2024 terdapat 323 PAUD negeri maupun swasta, dengan jumlah guru 1.033 orang, jumlah peserta didik 12.114 peserta didik. Pada jenjang Sekolah Dasar terdapat 246 SD baik negeri maupun swasta, dengan jumlah guru sebanyak 2.305 orang, dan jumlah peserta didik 32.745 peserta didik. Pada tingkat SMP terdapat 58 sekolah dan guru sebanyak 739 orang dan jumlah peserta didik 9.186 peserta didik. Pada tingkat SMA, jumlah sekolah dan guru sebanyak 19 SMA dan 10 SMK sekolah masing masing memiliki 404 orang dan 267 guru dengan jumlah peserta didik 6.189 peserta didik dan 3293 peserta didik. Data ini belum termasuk sekolah yang berada dibawah Kementerian Agama. Tentunya jika ditambah akan semakin memperbesar angka-angka di atas.

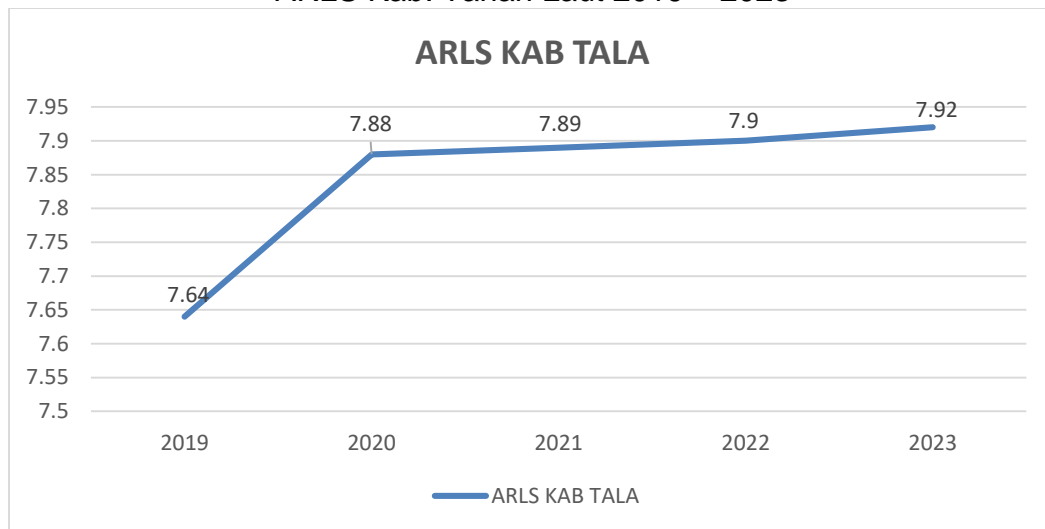
Grafik 3.1.1  
ARLS se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional  
Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Angka rata-rata lama sekolah tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada di bawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi meski angka putus sekolah di wilayah Tanah Laut tergolong rendah dengan realisasi jenjang SD 0 % jenjang SMP 0 % dan pada jenjang SMA 0,17%, SMK 0,03% dan yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah kecenderungan orang tua di Tanah laut menyekolahkan anak mereka ke pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan umum karna peserta didik yang berada pada pesantren tersebut tidak akan terdata pada Aplikasi DAPODIK KEMENDIKBUD.

Grafik 3.1.2  
ARLS Kab. Tanah Laut 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dilihat dari grafik di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, artinya masyarakat semakin sadar dan memahami pentingnya arti sekolah bagi masa depan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan memberikan beasiswa bagi peserta didik, menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak dini pentingnya



peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Selain itu juga banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung melalui perbaikan prasaran dan sarana, pembangunan infrastruktur pendidikan terus dilakukan baik penambahan maupun rehabilitasi sarana/ prasarana proses belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyiapkan berbagai kebijakan untuk terlaksananya pendidikan secara menyeluruh di Tanah Laut, diantaranya dengan Program Bantuan Operasional Sekolah untuk SD & SMP Negeri. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menganggarkan sebesar Rp. 557.292.222.288 untuk pengembangan pendidikan di Tanah laut termasuk belanja pegawai.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, disamping itu juga berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Selain itu disediakan dana bantuan untuk pelajar Tanah Laut agar bisa menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya. dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan Program Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak mampu yang ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah ke atas.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah

1. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana PAUD dan PNF.

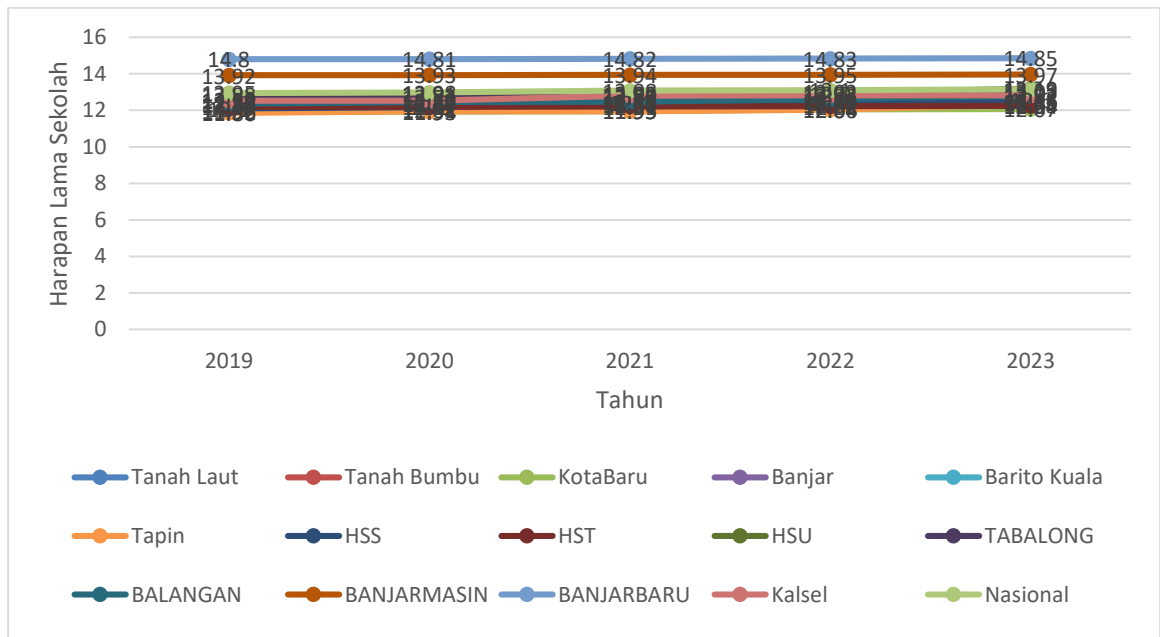
#### **b. Harapan Lama Sekolah**

Pada tingkat nasional, HLS Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 13,15 tahun. Angka ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan



dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di Indonesia hingga mengenyam pendidikan setara dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut sebesar 12,41 tahun. Angka tersebut memiliki peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 12,32 tahun pada 2022. Dari realisasi tersebut, capaian terhadap target tahun 2023 yaitu 13,22 tahun telah mencapai 93,87%. Peningkatan angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat. Akan tetapi, angka tersebut juga masih berada di bawah angka provinsi yang sebesar 12,86 tahun atau terput 0,45 tahun dari angka Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.1.3  
HLS se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional  
Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

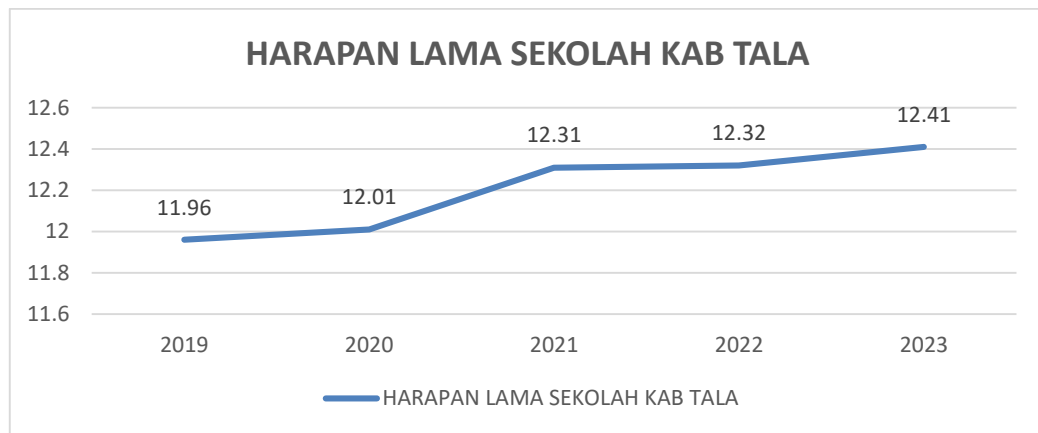
Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 untuk **harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut dengan angka 12,41 tahun**. Jika dibandingkan dengan **Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 12,86 tahun** maka lebih rendah 0,45



tahun dan lebih rendah 0,83 tahun jika di bandingkan dengan angka harapan hidup **Indonesia** dengan angka 13,15 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Grafik 3.1.4  
HLS Kab. Tanah Laut 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Bagi suatu daerah, pendidikan merupakan sektor yang fundamental karena pendidikan mampu memberikan manfaat positif bagi pembangunan meskipun manfaatnya baru dapat dirasakan beberapa tahun ke depan.

Pada tahun 2023 HLS pada angka 12,41 tahun menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Laut hingga mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Peningkatan angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah belum tercapai sesuai target karena dipengaruhi beberapa hal yaitu masyarakat di



Tanah Laut yang mayoritasnya adalah muslim memilih kecenderungan menyekolahkan anak pada pondok pesantren dan masalah timbul ketika penduduk usia sekolah kita bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK ( Data Pokok Pendidikan ) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (Anak Tidak Sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim di wilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia di bawah 7 Tahun karena sebagian orang tua memiliki kebanggaan bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 62 ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 159,999,086,247,00 dan terealisasi Rp. 98,603,541,256,00 atau sebesar 61,62%.





Tabel 3.1.3  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	158,851,401,107,00	97,698,843,833,00
2	Program Pembinaan Perpustakaan	772,754,784,00	690,341,923,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	374,930,356,00	214,355,500,00
<b>Jumlah</b>		<b>159,999,086,247,00</b>	<b>98,603,541,256,00</b>

Tabel 3.1.4  
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
96.005 %	61,62 %	34,38 %



## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan

Meningkatnya akses dan pelayanan bidang kesehatan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

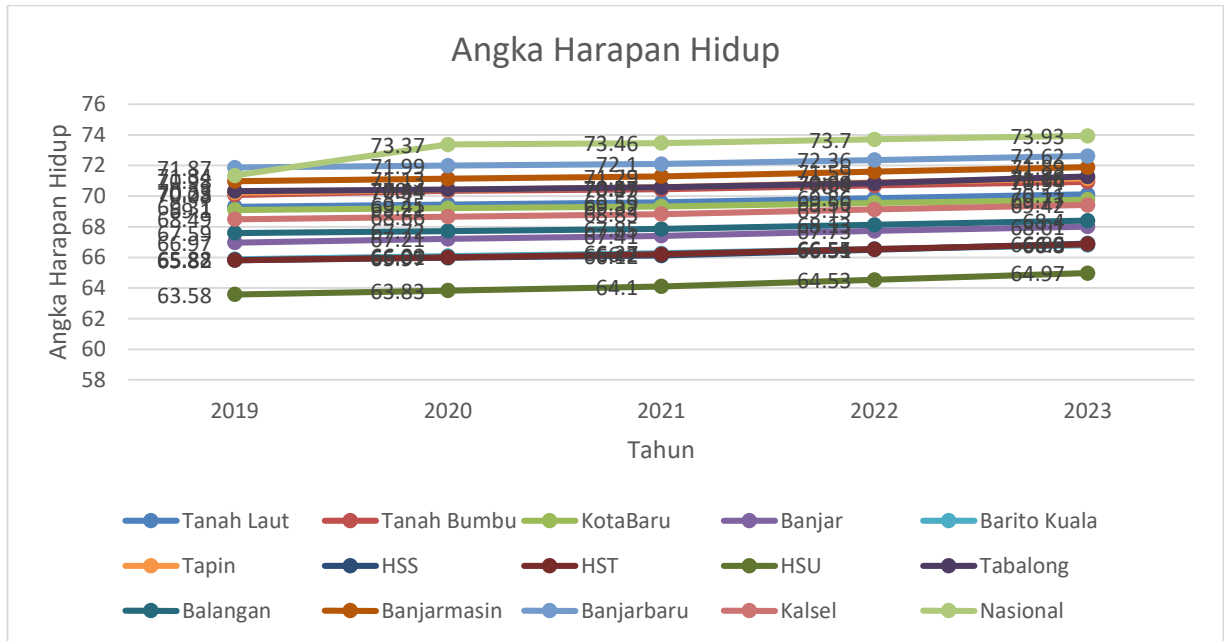
Tabel 3.1.5  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,30	69,59	100,42%	69,60	69,86	100,37%	69,80	70,11	100,44%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>100,44%</b>

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2022-2023 yaitu pada angka 69,86 di tahun 2022 menjadi 70,11 di tahun 2023 atau terdapat peningkatan sebesar 0,25 tahun. Realisasi tersebut berdasarkan target tahun 2023 telah mencapai 100,44%. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 diharapkan mencapai umur 70,11 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat. Angka tersebut juga masih berada di atas angka Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 69,42 atau terpaut 0,69 di bawah angka Kabupaten Tanah Laut namun dibawah angka Nasional yaitu 73,93 untuk AHH Indonesia.



Grafik 3.1.5  
Angka harapan hidup Kab/Kota di Kalimantan Selatan dan Nasional 2019-2023



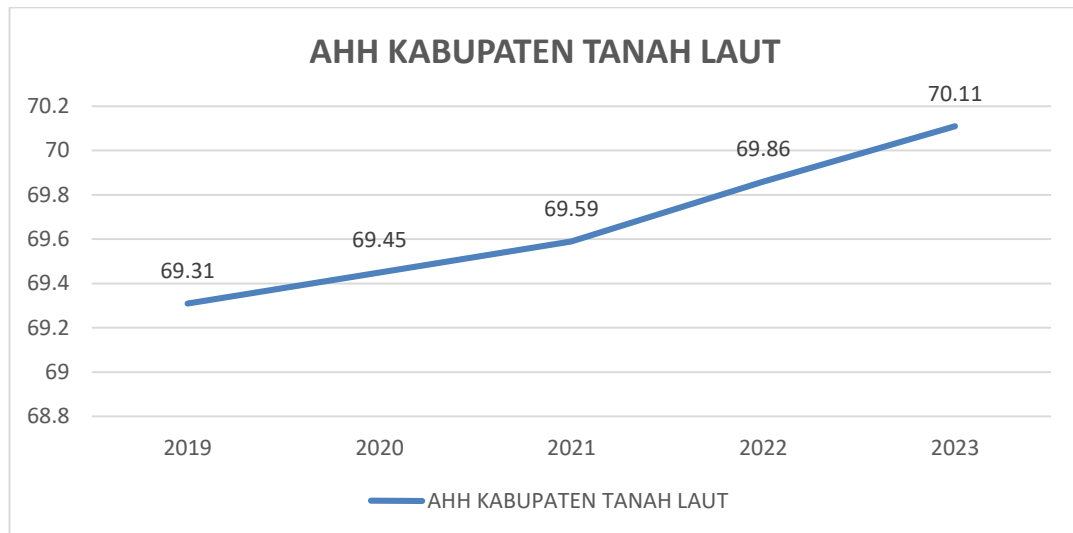
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

*Trend* peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019-2023 dapat dilihat dari grafik berikut:



Grafik 3.1.6  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2019 -2023



Sumber: BPS Kabupaten tanah Laut

Perubahan Data Umur Harapan Hidup sebagai salah satu komponen perhitungan IPM :

- Mulai tahun 2023, BPS melakukan *updating* sumber data UHH hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dengan hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 yang lebih terkini dan berdasarkan jumlah sampel yang lebih besar.
- Hal ini dilakukan karena telah tersedia data hasil Sensus Penduduk yang lebih update dan lebih menggambarkan kondisi terkini dibandingkan data sebelumnya.
- Hal ini mengakibatkan adanya perubahan angka UHH menjadi 2 yaitu UHH series lama (sumber data Sensus Penduduk 2010) dan UHH series baru (sumber data Long Form Sensus Penduduk 2020)
- Untuk sumber data HLS, RLS dan Pengeluaran Perkapita masih tetap bersumber dari hasil Susenas Maret tahun berjalan (tidak ada perubahan angka)

Tabel 3.1.6  
 Series Data Umur Harapan Hidup (UHH)

Sumber Data	Disagregasi	2020	2021	2022	2023
Hasil Sensus Penduduk 2010 (Metode Lama)	Kabupaten Tanah Laut	69,45	69,59	69,86	70,11
	Provinsi Kalsel	68,66	68,83	69,13	69,42
	Indonesia	71,47	71,57	71,85	72,13
Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (Metode Baru)	Kabupaten Tanah Laut	73,81	73,95	74,21	74,46
	Provinsi Kalsel	73,28	73,43	73,70	73,97
	Indonesia	73,37	73,46	73,70	73,93

Angka Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, umur harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya daerah yang Angka Harapan Hidupnya tinggi pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi yang menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakatnya yang diukur dengan indikator sesuai tabel dibawah.

Tabel 3.1.7  
 Data kematian ibu dan bayi serta prevelensi gizi stunting Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	46,2	122,8	267	51	158
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	7,4	9,5	11,3	12,3	10
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	15,66 %	10,67%	6,41%	5,4%	4,90%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Data diatas menunjukkan capaian AKI per tahun cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020, 2021 dan 2023, jumlah kematian ibu mencapai 3 (tiga orang) pada tahun 2019, 8 (delapan) kematian di tahun 2020, 17 (tujuh belas) kematian pada tahun 2021, 3 (tiga) Tahun 2022 dan 9 (Sembilan) kematian di tahun 2023. AKI Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yaitu 158 per 100.000 kelahiran hidup



lebih rendah apabila dibandingkan dengan target RPJMN Tahun 2023 yaitu 194 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 terjadi penurunan yaitu 10 per 1000 Kelahiran Hidup dan masih lebih rendah dari target RPJMN tahun 2023 yaitu 17,6 per 1000 Kelahiran Hidup.

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian pada usia di bawah satu tahun. Menurut BPS (2016) secara teori menurunnya angka kematian bayi dapat meningkatkan angka harapan hidup di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan bayi sangat rentan terhadap penyakit dan pengaruh dari lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik.

Prevalensi stunting mengalami trend penurunan berdasarkan data EPPGBM yaitu 5,4 % pada tahun 2022 menjadi 4,90 % di 2023. Prevalensi ini dibawah target RPJMN yaitu 16 % di Tahun 2023.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup, berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama / Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari beberapa faktor (Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, ahli gizi Institut Pertanian Bogor) yaitu:

- 1) Pola makan
- 2) Penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif
- 3) Lingkungan tempat tinggal
- 4) Stress/tekanan

Faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan umur harapan hidup terdiri atas:

- 1) Gizi
- 2) Merokok
- 3) Manepause
- 4) Osteoporosis/tulang keropos

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah 85,97 (Mutu Pelayanan Baik), oleh karenanya meskipun AKI Kabupaten Tanah Laut



mengalami peningkatan akan tetapi Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 69 tahun, 86 hari (tahun 2022) menjadi 74 tahun, 46 hari (tahun 2023), hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Tanah Laut.

Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai melebihi target dikarenakan:

- 1) Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bisa diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 diperoleh pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,97 dimana dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada kisaran Baik.
- 2) Kesehatan juga bisa diukur dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 capaian AKI adalah 158 per 100.000 Kelahiran Hidup sudah baik karena angka kematian ibu lebih rendah dari target RPJMN yaitu 194 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 10 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 17,6 per 1000 Kelahiran Hidup.
- 3) Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sampai tahun 2023 ini dapat dikatakan telah memadai. seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan polindes. saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki 2 buah rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dan Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap. Selain itu kita juga mendapat dukungan dari beberapa rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Borneo Citra Medika, Rumah Sakit Khusus RSIA Ibunda dan RSIA Ainun, Klinik Utama Ammariz, Klinik-Klinik Perusahaan serta beberapa Klinik Pratama lainnya yang kesemuanya berada di wilayah kabupaten Tanah Laut.
- 4) Layanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Tanah Laut tersebar merata di seluruh kecamatan sebanyak 22 buah, dengan 2 buah adalah puskesmas rawat inap yaitu puskesmas tajau pecah dan kurau. sampai tahun 2023 ini hasil penilaian akreditasi puskesmas adalah:



- ✚ Penilaian Reakreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada 11 Puskesmas dengan hasil 9 puskesmas mendapat predikat Paripurna yakni Puskesmas Angsau, Tirta Jaya, Jorong, Tajau Pecah, Takisung, Sungai Riam, Panyipatan, Kait-Kait, Tambang Ulang; dan 2 Puskesmas mendapat predikat Utama yakni Puskesmas Batakan dan Tanjung Habulu.
  - ✚ Adapun 11 Puskesmas lainnya akan dilaksanakan akreditasi pada tahun 2024 yang terdiri dari Survei Reakreditasi pada 8 Puskemas yakni Puskesmas Sungai Cuka, Kintap, Asam-Asam, Pelaihari, Padang Luas, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati ; dan survei perdana akreditasi pada 3 Puskesmas yakni Puskesmas Durian Bungkok, Bentok Kampung, dan Panggung.
  - ✚ 8 puskesmas yang akan reakreditasi tahun 2024 telah mendapat sertifikat akreditasi pada survei akreditasi sebelumnya pada tahun 2019 dengan predikat madya 3 Puskesmas (untuk Puskesmas Padang Luas, dan Bumi Makmur dan Kintap), dengan predikat Utama 5 Puskesmas (untuk Puskesmas Bati-Bati, Kurau, Pelaihari, Asam-Asam, dan Sungai Cuka). Pelaksanaan survei reakreditasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan Anggaran Pembiayaan dari DPA Dinkes Tahun 2024.
  - ✚ Sementara, 3 Puskesmas Baru yakni Puskesmas Durian Bungkok, Bentok Kampung dan Panggung) akan diakreditasi perdana pada tahun 2024 dengan Anggaran Pembiayaan dari DPA Dinkes Tahun 2024.
- 5) Peningkatan manajemen puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada semua puskesmas, 22 puskesmas yang telah di BLUD kan pada tahun 2022 dan 2023.
  - 6) Penempatan Bidan Desa di semua desa dan kelurahan (135 desa dan 5 Kelurahan) yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, disamping itu juga Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terutama yang berisiko tinggi dengan mendatangkan dokter spesialis kebidanan secara berkala di Puskesmas yang ditunjuk. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses penduduk terhadap





pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.

- 7) Pelaksanaan program *Universal Health Coverage (UHC)* dengan cakupan sebagai berikut:

Tabel 3.1.8

Terkait Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan Kabupaten/ Kota Tahun 2023

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persentasi
<b>1</b>	<b>PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)</b>		
	PBI APBN	95.722	26,52
	PBI APBD	123.936	34,33
	<b>Sub Jumlah PBI</b>	<b>229.658</b>	<b>60,85</b>
<b>2</b>	<b>NON PBI</b>		
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	75.562	20,93
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	40.274	11,16
	Bukan Pekerjaan	5.089	1,41
	<b>Sub Jumlah NON PBI</b>	<b>120.925</b>	<b>33,50</b>
	<b>Jumlah (Kab / Kota)</b>	<b>341.583</b>	<b>94,35</b>

- 8) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 11 Kecamatan yaitu 2 (dua) Rumah sakit Umum Daerah, 22 (dua puluh dua) Puskesmas, 1 (satu) Instalasi Gudang Farmasi, 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 (enam puluh tiga) Puskesmas Pembantu, 135 (seratus tiga puluh lima) Poskesdes/Polindes, 21 (Dua Puluh Satu) Ambulan, 16 (enam belas) Puskesmas Keliling, dan 281 (dua ratus delapan puluh satu) Posyandu.
- 9) Memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada



masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 terdiri dari ;

- ✚ Dokter Spesialis sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang yang terdiri dari 30 orang dokter spesialis di RSUD H. Boejasin Pelaihari dan 4 orang Dokter Spesialis di RSUD K.H Mansyur Kintap.
- ✚ Dokter Umum sebanyak 79 (Tujuh Puluh Sembilan) orang terdiri dari 25 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 14 orang di RSUD K.H Masyur Kintap, 11 Orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 2 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing - masing.
- ✚ Dokter Gigi sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang, terdiri dari 5 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, dan sisanya tersebar di UPT Puskemas masing – masing.
- ✚ Dokter Sub Speisiallis sebanyak 1 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari.
- ✚ Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 54 orang terdiri dari 6 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 8 orang di RSUD. K.H. Mansyur Kintap sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
- ✚ Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 51 orang yang terdiri dari 7 Orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 orang di RSUD.K.H. Mansyur Kintap, 2 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT puskemas masing masing.
- ✚ Tenaga Nutrisionis sebanyak 76 orang terdiri dari 22 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 5 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 2 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
- ✚ Perawat sebanyak 649 orang terdiri dari 254 di RSUD H. Boejasin pelaihari, 55 orang di KH Mansyur Kintap, 80 orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 5 Orang di RSIA ibunda dan sisanya tersebar di Puskemas masing – masing.
- ✚ Bidan sebanyak 492 orang terdiri dari 90 di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 39 Orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 45 orang di RSBCM pelaihari, 10








Orang di RSIA Ainun, 19 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.

- ✚ Tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 88 orang terdiri dari 22 Orang di RSUD H. Boejasin pelaihari, 8 orang di RSUD K.H Mansyur Kintap, 10 Orang, di RSBCM pelaihari, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.
- ✚ Tenaga Teknik Bio Medika lainnya sebanyak 21 Orang terdiri dari 14 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 Orang di KH. Masyur Kintap, 2 orang di RSBCM pelaihari, dan sisanya di UPT Puskesmas.
- ✚ Tenaga Keterampilan Fisik sebanyak 7 orang di RSUD. H. Boejasin Pelaihari,
- ✚ Tenaga Keteknisian Medis sebanyak 65 orang terdiri dari 18 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 5 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 6 Orang di RSBCM Pelaihari, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas Masing Masing.

10) Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah namun sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2023 adalah 51% (dari 11.815 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 6011 rumah tangga yang ber PHBS) capaian ini belum mencapai target renstra pada tahun 2023 (60%) tetapi angka ini sedikit mengalami penurunan atau cenderung sama dari tahun 2022 53% (dari 9.338 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 4.951 rumah tangga yang ber PHBS). Dari capaian PHBS tahun 2023 diketahui rumah tangga yang berPHBS yaitu sebanyak 51%, berarti masih ada 49% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat salah satu indikator yang membuat capaian PHBS tidak tercapai adalah masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah yaitu sebesar 46%. Untuk



memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. 5 pilar STBM yaitu:

-  Stop Buang Air Besar Sembarangan ( BABS ),
-  Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air mengalir ( CTPS ),
-  Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga ( PAM RT ),
-  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,
-  Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

11) Secara kumulatif desa yang sudah melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2023 sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) desa/kelurahan atau mencapai 100% desa/kelurahan. Akan tetapi untuk pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2023 masih 21,4 % desa/kelurahan (29 Desa dari 135 Desa/Kelurahan) yang sudah di nyatakan desa ODF (Open Defecation Free) lebih rendah dari target 2023 yaitu 70 % Secara kumulatif desa yang sudah melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2022 sebanyak 135 (seratus tiga puluh) desa/kelurahan atau mencapai 120% dari target 2022 sebanyak 114 (seratus empat belas) desa/kelurahan, dan sudah melebihi target renstra Dinas kesehatan di tahun 2022 (84,6%). Akan tetapi untuk pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2022 masih 19,3 % desa/kelurahan (26 Desa dari 135 Desa/Kelurahan) yang sudah di nyatakan desa ODF (Open Defecation Free) artinya Desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan yang mana dinyatakan melalui deklarasi desa ODF melalui verifikasi sebelumnya.

12) Pelaksanaan Layanan *On Call PSC 119*. Bermula dengan adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 Pemda Tanah Laut memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membentuk Layanan Publik (PSC 119), Serta



adanya Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, akhirnya Terbentuklah **Layanan Public Safety Center 119**. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional **12 November 2019** yang dilaksanakan di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang diresmikan Langsung Bapak Bupati Sukamta, Dewan DPRD Tanah Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Layanan *On Call* atau Layanan *Public Safety Center*. Layanan on Call merupakan salah satu program unggulan Bupati tanah Laut yang beralamat pada Jalan H.Boejasin Kelurahan Angsau.

Hambatan:

- 1) Tingginya mobilitas penduduk terutama ibu hamil sehingga berpengaruh pada kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin sesuai standar
- 2) Kurangnya tenaga medis (dokter) untuk menolong persalinan. Sesuai Permenkes No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Persalinan ditolong oleh 3 (tiga) orang yaitu 1 orang dokter dan 2 orang bidan atau 1 orang dokter, 1 orang bidan dan 1 orang perawat
- 3) Partisipasi masyarakat pada kegiatan Posyandu masih kurang (rata-rata 40 s/d 50 %)
- 4) Tingginya angka pernikahan anak
- 5) Hambatan pencapaian Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2023 masih 21,4 % desa/kelurahan (29 Desa dari 135 Desa/Kelurahan) yang sudah di nyatakan desa ODF (*Open Defecation Free*) lebih rendah dari target 2023 yaitu 70 % yaitu
  - ✚ Belum optimalnya Forum Kabupaten Kota Sehat tingkat Kecamatan dan Desa
  - ✚ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan di sungai
  - ✚ Biaya yang tidak dimiliki oleh sebagian warga untuk membangun jamban sehat



Solusi :

- 1) Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor (Camat / Lurah / Kepala Desa / ketua RT) untuk pelaporan warga pendatang terutama ibu hamil pendatang
- 2) Mengusulkan penambahan tenaga dokter dan bidan
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat pada kegiatan Posyandu melalui himbauan dan berinovasi
- 4) Meningkatkan kerjasama lintas sector dalam menurunkan angka pernikahan anak dan konseling kesehatan kepada pengantin
- 5) Mengoptimalkan forum kabupaten sehat tingkat kecamatan dan desa dalam mengupayakan pemecahan masalah tidak tercapainya ODF di Desa / Kelurahan masing-masing
- 6) Meningkatkan upaya promosi kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 7) Menginventarisir solusi untuk biaya pembuatan jamban melalui dana swadaya, dana desa / ADD, dana CSR dan dana lain sesuai ketentuan
- 8) Meningkatkan Umur harapan Hidup tidak hanya bidang kesehatan, dan sangat diperlukan kerjasama di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Sosial, Ekonomi dan lain lain.
- 9) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 720 ASN pada Dinas Kesehatan termasuk Tenaga Kesehatan dan di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 161,498,515,992.00 dan terealisasi Rp. 126,172,091,671.00 atau sebesar 78,12%.

Tabel 3.1.9  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	25,494,424,413.00	18,039,245,360.00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134,898,085,829.00	107,812,334,361.00



<b>3</b>	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	361,893,945.00	<b>108,073,750.00</b>
<b>4</b>	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	744,111,805.00	<b>212,438,200.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>161,498,515,992.00</b>	<b>126,172,091,671.00</b>

Tabel 3.1.10  
Efisiensi Sasaran Strategis 2

<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>	<b>Efisiensi</b>
100,44 %	78,12 %	22,32 %



### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya

Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.11  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,5	84,53	110,49%	77,5	Baik (85,65)	110,51%	80	87,33	109,16%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>109,16%</b>

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat, pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada SKPD layanan publik.

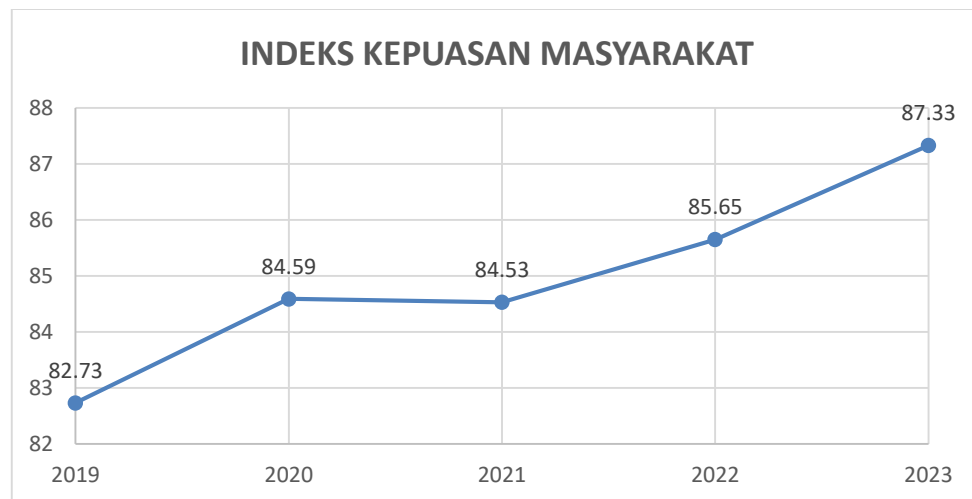
Realisasi indikator IKM di tahun 2023 adalah **87,33 (Baik)**, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 80 (Baik) dengan tingkat capaian 109,16%. mengalami kenaikan 1,68 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu **85,65 (Baik)**.

Secara umum kualitas pelayanan pada SKPD/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 dipersepsikan “**BAIK**” oleh masyarakat penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang



diperoleh yaitu 87,33 (Kategori B = Baik) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di seluruh SKPD. Terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu 84,53 (Kategori B = Baik). Dari tahun 2018 indeks kepuasan masyarakat sudah berkategori Baik, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1.7  
IKM Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2023 nilai SKM Kabupaten Tanah Laut sebesar 87,33 dengan kategori **“BAIK”**. Rata-rata persentase nilai SKM masing-masing SKPD bisa dikatakan Baik, karena nilai interval yang didapat oleh masing-masing SKPD antara 76,61-88,30.

Pada Tahun 2023 ada 15 SKPD yang kategori nilai SKM nya kategori **“SANGAT BAIK”** yaitu Sekretariat Daerah (89,63), Inspektorat (89,44), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (95,16), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (91,93), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (91,75), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (92,19), Dinas Kominfo (89,00), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (95,92), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (89,49), Dinas P2KBP3A (90,84), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (90,26), Kecamatan Bati-Bati (92,25), Kecamatan Bajuin (88,45), Kecamatan Kintap (88,89), dan Kecamatan Tambang Ulang (90,59).



Tabel 3.1.12  
Rekapitulasi SKM Tahun 2021-2023

REKAPITULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)				
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT				
No	Nama Satuan Kerja	Nilai IKM 2021	Nilai IKM 2022	Nilai IKM 2023
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	86,73	88,00	89,63
2	Sekretariat DPRD	82,76	81,81	86,39
3	Inspektorat	83,14	83,69	89,44
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79,81	81,09	82,42
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	83,80	85,78	95,16
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94,16	94,02	91,93
7	Badan Pendapatan Daerah	81,07	81,81	83,90
8	Badan Kesbangpol	85,98	86,98	87,39
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83,82	82,42	88,10
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,64	94,22	82,54
11	Dinas Kesehatan	83,69	83,24	86,64
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77,39	80,38	85,88
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	88,04	91,33	91,75
14	Dinas Sosial	87,11	91,48	84,58
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	82,06	84,56	86,80
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,28	91,34	92,19
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,20	87,10	89,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	95,72	87,90	95,92
19	Dinas Pariwisata	81,10	79,31	88,17



20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83,16	84,69	87,81
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,54	89,51	89,49
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88,97	89,05	90,84
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	79,06	80,97	83,02
24	Dinas Perhubungan	-	-	-
	UPT Terminal	83,01	-	82,87
	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	80,06	82,19	86,36
	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	82,19	82,38	83,20
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,64	85,07	82,97
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	83,01	80,67	82,72
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	83,52	85,01	84,47
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	87,72	89,61	90,26
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	89,97	83,31	86,02
30	Kecamatan Pelaihari	81,92	87,86	87,42
31	Kecamatan Takisung	82,30	82,34	84,14
32	Kecamatan Panyipatan	88,80	84,73	84,47
33	Kecamatan Bajuin	83,64	88,09	88,45
34	Kecamatan Jorong	80,87	79,65	85,11
35	Kecamatan Kintap	81,85	85,69	88,89
36	Kecamatan Batu Ampar	87,01	87,19	84,50
37	Kecamatan Tambang Ulang	80,26	80,27	90,59
38	Kecamatan Bati-Bati	81,13	87,78	92,25
39	Kecamatan Kurau	85,48	86,28	86,61



40	Kecamatan Bumi Makmur	91,44	91,75	87,48
	<b>Total Nilai IKM Kategori</b>	<b>84.59 Baik</b>	<b>84.53 Baik</b>	<b>87,33 Baik</b>

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Ada beberapa SKPD/Unit Pelayanan yang unsur pelayanannya dianggap paling memuaskan oleh responden dan mencapai angka 4,00, yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, dan Kecamatan Panyipatan.

Sedangkan unsur pelayanan yang kurang memuaskan dengan angka dibawah 3,00 terdapat pada Sekretariat DPRD dan UPT. Terminal Dinas Perhubungan.

Untuk Tahun 2023, pelaksanaan SKM pada seluruh SKPD dilakukan setiap triwulan dengan mengisi link yang sudah disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu [https://bit.ly/SKM\\_Triwulan](https://bit.ly/SKM_Triwulan) dimana untuk pengisian setiap triwulan pada akhir link yang ada tulisan Triwulan ditambahkan angka 1 sampai dengan 4 sesuai dengan survei yang dilakukan pada triwulan berapa. Sedangkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat Kabupaten Tanah Laut semester 1 telah dilaporkan kepada Kementerian PANRB pada bulan Oktober 2023, untuk semester 2 Kementerian PANRB mendorong Pemerintah Daerah agar dapat menyampaikan pula laporan hasil survei kepuasan Masyarakat untuk semester 2.

Tabel 3.1.13  
Rekapitulasi Jumlah Responden SKM Semester 1 Tahun 2023

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah	303



2	Sekretariat DPRD	300
3	Inspektorat	309
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300
7	Badan Pendapatan Daerah	202
8	Badan Kesbangpol	300
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	512
11	Dinas Kesehatan	331
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	300
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	437
14	Dinas Sosial	300
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	300
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	300
19	Dinas Pariwisata	300
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	300
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	300
24	Dinas Perhubungan	
	UPT Terminal	300



	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	300
	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	340
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	328
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	305
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	360
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	300
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	228
30	Kecamatan Pelaihari	300
31	Kecamatan Takisung	300
32	Kecamatan Panyipatan	300
33	Kecamatan Bajuin	300
34	Kecamatan Jorong	140
35	Kecamatan Kintap	300
36	Kecamatan Batu Ampar	300
37	Kecamatan Tambang Ulang	300
38	Kecamatan Bati-Bati	400
39	Kecamatan Kurau	300
40	Kecamatan Bumi Makmur	260

Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan salah satunya dikarenakan adanya kegiatan **Manunggal Tuntung Pandang yaitu kegiatan bermalam di desa untuk Bupati dan seluruh jajaran** dan Perangkat Daerah. Pada saat manunggal tuntung pandang dilaksanakan, SKPD pemberi layanan misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, DP2KBP3A memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat tanpa mereka harus datang langsung ke Kantor SKPD pemberi layanan.

Gambar 3.1.1  
Pemberian pelayanan pada kegiatan manunggal tuntung pandang



Pada akhir tahun 2023, berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut telah meraih predikat Sangat Baik (A-) dengan indeks 4.10.





Untuk Tahun 2023 ini unit pelayanan yang dijadikan lokus penilaian adalah Dinas Sosial, Kecamatan Pelaihari, dan RSUD Hadji Boejasin dengan perolehan nilai sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Indeks : 4,33 dengan predikat A-
2. Kecamatan Pelaihari Indeks : 3,44 dengan predikat B-
3. RSUD H. Boejasin indeks : 4,54 dengan predikat A

Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori A (opini kualitas tertinggi) dengan nilai kepatuhan 90,61 zona hijau.

**Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat:**

Masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami penggunaan aplikasi pelayanan, sehingga yang seharusnya proses layanan dilakukan 1 hari selesai menjadi lebih dari 1 hari selesainya.

**Solusi**

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi pelayanan.

**Rencana aksi**

Beberapa rencana aksi yang telah dilaksanakan:

- 1) Survei Kepuasan Masyarakat di SKPD dilakukan berkelanjutan secara berkala, untuk tahun 2023 telah dilaksanakan per triwulan. Jadi SKPD menyampaikan laporan hasil survei kepuasan masyarakat ke bagian organisasi per triwulan. Untuk laporan pelaksanaan hasil survei kepuasan masyarakat Kabupaten Tanah Laut semester 1 tahun 2023 telah disampaikan ke Kementerian PANRB sesuai dengan batas akhir yang ditentukan. Ke depannya Kementerian PANRB mendorong seluruh Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk dapat melaporkan hasil survei kepuasan Masyarakat semester 2.
- 2) Pemberian *reward* and *punishment* terhadap SKPD dengan predikat terburuk dan terbaik telah diberikan atas prestasi kinerja yang dihasilkan oleh SKPD.





Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 21 ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 27 ASN pada DP2KBP3A dan di dukung oleh 6 Program dengan Pagu Rp 9,471,188,334.00 dan terealisasi Rp. 8,709,417,517.00 atau sebesar 91.95%.

Tabel 3.1.14  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	250,606,034.00	<b>247,339,017.00</b>
2	Program Pencatatan Sipil	81,266,150.00	<b>70,248,000.00</b>
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	388,191,959.00	<b>375,073,584.00</b>
4	Program Pengendalian Penduduk	327,140,605.00	<b>293,450,627.00</b>
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,043,244,219.00	<b>5,558,579,861.00</b>
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,380,739,367.00	<b>2,164,726,428.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>9,471,188,334.00</b>	<b>8,709,417,517.00</b>

Tabel 3.1.15  
Efisiensi Sasaran Strategis 3

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
109,16 %	91,95 %	17,21 %

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 4

### Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.16  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
2	Jumlah Atlet yang berprestasi	Atlet	74	128	172,97%	81	315	388,89%	89	200	224,71%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>162,35%</b>

#### a. Cakupan Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah

Realisasi indikator pelestarian dan pengembangan budaya daerah di tahun 2023 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%. Capaian indikator cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah tercapai 100% dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Dari 16 cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan ke dalam Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021 pada tahun 2022 telah dilakukan pelestarian dan pengembangan seluruhnya. Kemudian Dari 16 cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan ke dalam Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021 pada tahun 2022. Berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Propinsi Kalimantan Selatan ada 2 Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat kabupaten dan Telah ditetapkan Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/ 1399 -Kum/2023 Tentang Penetapan Struktur Cagar Budaya Makam Datu Insad dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/ 1398-Kum/2023 Tentang Penetapan Struktur Cagar Budaya Makam datu



Pamulutan. Sedangkan untuk unsur-unsur lain seperti seni music, seni tari dan budaya belum ditetapkan dalam keputusan Bupati namun tetap dilaksanakan pelestarian dan pengembangannya.

Pembangunan kebudayaan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tanah Laut juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025. Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diridan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya. Peran penting yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya daerah serta pengembangan interaksi antar budaya.

Adapun Langkah Langkah yang di ambil untuk melestarikan kebudayaan:

- 1) Dengan melaksanakan kegiatan lomba-lomba tradisional, lomba paduan suara, lomba membaca pantun, lomba membaca puisi, lomba menyanyi yang semuanya menggunakan bahasa daerah. Selain itu juga melaksanakan lomba busana sasirangan, lomba tari tradisional dan tari umum.
- 2) Melakukan pendataan sanggar sanggar seni yang ada di Kabupaten agar kebudayaan tetap hidup dan lestari di Kabupaten Tanah Laut.
- 3) Melaksanakan Pembuatan Buku sejarah kabupaten Tanah Laut dan kemudian akan dijadikan sebagai buku muatan local agar setiap siswa paham dan mengerti sejarah kabupaten Tanah Laut
- 4) Melakukan Pemeliharaan bangunan bangunan peninggalan bersejarah di Kabupaten Tanah Laut.
- 5) Melakukan Inventarisasi Barang Peninggalan Bersejarah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk pelestarian budaya lokal Seni Tari Daerah, Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Bayun Anak, Kuda Lumping,



Hadrah / Maulid Habsyi, pelestarian makam-makam yang memiliki potensi cagar budaya di Tahun 2021 yaitu rehab makam keramat datu panjang di Desa Tungkaran, kubah makam keramat lok batu Datu Ahmad Kelurahan Karang Taruna, pembangunan sarana prasarana dan faslitasi bangunan peninggalan bersejarah makam keramat ustana (pangeran datu ahmad) di Kelurahan Karang Taruna, rehab kubah makam keramat habib alwi bin Iderus Bahasyim di Desa Handil Birayang Bawah Bumi Makmur, kubah makam keramat datu pamulutaan Kecamatan Panyipatan.

Menurut Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/ayau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejatrah, ilmu pengetahuan , pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam rangka melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya maka Bupati Tanah Laut menetapkan Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021 dengan menetapkan cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel 3.1.17  
Daftar cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA	KATEGORI	LOKASI
1	Makam Keramat Datu Bungur	Struktur Cagar Budaya	Desa Simpang 4 Sei Baru Kec. Jorong
2	Makam Keramat Datu Timang	Struktur Cagar Budaya	Desa Jorong Kec. Jorong
3	Makam Keramat Datu Nafis	Struktur Cagar Budaya	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari
4	Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad	Struktur Cagar Budaya	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari
5	Makam Keramat Datu Panjang	Struktur Cagar Budaya	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari
6	Makam Keramat Lok Batu Datu Ahmad	Struktur Cagar Budaya	Desa Telaga Kec. Pelaihari
7	Makam Keramat KH. Abdussamad Khairi	Struktur Cagar Budaya	Desa Tabanio Kec. Takisung



8	Benteng Tabanio	Situs Cagar Budaya	Desa Tabanio Kec. Takisung
9	Makam Keramat Syekh Abdul Gani Bin Abdurrahim	Struktur Cagar Budaya	Desa Padang Kec. Bati-Bati
10	Makam Keramat Datu Insad	Struktur Cagar Budaya	Desa Sambangan Kec. Bati-Bati
11	Makam Keramat Tuan Datu H. Ismail	Struktur Cagar Budaya	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati
12	Makam Keramat Ahmad Syamhudi	Struktur Cagar Budaya	Desa Padang Luas Kec. Kurau
13	Makam Keramat Datu Pamulutan	Struktur Cagar Budaya	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan
14	Marcusuar Peninggalan Kolonial Belanda	Bangunan Cagar Budaya	Desa Batakan Kec. Panyipatan
15	Makam Keramat Habib Alwi Bin Idrus Bahasyim	Struktur Cagar Budaya	Ds. Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur
16	Banker Peninggalan Kolonial Jepang	Bangunan Cagar Budaya	Desa Sungai BakarKec. Bajuin

Kendala yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya yaitu Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu, yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Dengan Tidak Tersedianya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bersertifikat di daerah maka untuk membentuk belum terbentuk yang mengakibatkan daerah tidak bisa menetapkan cagar budaya yang dibina menjadi cagar budaya yang ditetapkan karena tim tersebut yang dapat menilai layak atau tidak layak menjadi cagar budaya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1292/-KUM/2021 Tentang Penetapan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Ada 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Tabel 3.1.18  
OPK Manuskrip di Kabupaten Tanah Laut

No	Nama Manuskrip	Tempat Penyimpanan	Bahasa	Bahan
----	----------------	--------------------	--------	-------



1.	Manaqib Al Habib Abdullah Al Haddad	Kecamatan Pelaihari	beraksara Arab dan Bahasa Melayu	kertas
2.	Kitab Rasam Perukunan	Kecamatan Pelaihari	beraksara Arab dan Bahasa Melayu	kertas
3.	Manaqib Syekh Salman Al Madani	Kecamatan Takisung	beraksara Arab dan Bahasa Melayu	kertas
4.	Manaqib Datu Pamulutan	Kecamatan Panyipatan	beraksara Arab dan Bahasa Banjar	kertas
5.	Manaqib Maulana Abdus-Shamad (Datu Insad)	Kecamatan Bati Bati	beraksara Arab dan Bahasa Banjar	kertas
6.	Manaqib Syekh Sulthani al-Awliya Abdu alQadir al-Jailani	Kecamatan Pelaihari	beraksara Arab dan Bahasa Melayu	kertas
7.	Kitab Hidayatussalikin	Kecamatan Pelaihari	Bahasa Melayu beraksara Jawi.	kertas
8.	Kitab Sayrussalikiin	Kecamatan Pelaihari	Bahasa Melayu beraksara Jawi.	kertas
9.	Kitab Hadits Jauhar Mauhub	Kecamatan Pelaihari	Bahasa Melayu beraksara Jawi.	kertas

Tabel 3.1.19  
OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Tanah Laut

No.	Nama Tradisi Lisan	Kecamatan Persebaran	Etnis	Jenis	Frekuensi
1.	Kampung Bajuin	Bajuin	Banjar	Legenda	Sering
2.	Telaga Alam Banyu Batuah	Bajuin	Banjar	Legenda	Sering
3.	Batu Bajanggut Pantai Takisung	Takisung	Banjar	Legenda	Sering
4.	Pantai Batu Lima	Takisung	Banjar	Legenda	Sering
5.	Tanah Habang (Tanah Merah)	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
6.	Babi Pulangari	Pelaihari	Banjar	Mitos	Sering
7.	Kisah Datu Timang	Jorong	Banjar	Legenda	Sering
8.	Kisah Datu Bungur	Jorong	Banjar	Legenda	Sering
9.	Kisah Datu Pamulutan, Tanjung Dewa	Panyipatan	Banjar	Legenda	Sering



10.	Gua Marmer	Bajuin	Banjar	Legenda	Jarang
11.	Gunung Kayangan	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
12.	Kisah Datu Insad Sambangan	Bati Bati	Banjar	Legenda	Sering
13.	Legenda Asal Usul Pelaihari	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
14.	Kisah Kampung Cina Parit	Pelaihari	Banjar	Sage	Sering
15.	Kisah Datu Nafis/Alif Bata	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
16.	Gunung Keramaian	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
17.	Kisah Haji Buyasin	Semua Kecamatan	Banjar	Sage	Sering
18.	Kisah Datu Daim	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
19.	Tangkisung dan Kapal Inggris	Takisung	Banjar	Sage	Jarang
20.	Kisah Syech Abdul Gani Bati Bati	Bati Bati	Banjar	Legenda	Sering
21.	Kisah Pangeran Datu Ahmad Keramat Istana	Pelaihari	Banjar	Sage	Sering
22.	Kampung Sarang Halang	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
23.	Kampung Pada Wanyi/ Sungai Riam	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
24.	Asal Usul Kampung Pabahanan	Pelaihari	Banjar	Legenda	Sering
25.	Asal Usul Desa Salaman	Kintap	Banjar	Legenda	Sering
26.	Asal Usul Desa Sambangan	Bati Bati	Banjar	Legenda	Sering
27.	Asal Usul Desa Sungai Cuka	Kintap	Banjar	Legenda	Sering
28.	Asal Usul Desa Tajau Pecah	Batu Ampar	Banjar	Legenda	Sering
29.	Asal Usul Desa Jorong	Jorong	Banjar	Legenda	Sering
30.	Kisah Perjuangan Bukit Timah	Panyipatan	Banjar	Sage	Sering
31.	Asal Usul Kampung Panggung	Pelaihari	Banjar	Legenda	Tidak Pernah
32.	Asal Mula Batu Lima	Takisung	Banjar	Legenda	Jarang
33.	Asal Usul Gunung Hamidah	Jorong	Banjar	Legenda	Tidak Pernah
34.	Asal Usul Desa Asam Asam	Jorong	Banjar	Legenda	Jarang
35.	Asal Usul Kampung Telaga	Pelaihari	Banjar	Legenda	Jarang



36.	Kisah Tuntung Pandang	Semua kecamatan	Banjar	Legenda	Jarang
-----	-----------------------	-----------------	--------	---------	--------

Tabel 3.1.20  
OPK Adat Istiadat di Kabupaten Tanah Laut

No.	Nama Adat Istiadat	Keterangan	Frekuensi
1.	Perkawinan		
	a. Perkawinan Adat Banjar		
	1) Basasuluh	istilah ini diambil dari kata "suluh" atau obor yang dapat di artikan sebagai langkah awal atau penjajakan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya.	sering
	2) Batatakunan	tahapan seperti layaknya <i>basasuluh</i> , tetapi lebih detail, "takun" atau bertanya tujuan-nya memperoleh informasi mengenai mempelai wanita yang lebih spesifik misalnya "apakah si mempelai sudah memiliki calon pendamping hidup atau belum".	sering
	3) Badatang	melamar, menyampaikan niat atau hajat si pria menjadikan si gadis sebagai calon istri kepada kedua orang tuanya.	sering
	4) Maatar Patalian	tahapan peresmian, bahwa kedua calon itu sudah tidak bisa diganggu gadis atau pria lainnya.	sering
	5) Maatar Jujuran	jujuran atau mas kawin, bisa diantar kepada pihak perempuan sebelum hari akad nikah ataupun sesaat sebelum prosesi akad nikah. Biasanya jujuran dalam bentuk uang, emas (cincin) dan seperangkat alat sholat.	sering
	6) Nikah	proses ijab qabul (akad nikah) yang dipimpin penghulu agar hubungan mempelai sah dari segi agama dan hukum.	sering
	7) Bapingit	perempuan yang telah menikah akan di "pingit" atau di kurung di rumah dan tidak di perkenankan bertemu mempelai laki-laki atau pemuda lain sembari memper-siapkan diri batamat Qur'an dan acara perkawinan	sering
	8) Bapiduduk	sesaji yang disiapkan dinamakan "bapiduduk" yaitu ketan, kelapa, jarum, telur, benang putih, semua sesaji itu ditempatkan di tempat betimung, kamar tidur dan di dapur.	Sering
	9) Batimung	ritual adat calon pengantin untuk membersihkan badan agar sehat dan wangi.	sering
	10) Mandi-mandi/ Badudus	pada tahapan ini mempelai perempuan atau bersama mempelai laki laki (jika sudah menikah) melakukan prosesi mandi di alam terbuka di atas satu balai yang terdiri atas 3 jenjang yang masing-masing sudutnya terpancang tombak yang di beri lelangit (semacam atap) warna kuning.	sering





	11) Bahambur Baras Kuning	adat menyambut pengantin yang baru datang disertai shalawat.	sering
	12) Bakuntau	upacara menyambut pengantin.	sering
	13) Bausung	istilah adat mengendong pengantin dan membawanya menari pada keturunan orang banjar tertentu.	sering
	14) Bajapin	kegiatan yang dilaksanakan saat perkawinan.	sering
	15) Hari Perkawinan	hari disandingkannya kedua mempelai dengan mengadakan selamat atau hajatan di hadir tetangga dan kerabat serta sanak saudara.	sering
	16) Batumbang Penganten	tradisi yang dilaksanakan setelah 3 hari atau 7 hari usai perkawinan.	sering
	b. Perkawinan Adat Hindu		
	1) Lamaran	Prosesi melamar	sering
	2) Mengkalakalan atau Pawiwahan		sering
	3) Mebaton		sering
2.	Kehamilan, Kelahiran Sampai Anak-Anak		
	a. Adat Banjar		
	1) Mandi - Mandi 7 Bulanan	ritual mandi-mandi calon ibu yang sedang mengandung masa kehamilan 7 bulan (Anak pertama)	sering
	2) Bapalas	upacara bertujuan mengucapkan rasa syukur kepada bidan atau sang pengasuh bayi setelah dilahirkan.	sering
	3) Batasmiah & Aqikahan	upacara memberi nama anak yang baru lahir.	sering
	4) Baayun Anak	rangkaian upacara memberi nama anak yang baru lahir dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.	sering
	5) Aqikahan	rangkaian upacara memberi nama anak yang baru lahir dengan memotong hewan kambing (1 ekor untuk bayi perempuan dan 2 ekor untuk bayi laki - laki).	sering
	6) Bapukung	membuai/mengayun (bayi) di posisi duduk dan kaki <i>terlonjor</i> (dengan melipat kain ayunan sedemikian rupa sehingga menyelimuti seluruh tubuh bayi dan dibelit lagi dengan kain sehingga badan bayi hangat dan aman) seperti posisi bayi saat berada dalam kandungan.	sering
	7) Turun Tanah	upacara untuk bayi atau anak yang akan mulai turun ke tanah.	Sering
	8) Basunat	mengkhitan anak laki – laki.	sering
	b. Adat Hindu		
	1) Menggedong-gedongan		sering
	2) 42 hari atau Biyakon		sering
	3) 3 Bulan atau Potong Rambut		sering
	4) Sibuhrah dan ngeraje		sering



	5) Potong gigi		sering
3.	Upacara Kematian		
	a. Adat Banjar		
	1) Mamandikan mayat	orang-orang yang dipilih memandikan mayat umumnya saleh atau para ulama atau orang-orang yang ahli memandikan mayat. Jumlahnya biasanya ganjil (bisa 3 orang, bisa 5 orang, atau 7 orang). Dari jumlah itu ada yang disebut sebagai mirandu (ahli waris) yang dalam pemandian bertugas membersihkan dubur dan kemaluan mayat. Sebelum mayat dimandikan, ia dibaringkan di atas batang pohon pisang. Kemudian, mayat diwudlukan (seperti orang yang akan sholat), selanjutnya disiram air sabun sejumlah tiga kali, lalu dengan air yang dicampur dengan kapur barus sejumlah tiga kali, dan akhirnya disiram dengan air bersih, juga sejumlah tiga kali.	sering
	2) Mangafani Mayat	proses membungkus mayat dilapisi kain putih (tiga lapis). Selanjutnya, bagian-bagian tertentu, seperti: muka, tapak tangan, dan kemaluan ditutup kapas yang telah ditetesi minyak cendana. Sebagai catatan, sebelum muka mayat ditutup dengan kain kavan (kain putih), para keluarganya diberi kesempatan untuk melihat yang terakhir kalinya.	Sering
	3) Manyambahyangkan Mayat	proses mengsholatkan Mayat yang telah dibaringkan dalam usungan (tandu) dibawa ke tempat peribadatan (langgar atau surau atau mesjid) untuk disholatkan. Jumlah yang mensholatkan minimal 40 orang. Jumlah tersebut oleh masyarakat Banjar disebut <i>satu-dirian</i> . Adapun yang menjadi imam adalah orang yang dipercayai atau ditunjuk ahli waris.	Sering
	4) Manyusup di bawah tanduan	jenazah diletakkan dalam usungan. Pada saat dibawa keluar dari rumah, maka anak-anak dan keluarga dekatnya disuruh menyusup di bawah tanduan tadi, dengan maksud anak cucunya jangan sakit-sakitan serta panjang umur.	sering
	5) Mangubur Mayat	proses mengubur jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan dibaringkan miring ke kanan dengan wajah mayat menghadap kiblat.	sering
	6) Manalakin	membaca doa yang dipimpin tokoh agama kepada orang yang telah meninggal dunia, serta diberi petunjuk melewati alam baka	sering
	7) Manyurabi	selamatan setelah Menghatamkan Alqur'an di tempat Makam yang baru meninggal dunia selama 3 hari berturut – turut.	sering
	8) Maniga Hari	selamatan 3 hari orang meninggal dunia	sering
	9) Manujuh Hari	selamatan 7 hari orang meninggal dunia	sering
	10) Manyalawi	selamatan 25 hari orang meninggal dunia	sering
	11) Ma'ampat Puluh	selamatan 40 hari orang meninggal dunia	sering
	12) Manyaratus	selamatan 100 hari orang meninggal dunia	sering



13) Mahaul	selamatan 1 tahun sekali kepada orang yang telah meninggal dunia	sering
b. Adat Dayak		
Upacara balian Dayak	Upacara pembersihan kampung pada Suku Dayak di Riam Adungan Tanah Laut	sering
c. Adat Hindu		
1) Pengabenan atau pembakaran mayat	Kampung Baru	sering
2) Melarutkan abu ke laut	Kampung Baru	sering
3) Mengorasin atau 12 hari (upacara ulang)	Kampung Baru	Sering

Tabel 3.1.21  
OPK Ritus di Kabupaten Tanah Laut

No.	Ritus	Keterangan	Frekuensi
1.	Ritus Tahunan		
	a. Maulidan	syukuran/selamatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW	sering
	b. Mi'ratan	syukuran memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW/turunnya perintah Sholat lima (5) waktu.	sering
	c. Bakurban	upacara memotong hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha.	sering
	d. Ziarah Makam	ziarah yang dilakukan setiap habis Shalat Jum'at dan Sebelum Hari raya Agama Islam	sering
	e. Tolak Bala (Bazikiran)	upacara yang bertujuan untuk keselamatan dan keberkahan kampung.	jarang
	f. Maasyura	upacara memperingati hari 10 Muharram.	sering
	g. Arba Mustamir	peringatan hari Rabu akhir Bulan Safar.	jarang
	h. Nisfu Sa'ban	melakukan ibadah puasa untuk menyambut Bulan Ramadhan dan melakukan puasa selama 1 hari (sunnah).	sering
	i. Ta'mir Ramadhan	acara buka puasa bersama yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan (Puasa).	sering
	j. Bagarakan Sahur	tradisi membangunkan orang untuk makan sahur di bulan ramadhan	sering
	k. Tadarusan	mengaji setelah sholat tarawih di bulan ramadhan	sering
	l. Nuzulul Quran	memperingati turunnya alquran (17 Ramadhan)	sering



	m. Selamatan Bepalas Laut	Desa Tabanio	sering
	n. Baratip Awal Tahun Muharam	Desa Tabanio	sering
	o. Selamatan Pehumaan	Desa Tabanio	sering
	p. Pagerwesi	Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari	sering
	q. Galungan	Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari	sering
	r. Kuningan	Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari	sering
	s. Nyepi	Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari	Sering
2.	Ritus Tertentu		
	a. Batajak Tihang	upacara saat mendirikan tiang rumah	sering
	b. Bawayang	pagelaran wayang, selamatan kampung serta hiburan masyarakat	sering
	c. Manakiban	selamatan dengan membaca riwayat hidup nabi/alim ulama	sering
	d. Pidara	upacara untuk menyembuhkan penyakit anak yang terkena gangguan roh ghaib	jarang
	e. Bababari	ritual adat memberikan sesajen kepada roh ghaib agar tidak mengganggu	jarang
	f. Selamatan	kegiatan yang dilaksanakan ketika mensyukuri suatu perkara yang sudah dilewati atau di jalani	sering
	g. Tapung Tawar	ritual memberi berkah keselamatan	jarang
	h. Baburdah	pembacaan burbah yang dilaksanakan saat batasmiah, tahun baru islam, tolak bala dan lain lain	sering
	i. Yasinan	silaturahmi antar warga setiap malam jum'at.	sering
	j. Mambasuh Wasi	membersihkan benda pusaka 1 tahun sekali	jarang
	k. Maasyura	Memperingati hari 10 Muharram	sering
	l. Tolak Bala (Bazikiran)	upacara keselamatan dan keberkahan kampung.	jarang
	m. Bahalarat	Acara Naik Juzz 15 Alquran	jarang
	n. Selamatan Laut	syukuran atas Panen ikan yang melimpah	sering
	o. Majelis Ta'lim	mendengarkan ceramah serta menuntut ilmu kepada tokoh alim ulama	sering



	p. Haulan Wali Allah	selamatan kepada para Wali Allah yang ada di wilayah Kab. Tanah Laut	sering
	q. Upacara Batatungkal	Tari pengobatan untuk warga yang mengalami sakit berbulan-bulan dan tak kunjung sembuh pada Masyarakat Dayak Biaju di Bajuin.	jarang
	r. Tilem	Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari	sering
	s. Bulan Purnama	Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari	sering

Tabel 3.1.22  
OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Tanah Laut

No.	Pengetahuan Tradisional	Keterangan	Frekuensi
1.	Bapidara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan anak demam pada Suku Banjar berbeda dengan pengobatan tradisional, salah satu hal yang membuatnya unik dalam kajian kesehatan adalah budaya bapidara. Ketika anak sakit demam, tangisan meleng-king maka dibawa kepada orang yang bisa mepidarai meng-gunakan parutan kunyit dan kapur kemudian dioleskan pada daerah lipatan tubuh anak maka demam, gelisah dan anak berangsur tenang serta dalam waktu singkat akan sembuh.</li> </ul>	sering
2.	Penanaman (Pengobatan Tradisional)/ Batatamba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batatamba atau tatamba adalah pengobatan tradisional masyarakat Banjar. Batatamba mencakup pengobatan jasmani dan rohani. Penyakit jasmani seperti terkilir atau muntah-muntah dapat disembuhkan dengan pijatan atau konsumsi herbal tertentu. Sementara itu, penyakit rohani, yang dipercaya disebabkan sihir, disembuhkan dengan ritual/mantra tertentu.</li> <li>Batatamba terbagi menjadi tiga cara, yakni dengan cara agamis, tradisional, dan percampuran antara agamis dan tradisional. Pengobatan tradisional ini banyak bertahan di wilayah perdesaan.</li> </ul>	sering
3.	Pertanian Tradisional Lahan Basah dan Kering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam bidang pertanian, masyarakat Tanah Laut mengenal pengetahuan tradisional sistem pertanian lahan basah untuk komoditas padi, jagung, sayuran.</li> <li>Kemudian pengetahuan tradisional pertanian lahan kering tanaman pangan untuk jagung, padi gogo, kedelai, kacang tanah, serta kacang tunggak.</li> <li>Terdapat juga pengetahuan tradisional pertanian lahan kering tanaman tahunan/ perkebunan dan tanaman pangan (karet, sawit, kelapa, kakao, kopi, buah- buahan, jagung serta padi).</li> <li>Berikutnya pengetahuan tradisional dalam pertanian lahan kering tanaman tahunan/perkebunan (karet, sawit, kopi, kakao) serta hutan lahan kering/basah atau vegetasi alami/konservasi.</li> </ul>	sering



4.	Pijat Tradisional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada masyarakat Tanah Laut, pijat tradisional dilakukan oleh "ahli" pijat dengan ilmu yang turun-temurun. Tujuannya meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, meningkatkan imunitas, mengatur tekanan darah, mengurangi rasa sakit, mengurangi kecemasan dan stres, membantu pasien arthritis hingga mengurangi efek samping dari pengobatan kanker.</li></ul>	sering
5.	Jamu Herbal/ Tradisional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produk jamu tradisional, diantaranya jahe merah instan, beras kencur, kunyit, menjakani dan ginseng, kunir putih, temu lawak, teh jahe, teh kunyit, teh temulawak. Selain itu terdapat banyak UMKM yang memproduksi jamu tersebar di area wilayah Tanah Laut.</li><li>• Khusus jamu yang dibuat masyarakat terbagi atas tiga yakni jamu buatan orang lain yang dibuat, diolah, dan dicampur orang lain baik dari bahan aslinya maupun dalam bentuk kemasan tetapi tidak mempunyai label/merek. Kemudian jamu buatan sendiri, adalah jamu yang dibuat, diolah, dan dicampur sendiri dari bahan aslinya. Terdapat juga jamu gendong, jamu/obat tradisional buatan orang lain yang dijajakan berkeliling baik dengan cara menggendong, mengendarai sepeda/sepeda motor, atau gerobak.</li></ul>	sering
6.	Ramuan tradisional Dari Tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengobatan tradisional menggunakan bahan dasar dari tumbuhan berkhasiat obat yang ditemukan di kawasan Takisung. Ada 15 jenis tumbuhan yang diketahui dan digunakan masyarakat setempat untuk obat luar dan dalam penyakit yang diderita masyarakat.</li><li>• Diantaranya tumbuhan Alalang (<i>Imperata cylindrica</i> L.), Lambai-lambai (<i>Lindernia Tripolia</i>), Mengkudu (<i>Morinda citrifolia</i>), Paku piai (<i>Acrostichum aureum</i>), Bamban (<i>Donax cannaeformis</i>), Karamunting (<i>Melastoma candidum</i> D. Don), Rumput jepang (<i>Eupatorium odoratum</i>), Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>), Beluntas (<i>Pluchea indica</i>), Pandan Laut (<i>Pandanus tectoris</i>), Kangkung laut (<i>Ipomea pes caprae</i>), Jarak (<i>Ricinus communis</i>), Lukut simbar (<i>Drynaria sparsisora</i>), Jayanti (<i>Sesbania sesban Merr</i>), Rambai bintang (<i>Sonneratia caseolaris</i>).</li></ul>	sering
7.	Pembuatan Makanan Berbasis Perikanan Laut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada wilayah Tanah Laut terdapat jenis-jenis produk industri rumah tangga berbasis perikanan laut, diantaranya Ikan tongkol, Ikan asin, Kerupuk udang, Kerupuk ikan, Udang kering, Terasi, Amplang hingga Abon ikan/udang. Terdapat empat kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Tanah Laut yang mengembangkan usaha tradisional ini yaitu Kurau, Jorong, Panyipatan dan Takisung.</li></ul>	sering
8.	Tayuk Obat Urut Tradisional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tayuk adalah obat urut tradisional di kalangan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu tayuk juga dapat dikonsumsi sebagai obat tradisional. Pada versi lain dinamakan arak khas Pelaihari, yaitu minuman tayuk. Minuman ini sangat khas dan hanya dapat ditemukan di daerah perkampungan cina parit Pelaihari. Tayuk memiliki aroma tersendiri dan memiliki bau yang sangat kuat. Tayuk diantaranya digunakan sebagai minuman pada saat merayakan hari-hari besar mereka.</li></ul>	jarang

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari hasil pencampuran beragam ramuan menghasilkan sebuah minuman multi fungsi, bisa dijadikan sebagai minum penghangat badan atau obat gosok penghilang kerutan kulit, bahkan digunakan juga untuk obat urut.</li> </ul>	
9	Obat Tradisional Dayak Riam Adungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etnis Dayak merupakan etnis yang masih memanfaatkan tumbuhan mengobati berbagai penyakit. Terdapat jenis tumbuhan berkhasiat obat, bagian tumbuhan yang digunakan. Terdapat 52 jenis tumbuhan berkhasiat obat.</li> </ul>	sering

Tabel 3.1.23  
OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Tanah Laut

No.	Pengetahuan Tradisional	Keterangan	Frekuensi
1.	Teknologi Pembuatan Jamu temulawak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teknologi tradisional dipergunakan dalam proses pembuatan salah satu jenis produk minuman serbuk yaitu serbuk minuman tradisional dengan menggunakan bahan dasar temulawak. Tahapan dimulai dari penyiangan, pencucian, penimbangan, penghalusan, pemerasan, pencampuran, pemanasan, pengadukan, penyaringan dan pengemasan.</li> </ul>	sering
2.	Teknologi Pengolahan Obat Dari Tumbuhan Esturia Takisung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tumbuhan berkhasiat obat yang ditemukan di kawasan estuaria Takisung yang diketahui dan digunakan oleh masyarakat setempat terdapat 15 jenis tumbuhan. Dari semua jenis ini menggunakan teknologi pengolahan konvensional, meliputi pencucian bahan, perebusan, penyaringan, penumbukan hingga pemerasan.</li> </ul>	sering
3.	Teknologi Pemanfaatan Limpasu Sebagai Pengental Lateks Alami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buah limpasu (<i>Baccaurea lanceolata</i>) merupakan buah hutan khas Kalimantan dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut sebagai pengental lateks alami. Buah limpasu memiliki beberapa nama, antara lain ampusu, asam pauh, buah lepasu, dan sebagainya dengan teknologi tradisional dimanfaatkan sebagai bahan alternatif untuk koagulan lateks.</li> </ul>	jarang
4.	Teknologi Pembuatan Lipstik Berbasis Ekstrak Kunyit dan Kesumba Keling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrak kunyit (<i>Curcuma longa L.</i>) memiliki warna kuning dan kesumba keling memiliki warna jingga digunakan sebagai bahan pewarna pembuatan lipstik alami. Dibuat dengan teknologi tradisional, dapat mengurangi ketergantungan akan pewarna sintesis dan keamanan kesehatan kulit.</li> </ul>	jarang
5.	Teknologi Pembuatan Teh Herbal Daun Sukun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teh herbal adalah sebutan ramuan bunga, daun, biji, akar, atau buah kering yang biasanya digunakan sebagai minuman berhasiat obat. Dibuat dengan menggunakan teknologi tradisional. Salah satu jenis tanaman yang daunnya dapat dimanfaatkan dalam pembuatan teh herbal adalah sukun, produk yang dapat menunjang kesehatan.</li> </ul>	jarang



6.	Teknologi Pembuatan Keripik Singkong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keripik singkong merupakan makanan ringan bersifat kering dan renyah serta memiliki kandungan lemak tinggi, rendah protein dibandingkan beras sehingga banyak digemari. Dibuat dengan menggunakan teknologi tradisional.</li> </ul>	sering
7.	Teknologi Pembuatan Kayu Arang Alaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha pembuatan arang kayu yang meliputi bahan baku, teknologi, pembuatan dan rendemen dan memberikan suatu arah kebijakan untuk keberlanjutan usaha arang kayu. Teknologinya adalah tungku arang yang harus sesuai kapasitas muat kayu (bahan baku) untuk tobong.</li> </ul>	sering
8.	Teknologi Pengolahan Ikan Asin Khas Tanah Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada berbagai macam ikan yang diolah dengan teknologi tradisional di Desa Tabanio yakni Tenggi, Peda, Telang, hingga Menangin.</li> </ul>	sering
9.	Teknologi Pembuatan Tatal Kuah Haruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makanan Khas Pelaihari ini adalah kuliner khas identitas lokal Kabupaten Tanah Laut yang dibuat dengan teknologi tradisional. Disajikan dalam acara tertentu saja, seperti saat bergotong royong mendirikan tenda pernikahan ataupun jamuan rapat panitia pelaksana. Makanan khas Pelaihari ini terdiri dari ketan yang diberi kuah seperti kuah kare warna coklat bercampur daging ikan haruan tanpa tulang. Dicampur tumis sayur terdiri irisan jagung muda, kacang panjang dan pepaya muda.</li> </ul>	sering
10.	Teknologi Pembuatan Gangan Asam Patin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makanan khas Pelaihari ini olahan dari ikan patin. Dibuat dengan teknologi tradisional menghasilkan produk segar dan gurih. Gangan Asam Patin adalah salah satu kuliner yang populer.</li> </ul>	sering
11.	Kerupuk Tempe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat dengan teknologi tradisional, disediakan mentah atau sudah digoreng. Bentuknya bulat dan kotak.</li> </ul>	sering
12.	Teknologi Olahan Iwak Haruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan teknologi tradisional dalam proses mengolah, memasak, dan menyajikannya. Bahan utamanya ikan haruan dan kuahnya terdiri dari santan kental, lombok besar kering, bawang merah, bawang putih, dan ebi udang. Dan dicampur dengan bahan tumis, seperti jagung muda manis, papaya mentah, biji nangka, dan santan.</li> </ul>	sering

Tabel 3.1.24  
OPK Seni di Kabupaten Tanah Laut

No.	Bentuk Seni	Jenis Seni	Frekuensi
1.	Seni Teater	a. Teater Mamanda b. Teater Damuluk c. Pedalangan	sering





2.	Seni Sastra	a. Tartil Qur'an (seni baca Al Quran)	sering
3.	Seni Musik	a. Maulid Habsyi b. Musik Panting c. Campur Sari d. Hadrah/Bahadrah e. Karawitan f. Rebana g. Orkes h. Musik Kurung - Kurung i. Calung j. Musik Panting Modern k. Burdah l. Kuriding	sering
4.	Seni Rupa	a. Relief Tugu dan Monumen b. Gerbang Selamat Datang & Batas Wilayah c. Lukisan kanvas	jarang
5.	Seni Tari	a. Kuda Gepang b. Sinoman Hadrah c. Kuda Lumping d. Tari Japin e. Kesenian Adat Tradisi Bali f. Rudat g. Tari Tajun Tandang Dayak Bajuin h. Tari Adat Dayak Riam Adungan i. Tari Lenggam Banua Kreasi j. Tari Rakat k. Rejang sari (Kampung Baru) l. Rejang Renteng (Kampung Baru) m. Kuntau (beladiri)	sering

Tabel 3.1.25  
OPK Bahasa di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bahasa	Persen tase	Keterangan Suku Penutur Bahasa	Kategori	Frekuensi Pengguna
1.	Bahasa Banjar	60 %	Suku asli di Kabupa-ten Tanah Laut. Termasuk di dalamnya orang Tionghoa/Cina Parit sudah menggunakan Bahasa Banjar dan tidak bisa lagi berbahasa Tionghoa	bahasa yang tidak terancam	aktif
2.	Bahasa Jawa	35 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui program transmigrasi	bahasa yang tidak terancam	aktif
3.	Bahasa Madura	5 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui program transmigrasi	bahasa yang tidak terancam	aktif



4.	Bahasa Dayak Biaju	0,6 %	Suku ini bermukim di wilayah Bajuin, termasuk suku asli di Kabupaten Tanah Laut. Terdapat versi Suku Dayak Bukit bernama lain Suku Biaju Abaling yang bertempat tinggal di Hulu Sungai Tabanio, dekat Gunung Skatalu.	bahasa yang potensial terancam	tidak aktif
5.	Bahasa Bakumpai	0,4 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui migrasi	bahasa yang potensial terancam	tidak aktif
6.	Bahasa Bugis	0,5 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui migrasi	bahasa yang potensial terancam	tidak aktif
7.	Bahasa Mandar	0,5 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui migrasi	bahasa yang potensial terancam	tidak aktif
8.	Bahasa Sunda	0,5 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui program transmigrasi	bahasa yang tidak terancam	tidak aktif
9.	Bahasa Bali	0,4 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui program transmigrasi	bahasa yang tidak terancam	tidak aktif
10.	Bahasa Lombok	0,1 %	Bermukim di Kabupaten Tanah Laut melalui migrasi	bahasa yang tidak terancam	tidak aktif

Tabel 3.1.26  
OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Permainan	Persebaran	Keterangan	Frekuensi
1.	Bedamprak/ Saman Saman	Takisung, Pelaihari	Proses permainannya dimulai dari membuat arena permainan sampai mengulang rumahan hingga semua kotak berhasil menjadi rumah. Aturan permainan ada 9, salah satunya rumah hanya boleh diinjak pemilik rumah dan harus menggunakan kedua kaki.	Sering
2.	Bekeleker	Takisung, Pelaihari	Proses permainan dimulai dari menyiapkan <i>undas</i> untuk bermain sampai menjadi raja. Aturan permainan salah satunya boleh menambahkan tumpukan batu di bawah undas lawan.	Sering
3.	Tali Ulai	Takisung, Pelaihari	Pemainan dimulai dari menyiapkan tali karet sampai tahap meloncat sampai lagu yang dinyanyikan lawan selesai. Aturan permainan	Jarang



			salah satunya jika ada salah satu anggota tim gagal menyelesaikan 1 tahap maka anggota yang lain menjalankannya.	
4.	Tarik Tambang	Takisung, Pelaihari	Dua regu yang saling berhadapan dalam sebuah perlombaan dengan tujuan menarik batas tengah tali ke daerah sendiri.	Sering
5.	Balap Karung	Takisung, Pelaihari	Permainan kompetitif dilakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finis. Orang pertama melewati garis finis adalah pemenang .	sering
6.	Gapri/Bagimpar	Panyipatan	Permainan menggunakan media batu kali berukuran sedang.	sering
7.	Bekalayangan	Semua kecamatan	Main layang layang, biasanya dilakukan secara musiman (usai panen) Permainan ini diwariskan turun temurun dalam masyarakat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, rakat mufakat.	sering
8.	Bedaku	Semua kecamatan	merupakan permainan tradisional yang sudah mulai langka di kalangan anak-anak akibat perkembangan zaman, dengan papan untuk bermain yang terbuat dari kayu atau plastik dan biji congklak dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil.	sering
9.	Batewah	Semua kecamatan	Jumlah pemain dalam permainan tradisional batewah yaitu minimal ada 3 orang pemain, 1 pemain jaga/pasang dan 2 pemain sebagai penewah yang naik/bersembunyi. Maksimal pemain dalam satu permainan tewah biasa ada 8 orang. Permainan ini bisa dilakukan anak laki-laki dan perempuan. Peralatan dalam Batewah ini sederhana dan mudah didapat.	Jarang
10.	Pal-Palan	Semua kecamatan	Permainan ini pada dasarnya adalah permainan petak umpet yang mana satu pemain mencari beberapa tanggota yang bersembunyi di suatu tempat. Permainan ini tidak terbagi menjadi 2 tim atau beberapa tim tetapi yang jelas satu pemain mencari beberapa pemain bersembunyi.	Sering

Tabel 3.1.27  
OPK Olahraga Tradisional di Kabupaten Tanah Laut



No	Jenis Permainan	Persebaran	Keterangan	Frekuensi
1.	Balogo	Takisung, Pelaihari	Bisa dilakukan satu lawan satu atau secara beregu. Jika dimainkan beregu, maka jumlah pemain yang "naik" (yang melakukan permainan) harus sama dengan jumlah pemain yang "pasang" (pemain yang logonya dipasang untuk dirobokkan). Regu yang paling banyak merobokkan logo lawan, mereka pemenangnya.	Sering
2.	Dagongan	Takisung, Pelaihari	Menggunakan bambu ukuran tertentu sebagai alat mengadu kekuatan dan saling mendorong antara regu satu dengan lainnya.	Jarang
3.	Bakiak	Takisung, Pelaihari	Melatih kekompakan seperti kemampuan berjalan cepat bersamaan, mengkoordinasikan gerak tubuh, antara gerakan melangkah dan mengayunkan tangan dengan tubuh serta melatih keseimbangan dan kelincahan.	jarang
4.	Batungkau/Enggrang	Takisung, Pelaihari	Cara bermainnya dengan berlomba berjalan menggunakan enggrang sampai garis finish. Siapa yang pertama sampai, dialah pemenangnya.	Sering
5.	Asinan/Bahadang	Takisung, Pelaihari	Permainan hadang biasanya dilakukan dalam waktu 2 x 15 menit. Pemenang permainan ditentukan besarnya nilai salah satu regu, setelah permainan berakhir. Penetapan nilai diambil dari setiap pemain yang melewati garis depan sampai garis belakang diberi nilai satu. Pemain yang berhasil melewati garis belakang sampai garis depan diberi nilai satu.	Sering
6.	Basumpit/Sumpitan	Takisung, Pelaihari	kegiatan utama adalah menyumpit, yakni suatu keahlian membidik anak sumpitan ke sasaran menggunakan sebuah sumpitan.	Jarang

Tabel 3.1.28  
OPK Cagar Budaya di Kabupaten Tanah Laut

No	Nama Potensi Cagar Budaya	Alamat	Kategori/Kriteria	Kondisi
1	Makam Keramat Datu Bungur	Desa Simpang 4 Sei. Baru Kec. Jorong	Struktur Cagar Budaya	Cukup Terawat



2	Makam Keramat Datu Timang	Desa Jorong Kecamatan Jorong	Struktur Cagar Budaya	Terawat
3	Makam Keramat Datu Nafis	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari	Struktur Cagar Budaya	Terawat
4	Makam Keramat KH Abdussamad Khairi	Desa Tabanio Kec. Takisung	Struktur Cagar Budaya	Terawat
5	Makam Syekh Abdul Ghani Bin Abdurrahim	Desa Padang Kec. Bati - Bati	Struktur Cagar Budaya	Terawat
6	Makam Keramat Datu Insad	Desa Sambangan Kec. Bati - Bati	Struktur Cagar Budaya	Terawat
7	Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Struktur Cagar Budaya	Terawat
8	Makam Keramat Datu Panjang	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari	Struktur Cagar Budaya	Terawat
9	Makam Lok Batu Datu Ahmad	Desa Telaga Kec. Pelaihari	Struktur Cagar Budaya	Terawat
10	Makam Ahmad Syamhudi	Desa Padang Luas Kec. Kurau	Struktur Cagar Budaya	Cukup Terawat
11	Makam Keramat Datu Pamulitan	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	Struktur Cagar Budaya	Terawat
12	Benteng Tabanio	Desa Tabanio Kec. Takisung	Situs Cagar Budaya	Kurang Terawat
13	Makam Keramat Tuan Datu H. Ismail	Desa Bati Bati Kecamatan Bati Bati	Struktur Cagar Budaya	Terawat
14.	Mercusuar Peninggalan Hindia Belanda	Desa Batakan Kecamatan Panyipatan	Bangunan Cagar Budaya	Terawat
15	Makam Keramat Habib Alwi bin Idrus Bahasyim	Desa Handil Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur	Struktur Cagar Budaya	Cukup Terawat



16	Bunker Peninggalan Kolonial Jepang	Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin	Bangunan Cagar Budaya	Tidak Terawat
----	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------

Rencana Aksi kedepan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelestarian budaya daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Menggali potensi cagar budaya baru.
2. Mengikuti uji **sertifikasi** Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
3. Penghargaan seniman dan budayawan
4. Seniman Masuk Sekolah
5. Mengadakan Pertunjukan / Karnaval /Gelar Karya Seni dan Budaya
6. Mengadakan Lomba Lomba dan Pelatihan Seni dan Budaya
7. Pemutahiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Seni dan Budaaya
9. Melakukan Pendataan Kelompok seni dan Budaya
10. Pelaksanaan pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Tanah Laut Tahun.
11. Pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut.

#### b. Jumlah Atlet Yang Berprestasi

Realisasi indikator jumlah atlet yang berprestasi di tahun 2023 adalah 200 atlet , telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 89 atlet dengan tingkat capaian 224,71%.

Tabel 3.1.29  
Daftar Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Medali yang diperoleh Tahun 2023

NO	NAMA	CABOR	KEJUARAAN	MEDALI
1	ADITYA PUTRA RIZQI KHOIRUDDIN	ATLETIK	POPDA	PERAK
2	ADRIANSYAH	GULAT	POPDA	PERAK
3	AFAN WAHYUDA	FOKBI	PORTRADA	PERAK
4	AGUS SAPUTRA	B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
		B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
5	AGUS SETIA BUDI	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERAK
		GEBUK BANTAL	PORTRADA	PERAK
6	AHDIA NESA FATHINA,	PANAHAN	POPDA	PERAK



7	AHMAD A.Z	BASKET PUTRA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
8	AHMAD DA'I ROBBI	ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
9	AHMAD FARDANI LEZTANTO	JUDO	POPDA	PERAK
10	AHMAD HUSEIN	KEMPO	POPDA	EMAS
11	AHMAD RIADI	APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
12	AHMAD RIDUAN	ASTA	PORTRADA	PERAK
13	AHMAD SAUKANI	APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
14	AHMAD TAUIQ	ASTA	PORTRADA	PERUNGGU
15	AHMAD ZAYDAN RAHMADANI	PANJAT TEBING	POPDA	PERUNGGU
16	AHMAT BAKRI	APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
17	AKBAR NANDANG M.	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
18	AKBAR NANDANG MAHULANA	GULAT	POPDA	PERUNGGU
19	ALDA RIYANI	TEROMPAH PANJANG	PORTRADA	PERAK
20	ANANDA MISLIA	KEMPO	POPDA	PERAK
21	ANDRIYAN	ATLETIK	POPDA	PERUNGGU
22	ANISA AULIA	MENEMBAK	POPDA	PERUNGGU
23	ANNISA RAMADHANI	KARATE	POPDA	EMAS
		KARATE	POPDA	PERAK
24	ARUM MUSTIKA DEWI	JUDO	POPDA	EMAS
		JUDO	POPDA	EMAS
25	ARYA SATRIA	ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
26	AULIA	BASKET PUTRI	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
27	AYU AMBARWATI	KARATE	POPDA	EMAS
		KARATE	POPDA	EMAS
28	AZIZHRUL IQNA	HADANG	PORTRADA	PERAK
29	BARIYAH	ATLETIK	PEPARPENAS (NPC)	PERAK
		TENIS MEJA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
		BOLTANG PUTRI	PESODA (SOINA)	EMAS
30	CARITAS DAMAI NUGRAHA	PANJAT TEBING	POPDA	PERAK
31	CHINTIA CANTIKA CLAUDIA PUTRI	B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
32	CITRA CHELSY.O	BOLTANG PUTRI	PESODA (SOINA)	EMAS
33	CRESSINDA SAKDIJAH,	KEMPO	POPDA	PERAK



34	DAFFA BAGASKARA	B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
		B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
35	DARWANTO	ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
		ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
36	DELA LUTFIAH	KARATE	POPDA	EMAS
		KARATE	POPDA	EMAS
		KARATE	POPDA	PERUNGGU
37	DERREN ABIGAIL MARBETH	ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
38	DESI KARTIKA SARI	GULAT	POPDA	EMAS
39	DESY WIDYA SARI	GULAT	POPDA	EMAS
40	DEVIA ANDRIANI	FOKBI	PORTRADA	PERAK
41	DEWI HENI AGUSTINI	PERWATUSI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
42	DEWI SUSANTI	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
43	DIO ARDIANSYAH	KARATE	POPDA	PERUNGGU
44	DWI SRI RAHAYU	PERWATUSI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
45	DWI SUCI RAMADHANI	RENANG	POPDA	EMAS
		RENANG	POPDA	EMAS
		RENANG	POPDA	EMAS
		RENANG	POPDA	EMAS
		RENANG	POPDA	EMAS
		RENANG	POPDA	EMAS
46	EKA OCTA VARISA	ASIAFI	PORTRADA	PERUNGGU
47	ELSA ASTUTI	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
48	ERIG PRASETYO	KIS	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
49	FADILA PUSPA NINGRUM	JUDO	POPDA	PERUNGGU
50	FAISAL	ATLETIK	POPDA	EMAS
		ATLETIK	POPDA	PERAK
51	FARIDAH HASANAH	HADANG	PORTRADA	PERAK
52	FATHULLAH SYURURI	KEMPO	POPDA	PERAK
53	FAUZAN MUTTAQIN	KEMPO	POPDA	EMAS
54	FIRMANSYAH	JUDO	POPDA	EMAS
		JUDO	POPDA	EMAS
55	FREDIAN.F	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
56	GAZALI AKBAR	PORGASI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
57	GHEFIRA AULIA VIEDHA IZZATI	FOKBI	PORTRADA	PERAK
		FOKBI	PORTRADA	PERAK
58	GHINA KHAIRINA	KEMPO	POPDA	EMAS
59	HABIBAH	CATUR	PEPARPENAS (NPC)	PERUNGGU
60	HAFIZAH	ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU





		ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
		ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
61	HAIRUN NISA	KEMPO	POPDA	EMAS
62	HANISA.K	BASKET PUTRI	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
63	HASANY REYVANZA	PORGASI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
64	HASIFA	KEMPO	POPDA	EMAS
65	HEFNI	APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
66	HELDA ARIANI	PERWATUSI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
67	HENNY ANGGRAINI	HADANG	PORTRADA	PERAK
68	HERIADI	ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
		ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
69	HINDUN NOR HAYATI	HADANG	PORTRADA	PERAK
70	HOTIMAH	BOLTANG PUTRI	PESODA (SOINA)	EMAS
71	IMAMAH MUFIDATUL NADIVA	PORGASI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
72	JIHAN AQILAH AZZAHRA	FESPATI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
73	JUANDA HUSAINI	GULAT	POPDA	EMAS
		PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERAK
74	KHAIRUNNISA	APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
75	KHALIMATUS.S	BOLTANG PUTRI	PESODA (SOINA)	EMAS
76	LAILAN NAJAH	GULAT	POPDA	PERUNGGU
77	LAILY SYAHRA RAMADANI	TEROMPAH PANJANG	PORTRADA	PERAK
78	LENY MULYANI	ULD	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
79	LEVIA	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
80	LILIS ALMADINA	PANJAT TEBING	POPDA	PERAK
81	LISANUL HIDAYAH	GULAT	POPDA	PERAK
82	M. ARDI BOCHORI	ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
83	M. HAFIZ ANSHARI	GULAT	POPDA	PERUNGGU
84	M. HELMY A	ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
		ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
		ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
85	M. JULIAN FARICA	B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	PERAK
86	M. NURROHIM SIDIK	JUDO	POPDA	EMAS
		JUDO	POPDA	EMAS
87	M. SAIRUPI	ASTA	PORTRADA	PERAK
88	M.ADITYA.S	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
89	M.ADRIAN	ATLETIK	PESODA (SOINA)	PERAK



90	M.ADRIANSYAH	ATLETIK	POPDA	PERUNGGU
91	M.ALFIAN HAMDANI	B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
92	M.BAGUS.P	BASKET PUTRA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
93	M.EDGAR.M	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
94	M.FATHIR ASSILVA	JUDO	POPDA	EMAS
		JUDO	POPDA	EMAS
95	M.FIRMANSYAH	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
96	M.GALIH.M	BASKET PUTRA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
97	M.HADI.W	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
98	M.IHSAN	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
99	M.JULIAN FARICA	B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
100	M.KHADAVI.R	BASKET PUTRA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
101	M.KURNIAWAN	BASKET PUTRA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
102	M.RAFFI K	BOCCE	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
103	M.RAMADA RAJRIN	DAYUNG	POPDA	PERAK
		DAYUNG	POPDA	PERUNGGU
104	M.RASIDI	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
105	M.WAHIDIN	GULAT	POPDA	EMAS
106	MA'MUN SARIPUDIN	PORGASI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
107	MAILISSA N.	BOLTANG PUTRI	PESODA (SOINA)	EMAS
108	MARSYA YURIEKA PANGGALONGAN	JUDO	POPDA	EMAS
109	MASNA MONADA	KEMPO	POPDA	PERAK
110	MAS'UD.A	BASKET PUTRA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
111	MELINDA	ATLETIK	POPDA	PERAK
112	MONIKA ANJANI	ATLETIK	POPDA	PERUNGGU
113	MUCLISIN	POGTI	PORTRADA	PERAK
114	MUDIANTO	ATLETIK	KEJURPROV	PERUNGGU
		ATLETIK	KEJURPROV	PERAK
		ATLETIK	KEJURPROV	PERAK
115	MUHAMAD RAFI NUGROHO	TAEKWONDO	POPDA	PERAK
116	MUHAMMAD	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
117	MUHAMMAD ADITYARAHMAN	KARATE	POPDA	PERUNGGU
		KARATE	POPDA	PERUNGGU
118	MUHAMMAD AKBAR PRATAMA	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
119	MUHAMMAD ALAMULHUDA	PANAHAH	POPDA	EMAS
		PANAHAH	POPDA	EMAS
		PANAHAH	POPDA	PERAK
		PANAHAH	POPDA	PERAK



120	MUHAMMAD AMINUDIN	ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
121	MUHAMMAD ANSORI ZAINI,	KEMPO	POPDA	EMAS
		KEMPO	POPDA	EMAS
122	MUHAMMAD AQIB	KARATE	POPDA	PERUNGGU
123	MUHAMMAD ARDY	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
124	MUHAMMAD BAHRI	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
125	MUHAMMAD FIKRI	KEMPO	POPDA	PERUNGGU
126	MUHAMMAD GURUN SATU'I	TAEKWONDO	POPDA	EMAS
127	MUHAMMAD HAFIZ	KARATE	POPDA	PERUNGGU
128	MUHAMMAD HAFWA AKBARI	FOKBI	PORTRADA	PERAK
129	MUHAMMAD IHSAN RIDWAN	GULAT	POPDA	PERUNGGU
130	MUHAMMAD ILHAM RIDHANI	TAEKWONDO	POPDA	PERUNGGU
131	MUHAMMAD RAFI'E	APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
132	MUHAMMAD REZA SAMULI	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
133	MUHAMMAD RIYAN SAPUTRA	KEMPO	POPDA	EMAS
134	MUHAMMAD ROFI FADILLAH	GULAT	POPDA	PERAK
135	MUHAMMAD ROFIQ	B-BOY	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
136	MUHAMMAD ROMADHONI	KEMPO	POPDA	EMAS
137	MUHAMMAD SALMAN	APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERAK
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
		APSSBI	PORTRADA	PERUNGGU
138	MUHAMMAD SATRIO AIRLANGGA	GULAT	POPDA	EMAS
139	MUHAMMAD SYAHROWARDI,	KEMPO	POPDA	PERAK
140	MUHAMMAD SYARIF	KEMPO	POPDA	EMAS
141	MUHAMMAD YUSUF	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
142	MUHAMMAD YUSUF ARIFIN	FOKBI	PORTRADA	PERAK
143	MULYANI	ULD	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
144	MUTIA .A	BASKET PUTRI	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
145	NADIA EKA.P	ATLETIK	PESODA (SOINA)	EMAS
146	NADIA LISMAYA PUTRI	GULAT	POPDA	PERAK
147	NADZRIN ANGGHANA YUDHOYONO	TAEKWONDO	POPDA	PERUNGGU



148	NASARUDIN	GULAT	POPDA	EMAS
149	NASARUDIN	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
150	NAYLA KARIMA AZKIA	ASTA	PORTRADA	PERAK
151	NAZWA DESTINA	HADANG	PORTRADA	PERAK
152	NAZWA JAHRATUS	TEROMPAH PANJANG	PORTRADA	PERAK
153	NITA A.	BOLTANG PUTRI	PESODA (SOINA)	EMAS
154	NIZAM ZAHMI	FESPATI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
155	NOR AINAH	HADANG	PORTRADA	PERAK
156	NORDIANSYAH	TAEKWONDO	POPDA	PERUNGGU
157	NUR ALAM SETIA HADI	PORGASI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
158	NUR HAIJA	HADANG	PORTRADA	PERAK
159	OKTORIYADI	POGTI	PORTRADA	PERUNGGU
160	R. ALDO FEBRIAN SAPUTRA	KARATE	POPDA	PERUNGGU
161	RAHMADI	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERAK
162	RAMADHAN	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERAK
163	RAMADHANI	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERAK
164	RAYYA NOUVALIA	KEMPO	POPDA	EMAS
		KEMPO	POPDA	PERUNGGU
165	REGINA S	BOCCE	PESODA (SOINA)	PERAK
166	RENDY FAHRIZAL	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
167	RESYA YUANITA PANGGALONGAN	JUDO	POPDA	PERUNGGU
168	REZA KURNIAWAN	ASSI	PORTRADA	PERUNGGU
169	REZQI N.D	BOLTANG PUTRI	PESODA (SOINA)	EMAS
170	RIRIN DWI LESTARI	JUDO	POPDA	PERAK
171	RISKI NORHIDAYAT	ATLETIK	POPDA	PERUNGGU
172	RIZKI FADILLAH	KARATE	POPDA	PERUNGGU
173	RIZKY AL.P	BOCCE	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
174	ROSMILAWATI	ULD	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
175	ROVAN RAKHA ADINATA	RENANG	POPDA	EMAS
		RENANG	POPDA	PERAK
176	SAFA NURALISYA	PANJAT TEBING	POPDA	PERAK
177	SAFITRY WARDANI	PORGASI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
178	SAIDI RAHMAN	KIS	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
179	SARAH NABILA R. SIMANJUNTAK	KARATE	POPDA	EMAS
		KARATE	POPDA	EMAS
		KARATE	POPDA	PERUNGGU
180	SELAMAT RAMADHAN	PPSI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
181	SISILIA ERIKA SUSANTI	PERWATUSI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
182	SITI ARI NUR ANISYA	ATLETIK	POPDA	PERAK



183	SITI BULKIS	FESPATI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
184	SITI HADIJAH	TEROMPAH PANJANG	PORTRADA	PERAK
185	SITI LESTARI	GULAT	POPDA	EMAS
186	SRI WAHYUNI	PERWATUSI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
187	SRI WIDARTI	ULD	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
188	SUPIANOR	BOLTANG PUTRA	PESODA (SOINA)	EMAS
189	SURYA OCTAVIAN PRADANA	KARATE	POPDA	PERUNGGU
190	SURYANATA	BASKET PUTRA	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
191	SYAHRIL FAHMI	PORGASI	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
192	SYAHRUL RAMADHAN	PSOBI	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
193	SYIFA NOR.A	ATLETIK	PESODA (SOINA)	PERAK
194	SYIFA NUR.Z	BASKET PUTRI	PESODA (SOINA)	PERUNGGU
195	TIYA JULIANA	JUDO	POPDA	EMAS
		JUDO	POPDA	EMAS
196	WINDI AGUSTINA	TEROMPAH PANJANG	PORTRADA	PERAK
197	YULIANTY	ULD	PORTRADA DAN FORDA	EMAS
		ULD	PORTRADA DAN FORDA	PERUNGGU
198	YUNITA	HADANG	PORTRADA	PERAK
199	ZAHRA NUR KAMILA	KARATE	POPDA	EMAS
		KARATE	POPDA	PERUNGGU
200	ZUBDATUL WAIZHAH	JUDO	POPDA	EMAS
		JUDO	POPDA	PERAK

Sebagai bahan perbandingan, berikut disajikan daftar jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan medali yang diperoleh Tahun 2022.

Tabel 3.1.30

Daftar Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Medali yang diperoleh Tahun 2022

NO	NAMA	KEJUARAAN DAERAH	CABOR	MEDALI
1	ABDUL KHAIR RAMADANA	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
2	ABDULLAH	FORDA	SILAT BUDAYA	EMAS
3	ACCHYDIA JAGAT	PORPROV	ANGKAT BESI	EMAS
4	ACHMAD BAGAS RIDHO RAMADHAN	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
5	ADELIA INDRI SURYANI	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
6	ADI SURYANTO	PORPROV	VOLI	PERAK
7	ADIANSYAH	PORPROV	ATLETIK	PERAK



8	AGUS SAPUTRA	PORPROV	IODI	EMAS
		FORDA	BIGBOYS	EMAS
		PORPROV	IODI	EMAS
		PORPROV	IODI	EMAS
9	AGUS SETIA BUDI	PORPROV	GULAT	EMAS
10	AGUS WAHYUDI	PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
11	AHLAN KOIRRUDIN	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
12	AHMAD RAIHAN	PESONAS	VOLI	EMAS
13	AHMAD ABDUL AZIZ	PORPROV	VOLI	PERAK
14	AHMAD ALVIN NIZAR	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		PESONAS	FUTSAL	EMAS
15	AHMAD INSANI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
16	AHMAD LUTHFI MADYANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
17	AHMAD MALIKI PRAMUJA	POPDA	BASKET	-
18	AHMAD NASRULLOH YUSUF	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
19	AHMAD RIFAI	PORPROV	TINJU	PERAK
20	AHMAD SAYFII	POPDA	VOLI	EMAS
21	AHMAD SUPIYADI	PORPROV	TINJU	PERAK
		POPDA	TINJU	PERUNGGU
22	AISYA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
		PORPROV	BRIDGE	PERAK
23	AKHMAD NAJIB KHAIRI	PORPROV	KEMPO	PERAK
24	AKHMAD RAMADHAN	PESONAS	VOLI	EMAS
25	AKHMAD RIYADI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
26	ALADIN	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
27	ALDI RANGGA	PORPROV	KEMPO	EMAS
28	ALDIAN PRABOWO	PORPROV	ANGKAT BESI	PERAK
29	ALDY	PORPROV	IODI	PERAK
30	ALDYA MUSOUFI	PORPROV	IODI	PERAK
31	ALEXANDRIANUS RISKI	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
32	ALIEF BINTANG RAMADHAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS



33	ALIFAH NABILAH	PORPROV	KEMPO	EMAS
34	ALPIANOR	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
35	ANDIKA BAGUS PEBRIANTO	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU
36	ANDINI DENO	PORPROV	ANGKAT BESI	EMAS
37	ANNISA AYU ADIBAH	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
38	ANNISA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
39	ARBAINAH	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
40	ARISTA KURNIA DEWI	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
41	ARJUNA ALDILLAH PRIAMBODHO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
42	ARMANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
43	ARUM MUSTIKA DEWI	PORPROV	JUDO	EMAS
44	ASDIYASAH	PORPROV	IODI	PERAK
		PORPROV	IODI	PERAK
45	ASMAUL HUSNATI	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
46	AULIA	PESONAS	BASKET	EMAS
47	AZIZAHTUL IQNA	PORPROV	ATLETIK	PERAK
48	BAGUS SETIAWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
49	BARIYAH	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERAK,PERUNGGU
		PESONAS	ATLETIK	PERAK
50	BAYU SAPUTRA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
51	BELLA PUSPITA	PESONAS	ATLETIK	EMAS
52	BERLIAN LAFITRI FANY	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
53	BISMA ZULFIAN PUTRA RAMADHAN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
54	BONIFASius TANDI	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
		PORPROV	FPTI	PERUNGGU
55	BUDI SANTOSO	PORPROV	ATLETIK	PERAK
56	CITRA CHELSY OLIVIA	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
57	DAFFA BAGASKARA	PORPROV	IODI	EMAS
58	DARSIAH	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
59	DEDY SETIAWAN	PEPARPROV	JUDO	EMAS
60	DELA LUTFIAH	PORPROV	KARATE	EMAS



		PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
61	DESI PUSPITA SARI	PORPROV	SILAT	EMAS
62	DIANDRA PARAMITHA	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
63	DIMAS ARI SUDARIANTO	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
64	DIMAS DAN HENDRA	PORPROV	ESPORT	EMAS
65	DIMAS FERDINAN	PORPROV	ESPORT	EMAS
66	dr. FADILLAH ALMA PUTRA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
67	DWI ANGGRAINI	PEPARPROV	ATLETIK	PERUNGGU
68	DWI ANGGREANI SAPUTRI	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
69	DWI FERDYAN SAPUTRA	POPDA	VOLI	EMAS
70	DWI SUCI RAMADHANI	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
71	DZAKI FATTURAHMAN	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
72	EDO ALFIANTO WIJAYA	PORPROV	TAKRAW	PERUNGGU
73	EDWIN MARTHA PRADANA	PORPROV	VOLI	PERAK
74	EDY RAHMADI	PORPROV	MUAYTHAI	PERAK
75	EKA PRASANTI	PORPROV	SILAT	PERAK





76	ELFINA NURSANTI	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
77	ENDANG	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
78	ERI ASTUTI	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
79	ERVINA	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
		PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
80	ERVINA DAMAYANTI	PORPROV	SILAT	EMAS
81	FAATIH MUHAMMAD AKMAL	PORPROV	RENANG	PERUNGGU
82	FADILLAH ALMA PUTRA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
83	FAHRIANSYAH	PESONAS	FUTSAL	EMAS
84	FAKHRI HIDAYATULLAH	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
85	FAKHRUDIN	PORPROV	BILLIARD	EMAS
		PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
		PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
86	FATIKAH	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
87	FEBRIAN ALFA REZA	PORPROV	BALAP MOTOR	PERAK
88	FEMAS ADI PRAMANA	POPDA	VOLI	EMAS
		PORPROV	VOLI	PERAK
89	FERDIAN FATHUR ROHMAN	PESONAS	VOLI	EMAS
90	FIRMANSYAH	POPDA	PENCAK SILAT	EMAS
91	FITRI RAHMAYANTI	PESONAS	FUTSAL	PERAK
92	FITRIA RAMADANI	PEPARPROV	CATUR	PERAK
		POPDA	TINJU	EMAS
93	FITRIANOOOR	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
94	FITRIATI	PORPROV	CATUR	PERUNGGU
95	GHOEUR SETIAWANTO	PORPROV	IODI	PERUNGGU
96	GILANG	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		PORPROV	ATLETIK	PERAK
97	GITA AMALIA WARDANI	POPDA	TINJU	EMAS
		PORPROV	TINJU	PERAK
98	H. MUSTAFA	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU



99	HADI PUTRO SETIAWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
100	HADIYANOOR	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
101	HAJIMI YANNOOR	PORPROV	ATLETIK	PERAK
102	HANISA MAYRANI	PESONAS	FUTSAL	PERAK
103	HASAN	PEPARPROV	ATLETIK	PERUNGGU
104	HEFNI	PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
105	HELMINA SALWA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
		PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
106	ANNISA	PORPROV	VOLI	PERAK
107	HENDRA RUSADI	PORPROV	BALAP MOTOR	PERUNGGU
108	HERI MAULANA	PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
109	HUDIYA LAILAN	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
110	I MADE PRABAWA DEVA	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
111	IBERAHIM	PEPARPROV	CATUR	PERUNGGU
112	IBRA AL MADINA	POPDA	VOLI	EMAS
113	ILHAM FADILA	PORPROV	VOLI	PERAK
114	IRAYATI NORIWANI	PORPROV	IODI	PERUNGGU
115	IRMA ARANA ZAHRA	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
116	IRVAN ADITIYA	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
117	IRWANSYAH ABDI	PORPROV	MUAYTHAI	PERAK
118	ISNAINI NOR	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
119	JULIAN FARICA	PORPROV	IODI	EMAS
120	KHAIRIAN IKBAL	PORPROV	SILAT	PERAK
121	KHAIRIL FADILLAH	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
122	KHAIRUL FADLAN LUBIS	PORPROV	KARATE	PERAK
		PORPROV	KARATE	PERUNGGU
123	KHARISMA NUR HIDAYAH	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
124	LAILA RUSADY	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
125	LAILAN NAJAH	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
		PORPROV	SAMBO	PERUNGGU



		PORPROV	SAMBO	PERAK
126	LAILI DWI	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
127	LIA HIDAYAH	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
128	LILIS INDRIANI	PORPROV	SILAT	PERUNGGU
129	LISA NUR HIDAYAH	PORPROV	SAMBO	PERAK
130	LISDA YUSVIANTI	PORPROV	BRIDGE	PERAK
		PORPROV	BRIDGE	EMAS
131	LUKMAN HAKIM	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
132	LUKMAN HANAFI	PORPROV	SILAT	PERAK
133	LUKMAN NOOR HAKIM	PORPROV	IODI	PERAK
		PORPROV	IODI	PERAK
134	LUSIANA ANDINKA	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
135	LUTFI GAZALI RAHMAN	PEPARPROV	JUDO	EMAS,PERUNGGU
136	M. ADITYA RAHMAN	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
137	M. ADRIANSYAH	PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
		PORPROV	ATLETIK	PERAK
138	M. AMIRULLAH ABDUL AZIZ	PORPROV	TINJU	PERAK
139	M. ANUGRAH	PORPROV	SILAT	PERUNGGU
140	M. ARDY	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
141	M. BINTANG SURYA PRATAMA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
142	M. FAHMI HIDAYAT	POPDA	TINJU	PERUNGGU
143	M. FERDYAN NOOR HADI	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
144	M. GILANG RAMADHAN	PESONAS	BADMINTON	EMAS
145	M. HAFIZI	PORPROV	SILAT	EMAS
146	M. HELMY AZHARI	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERUNGGU
147	M. HONGKI	PORPROV	KEMPO	EMAS
148	M. IHSAN	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS
149	M. IHZA AKBARIATNA	PORPROV	IODI	PERUNGGU
150	M. IRFAN	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
		PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
151	M. KURNIAWAN	PESONAS	BASKET	PERUNGGU



152	M. NABIL BACHLEVI	PORPROV	ANGKAT BESI	PERUNGGU
153	M. PEBRIYANOR ALI	PORPROV	VOLI	PERAK
154	M. RAFII	PORPROV	ATLETIK	PERAK
155	M. RAMLY	PORPROV	MUAYTHAI	PERUNGGU
156	M. RASYIDI	PESONAS	FUTSAL	EMAS
157	M. REFENDI	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU
		PORPROV	KEMPO	PERAK
158	M. REZA FAHLEVI	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU
		PORPROV	KEMPO	PERAK
159	M. RIFQI ULIL IKHBAL	PORPROV	ATLETIK	PERAK
		PORPROV	ATLETIK	PERAK
		PORPROV	ATLETIK	PERUNGGU
160	M. RISKI SAFARI	PORPROV	TINJU	PERUNGGU
161	M. SAFUANI	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
162	M. SALIHIN	PORPROV	TENIS MEJA	PERUNGGU
163	M. SARI BUDI	PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
164	M. SURYADI SAPUTRA	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
165	M. SYAFWAN	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
166	M. YAHYA	PORPROV	KEMPO	PERAK
167	M. ZAKI	PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
168	M.AL FARADU SUMIRAT	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
169	M.FAZRIAN ARRAFIE	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERAK
170	M.GILANG RAMADHAN	PEPARPROV	BULU TANGKIS	EMAS,PERAK
171	M.RAFII	PORPROV	ATLETIK	PERAK
172	M.REHAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
173	M.RIFQI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
174	MAHENDRA	PESONAS	FUTSAL	EMAS
175	MAHRETA INDAYANI S	PORPROV	MUAYTHAI	PERAK
176	MALASARI	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
		PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS
177	MALIK ABDUL AZIZ YULIANTO	POPDA	VOLI	EMAS



178	MARIAM	PORPROV	TENIS MEJA	PERUNGGU
179	MARSUDI SETIYAWAN	PORPROV	TINJU	EMAS
180	MAULANA MALIK IBRAHIM	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
181	MAULIA SABILA	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
182	MAULIDA RAHMAH	PORPROV	BRIDGE	EMAS
183	MAURA AMALINA NAYLA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
184	MELITA YOGI PRATAMA	PORPROV	GULAT	PERAK
185	MIRWAN ALIYANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
186	MN. YUSDI MUSALIN	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
187	MOHAMAT APRIYANTO	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
188	MOHAMMAD ZAKY HABIBI	POPDA	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
189	MP. HASMI NORBANA	PORPROV	CATUR	EMAS
		PORPROV	CATUR	PERUNGGU
190	MUDIANTO	PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS,PERAK
191	MUHAMAD SIBAWAIHI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
192	MUHAMAD SYARWANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
193	MUHAMMAD	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
194	MUHAMMAD ADITYA RAHMAN	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
195	MUHAMMAD AFIF LUBIS	PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
		PORPROV	KARATE	PERUNGGU
196	MUHAMMAD ALAMULHUDA	PORPROV	PANAHAH	PERUNGGU
197	MUHAMMAD ALFA RIZI	POPDA	PENCAK SILAT	PERAK
198	MUHAMMAD ALFARADU SUMIRAT	POPDA	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
199	MUHAMMAD ALWIN GHOFARI	POPDA	VOLI	EMAS
200	MUHAMMAD AMIRUDIN	PORPROV	PETANQUE	EMAS
201	MUHAMMAD HALILLURAHMAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
202	MUHAMMAD HONGKI ADI PUTRA	PORPROV	KEMPO	PERAK



203	MUHAMMAD IHSAN	PORPROV	ATLETIK	PERAK
		PESONAS	FUTSAL	EMAS
204	MUHAMMAD IRWANDANA	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
		PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
205	MUHAMMAD JAILANI	PESONAS	BOLA TANGAN	EMAS
206	MUHAMMAD NAVAN SETIAWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
		POPDA	VOLI	EMAS
207	MUHAMMAD NOOR IQWAN	PORPROV	VOLI	PERAK
208	MUHAMMAD NUR YANDA RIFANI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
209	MUHAMMAD RAHMATULLAH	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
210	MUHAMMAD RAMADHAN	PORPROV	TAKRAW	PERUNGGU
211	MUHAMMAD RAULNAL VANESTY	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
212	MUHAMMAD RIDUAN	PORPROV	BALAP MOTOR	PERAK
213	MUHAMMAD RIZKY RAMADANI	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
214	MUHAMMAD YAHYA	PORPROV	KEMPO	EMAS
215	MUHAMMADSYAH AL HABSY	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
216	MUJI LESTARI	PEPARPROV	CATUR	PERAK
		PEPARPROV	ATLETIK	PERAK
		PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS
217	NABILA AATIFA	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
218	NADIA LISMAYA PUTRI	PORPROV	SAMBO	EMAS
		PORPROV	SAMBO	PERAK
		PORPROV	SAMBO	PERAK
219	NAFSIAH	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
220	NAJLA SALSABILLA	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
221	NANDA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
222	NASARUDDIN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
223	NAYLA NAKEISYA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
224	NAZWA D	PORPROV	KEMPO	PERUNGGU



225	NITA APRILIYANTI	PESONAS	TENIS MEJA	PERUNGGU
226	NLISANUL HIDAYAH	PORPROV	SAMBO	PERAK
227	NOOR HAPIPAH	PORPROV	KARATE	PERAK
228	NOR AINAH	PESONAS	FUTSAL	PERAK
229	NOR AZIMA	PORPROV	KEMPO	EMAS
230	NOR CHASANAH	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
231	NOR RAINI SYARIFAH	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
232	NORHAPIPAH	PORPROV	KARATE	PERAK
233	NORLAILI, S.Pd	PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	EMAS
		PORPROV	RENANG	PERAK
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
234	NORMIA	PORPROV	TINJU	PERAK
235	NORMINA	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
		PORPROV	SAMBO	PERAK
236	NUARY MAULANA	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
		PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
		POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
237	NUGROHO RAMADHANU	PORPROV	IODI	EMAS
238	NUR HAVIJA	PESONAS	FUTSAL	PERAK
239	NUR KHOLIK	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
240	NUR LUKMAN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
241	NURDIN	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS
		PEPARPROV	BULU TANGKIS	PERAK
242	NURROHIM SIDIK	PORPROV	JUDO	PERAK
243	NURUL HIKMAH	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
		PORPROV	FPTI	PERUNGGU
244	PANJI RIFKI	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
245	PHARAS GUNTUR NASTIAR	PORPROV	VOLI	PERAK



246	PINNEHAS JULIANO	PORPROV	VOLI	PERAK
247	PRIYO SANTOSO	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERUNGGU
248	PUTU ARI ARNIKA	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
		PORPROV	KARATE	PERAK
249	RAHMAD HIDAYAT	POPDA	VOLI	EMAS
250	RAHMADANI	PORPROV	SAMBO	PERAK
251	RAHMANNUL HAKIM	PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU
252	RAHMAT	PORPROV	TINJU	PERUNGGU
253	RAHMAYANTI	PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
		PORPROV	KEMPO	PERAK
254	RAHMI ASHFIA	PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
		PORPROV	TENIS LAPANGAN	PERUNGGU
255	RAHMIDI	PORPROV	ATLETIK	PERAK
256	RAMADANI	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
	RAMADANI	POPDA	VOLI	EMAS
257	RAMADHAN	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
		PORPROV	SILAT	PERAK
258	RAMANDA	PORPROV	JUDO	PERAK
259	RATIH INDAH PERTIWI	PORPROV	IODI	PERAK
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERUNGGU
260	RAYMOND HARIYONO	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
261	RENDY FAHRIZAL	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
262	REVIANI	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
263	RIDHO APIBRI	PORPROV	ANGKAT BESI	EMAS
264	RIKO ARDIANTO	PORPROV	VOLI	PERAK
265	RISKA ANISA	PORPROV	ANGKAT BESI	PERAK
266	RISKY AL-FARISI	PESONAS	BOCCE PUTRA	PERUNGGU
267	RISKY HIDAYAT	PESONAS	FUTSAL	EMAS
268	RISWAN	PORPROV	GULAT	PERUNGGU





269	RIZKY ALVINA	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
270	ROBBY SURRAHMAN	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
271	ROVAN RAKHA ADINATA	PORPROV	RENANG	PERUNGGU
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
		PORPROV	RENANG	PERUNGGU
272	SAFA NURHALISYA	PORPROV	FPTI	PERUNGGU
273	SAFFILA ADANTA PUTRA SANTOSO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
274	SAIBUL BAHRI	PESONAS	VOLI	EMAS
275	SAID AKBAR	PORPROV	SAMBO	PERAK
		PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
276	SALAMIAH	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
277	SAM'ANI	PORPROV	BILLIARD	PERUNGGU
278	SANTUSU	PEPARPROV	JUDO	PERAK,PERUNGGU
279	SARAH NABILA SIMANJUNTAK	PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
280	SATRIA WIRA DEWANTO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
281	SATRIO MULYADI	POPDA	VOLI	EMAS
282	SELAMET APRIYANTO	PEPARPROV	ATLETIK	PERAK,PERUNGGU
283	SHOLIKIN	PEPARPROV	ATLETIK	PERUNGGU
284	SITI AISYAH	PORPROV	HAPKIDO	PERUNGGU
285	SITI LESTARI	PORPROV	GULAT	EMAS
286	SITI MONALISA	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
287	SITI RAHAYU	POPDA	PENCAK SILAT	PERUNGGU
288	SONI MARKUS	POPDA	VOLI	EMAS
289	STEVANI VANESIA DARMAWAN	POPDA	TINJU	PERUNGGU
		PORPROV	TINJU	PERUNGGU
290	SUPIANOR	PESONAS	VOLI	EMAS
291	SURYA HADI SAPUTRA	PORPROV	SILAT	PERUNGGU
		PESONAS	BADMINTON	EMAS
292	SUWANDI	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS,PERAK
293	SYAHRUL RAMADHAN	PORPROV	GULAT	PERUNGGU
294	SYAIFUL BAHRI	PEPARPROV	ATLETIK	EMAS
295	TAIBAH	PORPROV	KEMPO	PERAK



296	TAQDIR HERO WASKITO	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
297	TAUFIK RAHMAN	PORPROV	HAPKIDO	PERAK
298	TAUPIKURAHMAN	PORPROV	SAMBO	PERUNGGU
299	TEDDY	PORPROV	SEPAK BOLA	EMAS
300	TEJA HANDOKO	PORPROV	TAKRAW	PERUNGGU
301	THOYYIBAH	PORPROV	KEMPO	EMAS
		PORPROV	KEMPO	EMAS
302	TIGOR ROBERT	PORPROV	KARATE	PERUNGGU
303	TIYA JULIANA	PORPROV	JUDO	PERAK
304	TONY KUNCAHYOHADI	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
305	TRI UNTARI	PEPARPROV	BULU TANGKIS	PERUNGGU
306	TRIO TONDO PRASETYO	POPDA	SEPAK BOLA	EMAS
307	TUTUT HASTUTI	PORPROV	KARATE	EMAS
		PORPROV	KARATE	PERAK
308	VINA	PORPROV	IODI	PERUNGGU
		PORPROV	IODI	PERAK
309	WAHYUDI NUR	PORPROV	HAPKIDO	EMAS
310	WINDA SAPUTRI	PORPROV	KARATE	PERAK
311	WULAN DESTIYA FITRI	PORPROV	PETANQUE	EMAS
312	ZAINAL AKLI	PORPROV	VOLI	PERAK
313	FEBRIANDY RANGGA	PORPROV	MUAYTHAI	EMAS
314	SUPRIYANTO	PEPARPROV	ANGKAT BBERAT	EMAS
315	NAYLA SAFINA	PORPROV	BRIDGE	EMAS
		PORPROV	BRIDGE	PERUNGGU

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan atlet berprestasi selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan venue Petangque, Sirkuit Sepeda, Lapangan Tembak, rehap Lapangan Tenis dan Lapangan Basket.
2. Mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional.
3. Melaksanakan kejuaraan daerah/provinsi



4. Pelatihan pelatih/wasit dan juri olahraga
5. Pengawasan dan pendampingan pemusatan latihan
6. Kegiatan olah raga prestasi, tradisional, rekreasi serta disabilitas.
7. Melaksanakan kegiatan single event dan multy event olahraga.
8. Pemberian penghargaan berupa bonus kepada atlet berprestasi dan pelatih untuk atlet berprestasi.
9. Pemasalan olahraga masyarakat berupa Senam Kesegaran Jasmani dan ILDI di Kecamatan.

Rencana aksi kedepan antara lain :

1. Lebih meningkatkan prestasi yang dicapai melalui semua cabang olahraga
2. Dilaksanakannya pemusatan latihan atlet yang lebih intensif
3. Terlaksananya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Cabang Olahraga Unggulan
4. Pemanduan bakat atlet usia dini sesuai intruksi Presiden Tentang Design Besar Olahraga Nasional
5. Melaksanakan kejuaraan daerah dan provinsi
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
7. Mewujudkan masyarakat sehat melalui olahraga
8. Pembudayaan Cabang Olahraga Baru
9. Pembentukan Kampung Olahraga
10. Pembinaan Olahraga Wanita (Tenis dan Sepak Bola)
11. Pemassalan Olahraga Melalui Program Ayo Olahraga

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 21 ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta 62 ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di dukung oleh 6 Program dengan Pagu Rp. 32,060,669,424.00 dan terealisasi Rp. 26,937,411,354.00 atau sebesar 84,02%.

Tabel 3.1.31  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
----	---------	------	-----------



1	Program Pengembangan Kebudayaan	936,335,708.00	<b>905,192,610.00</b>
2	Program Pembinaan Sejarah	345,119,464.00	<b>333,580,860.00</b>
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	349,961,862.00	<b>341,282,500.00</b>
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,970,750,538.00	<b>1,845,219,884.00</b>
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27,858,501,852.00	<b>22,912,135,500.00</b>
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	600,000,000.00	<b>600,000,000.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>32,060,669,424.00</b>	<b>26,937,411,354.00</b>

Tabel 3.1.32  
Efisiensi Sasaran Strategis 4

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
162,35 %	84,02 %	78,33 %

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 5

### Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.33  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>100%</b>

Realisasi indikator Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD di tahun 2023 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%. Capaian 100% diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tugas Pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui inovasi inovasi baru salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa SKPD telah menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya Disdukpencahil, DPMPSTSP, BKPSDM, Dinas Kesehatan UPTD RSUD. Hadji Boejasin, Dinas Perhubungan, Kecamatan panyipatan, Kelurahan Angsau, Kelurahan Pabahanan dll. Berikut disajikan aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Tanah Laut.

Seluruh SKPD di atas telah melakukan pelayanan berbasis elektronik, sebagai contoh disajikan data jumlah pelayan berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh DPMPSTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Tabel 3.1.34  
Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh DPMPSTP

NO	URAIAN		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
			JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN
1.	TDP		582	589					
	*	PERORANGAN			449				
	*	CV			141				
	*	PT			60				
	*	KOPERASI			8				
	*	LAINNYA			2				
2.	SIUP		591	586	672	578	154		
3.	TANDA DAPTAH INDUSTRI/IUI		42	9	3	4			
4.	TDG (Tanda Daftar Gudang )				2	2	3		
4.	IJIN GANGGUAN HO (Izin Lingkungan Limbah B3 & Cair)		113	56			15		
	*	IZIN LINGKUNGAN			22				
	*	IZIN LIMBAH B3			22				
	*	IZIN LIMBAH CAIR			17				
5.	IMB/PBG		216	185	225	225	121	122	182
6.	SIUJK		88	108	74	39	20 (sampai april, selanjutnya OSS)		
7.	IJIN USAHA PERKEBUNAN		3			1	1		
8.	IJIN USAHA HUBURAN UMUM		14		6		0		
9.	IJIN PEMBUKAAN KOPERASI				1				
10.	IJIN KOPERASI SIMPAN PINJAM				1	2			
11.	IJIN RENTAL PLAYSTATION/GAME								
12.	IJIN REKLAME		149	129	117	137	134	119	128
13.	IJIN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET								
14.	IJIN USAHA PERIKANAN (Pencatatan Kapal Perikanan)		44	36	47	45	91	39	10
15.	IJIN PENANGKAPAN IKAN								
16.	IJIN USAHA TOKO MODERN		12	7	10	8	14	14	3
17.	IJIN KETERANGAN TEMPAT USAHA		1,238	1247					
	*	PERORANGAN			770				
	*	CV			380				
	*	PT			213				
18.	IJIN USAHA PETERNAKAN		7		2	5	2	5	



19	IJIN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT							
20	IJIN PENGGILINGAN PADI.	5	1	2	5	2		
21	IJIN PENUMPUKAN BAHAN BAKAR MINYAK / BBM	9	9	8		provinsi		
22	IJIN PRAKTEK DOKTER HEWAN	1		2	3	0	2	
23	IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS	3		3				
24	IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)				6			1
25.	IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN							
26.	JASA KEPARIWISATAAN (TDUP)	23	6	6	7	2		
27.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	41	20	25	8	3		
28.	IZIN RUMAH SAKIT DAN RUMAH SAKIT BERSALIN SWASTA		2					
29.	IZIN KLINIK SWASTA		5					
30.	IZIN KLINIK PERUSAHAAN							
31.	IZIN APOTEK	3	8	5	5	11	4	
32.	IZIN TOKO OBAT	2	2	2	1	2		
33	IZIN KURSUS		1	-	6	2		5
34	IZIN KEPARIWISATAAN	4	7		7			
35	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)		131	253	118	237	307	191
36	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEHNIK KEFARMASIAN		33	40	33	56	40	56
37	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER		5	15	10	36	40	36
38	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT		3	8	11	16	29	21
39	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM			5	31		183	161
40	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS			4	36			
41	SURAT IZIN PRAKTEK KESEHATAN MASYARAKAT			2	3			
42	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN			2	70	224	233	180
43	IZIN OPERASIONAL KLINIK		5	4	4	4	1	1
44	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT		3	2		1		
45	IZIN PENYELENGGARA OPTIKAL		1					
46	SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN RUMAH TANGGA			29	52	22	61	27
47	IZIN LPK		1	1	3	1		2
48	SURAT KETERANGAN TATA RUANG		12	95	89	79	105	143
49	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH / PKPPT			5	16	24	18	24
50	IZIN LOKASI			11	11	12		
51	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS					2	2	



52	IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA					1		
53	IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK					43	63	28
54	IZIN PRAKTEK PSIKOLOGI KLINIS					2	1	3
55	IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI					3	2	5
56	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI					12	16	10
57	IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN					1		
58	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI					15	10	16
59	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS					1	1	2
60	SURAT IZIN KERJA SANITARIAN					18	35	14
61	SURAT IZIN KERJA PROMOTOR KESEHATAN					11	13	
62	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS					2	2	7
63	SURAT IZIN KERJA TENAGA REKAM MEDIS					10	14	2
64	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI					6	5	6
65	SURAT IZIN KERJA TENAGA OKUPASI TERAPI					1	1	
66	IZIN PENELITIAN					71	141	159
67	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE DEPO AIR MINUM					4	1	
68	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA					1	1	
69	SKB							
	• PERORANGAN					602	509	360
	• CV					289	183	145
	• PT					176	132	118
	• BADAN USAHA LAIN					0		
70	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL					1	1	
71	IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG						3	3
72	IZIN HIBURAN						3	1
73	SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD						91	43
74	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA PROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU						13	13
75	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA						2	
76	SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS						1	
77	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL						91	1
78	IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR						13	1
79	SURAT IZIN OPERASIONAL SD						2	1
<b>Jumlah</b>		<b>3.148</b>	<b>3.207</b>	<b>3.773</b>	<b>3.409</b>	<b>2.882</b>	<b>2.568</b>	<b>2109</b>

Sumber : DPMPTSP Kab. Tanah Laut





Seluruh permohonan pelayanan yang masuk ke DPMPSTSP baik itu secara langsung maupun elektronik harus melalui aplikasi Apperindu (Aplikasi Perizinan Terpadu) agar tidak terjadi pemalsuan perizinan (perizinan bodong).

Tabel 3.1.35  
Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh Disdukcapil Tahun 2023

No	JUMLAH PERMOHONAN						JUMLAH	
	APLIKASI SILAKAS		WHATSAPP		APLIKASI PELANGI		DITERIMA	DITOLAK
	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK		
1	861	805	7.566	16	268	-	8.695	821

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Tabel 3.1.36  
Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh Disdukcapil Tahun 2022

No	JUMLAH PERMOHONAN				JUMLAH	
	APLIKASI SILAKAS		WHATSAPP		DITERIMA	DITOLAK
	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK		
1	4.888	821	6.939	82	11.827	903

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Seluruh permohonan pelayanan yang masuk ke Disdukcapil diverifikasi oleh petugas. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan. Untuk permohonan yang data dukungnya tidak lengkap maka permohonan akan ditolak dan disarankan untuk melakukan permohonan ulang dengan melengkapi seluruh data dukung yang dipersyaratkan.

Untuk pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh BKPSDM kepada seluruh PNS diantaranya yaitu Simpeg, E-SKP, SIDIKA, My SAPK, SIMPONI, aplikasi-aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh seluruh PNS yaitu berjumlah 4765 orang telah mengakses dan menggunakannya.

Selain itu pada DPMPSTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengaplikasikan penggunaan Tanda Tangan Digital (*digital signature*) sehingga lebih mempercepat proses pelayanan di Kabupaten Tanah Laut.



Berikut disajikan data layanan yang berbasis elektronik pada SKPD lain, diantaranya yaitu :

Tabel 3.1.37

Data Layanan Berbasis Elektronik

NO	SKPD	Jenis Layanan Berbasis Elektronik	Permohonan Pelayanan			Penjelasan Singkat
			Jumlah Seluruh Permohonan	Diterima/ Aktif	Ditolak/ Tidak Aktif	
1	SETDA	PERMOHONAN AKUN SOSIALITA (Akun PPK, PEMBANTU PPK, PP, BENDAHARA INSTANSI)	301	301	0	Permohonan layanan melalui website Portal UKPBJ Tala ( <a href="https://ukpbj.tanahlautkab.go.id/permohonan">https://ukpbj.tanahlautkab.go.id/permohonan</a> ) untuk layanan permohonan akun pengguna sosialita untuk instansi lingkup tanah laut agar dapat Bertransaksi dengan Penyedia di SOSIALITA
		PERMOHONAN AKUN PENYEDIA SOSIALITA	322	319	3	Untuk menjadi penyedia di SOSIALITA Maka calon Penyedia mendaftar melalui website ( <a href="https://sosialita.tanahlautkab.go.id/">https://sosialita.tanahlautkab.go.id/</a> ) kemudian akan diverifikasi oleh admin verifikasi penyedia sosialita apakah data dan dokumen sdh memenuhi persyaratan atau tidak, yang memenuhi persyaratan akan di aktifkan dan yang belum memenuhi akun tidak aktif.
		PERMOHONAN AKUN SPSE (Akun PA, PPK dan PP)	162	162		Permohonan layanan melalui website Portal UKPBJ Tala ( <a href="https://ukpbj.tanahlautkab.go.id/permohonan">https://ukpbj.tanahlautkab.go.id/permohonan</a> ) untuk layanan permohonan akun SPSE untuk instansi lingkup tanah laut agar dapat melaksanakan proses mulai dari perencanaan pengadaan barang/jasa sampai pada pelaksanaan pengadaan melalui Akun PA, PPK dan PP yang telah ditetapkan oleh Pemangku Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan, permohonan yang memenuhi syarat akan dibuatkan atau update data serta di aktifkan oleh admin agency pada web ( <a href="https://lpse.tanahlautkab.go.id/eproc4/">https://lpse.tanahlautkab.go.id/eproc4/</a> )
2	DISPUS IP	Inlistlite	2422	2422	0	ENLIS LITE merupakan rangkaian modul sistem perpustakaan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Modul untuk digunakan oleh USER dan modul untuk ADMINISTRASI. Pengertian user adalah orang atau petugas perpustakaan yang bertugas mengelola data perpustakaan sementara Administrasi adalah petugas yang membantu user memelihara sistem dari sisi administrasi seperti pendaftaran user ke dalam sistem, konfigurasi setting pada aplikasi dan lain-lain. Semua ini akan dibahas satu per satu pada sub-sub bahasan pada dokumen ini Dimana Semua Buku yang ada di perpustakaan abik itu dari belanja modal maupun hibah masuk kedalam apalिकासai ini, dan juga mendaftar sebagai anggota perpustakaan di mana nanti user



						<p>maupun pengguna cukup memperlihatkan ktp, kepada petugas langsung di buatkan kartu sebagai pendaftar segai anggota diman mudah unyutuk meminjam buku,</p>
						<p>Cara buat meminjam buku iya lah akan di sediakan computer lalu di isi judul buku yang di inginkan lalu operator (petugas0 akan mengarahkan ke rak sesuai dengan kategorinya lalu petugas mengisi data kita dengan lengkap dengan menyerahkan kartu anggota perpustakaan yang kita buat tadi lalu setelah selesai nanti nanti petugas akan memperivikasinya berapa lama buku tersebut ingin kita pinjam maksimal biasanya kurang lebih 2 minggu</p>
		SIMPUN	191	191	0	<p>SIMPUN adalah system informasi pengelolaan unit kearsipan yang memandu untuk memanajemen pengelolaan arsip dengan lebih mudah dan efisien. Mudah dan efisien yang dimaksud adalah SIMPUN telah dirancang dengan antar muka yang user friendly yang memudahkan pada proses penerimaan, pemilahan, dan penyimpanan arsip. Efisien dalam artian proses penyimpanan arsip dilakukan secara bertahap dan terorganisir.</p>
		eDispusiptala	46	46	0	<p>Perpustakaan Digital Daerah Tanah Laut yang dikembangkan oleh Dispusip Tanah Laut bersama Gramedia. Semua buku yang diakses di aplikasi ini adalah gratis dalam bentuk e-book.</p>



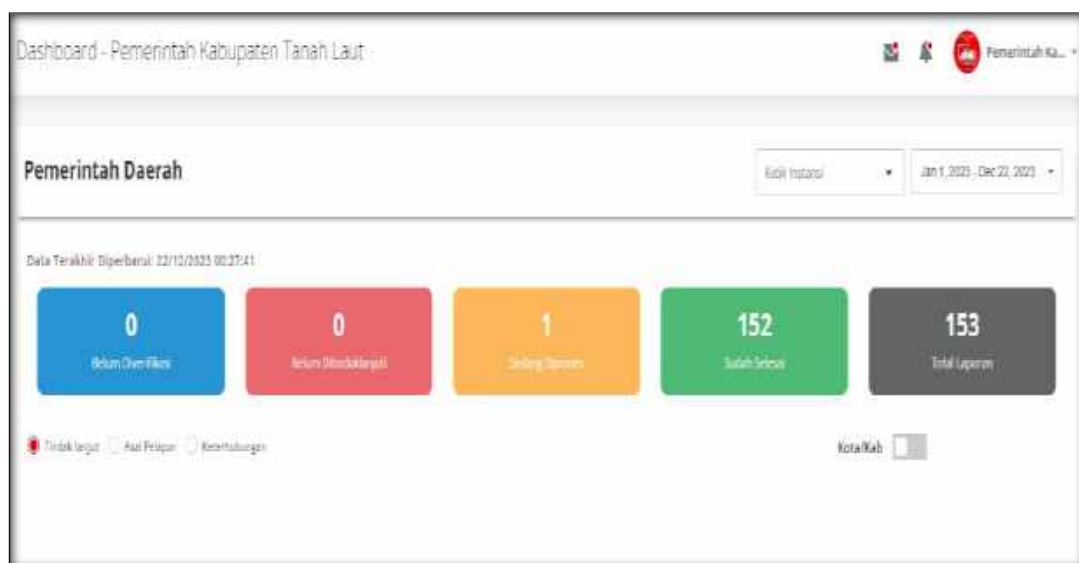
3	BPKAD	Penerbitan Pengantar Perpanjangan STNK/administrasi kendaraan dinas ke Samsat/Polda	1202	1202	-	Semua usulan peperangan STNK (pajak kendaraan bermotor) yang masuk melalui SIM-PKB diverifikasi admin bidang. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan.
		Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) UP, GU, LS, TU	8071	8071	-	Semua usulan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui aplikasi SIPD diverifikasi kelengkapannya oleh admin bidang. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan.
		Penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) Pensiun, Pindah, Diberhentikan, Mengundurkan Diri, Mati Bujang, Habis Kontrak	248	248	-	Semua usulan penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) melalui aplikasi SIM-GAJI diverifikasi kelengkapannya oleh admin bidang. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan.

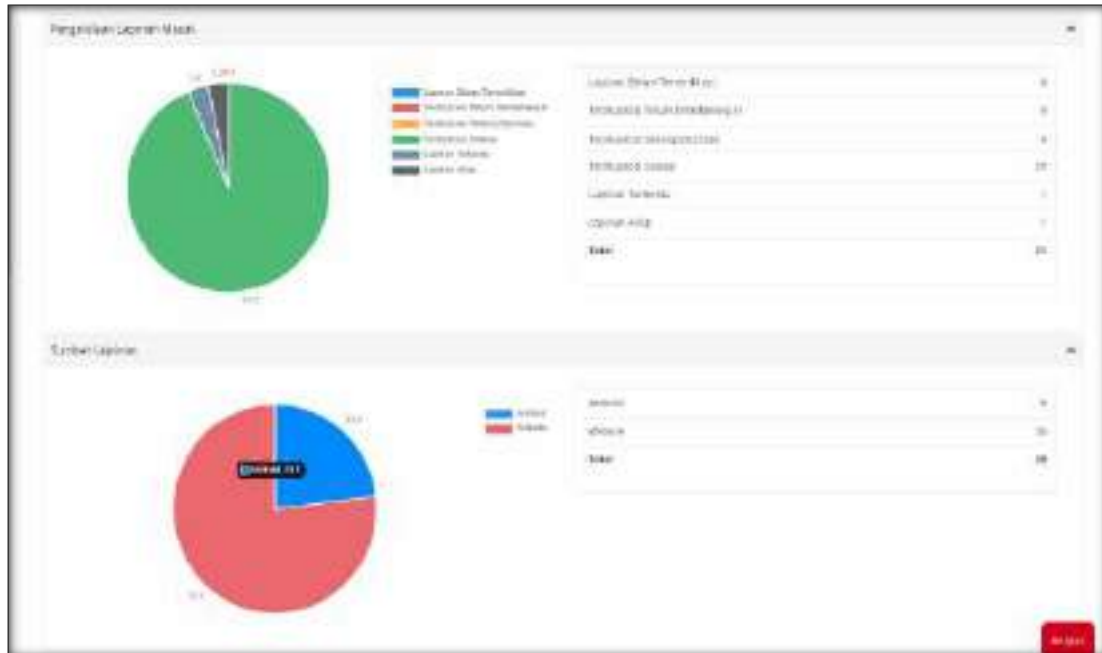
4	BKPSDM	SIMFONI	5.085	5.085	-	<p>Aplikasi simfoni dibuat pada tahun 2020 dan mulai digunakan mulai Tahun 2021. Aplikasi ini digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepegawalan hanya melayani usulan kenaikan Pangkat.</p> <p>Pada Pertengahan Tahun 2021 Aplikasi Simfoni dikembangkan untuk berbagai pelayanan di BKPSDM Kab. Tala (usulan jabatan fungsional, Izin Belajar, Tugas Belajar, Diklat/Bimtek, Cuti, Karis Karsu, Kartu Taspen, Satya Lencana, Perbaikan Data PNS dan Ujian Dinas, serta untuk mengunduh semua berkas kepegawaian yang telah dikeluarkan BKPSDM.</p> <p>Pada tahun 2022 berinovasi memudahkan pemakai untuk mendapatkan informasi peraturan-peraturan, surat menyurat dan monitoring pelaksanaan proses kenaikan pangkat Tahun 2023 fitur-fitur ditambahkan untuk data jaga elektronik dan memudahkan memverifikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan seluruh ASN.</p> <p>Aplikasi simfoni memberikan solusi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel untuk seluruh ASN.</p>
---	--------	---------	-------	-------	---	--

Pada Tahun 2023 jumlah pengaduan yang masuk pada aplikasi LAPOR berjumlah 153 pengaduan, dengan ketepatan waktu verifikasi kurang dari 3 hari berjumlah 46 laporan dan verifikasi lebih dari 3 hari berjumlah 2 laporan. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui akun masing-masing SKPD.

Gambar 3.1.3

Statistik Aplikasi LAPOR Kab.Tanah Laut Tahun 2023





Langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan SKPD terkait dalam rangka peningkatan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dalam mendukung SKPD agar dapat menindaklanjuti seluruh permohonan pelayanan publik diantaranya:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan-layanan apa saja dan oleh SKPD mana saja yang memberikan pelayanan berbasis elektronik.
- 2) Pengembangan *E-Government* melalui Penempatan Aplikasi Pelayanan Perizinan di Server Kominfo dan Pusat Data Nasional;
- 3) Tersedianya website seluruh SKPD dan aplikasi aplikasi penunjang pelayanan
- 4) Pengintegrasian seluruh website dan aplikasi di dalam portal resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diakses <https://portal.tanahlautkab.go.id>.
- 5) Pembuatan hosting dan virtual server yang bertujuan untuk kelancaran akses website dan aplikasi SKPD.
- 6) Sinkronisasi Data Kependudukan dengan data ketenagakerjaan dan untuk Pelayanan Puskesmas
- 7) Sinkronisasi Pemanfaatan data kependudukan dengan Aplikasi Perizinan Terpadu Secara Online.
- 8) Melaksanakan analisa jaringan intra pemerintah;



Dengan adanya upaya-upaya di atas maka, seluruh permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang diajukan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh SKPD. Namun masih terdapat Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih belum terbiasanya masyarakat untuk menggunakan layanan secara elektronik terutama masyarakat yang masih minim terhadap teknologi informasi.
- 2) Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang inovasi-inovasi pelayanan yang tersedia.
- 3) Belum terintergrasi sepenuhnya seluruh Aplikasi layanan namun seluruh aplikasi secara terpusat sudah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4) Masih susahnya jaringan internet di beberapa Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Bajuin.

Rencana Aksi/Langkah-kangkah ke depan dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi:

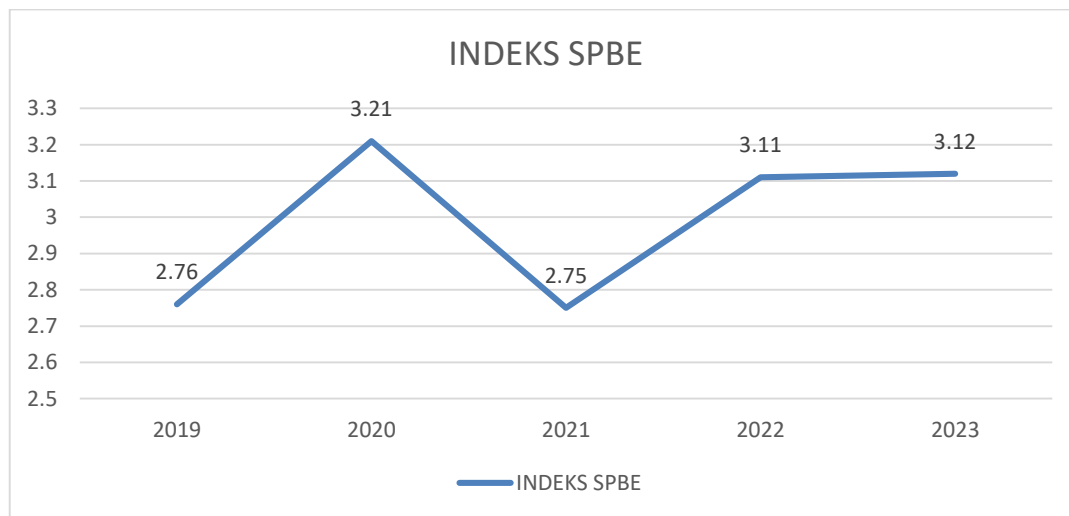
- 1) Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak, radio dan lain-lain.
- 2) Penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik;
- 3) Penguatan ruang Server Room dan Network Operation Center (NOC) Kabupaten dan menjalin Kerjasama dengan Pusat Data Nasional;
- 4) Pembangunan jaringan antar SKPD yang masih belum terhubung dengan jaringan intra pemerintah kabupaten;
- 5) Penyusunan revisi Peraturan Bupati tentang SPBE dan aplikasi daerah;
- 6) Pengembangan aplikasi daerah yang terintegrasi;
- 7) Pemanfaatan infrastruktur *E-Government* untuk penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektroink;
- 8) Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang teknologi informasi; dan
- 9) Penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi.
- 10) mengadakan pemeliharaan dan penambahan kecepatan kualitas jaringan internet

Sebagai bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Tanah



Laut telah memperoleh Indeks SPBE pada Tahun 2023 yaitu 3,12 dengan predikat Baik. Nilai ini peningkatan dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2022 yaitu 3,11 dengan predikat Baik. Berikut disajikan Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Grafik 3.1.8  
Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 18 ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp 10,085,029,486.00 dan terealisasi Rp. 9,324,970,279.00 atau sebesar 92,46%.

Tabel 3.1.38  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3,525,009,634.00	<b>3,158,421,719.00</b>
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	17,685,000.00	<b>16,185,000.00</b>
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32,276,510.00	<b>30,020,000.00</b>
4	Program Aplikasi Informatika	6,510,058,342.00	<b>6,120,343,560.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>10,085,029,486.00</b>	<b>9,324,970,279.00</b>





Tabel 3.1.39  
Efisiensi Sasaran Strategis 5

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100 %	92,46 %	7,54 %



**MISI II**

**Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 2 tujuan untuk misi II yaitu :

1. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik.
2. Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu jumlah penghargaan inovasi publik dan jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian.

Tabel 3.2.1  
Target indikator tujuan Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Penghargaan	1 Penghargaan
2	Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Unit Usaha	25 Unit Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya inovasi pelayanan publik
2. Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6**  
**Meningkatnya inovasi pelayanan publik**

Meningkatnya inovasi pelayanan publik diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.2.2  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	inovasi	2	6	300%	2	10	500%	2	8	400%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>400%</b>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Tujuan dari Inovasi Pelayanan Publik, yaitu:

- 1) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
- 2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Realisasi indikator jumlah inovasi yang didaftarkan di tahun 2023 pada KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada 8 (delapan) Inovasi, yaitu sebagai berikut :



Tabel 3.2.4  
Daftar Inovasi yang didaftarkan KIPP Tahun 2023

No	SKPD	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Detak (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	2019	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.
2	Dinas Kesehatan	PSC (Public Safety Center) 119 Tanah Laut	2019	Pelayanan ini mempermudah, mempercepat dan tidak menunda pelayanan kepada masyarakat, diantaranya strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Jika dalam kasus gawat darurat sehingga tidak biasa datang ke Puskesmas, maka petugas medis datang kerumah. Yang dimana, untuk program ini masih harus dilengkapi dengan aplikasi dan regulasi agar masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas medis melalui smartphone datang ke rumah atau pelayanan kesehatan On Call.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Silakas (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)	2020	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.
4	Bappeda	Integrasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemkab Tanah Laut	2020	Inovasi Integrasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah bentuk inovasi dalam rangka mewujudkan perencanaan yang mengutamakan prioritas dan berdampak secara langsung ke masyarakat sesuai dengan program berorientasi fungsi dan manfaat karena itu perlu suatu orientasi skema perencanaan yang terstruktur untuk menjadi acuan dan arah bagi perencana di lingkungan Pemkab Tanah Laut.
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Simfoni (Sistem Informasi Layanan Online)	2020	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI) adalah inovasi pelayanan administrasi kepegawaian secara online dalam mengurus usul dokumen kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat, Pensiun, Cuti, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pencantuman Kelar, Pembuatan Karis/Karsu, Satya Lencana dan dokumen kepegawaian lainnya.
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sidika (Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian)	2020	Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian (SIDIKA) merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola, menyimpan dan mengakses dokumen secara elektronik secara cepat dan tepat.
7	Sekretariat Daerah	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (Sosialita)	2020	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (Sosialita) adalah e-marketplace produk inovasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui UKPBJ Kabupaten Tanah Laut dan masuk kategori toko daring yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Aplikasi Sosialita ini bertujuan memudahkan dan memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa lainnya sampai dengan lima puluh juta rupiah yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi Sosialita untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel



				serta mendorong dan mengoptimalkan peran serta UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa lingkup Tanah Laut.
8	Dinas P2KBP3A	Layanan Konseling Kepada Anak Bawah Umur Ingin Nikah (LAYAK KAWIN)	2021	Layanan konseling ini bertujuan untuk dapat mencegah atau mengurangi minat perkawinan dini. Selain itu konseling yang diberikan dapat membuka serta memberikan wawasan bagi calon pasangan perkawinan dini agar dapat berfikir kembali atau memantapkan mental/pemikiran sebelum kawin. Sehingga nantinya jika calon pasangan tetap memutuskan untuk kawin, dapat mengurangi resiko perceraian.

Dari delapan inovasi yang didaftarkan tersebut ada enam Inovasi yang lolos sampai pada tahap seleksi administrasi yaitu : SIMFONI, SIDIKA, DETAK, SILAKAS, SOSIALITA, dan PSC119.

Pada tahun yang sama juga Kabupaten Tanah Laut mengadakan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2023 yaitu Tanah Laut Innovation Awards yang diikuti oleh beberapa SKPD, yaitu:

Tabel 3.2.5  
Daftar Inovasi yang didaftarkan Tanah Laut Innovation Awards 2023

No	SKPD	Nama Inovasi
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Dandaman Tarus
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIID)
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian (SIDIKA)
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SILAPOR - ORMAS
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Pengumpulan Lengkap Data Capaian Kinerja (Tempeleng Tapaija)
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	YANDU SANAK KAWAN



9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Simpel (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelangi (Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi)
11	Dinas Perhubungan	LAKATAN (Layanan Angkutan Tanah Laut)
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	PROGRAM KIJANG MAS TALA ( (Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah eks Transmigrasi di Wilayah Kabupaten Tanah Laut)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	WA in de OCA
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Layanan dan Program Siaran melalui Live dan Streaming pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kemudahan Penyaluran BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Melalui Sub Penyalur
16	Dinas Pariwisata	Film TALA "When Love Calls From The Bottom Of Borneo"
17	Dinas Pariwisata	Program Gesit Wisata (Gerakan Siswa Cinta Wisata Tanah Laut)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	DASAR TERANG (DATANGI SASARAN TERA DAN TERA ULANG)
19	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM)
20	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Smart Office Smart Service (SOSS)
21	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	LAYAK KAWIN (Layanan Konseling Kepada Anak Bawah Umur Ingin Nikah)
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EFEKTIVITAS LAYANAN BERBANTUAN ONLINE SINGEL SUBMISSION DENGAN KUNJUNGAN (ES DEGAN)
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(SiKoPI aDa) SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN DAN PELAPORAN INSAN OLAHRAGA DAERAH
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIGABSUS ( SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS )



25	Dinas Kesehatan	GERMAS (GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT)
26	Dinas Kesehatan	SIP OK (SURVEI INDIKATOR PHBS ONLINE OLEH KADER)
27	Dinas Kesehatan	SIMISTIK (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LOGISTIK)
28	Satpol PP dan Damkar	Sekretariat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
29	Kecamatan Batu Ampar	Silpat
30	Kecamatan Kintap	SUNATAN MASAL GRATIS
31	Kecamatan Takisung	Si-ALADIN (Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi)
32	Kecamatan Panyipatan	KILAT (Kendaraan transportasi Layanan cepaT)
33	Kecamatan Bumi Makmur	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan melalui Sistem Informasi Cepat terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK)
34	RSUD H. Boejasin	BISA (Boejasin Information System and Application)
35	PDAM TANAH LAUT	QGIS PTAM BERKAH BENUA (PERSERODA)
36	PDAM TANAH LAUT	ADUAN ONLINE PTAM BERKAH BANUA (PERSERODA)

Dari 36 inovasi yang ikut serta lalu diseleksi menjadi 10 besar, adapun yang lolos dan masuk dalam 10 besar adalah inovasi: SIMFONI, SIMPEL, SIKOPI ADA, SOSS, SIGABSUS, SALAM, PELANGI, SIP OK, SI CANTIK, dan BISA.

Berdasarkan hasil seleksi lebih lanjut diputuskan 3 inovasi terbaik, yaitu: Juara pertama dari RSUD H. Boejasin (BISA), juara kedua Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (SOSS), dan juara ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SIGABSUS).

Untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut meraih juara 2 dalam lomba Kalsel Innovation Award, dengan nama inovasi KIJANG MAS TALA dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut meraih indeks 55,15 dengan predikat Inovatif.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen akan terus meningkatkan inovasi-inovasi di segala sendi kehidupan terutama inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Timbulnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Mempersingkat panjangnya birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Setiap SKPD membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut atau Keputusan Bupati Tanah Laut.

Dengan adanya inovasi SKPD, hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan setaip tahun, dimana bagi SKPD yang telah memiliki inovasi maka akan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah itu sendiri dan akan mendapatkan *reward* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.
- 3) Menginventarisir inovasi-inovasi yang ada di SKPD, inovasi pada SKPD mana saja yang sudah memasuki 2 tahun pengimplementasiannya untuk diikutsertakan pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berikut adalah perbandingan jumlah inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2020-2023.



Tabel 3.2.6  
Perbandingan Jumlah Inovasi dari Tahun 2020-2023

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Inovasi SKPD	13	40	17	45

*\*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dari Tahun 2020 s.d 2023, yaitu dengan total jumlah inovasi 115 inovasi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Tanah Laut yang meminta kepada SKPD dan jajarannya agar terus dapat menciptakan inovasi-inovasi pada SKPD yang nantinya mempermudah dalam pelayanan publik.

Inovasi merupakan salah satu indikator sasaran dalam RPJMD dan penghargaan yang diterima adalah indikator tujuannya. Pada akhir tahun 2023, berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut telah meraih predikat Sangat Baik (A-) dengan indeks 4.10. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori A (opini kualitas tertinggi) dengan nilai kepatuhan 90,61 zona hijau.



Gambar 3.2.1

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi SKPD Tahun 2023



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 3 ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan di dukung oleh 1 Program dengan Pagu Rp 1,012,604,982,458.00 dan terealisasi Rp. 856,867,060,910.00 atau sebesar 84,62%.

Tabel 3.2.7  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1,012,604,982,458.00	856,867,060,910.00
Jumlah		1,012,604,982,458.00	856,867,060,910.00

Tabel 3.2.8  
Efisiensi Sasaran Strategis 6

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
400 %	84,62 %	315,38 %



## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 7

### Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian

Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.9  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah industry kreatif yang tumbuh dan berkembang	unit	15	103	686,67%	20	134	670%	25	188	752%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											752%

Industri Kreatif adalah Kumpulan Aktifitas Ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri Kreatif juga dikenal dengan nama Ekonomi Kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan, Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. ekonomi kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, kuliner, televisi dan radio serta permainan video.

Pada tahun 2021 target jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 15 unit usaha, terealisasi 103 unit usaha. Sedangkan pada tahun 2022 target jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 20 unit usaha, realisasinya ada 134 unit usaha dan pada tahun 2023 target jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 25 unit usaha, realisasinya ada 188 unit usaha. Berikut disajikan jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang pada Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022.



Tabel 3.2.10  
Jumlah IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri  
Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan
2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan
3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari
7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong
8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
9	IKM Karya Mulia Creative Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia Creative Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia Creative Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari



13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari	13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari	13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari
14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung
16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari
17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung
19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang
21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari
24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
25	IKM LuwesCollection	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	25	IKM LuwesCollection	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	25	IKM LuwesCollection	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap



28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari	30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari	30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari
31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap	36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap	36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap
37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin
38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong	39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong	39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong
40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin



43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari	43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari	43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari
44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong	44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong	44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong
45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari	45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari	45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari
46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin	47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin	47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin
48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan	48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan	48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan
49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin	50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin	50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin
51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
56	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari	56	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari	56	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari



57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang	57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang	57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang
58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap	58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap	58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap
59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong	59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong	59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong
60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati	63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati	63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati
64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur	64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur	64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur
65	IKM AI Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang	65	IKM AI Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang	65	IKM AI Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang
66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur	66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur	66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur
67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati	69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati	69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati
70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung	70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung	70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung
71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung	71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung	71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung





72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung	73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung	73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung
74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung	74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung	74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung
75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari	75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari	75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari
76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung	76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung	76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung
77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung	78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung	78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung
79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec, Pelaihari	79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec, Pelaihari	79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec, Pelaihari
80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsung, Kec. Takisung	80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsung, Kec. Takisung	80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsung, Kec. Takisung
81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar	81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar	81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar
82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin	83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin	83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin
84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari	85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari	85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari
86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari	86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari	86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari



87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
91	IKM Sahabat Madu	Ds. Sumber Makmur, Kec. Takisung	91	IKM Madu Hasan Al Zahra	Ds. Ujung Batu, Kec. Pelaihari	91	IKM Madu Hasan Al Zahra	Ds. Ujung Batu, Kec. Pelaihari
92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
93	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari	93	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari	93	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari
94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
97	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati	97	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati	97	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati
98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan	98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan	98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan
99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung	99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung	99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung
100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari	101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari	101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari



102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung	102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung	102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung
103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			104	Kelompok Sumber Rezeki Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	104	Kelompok Sumber Rezeki Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			105	Kelompok Kenanga Terasi	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	105	Kelompok Kenanga Terasi	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			106	Kelompok Berkah Mangrove Sirup dan Selai	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	106	Kelompok Berkah Mangrove Sirup dan Selai	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			107	Kelompok Kayuh Baimbai Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	107	Kelompok Kayuh Baimbai Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			108	Kelompok Nelayan Membangun Ikan Asin	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	108	Kelompok Nelayan Membangun Ikan Asin	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			109	IKM Mama Aisyah Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	109	IKM Mama Aisyah Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			110	IKM Mama Zahro Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	110	IKM Mama Zahro Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			111	IKM Berkat Motekar	Ds. Pemuda, Kec. Pelaihari	111	IKM Berkat Motekar	Ds. Pemuda, Kec. Pelaihari
			112	IKM Batu Balai	Ds. Batilai, Kec. Takisung	112	IKM Batu Balai	Ds. Batilai, Kec. Takisung
			113	IKM Kecap Kelulut	Ds. Gunung Melati, Kec. Batu Ampar	113	IKM Kecap Kelulut	Ds. Gunung Melati, Kec. Batu Ampar
			114	IKM Minuman Herbal dan VCO Bu Kokom	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin	114	IKM Minuman Herbal dan VCO Bu Kokom	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin
			115	IKM Kerupuk Haruan Acil Rapidah	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati	115	IKM Kerupuk Haruan Acil Rapidah	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati



			116	IKM Kerupuk Haruan Acil Rusmanina	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati	116	IKM Kerupuk Haruan Acil Rusmanina	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati
			117	IKM Perbengkelan Maju Bersama	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	117	IKM Perbengkelan Maju Bersama	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar
			118	IKM Kerupuk Udang Harapan Bersama	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	118	IKM Kerupuk Udang Harapan Bersama	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			119	IKM Kerupuk Parimata	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	119	IKM Kerupuk Parimata	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			120	IKM Kerupuk Seafood Lestari	Perumahan Putih RT.015/RW.001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	120	IKM Kerupuk Seafood Lestari	Perumahan Putih RT.015/RW.001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
			121	IKM Alika Cake	Ds. Kintap Kecil, Kec. Kintap	121	IKM Alika Cake	Ds. Kintap Kecil, Kec. Kintap
			122	Bumdes Mandiri Sejahtera (Lahang)	Ds. Guntung Besar, Kec. Pelaihari	122	Bumdes Mandiri Sejahtera (Lahang)	Ds. Guntung Besar, Kec. Pelaihari
			123	IKM Kerupuk Pantai Indah	Jl. Pahlawan RT.007/RW.002, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	123	IKM Kerupuk Pantai Indah	Jl. Pahlawan RT.007/RW.002, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
			124	IKM Kerupuk Telur Asin	Jl. A. Yani KM. 28 RT.007 RW.002 Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati	124	IKM Kerupuk Telur Asin	Jl. A. Yani KM. 28 RT.007 RW.002 Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati
			125	IKM Kerupuk Budi Bersama	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	125	IKM Kerupuk Budi Bersama	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			126	IKM Keripik Jaya Makmur	Gunung Melati RT.006/RW.002	126	IKM Keripik Jaya Makmur	Gunung Melati RT.006/RW.002
			127	IKM Madu Kelulut Sakatalu	Jl. Goa Marmer RT.005/RW.002, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	127	IKM Madu Kelulut Sakatalu	Jl. Goa Marmer RT.005/RW.002, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin
			128	IKM Kerupuk Cinta Rasa	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	128	IKM Kerupuk Cinta Rasa	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan



			129	IKM Kerupuk Mercusuar	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	129	IKM Kerupuk Mercusuar	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			130	IKM Kerupuk Pulau Datu	Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	130	IKM Kerupuk Pulau Datu	Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			131	IKM Kerupuk Karnita	Jl. Pariwisata RT.021/RW.011, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	131	IKM Kerupuk Karnita	Jl. Pariwisata RT.021/RW.011, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
			132	IKM Kerupuk Mama Zidan	Jl. Muhara RT.002/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	132	IKM Kerupuk Mama Zidan	Jl. Muhara RT.002/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			133	IKM Radjamadu	Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	133	IKM Radjamadu	Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
			134	IKM Madu Gunung Katunun	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari	134	IKM Madu Gunung Katunun	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari
						135	IKM Q'Chips	Jl. K.H Dewantoro RT.007/RW.002, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
						136	IKM Morievera	Jl. Kebun Kopi RT.011/004 Desa Telaga Langsung, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut
						137	IKM Pawon Mlaku Si Suki	Jl. Jaya No.65 RT.004/RW.002, Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut
						138	IKM Kin's Kitchen	KOMPLEK SHAKELA PERMATA BLOK 6 NO 68, RT/RW -, SARANG HALANG, PELAIHARI
						139	IKM Okmalasari Bakery	JL. LUMBUS, GUNUNG MAKMUR, RT/RW -, GUNUNG MAKMUR, TAKISUNG
						140	IKM Raos Pisan	JL. A. TILAM, RT/RW -, PABAHANAN, PELAIHARI



						141	KWT. Dewi Sri	JL.UPT PANDANSARI, RT/RW - , PANDAN SARI, KINTAP
						142	IKM UR. Sukanti	ROMBONGAN 4 RT.011 RW.005, RT/RW -, SUMBER MAKMUR, TAKISUNG
						143	IKM Berkah	DESA TANJUNG PASAR RT.006 RW.004, RT/RW -, TANJUNG, BAJUIN
						144	IKM Barokah	MARTADAH RT.004 RW.002, RT/RW -, MARTADAH, TAMBANG ULANG
						145	IKM Mama Kiki	DS. TAMBAK KARYA RT.004 RW.002, RT/RW -, TAMBAK KARYA, KURAU
						146	IKM Mama Hendra	DS. TAMBAK KARYA RT.005 RW.002, RT/RW -, TAMBAK KARYA, KURAU
						147	IKM Bang Surya	JL. KH. DEWANTARA, RT/RW - , ANGS AU, PELAIHARI
						148	IKM Hafizah	GUNTUNG BESAR RT.002, RT/RW -, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI
						149	IKM Acil A'ah	GANG BAHAGIA PAGATAN BESAR RT.003/RW.001 DESA PAGATAN BESAR PAGATAN BESAR TAKISUNG
						150	IKM Produk Ilmu Tala	JL. SOEPIRMAN, RT/RW -, KUNYIT, BAJUIN
						151	IKM Mama Candra	JL TAQWA RT10 RW4 PABAHANAN, RT/RW -, PABAHANAN, PELAIHARI
						152	IKM H5DU	JL. AMBAWANG RT 3 RW 2 , RT/RW -, SARANG HALANG, PELAIHARI
						153	IKM Kamil	M. ASAM-ASAM, RT/RW -, MUARA ASAM-ASAM, JORONG



						154	IKM 3 Saudara	JL. A. YANI, RT/RW -, KINTAP KECIL, KINTAP
						155	IKM R Food	JL.MAJAPAHIT RT.005/002, RT/RW -, BUMI JAYA, PELAIHARI
						156	IKM Barokah	JL. MAJAPAHIT RT.005 RW.002, RT/RW -, BUMI JAYA, PELAIHARI
						157	IKM Misbah Rizki Nurul	JL. GN. TAMBUNI RT.007 RW.002, RT/RW -, RANGGANG DALAM, TAKISUNG
						158	Bumdes Mandiri Sejahtera	JALAN WAHYU HARTOPO RT 1 DESA GUNTUNG BESAR, RT/RW 1/1, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI
						159	IKM Dabfarm (Dua Anak Bunda)	JALAN GOHA RT.004 RW.002 PASIR PUTIH KINTAP
						160	Kelompok UPPKA Bajuin	JL. SIDO RUKUN RT.005 RW.003, BAJUIN
						161	Kelompok Melati	JL. RAYA TAKISUNG, RT/RW -, TAKISUNG, TAKISUNG
						162	IKM Telur Asin Cap Enaak	Desa Panjaratan Pelaihari
						163	IKM Dapur Berkah	Desa Martadah Baru RT.007/RW.002
						164	IKM Syabit Taajir	JL. A. YANI RT/RW,- DESA PASIR PUTIH, KINTAP
						165	IKM Tiga Serangkai	JL. A. YANI RT.5 DESA KINTAP KECIL KEC. KINTAP
						166	Kelompok Tanjung Dewa Anugerah	JL. MUHARA RT.03/RW.01 DESA TANJUNG DEWA, KEC. PANYIPATAN
						167	Kelompok Batakan Berkah	JL. PARIWISATA RT.01/RW.05, DESA BATAKAN, KEC. PANYIPATAN



						168	IKM Keripik Alifa	Desa Sungai Riam RT.01/RW.01, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
						169	IKM Risma Amplang	JL. RAYA TAKISUNG, RT/RW -, TAKISUNG, TAKISUNG
						170	IKM Pinus Permai	Jl. Pariwisata RT.016/RW.004, Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut,
						171	IKM Oemah Olahan Mbak Dyah	Jl. Kolonel Soepirman RT.07/RW.02, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
						172	IKM Rumaisyah Bakery & Cake	Jalan Pasar Hewan RT.07, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
						173	IKM Rien's Kitchen	Jl. Junjung Buih, Gg. Berkah RT.17, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
						174	IKM Risol Bunda MTS	Jl. KH. Dewantara Gg. Damai RT.07, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
						175	IKM Pentol Sempol Aqila	Jl. Purnawirawan AMD. Manunggal RT.03/RW.01, Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
						176	IKM Kerupuk Udang Acil Jasimah	Jl. Saripul Desa Kurau RT.06/RW.03, Kab. Tanah Laut,
						177	IKM Dapur Mas Muflih	Jl. Rancah No.2 RT.06/03 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
						178	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang
						179	IKM Arthadeva Gallery	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang
						180	PT. Berkah Amanah Décor	Jl. Ki Hajar Dewantara No.28, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari





						181	IKM Olahan Jamur Poniti	Desa Sungai Jelai RT.03 RW.01, Kec. Tambang Ulang
						182	IKM Olahan Jamur Endar Ningsih	Desa Sungai Jelai RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang
						183	IKM Kancil Sasirangan	Desa Kintap Kecil RT.05 RW.02, Kec. Kintap
						184	IKM Kerajinan Kayu Ulin UDARA (Ulin Dandaman Riam Adungan)	Desa Riam Adungan RT.04 RW.02, Kec. Kintap
						185	Fanesya Sasirangan	Desa Banyu Irang, Gg. Rakat Rt. 07 Rw.03 Kec.Bati-Bati
						186	Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang
						187	Hayaart	Jl A Yani Desa Tampang Dusun 1 RT 1 No 73 Kec. Pelaihari
						188	D'Fesyen	Perumahan Aura Megah Tegency no 51, Jln Anggrek desa Panggung Kec. Pelaihari



Pertumbuhan IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri ini terjadi dikarenakan adanya pelatihan, pembinaan intensif dan fasilitasi pendampingan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab Tanah Laut, APBD Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Agama maupun dari Pokir DPRD Kab. Tanah Laut. Oleh karenanya, sinergi kerjasama pembinaan IKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan demi eksistensi keberadaan dan keberlangsungan usaha IKM.

Selain dari data pelatihan, data pertumbuhan jumlah industri yang mengembangkan inovasi dan kreativitas juga didapatkan dari Kegiatan Pendataan IKM se Kabupaten tanah Laut yang dilakukan rutin setiap tahun. Adapun pada tahun 2023 terdata sebanyak 5.523 IKM dengan sebaran data sebagai berikut :

Rekap data IKM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2023			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL Data Aktif
1	Bajuin	Bajuin	18	8	3	23
		Galam	29	0	1	28
		Ketapang	29	0	0	29
		Kunyit	34	7	0	41
		Pemalongan	14	0	0	14
		Sungai Bakar	50	5	1	54
		Tanjung	13	37	6	44
		Tebing Siring	17	34	4	47
		Tirta Jaya	28	0	0	28
2	Bati-Bati	Banyu Irang	56	0	3	53
		Bati-Bati	43	0	0	43
		Bentok Darat	60	0	3	57
		Bentok Kampung	25	0	0	25
		Benua Raya	15	31	1	45
		Kait-Kait	27	0	1	26
		Kait-Kait Baru	43	0	5	38
		Liang Anggang	75	0	3	72
		Nusa Indah	33	0	0	33
		Padang	43	36	7	72



		Pandahan	158	0	19	139
		Sambangan	17	21	3	35
		Ujung	65	0	17	48
		Ujung Baru	36	10	4	42
3	Batu Ampar	Ambawang	9	23	0	32
		Batu Ampar	46	0	9	37
		Bluru	20	0	0	20
		Damar Lima	15	0	2	13
		Damit	48	0	4	44
		Damit Hulu	36	0	6	30
		Durian Bungkok	52	0	0	52
		Gunung Mas	39	0	3	36
		Gunung Melati	19	26	6	39
		Jilatan	16	0	0	16
		Jilatan Alur	11	19	1	29
		Pantai Linuh	10	0	0	10
		Tajau Mulya	27	0	7	20
		Tajau Pecah	80	0	11	69
4	Bumi Makmur	Bumi Harapan	27	6	0	33
		Handil Babirik	62	5	3	64
		Handil Birayang Atas	13	17	1	29
		Handil Birayang Bawah	3	2	0	5
		Handil Gayam	73	5	0	78
		Handil Labuan Amas	10	0	0	10
		Handil Maluka	20	0	0	20
		Handil Suruk	31	0	0	31
		Kurau Utara	59	0	2	57
		Pantai Harapan	15	0	0	15
Sungai Rasau	15	3	1	17		
5	Jorong	Alur	20	36	0	56
		Asam Asam	21	0	3	18
		Asam Jaya	61	0	6	55
		Asri Mulya	20	0	4	16
		Batalang	4	7	0	11
		Jorong	41	0	14	27
		Karang Rejo	30	0	2	28
		Muara Asam Asam	18	27	3	42
		Sabuhur	80	16	2	94
		Simpang Empat Sungai Baru	68	0	4	64
Swarangan	20	5	0	25		
6	Kintap	Bukit Mulia	16	0	0	16



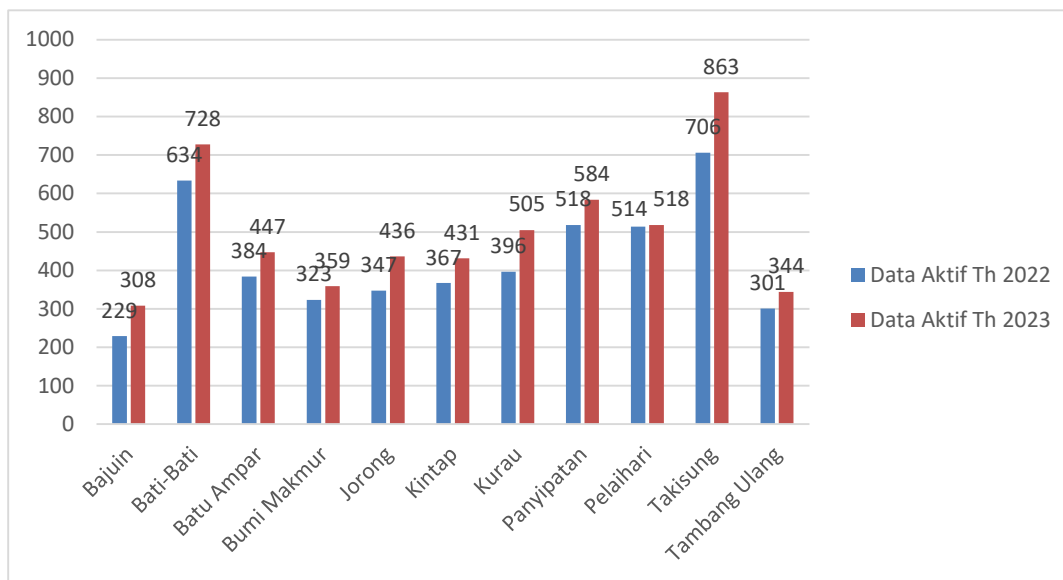
		Kebun Raya	38	0	2	36
		Kintap	28	16	5	39
		Kintap Kecil	42	0	2	40
		Kintapura	15	0	0	15
		Mekar Sari	21	32	3	50
		Muara Kintap	25	0	0	25
		Pandan Sari	43	0	0	43
		Pasir Putih	15	26	2	39
		Riam Adungan	4	0	0	4
		Salaman	5	0	0	5
		Sebamban Baru	21	3	3	21
		Sumber Jaya	47	0	1	46
		Sungai Cuka	53	0	1	52
7	Kurau	Bawah Layung	11	60	0	71
		Handil Negara	89	0	8	81
		Kali Besar	35	29	3	61
		Kurau	31	0	0	31
		Maluka Baulin	63	0	2	61
		Padang Luas	50	0	0	50
		Raden	11	13	2	22
		Sarikandi	35	0	2	33
		Sungai Bakau	12	12	0	24
		Tambak Karya	25	0	0	25
Tambak Sarinah	47	0	1	46		
8	Panyipatan	Batakan	178	17	5	190
		Batu Mulya	33	17	6	44
		Batu Tungku	41	0	6	35
		Bumi Asih	19	28	4	43
		Kandangan Baru	51	0	15	36
		Kandangan Lama	43	0	2	41
		Kuringkit	66	7	8	65
		Panyipatan	64	0	1	63
		Suka Ramah	42	0	6	36
Tanjung Dewa	31	0	0	31		
9	Pelaihari	Ambungan	29	0	0	29
		Atu-Atu	11	0	0	11
		Bumi Jaya	46	1	1	46
		Guntung Besar	13	0	0	13
		Kampung Baru	23	0	0	23
		Kelurahan Angsau	14	0	0	14
		Kelurahan Karang Taruna	48	4	0	52



		Kelurahan Pabahanan	39	0	1	38
		Kelurahan Pelaihari	45	0	0	45
		Kelurahan Sarang Halang	19	0	0	19
		Panggung	12	0	0	12
		Panggung Baru	23	0	3	20
		Panjaratan	17	0	0	17
		Pemuda	36	0	0	36
		Sumber Mulia	25	0	0	25
		Sungai Riam	38	0	0	38
		Tampang	18	0	1	17
		Telaga	27	0	0	27
		Tungkaran	7	0	0	7
		Ujung Batu	29	0	0	29
10	Takisung	Batilai	60	0	3	57
		Benua Lawas	59	6	13	52
		Benua Tengah	66	0	5	61
		Gunung Makmur	54	69	0	123
		Kuala Tambangan	38	0	0	38
		Pagatan Besar	69	0	0	69
		Ranggang	64	0	6	58
		Ranggang Dalam	18	0	0	18
		Sumber Makmur	88	0	4	84
		Tabanio	32	46	0	78
		Takisung	148	40	2	186
Telaga Langsat	35	8	4	39		
11	Tambang Ulang	Bingkulu	14	10	0	24
		Gunung Raja	66	0	5	61
		Kayu Abang	13	17	1	29
		Martadah	22	0	0	22
		Martadah Baru	24	0	0	24
		Pulau Sari	64	18	11	71
		Sungai Jelai	30	0	2	28
		Sungai Pinang	27	0	0	27
		Tambang Ulang	58	2	2	58
<b>TOTAL</b>			<b>4985</b>	<b>867</b>	<b>329</b>	<b>5523</b>



Jumlah IKM Tahun 2023 di Kab. Tanah Laut



Berdasarkan pendataan tahun 2023 terjadi peningkatan total jumlah IKM aktif dari 4.719 industri pada tahun 2022 menjadi 5.523 industri ditahun 2023 dan terjadi pertumbuhan jumlah industri sebesar 14,56 %. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi Hak Merek IKM, dengan data sbb :

NO	NAMA IKM	Merek	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KET
1	Q'Chips	Q'Chips	Nursullehah	Jl. K.H Dewantoro RT.007/RW.002, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Dana Mandiri
2	UP2K Desa Telaga Langsat	Morievera	Nurwulan	Jl. Kebun Kopi RT.011/004 Desa Telaga Langsat, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut	Dana Mandiri
3	Pawon Mlaku Si Suki	Pawon Mlaku Si Suki	Hartoyo	Jl. Jaya No.65 RT.004/RW.002, Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut	Dana Mandiri

Pada tahun 2023, total 51 IKM yang kita fasilitasi, dengan rincian sebanyak 45 IKM Pangan yang difasilitasi Sistem Jaminan Halal melalui Self Delcare dan sebanyak 6 IKM difasilitasi melalui Dana APBD Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang terinci pada tabel berikut :



NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
1	Kin's Kitchen	Kin's Kitchen	SRI WULANDARI	KOMPLEK SHAKELA PERMATA BLOK 6 NO 68, RT/RW -, SARANG HALANG, PELAIHARI	Sambal baby cumi
2	Okmalasari	Okmalasari	AMELIA RIZKI OKMALA SARI	JL. LUMBUS, GUNUNG MAKMUR, RT/RW -, GUNUNG MAKMUR, TAKISUNG	Roti manis
3	Raos Pisan	Raos Pisan	AMINAH	JL. A. TILAM, RT/RW -, PABAHANAN, PELAIHARI	Stik bawang, kembang goyang, keripik pisang
4	KWT. Dewi Sri	KWT. Dewi Sri	RATINI	JL.UPT PANDANSARI, RT/RW -, PANDAN SARI, KINTAP	Serbuk rimpang
5	UR. Sukanti	UR. Sukanti	ENDANG SUKANTI	ROMBONGAN 4 RT.011 RW.005, RT/RW -, SUMBER MAKMUR, TAKISUNG	Keripik talas, pisang, emping
6	Berkah	Berkah	RUSIYATI	DESA TANJUNG PASAR RT.006 RW.004, RT/RW -, TANJUNG, BAJUIN	Serbuk rimpang
7	Ratu Keripik	Ratu Keripik	NUR SULLEHAH	JL. K.H. DEWANTORO RT.007 RW.002, RT/RW -, ANGSAU, PELAIHARI	Aneka Keripik
8	Barokah	Barokah	AMJIMAH	MARTADAH RT.004 RW.002, RT/RW -, MARTADAH, TAMBANG ULANG	Uyah Lala
9	Barokah	Barokah	AMJIMAH	MARTADAH RT.004 RW.002, RT/RW -, MARTADAH, TAMBANG ULANG	Keripik singkong
10	Mama Kiki	Mama Kiki	ARNIAH	DS. TAMBAK KARYA RT.004 RW.002, RT/RW -, TAMBAK KARYA, KURAU	Makaroni
11	Mama Hendra	Mama Hendra	DAHWATI	DS. TAMBAK KARYA RT.005 RW.002, RT/RW -, TAMBAK KARYA, KURAU	Rengginang, Rempeyek
12	Bang Surya	Bang Surya	SURYONO	JL. KH. DEWANTARA, RT/RW -, ANGSAU, PELAIHARI	Bumbu rujak



13	Hafizah	Hafizah	RIFATUL MAHMUDAH	GUNTUNG BESAR RT.002, RT/RW -, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI	Lahang
14	Hafizah	Hafizah	RIFATUL MAHMUDAH	GUNTUNG BESAR RT.002, RT/RW -, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI	Gula Merah Padat & Cair
15	Hafizah	Hafizah	RIFATUL MAHMUDAH	GUNTUNG BESAR RT.002, RT/RW -, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI	Cuka Aren
16	Acil A'ah	Acil A'ah	AHDAH	GANG BAHAGIA PAGATAN BESAR RT.003/RW.001 DESA PAGATAN BESAR PAGATAN BESAR TAKISUNG	Kerupuk ikan dan udang
17	Produk Ilmu Tala	Produk Ilmu Tala	SRI NORMA HADIANTI	JL. SOEPIRMAN, RT/RW -, KUNYIT, BAJUIN	Kelapa Jelly
18	Mama Candra	Mama Candra	TRI ENDANG SUPIASIH	JL TAQWA RT10 RW4 PABAHANAN, RT/RW -, PABAHANAN, PELAIHARI	Aneka Keripik
19	H5DU	H5DU	RAHMAD HIDAYAT	JL. AMBAWANG RT 3 RW 2 , RT/RW -, SARANG HALANG, PELAIHARI	Madu Kelulut
20	Kamil	Kamil	ITA PURNAMASARI	M. ASAM-ASAM, RT/RW -, MUARA ASAM-ASAM, JORONG	Kerupuk ikan dan udang
21	3 Saudara	3 Saudara	RAMLAH	JL. A. YANI, RT/RW -, KINTAP KECIL, KINTAP	Telur Asin
22	Nana	Nana	RAMLAH	JL. A. YANI, RT/RW -, KINTAP KECIL, KINTAP	Kue Kacang
23	R Food	R Food	RIZQI ANSORI	JL.MAJAPAHIT RT.005/002, RT/RW -, BUMI JAYA, PELAIHARI	Cilok
24	Barokah	Barokah	ROHAYAH	JL. MAJAPAHIT RT.005 RW.002, RT/RW -, BUMI JAYA, PELAIHARI	Rempeyek, Telur Gabus
25	Misbah Rizki Nurul	Misbah Rizki Nurul	MISBAH	JL. GN. TAMBUNI RT.007 RW.002, RT/RW -, RANGGANG DALAM, TAKISUNG	Lahang





26	Bumdes Mandiri Sejahtera	Bumdes Mandiri Sejahtera	BUMDESA MANDIRI SEJAHTERA	JALAN WAHYU HARTOPO RT 1 DESA GUNTUNG BESAR, RT/RW 1/1, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI	Gula Merah Padat, serbuk & Cair
27	Bumdes Mandiri Sejahtera	Bumdes Mandiri Sejahtera	BUMDESA MANDIRI SEJAHTERA	JALAN WAHYU HARTOPO RT 1 DESA GUNTUNG BESAR, RT/RW 1/1, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI	Lahang
28	Bumdes Mandiri Sejahtera	Bumdes Mandiri Sejahtera	BUMDESA MANDIRI SEJAHTERA	JALAN WAHYU HARTOPO RT 1 DESA GUNTUNG BESAR, RT/RW 1/1, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI	Keripik talas
29	Dabfarm (Dua Anak Bunda)	Dabfarm (Dua Anak Bunda)	Ahmad Mahboby	JALAN GOHA RT.004 RW.002 PASIR PUTIH KINTAP	JAHE SERBUK INSTAN
30	Kelompok UPPKA Bajuin	Rengginang Bajuin	Ade Ratna Ningsih	JL. SIDO RUKUN RT.005 RW.003, BAJUIN	Rengginang
31	Kelompok Melati	Amplang Omega	Hamdanah	JL. RAYA TAKISUNG, RT/RW -, TAKISUNG, TAKISUNG	Amplang dan Stik Ikan
32	Telur Asin Cap Enaaak	Telur Asin Cap Enaaak	Jumiah	Desa Panjaratan RT.004/RW.002, Desa Panjaratan Pelaihari	Telur Asin
33	Dapur Berkah	Dapur Berkah	Ritta Andriani	Desa Martadah Baru RT.007/RW.002	Peyek
34	Dapur Berkah	Dapur Berkah	Ritta Andriani	Desa Martadah Baru RT.007/RW.002	Sambal Pecel
35	Morievera	Morievera	Nurwulan	TELAGA LANGSAT, KEC. TAKISUNG	Puding Kelor
36	Morievera	Morievera	Nurwulan	TELAGA LANGSAT, KEC. TAKISUNG	Stik Daun Kelor
37	Syabit Taajir	Syabit Taajir	Hasanul Basri	JL. A. YANI RT/RW,- DESA PASIR PUTIH, KINTAP	Madu
38	Tiga Serangkai	Tiga Serangkai	Lia Nor Aini	JL. A. YANI RT.5 DESA KINTAP KECIL KEC. KINTAP	MADU WANYI



39	Kelompok Tanjung Dewa Anugerah	Tanjung Dewa Anugerah	Mia Aulida	JL. MUHARA RT.03/RW.01 DESA TANJUNG DEWA, KEC. PANYIPATAN	Abon Udang dan Pentol Ikan
40	Kelompok Batakan Berkah	Batakan Berkah	Kasmiah	JL. PARIWISATA RT.01/RW.05, DESA BATAKAN, KEC. PANYIPATAN	Amplang
41	Kelompok Batakan Berkah	Batakan Berkah	Kasmiah	JL. PARIWISATA RT.01/RW.05, DESA BATAKAN, KEC. PANYIPATAN	Pentol Ikan
42	Keripik Alifa	Keripik Alifa	Hermanto	Desa Sungai Riam RT.01/RW.01, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Keripik Pisang
43	Risma Amplang	Risma Amplang	Paridatul Aina	JL. RAYA TAKISUNG, RT/RW -, TAKISUNG, TAKISUNG	Amplang
44	Pinus Permai	Pinus Permai	Misna Yanti	Jl. Pariwisata RT.016/RW.004, Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut,	Amplang dan Kerupuk
45	Kerupuk Udang Acil Jasimah	Kerupuk Udang Acil Jasimah	Jasimah	Jl. Saripul Desa Kurau RT.06/RW.03, Kab. Tanah Laut,	Kerupuk Udang
46	Oemah Olahan Mbak Dyah	Oemah Olahan Mbak Dyah	Heri Winardi	Jl. Kolonel Soepirman RT.07/RW.02, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Bandeng Presto
47	Pawon Mlaku Si Suki	Pawon Mlaku Si Suki	Haryoto	Jalan Jaya No.65 RT.04/RW.02, Desa Sungai Jelai, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Ayam dan Bebek Ungkep
48	Rumaisyah Bakery & Cake	Rumaisyah Bakery & Cake	Joko Safaat Slamet	Jalan Pasar Hewan RT.07, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Bakery
49	Rien's Kitchen	Rien's Kitchen	Reni Mariana	Jl. Junjung Buih, Gg. Berkah RT.17, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Dimsam, Kyoza, dan Tahu Baso
50	Risol Bunda MTS	Risol Bunda MTS	Raudatul Jannah	Jl. KH. Dewantara Gg. Damai RT.07, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Risoles
51	Pentol Sempol Aqila	Pentol Sempol Aqila	Renaldy	Jl. Purnawirawan AMD. Manunggal RT.03/RW.01, Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut	Pentol dan Sempol



Dalam mendorong Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut memfasilitasi IKM untuk memperoleh Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (TKDN IK) dengan total sebanyak 4 IKM yang difasilitasi melalui aplikasi SIINas Kementerian Perindustrian RI sebagaimana yang terinci pada tabel berikut :

No.	Nama IKM	Nama Pemilik Usaha	Komoditi	Alamat	Skor TKDN
1.	Dapur Mas Muflih	Nursahid	Susu Kurma	Jl. Rancah No.2 RT.06/03 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	38%
2.	Almanah Sasirangan	Sulistianah	Sasirangan dan turunannya	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang	40%
3.	PT. Berkah Amanah Decor	Aditya Agung Laksono	Furniture Keperluan Rumah Tangga dan Kantor	Jl. Ki Hajar Dewantara No.28, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	40%
4.	Arthadeva Gallery	Sri Rahayu	Kain Sasirangan kombinasi ringkel	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang	38%

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut juga berusaha meningkatkan pelayanan di Rumah Kemasan dengan cara memfasilitasi desain label dan kemasan sebanyak 22 IKM di Tahun 2023, dengan rincian sbb :

NO	NAMA IKM	Merek	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KET
1	Madu Trigona Kahuripan	Madu Trigona Kahuripan	Abdul Syukur	Tambang Ulang	Redesain Label Kemasan
2	Bang Surya	Bumbu Rujak Bang Surya	Suryono	Angsau	Desain Label Kemasan
3	Beras Rohyat	Beras Zakat Fitrah	Rohyat	Kec. Bajuin	Desain label karung beras
4	Beras Muhammad Raya	Beras Zakat Fitrah	Muhammad Raya	Kec. Bajuin	Desain label karung beras
5	Merpati Bordir	Merpati Bordir Sasirangan	Sirajuddin	Komp. Gasper 100	Desain Label kain Sasirangan
6	Bogem amalia	Sirup Rambai Bogem Amalia	Amalia	Sungai Rasau	Desain Label Sirup Rambai



7	Lele Ruli MJM	Abon Lele Ruli MJM	Masrudi	Jl. Suka Maju Desa Ujung Baru	Desain Label Abon lele, kerupuk lele, desain banner kerupuk lele, desain banner abon lele
8	Ningrum	Ningrum	Ningrum	Damit	Konsultasi Kemasan Desain
9	Diah R.	Diah R.	Diah R.	Kampung Baru	Konsultasi Kemasan Desain
10	Rizky Aditya Pratama	Rizky Aditya Pratama	Rizky Aditya Pratama	Sungai Riam	Konsultasi Kemasan Desain
11	Mohmudin	Mohmudin	Mohmudin	Desa Galam	Konsultasi Kemasan Desain
12	Lasti	Lasti	Lasti	SMKN-PP-Pelaihari	Konsultasi Kemasan Desain
13	Mama Salma	Mama Salma	Sumiati	Sungai Jelai	Desain Label Aneka Kue Basah Desain Label Jamu Tradisional Desain Label Tape Ketan
14	Sj Langkar	Sj Langkar Jamur Tiram	Sj Langkar Jamur Tiram	Sungai Jelai	Desain Label Keripik Jamur, Nugget Jamur, sambal jamur, pentol jamur
15	Batakan Berkah	Batakan Berkah	Batakan Berkah	Batakan	Desain Label Takoyaki Ikan, Desain Label Pentol Ikan, Desain Label Tahu Bakso Ikan, Desain Label Pangsit Ikan
16	Riana Catering	Riana Catering	Riana Putri Al Karomah	Sungai Riam	Desain label Kemasan Catering
17	Nuryati Farm	Nuryati Farm	Nuryati	Sungai Riam	Desain Label Kemasan Anggur segar
18	Tala Al Plus	Tala Al Plus	Amrullah	Banyu Irang	Desain Label Kemasan Ubi Segar
19	Ulya Madu	Madu Kelulut	Ahmad Sholeh	Sumber Makmur	Desain Label Botol Madu Kelulut
20	Madu TZD	Madu Kelulut Murni	Suwarsono	Sumber Makmur	Desain Label Botol Madu Kelulut
21	ASURA	Asura Rambai Sirup	Anugrah	Sungai Rasau	Desain Label Kemasan Cup
22	ARC	Madu Kelulut	Joko Melasi	Sumber Makmur	Desain Label Botol Madu Kelulut



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki 2 tempat promosi industry kreatif yaitu Dekranasda dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini, sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual dan dipromosikan.

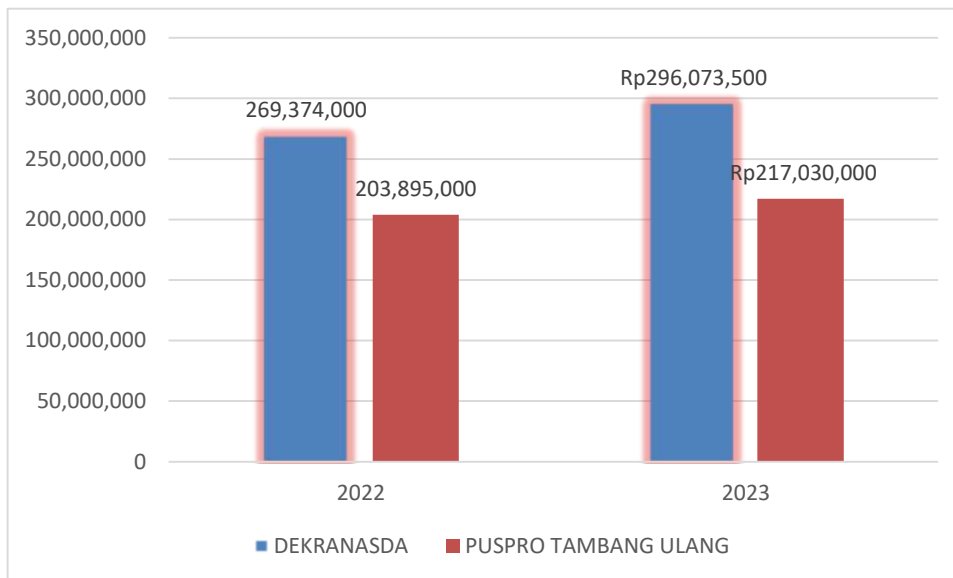
Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama Tahun 2023 adalah sbb :

NO	BULAN	DEKRANASDA (Rp)	PUSPRO (Rp)
1	JANUARI	Rp.32.385.000	Rp20.332.000
2	FEBRUARI	Rp26.987.000	Rp9.431.000
3	MARET	Rp16.354.000	Rp19.546.000
4	APRIL	Rp16.329.000	Rp11.922.000
5	MEI	Rp42.283.000	Rp16.814.000
6	JUNI	Rp18.044.000	Rp24.006.000
7	JULI	Rp16.632.000	Rp25.604.000
8	AGUSTUS	Rp27.107.000	Rp20.059.000
9	SEPTEMBER	Rp24.269.500	Rp29.607.000
10	OKTOBER	Rp24.468.000	Rp8.985.000
11	NOVEMBER	Rp26.546.000	Rp17.788.000
12	DESEMBER	Rp24.669.000	Rp12.936.000
	TOTAL	Rp296.073.500	Rp217.030.000
	Rata-rata	Rp24.672.792	Rp18.085.833

Pada Tahun 2023, Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 24.672.792/bulan dan di Pusat Promosi rata-rata penjualan Rp. 18.085.833/bulan.



### Jumlah Penjualan Produk IKM Tahun 2023 Pada Dekranasda dan Puspro



Jumlah Hasil Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2023 dengan mengikuti berbagai even pameran maupun menggunakan mobil Promosi Dekranasda sebesar Rp. 178.684.000,-

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan Desa	Kecamatan	Hasil Penjualan Produk IKM
1	20 Jan 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 96	Damit Hulu	Batu Ampar	1.692.000
2	25 Jan 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 97	Panggung Baru	Pelaihari	170.000
3	27 Jan 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 98	Martadah	Tambang Ulang	1.490.000
4	28 Jan 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada AcaraMuswil Muhammadiyah Se kalsel	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.862.000
5	31 Jan 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada AcaraBGMPA 12.15PM	Batu Ampar BGMPA	Batu Ampar	31.415.000
6	01 Feb 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 99	Panggung	Pelaihari	430.000



7	05 Feb 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 100	Batu Tungku	Panyipatan	5.036.000
8	10 Feb 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 101	Kintapura	Kintap	4.205.000
9	15 Feb 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 102	Atu-atu	Pelaihari	732.000
10	22 Feb 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 103	Singai Riam	Pelaihari	820.000
11	24 Feb 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 104	Batilai	Takisung	1.015.000
12	03 Mar 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 105	Damar Lima	Batu Ampar	730.000
13	06 Mar 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara Hut Satpol PP	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	411.000
14	07 Mar 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 106	Pemuda	Pelaihari	466.000
15	10 Mar 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 107	Sambangan	Bati-bati	1.186.000
16	01-06 Mar 23	INACRAFT 2023 (Jakarta Covention Center)	JCC	Jakarta	5.430.000
17	10-12 Mar 23	Banjarmasin Sasirangan Festifal (BSF) 2023	Menara Pantau Siring	Banjarmasin	7.100.000
18	Mar 2023	Indonesia Tourism & Trade Investment Expo Riorita Batam	Batam	Batam	4.759.000
19	15 Mar 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Pasar Murah Oleh Kopdag 2023	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	120.000
20	17 Mar 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 108	Sungai Cuka	Kintap	2.692.000
21	31 Mar 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 109	Ranggang	Takisung	302.000



22	03 Apr 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 110	Sungai Pinang	Tambang Ulang	933.000
23	06 Apr 2023	Mobil Expo pada Partisipasi Pasar Muarah di Kecamatan Kurau	Halaman Kantor Kec. Kurau	Kurau	875.000
24	13 Apr 2023	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Sepak Bola Dalas Hangit Kodim 1009	Lap Kodim 1009	Pelaihari	305.000
25	14 Apr 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 111	Ujung	Bati-bati	1.143.000
26	05 Mei 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 112	Kurau Utara	Bumi Makmur	1.522.000
27	10 Mei 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 113	Ujung Batu	Pelaihari	275.000
28	12 Mei 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 114	Maluka Baulin	Kurau	1.332.000
29	17 Mei 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 115	Telaga	Pelaihari	1.228.000
30	19 Mei 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 116	Pandahan	Bati-bati	1.560.000
31	22-23 Mei 2023	Promosi Produk Unggulan Kabupaten pada Kegiatan Rakornas Penumbuhan dan Pengembangan IKM	Galaxy Hotel	Banjarmasin	875.000
32	23-25 Mei 2023	Mobil Expo pada Event Tala Educatioan Expo (H+1)	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.871.000
		Mobil Expo pada Event Tala Educatioan Expo (H+2)	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.957.000
33	26 Mei 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 117	Kintap Kecil	Kintap	3.232.000
34	07 Jun 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 118	Ambungan	Pelaihari	150.000
35	08 Jun 2023	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Balai Desa Tanjung Dewa	Lap Balai Desa	Panyipatan/ Tanjung Dewa	260.000





36	09 Jun 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 119	Batakan	Panyipatan	1.345.000
37	14 Jun 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 120	Bumi Jaya	Pelaihari	1.160.000
38	16 Jun 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 121	Bentok Kampung	Bati-bati	2.311.000
39	19 Jun 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Rapat Apkasi Prov Kalsel	Best World Kindai Hotel	Banjarmasin	1.873.000
40	21 Jun 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 122	Kunyit	Bajuin	588.000
41	27 Jun 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 123	Kurau	Kurau	983.000
42	05 Jul 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 124	Tampang	Pelaihari	813.000
43	07 Jul 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 125	Jilatan	Batu Ampar	1.784.000
44	07 s.d 09 jul 2023	Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XLV Kecamatan Kintap	Desa Kintap	Kintap	6.797.000
45	12 Jul 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Pembukaan TMMD Ke 117	Lapangan 17 Agustus	Telaga Langsung	658.000
46	14 Jul 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 127	Handil Maluka	Bumi Makmur	496.000
47	18 Jul 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 129	Tambak Karya	Kurau	848.000
48	21 Jul 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 128	Ranggang Dalam	Takisung	692.000
49	20 s.d 22 Juli 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Rapat Apkasi di Tangerang	ICE BSD Tangerang	Banten	8.252.000
50	22 Juli 2023	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pasar Murah acara HKKB Murakata	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	1.105.000



51	10 Agt 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Penutupan TMMD Ke 117	Lapangan 17 Agustus	Telaga Langsung	632.000
52	25 Agt 2023	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 129	Pantai Harapan	Bumi Makmur	952.000
53	01 Sept 2023	Mini Expo Pada event lomba kain sasirangan	Sarantang saruntung	pemda Tala	621.000
54	02 Sept 2023	Mobile Expo pada even Hari Pramuka	Halaman Kantor Bupati	Pemda Tala	754.000
55	01 Sept 2023	Bazar MTQ Nasional Ke-34 Banjarbaru Tahun 2023 H1	Lapangan Murjani	Banjarbaru	7.355.000
56	05-07 Sep 2023	Gema Al-Qur'an Tanah Laut Tahun 2023 H1	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	15.001.000
57	12-18 Sep 2023	Pameran Kriyanusa Tahun 2023 H1	Jakarta Convention Center, Jakarta	Jakarta	9.120.000
58	21-24 September 2023	Pekan Raya Banjarmasin H1	Siring Pantau Banjarmasin	Banjarmasin	7.908.000
58	15 s.d 20 November 2023	Indokraf Expo 2023	Mataram Mall, Lombok	Lombok Nusa Tenggara Barat	3.747.000
60	30 Nop sd 03 Des 2023	Tala Expo 2023	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.566.000
61	07 sd 13 Des 2023	Festifal Kuliner Tanjung Tabalong	Tanjung Expo Center, Mabuun	Mabuun Tanjung Tabalong	7.742.000
	TOTAL				178.684.000

Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah

1. Tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dimana dana DAK hanya bagi Daerah Prioritas Pariwisata, sehingga Tanah Laut tidak dapat mengajukan permohonan dana tersebut untuk pengembangan rumah kemasan, baik untuk pembelian mesin peralatan maupun pembangunan workshop.

2. Tidak adanya Dana Intensif Daerah (DID)



Untuk dana DID, dimana pada tahun 2021 Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut mendapatkan dana DID dan dialokasikan untuk fasilitasi Hak Merek, Halal maupun pembelian mesin peralatan bagi IKM dan juga pembelian mobil promosi. Karena tahun 2023 ini tidak dapat, maka target kami untuk fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak bisa maksimal kami laksanakan. Begitupun dengan fasilitasi hak merek tahun 2023 ini berasal dari dana provinsi sehingga masih banyak IKM yang belum terfasilitasi Hak Merek.

3. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran/even promosi produk, sehingga pada tahun ini, kita mengalami kendala dalam mengikuti pameran yang tidak terjadwal.
4. Kurangnya pelatihan softskill yaitu pelatihan atau pengembangan yang dilakukan untuk memperlihatkan kembali kemampuan atau minat seseorang yang berasal dari dirinya sendiri, lebih tepatnya disebut dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang.
5. Kurangnya jumlah kegiatan pelatihan peningkatan wirausaha baru.
6. Belum maksimalnya Kawasan Industri Jorong karena belum terbitnya Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

## **Solusi**

Solusi untuk memecahkan masalah tersebut antara lain :

1. Mendorong pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar Tanah Laut masuk menjadi Daerah Prioritas Pariwisata, serta sounding ke kementerian agar kebijakan DAK dapat direvisi.
2. Mendorong Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan TAPD agar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mendapatkan alokasi DID yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi IKM dan untuk standarisasi produk IKM
3. Membangun kerjasama dengan SKPD khususnya terkait promosi produk dan investasi.
4. Diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi keterampilan berindustri yang diiringi dengan pelatihan soft skill dalam rangka membangun jiwa enterpreur.



Selain hal tersebut, pemilihan peserta pelatihan oleh Kepala Desa diharapkan juga akan lebih selektif lagi agar benar-benar yang berminat yang akan diikutsertakan dalam pelatihan dan dengan mengalokasikan jumlah peserta dari kalangan masyarakat miskin ekstrim.

5. Dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri serta fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM di Kabupaten Tanah Laut.
6. Untuk Kawasan Industri Jorong, pada tahun 2023 telah disusun Dokumen AMDAL dan ANDALALIN oleh Pengelola Kawasan Industri yaitu PT. Wahyu Putra Ramadhan dimana dokumen ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi Pengelola Kawasan Industri.

#### **Rencana Aksi 2024**

1. Menumbuhkan dan memperkuat legalitas sentra-sentra Industri Kecil Menengah
2. Mempromosikan Gedung Dekranasda dan Gedung Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang sebagai tempat promosi produk IKM, baik pangan maupun kerajinan. Selama ini promosi dilakukan melalui Media Sosial *Facebook* dengan alamat Fb : ***Dekranasda Tanah Laut dan Puspro Tambang Ulang***), melalui *Instagram* dan melalui Aplikasi *Whats App*. Promosi yang akan dilakukan ditahun depan dengan cara membuat Aplikasi *E-commerce* yaitu berupa penjualan produk IKM secara online.
3. Mendorong IKM untuk dapat mengakses Program Gapura Karomah dikarenakan IKM - IKM yang baru bertumbuh juga memerlukan stimulus bantuan permodalan yang dalam hal ini dapat ditanggulangi melalui Program Gapura Karomah yaitu program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang berlangsung sejak tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Tahun 2023 ada 19 IKM yang diusulkan/pengajuan untuk mengakses Program Gapura Karomah.
4. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.

5. Mendorong sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Hak Merek bagi Industri Kecil.
6. Penggunaan Aplikasi Sosialita dan EKatalog local dalam belanja pengadaan.
7. Mengaktifkan pelayanan desain produk di Rumah Kemasan.
8. Koordinasi dengan Pengelola Kawasan Industri dan dengan DPMPSTP dan DPRKPLH untuk percepatan terbitnya Izin Usaha Kawasan Industri.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 40 ASN pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp 1,837,730,920.00 dan terealisasi Rp. 1,748,852,983.00 atau sebesar 95,16%.

Tabel 3.2.11  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	338,997,997,00	<b>321.420.484,00</b>
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80,016,376.00	<b>46,607,440.00</b>
3	Program Hubungan Industrial	898,842,600.00	<b>887,307,600.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1,837,730,920.00</b>	<b>1,748,852,983.00</b>

Tabel 3.2.12  
Efisiensi Sasaran Strategis 7

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
752 %	95,16 %	656,84 %



**MISI III**

**Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 1 tujuan untuk misi III yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.3.1  
Target indikator tujuan Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75 (Baik)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
2. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik.

### **Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 8**

#### **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan diukur mealui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.3.2  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB (77,00)	B (66,11)	85,86%	A (81)	B (67,28)	83,06%	BB (70,01)	B (67,52)	96,44%
2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>98,22%</b>

**a. Nilai SAKIP**

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented program*).

Realisasi indikator Nilai SAKIP tahun 2023 adalah B (67,52) dan tahun 2022 adalah B (67,28), belum mencapai target yang ditetapkan yaitu BB (70,01) dengan tingkat capaian 96,44%. Nilai ini mengalami peningkatan 0,24 *point* jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu B (67,28). Realisasi tahun 2023 juga merupakan realisasi dari target akhir Tahun RPJMD.

Dilihat dari penilaian per komponen, dari ke 4 (empat) komponen penilaian SAKIP sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3.3  
Nilai Komponen SAKIP tahun 2022-2023

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,43	22,59
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,46	19,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,59	10,67
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80	14,76
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>67,28</b>	<b>67,52</b>
<b>Tingkat akuntabilitas kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: diolah

Untuk Tahun 2019-2021 dasar yang digunakan dalam rangka evaluasi SAKIP adalah PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan 5 (lima) komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3.4  
Nilai Komponen SAKIP tahun 2019, 2020 dan 2021

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,99	22,14	22,25
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,05	16,18	16,22
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,35	10,45	10,49
d.	Evaluasi Internal	10	6,17	6,53	6,53
e.	Capaian Kinerja	20	10,32	10,58	10,62
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>64,89</b>	<b>65,88</b>	<b>66,11</b>
<b>Tingkat akuntabilitas kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

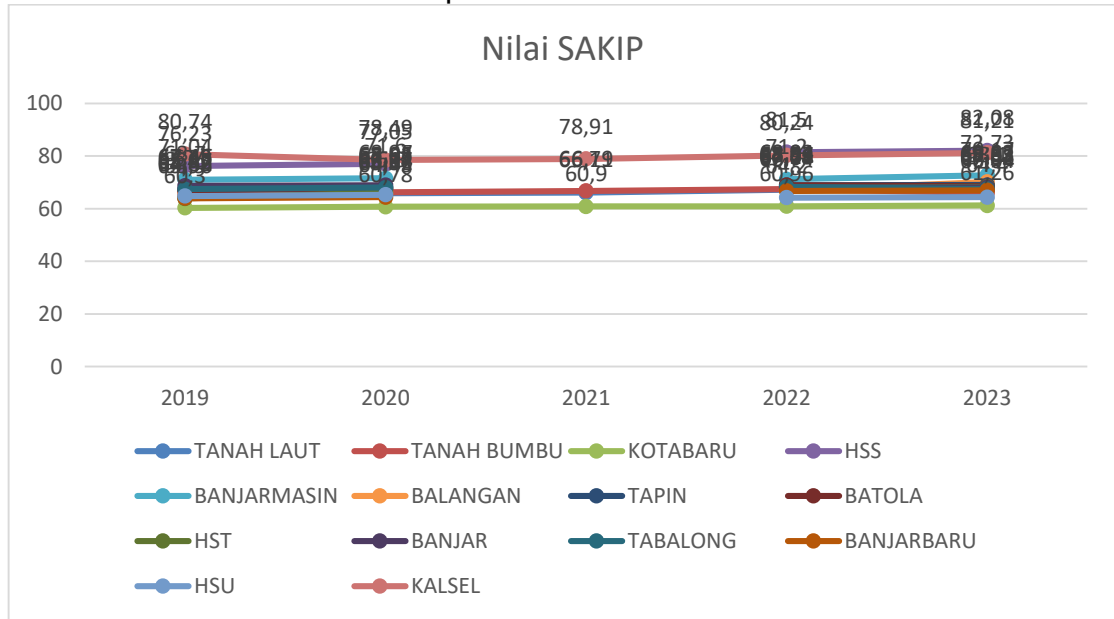
Sumber: diolah

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih jauh berada di bawah, dimana nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah A (81,21).





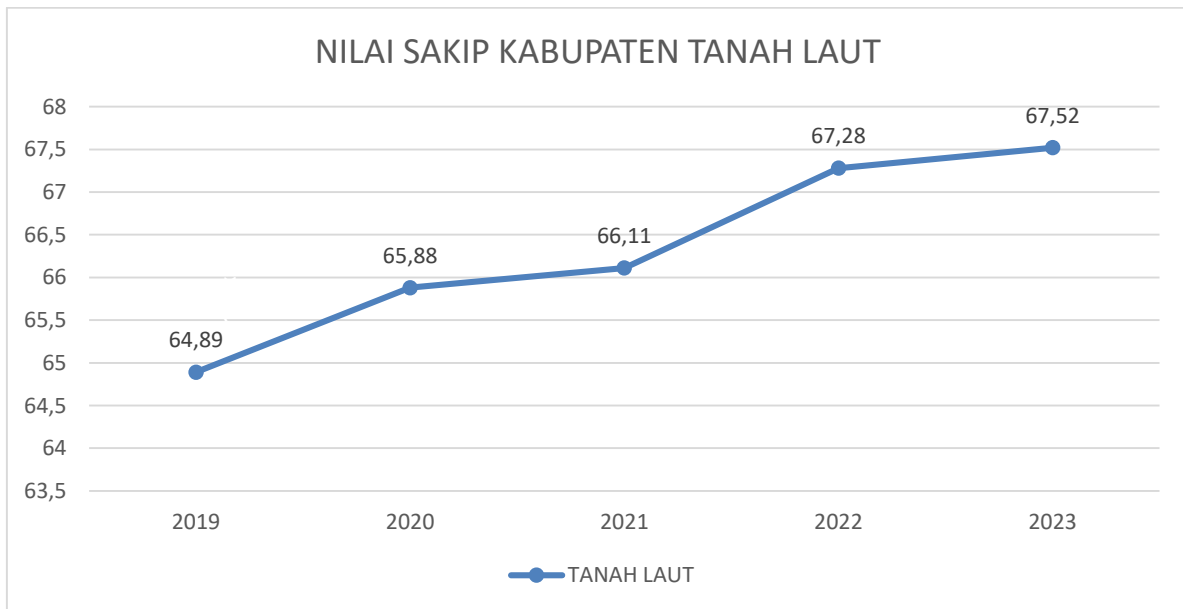
Grafik 3.3.1  
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.3.2  
Nilai SAKIP tahun 2019– 2023



Sumber: diolah



Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP, karena dilihat dari nilai semua komponen masih banyak terdapat kekurangan, nilai komponen yang masih sangat rendah yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimana nilai maksimal adalah 25 dan terealisasi sebesar 14,76 atau 59,04%. Komponen evaluasi kinerja internal juga mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar -0,04 point.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP di tahun 2023 antara lain :

1. Penyusunan Rencana Pemangunan Jangka Menengah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024-2026.
2. Menyusun *Logical Frame Work* sesuai dengan PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja dimana pohon kinerja disusun dengan memperhatikan *Critical Sucses Factor (CSF)* dalam pemecahan masalah berdasarkan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan perumusan definisi operasional dan formulasi pengukuran pada Indikator Kinerja utama Pemerintah pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah.
4. Menyusun konsep Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagai dasar dalam pemanfaatan pengukuran kinerja.
5. Menetapkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/886-KUM/2023 tentang Penetapan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga level pelaksana.
7. Melakukan asistensi peningkatan implementasi SAKIP kepada seluruh Kepala SKPD, Sekretaris dan aparatur perencanaan di SKPD dengan narasumber dari Kemenpan dan RB.
8. Melaksanakan asistensi Laporan Kinerja (LKj) SKPD dengan berfokus pada penajaman analisa terhadap pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki serta analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan.
9. Melaksanakan evaluasi SAKIP SKPD dengan menggunakan teknologi informasi yaitu SAKUNTALA (Sistem Akuntabilitas Tanah Laut) sesuai dengan Peraturan



Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, diharapkan dengan adanya system ini kinerja SKPD dapat lebih ditingkatkan. berikut tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2023:

Tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2023

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
6	A	15	Memuaskan
25	BB	62,5	Sangat Baik
5	B	12,5	Baik
2	CC	5	Cukup Baik
1	C	2,5	Kurang
1	D	2,5	Sangat Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2022

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
6	A	15	Memuaskan
34	BB	85	Sangat Baik
0	B	0	Baik
0	CC	0	Cukup Baik
0	C	0	Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2022 seluruh SKPD atau sebesar 100% telah mendapatkan nilai SAKIP minimal BB atau dengan nilai di atas 70. Terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2021 dimana pada Tahun 2021 terdapat 37 SKPD atau sebesar 92,5% dengan nilai SAKIP minimal BB, 3 SKPD dengan nilai SAKIP Baik dan tidak ada lagi SKPD yang memiliki nilai SAKIP dibawah Baik. Ringkasan evaluasi SAKIP Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 3.3.5  
Rekapitulasi Nilasi SAKIP SKPD per komponen Tahun 2023 hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten

NO	NAMA SKPD	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI	PREDIKAT
1	SEKRETARIAT DAERAH	24.60	24.60	12.30	20.50	82	A
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27.00	24.00	10.80	20.00	81,8	A
3	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	24.60	24.60	11.85	20.50	81.55	A
4	DINAS KESEHATAN	24.60	26.10	11.55	19.25	81.5	A
5	INSPEKTORAT KABUPATEN	25.50	24.00	12.00	20.00	81.5	A
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.60	24.60	12.30	20.00	81.5	A
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.00	24.00	12.00	20.00	80	BB
8	DINAS PARIWISATA	23.70	25.50	11.40	19.25	79.85	BB
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.60	24.00	12.00	19.25	79.85	BB
10	SEKRETARIAT DPRD	24.60	23.10	11.10	20.50	79.3	BB
11	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	24.00	24.00	11.25	20.00	79.25	BB
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.00	24.00	12.00	19.25	79.25	BB
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.60	23.10	11.85	19.25	78.05	BB
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.20	22.20	10.95	22.50	77.85	BB
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24.00	22.50	11.25	20.00	77.75	BB
16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	23.70	21.30	11.10	20.50	76.6	BB
17	KECAMATAN BATU AMPAR	22.50	24.00	10.05	20.00	76.55	BB
18	KECAMATAN PELAIHARI	23.10	22.50	11.55	19.25	76.4	BB
19	KECAMATAN TAMBANG ULANG	23.10	24.00	11.25	18.00	76.35	BB
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.20	22.50	11.55	19.25	75.5	BB
21	KECAMATAN TAKISUNG	24.60	22.50	12.00	16.25	75.35	BB



22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.10	21.90	12.00	18.00	75	BB
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	24.60	22.50	12.00	15.75	74.85	BB
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.10	21.60	10.35	19.50	74.55	BB
25	DINAS SOSIAL	21.60	23.10	10.50	18.75	73.95	BB
26	KECAMATAN PANYIPATAN	22.20	24.00	12.00	15.50	73.7	BB
27	KECAMATAN BAJUIN	23.01	21.60	10.35	18.50	73.55	BB
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24.00	23.10	10.95	15.00	73.05	BB
29	KECAMATAN JORONG	21.60	22.50	10.80	18.00	72.9	BB
30	DINAS PERHUBUNGAN	24.00	22.50	11.55	13.75	71.8	BB
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.80	21.30	10.65	18.50	70.25	BB
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	19.80	20.40	10.50	18.25	68.95	B
33	KECAMATAN BATI-BATI	20.10	20.70	9.75	16.75	67.3	B
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.10	19.80	8.10	14.50	62.5	B
35	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	21.60	20.10	9.30	11.00	62	B
36	KECAMATAN KURAU	22.50	17.70	7.05	14.75	62	B
37	KECAMATAN KINTAP	21.00	13.80	7.80	13.00	55.6	CC
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	18.60	16.80	4.80	13.00	53.2	CC
39	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	16.50	4.80	4.80	12.50	38.6	C
40	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.50	3.60	1.50	5.25	17.85	D

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan dan seluruh Aparatur dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja.
2. Kurangnya kualitas Pohon kinerja yang telah disusun karena belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan pohon kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja



serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi

3. Sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil pencapaian kinerja program, masih pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
5. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja, dimana masih banyak laporan kinerja yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
6. Analisa terhadap setiap pencapaian target belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan Sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki.
7. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program, dan hanya pelaksanaan program atau kegiatan serta penyerapan anggaran.
8. Pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD belum sepenuhnya dilakukan.
9. SKPD belum seluruhnya melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi internal yang disampaikan oleh Inspektorat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah:

1. Internalisasi BerAKhlak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar bekerja lebih berorientasi kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
2. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini untuk



- dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
3. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kerjanya;
  4. Memastikan kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten mendapatkan anggaran yang sesuai dengan porsinya, sehingga dapat mencapai target indikatornya.
  5. Membangun Komitmen antara KDH/WKDH dengan seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kabupaten Tanah Laut dengan Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Coaching Klinik tentang SAKIP yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah dibangun.
  6. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *outcome* dan *output* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
  7. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
  8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegritasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, serta meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kerjanya;
  9. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
  10. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, dan hasil evaluasi dapat dijadikan untuk pemberian reward dan punishment bagi SKPD.
  11. menciptakan pemahaman yang merata bagi APIP, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;



12. Perlunya pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala (triwulan) sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja;
13. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja setiap pencapaian target SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran
14. Perlunya dilakukan pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD, hal ini akan diketahui kendala solusi dan rencana aksi yang akan dan yang telah dilakukan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Mereviu kembali RPD dan Renstra SKPD 2024-2026.
2. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator yang salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh.
3. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran hingga pelaporan kinerja organisasi.
4. Pengukuran kinerja individu (SKP) akan diintegrasikan dengan hasil pengukuran organisasi (PK) yaitu dengan menurunkan rencana aksi menjadi sasaran kinerja pegawai sehingga akan terlihat keterkaitan hasil pelaporan aktivitas dalam capaian kinerja.
5. Melakukan pendampingan penyusunan dan perbaikan laporan AKIP ke seluruh SKPD.
6. Melakukan peningkatan kapasitas SDM evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP
7. Monev terhadap hasil Tindak lanjut dan memastikan apakah hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
8. Melakukan pendampingan/ consulting untuk meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP SKPD
9. Mengaplikasikan aplikasi SIMONEV dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran kinerja.





**b. Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 adalah merupakan pencapaian kesepuluh kalinya sejak Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan yang telah diterbitkan oleh BPK yaitu Nomor : 9.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Tabel 3.3.6

Perolehan Opini BPK Kabupaten Tanah Laut

NO	TAHUN PEROLEHAN	PREDIKAT (OPINI BPK)
1	2014	WTP
2	2015	WTP
3	2016	WTP
4	2017	WTP
5	2018	WTP
6	2019	WTP
7	2020	WTP
8	2021	WTP
9	2022	WTP
10	2023	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan 100%.



Untuk mencapai target tersebut dikarenakan adanya :

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan
  - a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas
  - b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
  - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
  - b. Sistem Reward and Punishment
  - c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
  - a. SIMDA-Keuangan dan Pendapatan (Simdang F-MIS) dan Aplikasi SIPD
  - b. SIMDA-BMD
4. Kelengkapan Regulasi Daerah
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan action plan mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Progress Action Plan/rencana aksi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan coffee morning untuk seluruh pimpinan SKPD.
2. Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) telah mengadakan pembinaan terhadap entitas



akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.

4. Dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
5. Bupati Tanah Laut telah menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset sudah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIMDA-Kuangan dan Pendapatan ( Simdang F-MIS) dan Aplikasi SIPD.
7. Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
8. Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SPKD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
4. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.



5. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
7. Belum terintegrasi antara Aplikasi SIPD dengan Simda Keuangan FMIS dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffee morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 79 ASN pada BPKAD, 47 ASN pada Inspektorat, 3 ASN pada Bagian Organisasi, 82 ASN pada BAPPEDA dan di dukung oleh 8 Program dengan Pagu Rp. 335,920,576,763.00 dan terealisasi Rp. 194,791,800,749.00 atau sebesar 57,98%.



Tabel 3.3.7  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38,537,563,532.00	<b>36,309,916,522.00</b>
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	270,000,377,529.00	<b>133,516,612,671.00</b>
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	18,600,703,525.00	<b>17,360,281,323.00</b>
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,192,787,996.00	<b>1,706,734,025.00</b>
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,142,147,592.00	<b>1,012,165,500.00</b>
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	738,098,908.00	<b>630,863,710.00</b>
7	Program Kepegawaian Daerah	2,187,269,980.00	<b>1,941,219,687.00</b>
8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,521,627,701.00	<b>2,314,007,311.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>335,920,576,763.00</b>	<b>194,791,800,749.00</b>

Tabel 3.3.8  
Efisiensi Sasaran Strategis 8

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
98,22 %	57,98 %	40,24 %



## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 9

### Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.9  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	35,71	55,87	156,45%	47,62	58,98	123,86 %	75	73,70	98,26%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>98,26%</b>

Realisasi indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 adalah sebesar 73,70 mengalami peningkatan sebesar 14,72 poin dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut adalah hasil dari langkah langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi PPID ke seluruh SKPD dan Kecamatan dengan membuat akun PPID Pembantu, sehingga masing masing SKPD dan Kecamatan melalui PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris SKPD dan Kecamatan dapat mempublikasikan dokumen dan Informasi langsung ke website PPID.
2. PPID Utama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progress PPID Pembantu dalam mempublikasikan dokumen dan Informasi tersebut. Hingga Desember 2023 perkembangan publikasi Informasi dan Dokumentasi di *website* [ppid.tanahlautkab.go.id](http://ppid.tanahlautkab.go.id) telah mencapai 4078 buah, ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 yang berjumlah 3408 buah. Dari data statistik di website tersebut juga menunjukkan jumlah peminat informasi cukup tinggi dengan kunjungan mencapai jumlah 38.197, meningkat cukup signifikan dari tahun 2022 dimana kunjungan peminat informasi ke website [ppid.tanahlautkab.go.id](http://ppid.tanahlautkab.go.id) sebanyak 37.838.
3. PPID Utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pembantu pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara berkala setiap



triwulan, agar menjadi bahan bagi SKPD untuk melengkapi jenis Daftar Informasi Publik yang belum terpublikasikan melalui website [ppid.tanahlautkab.go.id](http://ppid.tanahlautkab.go.id).

4. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID tingkat Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut diikuti oleh PPID Utama dan PPID Pembantu se-Kabupaten Tanah Laut dengan agenda evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.
5. Selain melakukan monitoring dan evaluasi melalui website PPID, PPID Utama juga membentuk grup whatsapp yang beranggotakan seluruh PPID Pembantu sebagai media komunikasi dan diskusi terkait kegiatan PPID di Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan koordinasi secara dinamis kepada pejabat pengelola informasi dokumentasi pembantu pada seluruh SKPD terkait keterbukaan informasi publik.

Dengan terpublikasikannya dokumen dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh badan publik melalui *website* [ppid.tanahlautkab.go.id](http://ppid.tanahlautkab.go.id), maka setiap orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengakses alamat website tersebut, sehingga keterbukaan informasi publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.

Selain itu juga dilakukan forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif Tanah Laut Menyapa dengan menghadirkan narasumber dari SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan program dan kegiatan pada masing masing SKPD sesuai jadwal yang telah ditentukan pukul 09.00 sampai 10.00 Wita setiap hari Rabu dan Kamis dan pada program siaran Inspirasi Pagi setiap hari Senin dan Selasa pukul 09.00 sampai 10.00. selain SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, program Inspirasi Pagi ini juga menghadirkan narasumber dari instansi vertikal dalam rangka penyempaan program kegiatan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu juga dilakukan penyebarluasan informasi melalui media sosial Facebook LPPL Radio Tuntung Pandang, instagram @radiotuntungpandang dan Youtube LPPL Radio Tuntung Pandang mengenai kegiatan Kepala Daerah dan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.



Untuk menunjang keterbukaan informasi publik di masyarakat, dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat di desa, yang bertugas sebagai corong informasi untuk mempromosikan dan mempublikasikan potensi dan prestasi desa termasuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di desa tersebut. Sampai dengan tahun 2023, KIM yang terbentuk sebanyak 17 buah. Pembinaan terhadap KIM dilakukan secara berkala, baik melalui kunjungan langsung maupun melalui grup whatsapp. Pada tahun 2023, seluruh KIM telah membentuk kepengurusan Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang diketuai oleh Siti Komsianah dari KIM Desa Tirtajaya. Untuk Forum KIM di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, ketua terpilih adalah Junaidi dari KIM Desa Tirtajaya Kabupaten Tanah Laut, Slamet Prayitno dari KIM Desa Martadah Baru dan M. Salman dari KIM Desa Sungai Rasau sebagai anggota kepengurusan. Untuk menunjang capaian publikasi yang lebih luas, maka publikasi informasi dari seluruh KIM dilakukan pada website resmi KIM Tanah Laut dengan alamat *website* [kim.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://kim.diskominfo.tanahlautkab.go.id). pada tahun 2023 ini juga salah satu KIM di Kabupaten Tanah Laut yaitu KIM Desa Sungai Rasau mengikuti kompetisi KIM Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan meraih predikat terbaik II yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial fanpage Media Center Kabupaten Tanah Laut, media sosial facebook LPPL radio Tuntung Pandang, Instagram @radiotuntungpandang, youtube LPPL Radio Tuntung Pandang, siaran radio Info Tanah Laut, portal berita daerah di alamat website resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut [www.tanahlautkab.go.id](http://www.tanahlautkab.go.id) dan youtube Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Indeks keterbukaan informasi publik dihitung dengan menggunakan indikator jenis dokumen yang dipublikasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ada sebanyak 12 jenis dokumen yang wajib dipublikasikan oleh setiap SKPD. Dari jumlah informasi dan dokumentasi seluruh SKPD yang wajib tersedia dibagi jumlah SKPD maka diperoleh capaian penilaian Keterbukaan Informasi publik Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yaitu sebesar 70. Ini menunjukkan realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 70. Namun jika dianalisis per SKPD, Sebagian besar SKPD telah mempublikasikan seluruh jenis dokumen yang wajib





dipublikasikan, hanya ada beberapa SKPD yang belum mempublikasikan dokumennya.

Website PPID (<http://ppid.tanahlautkab.go.id/>) dimana data yang tersedia di dalam website adalah data langsung bersumber dari masing-masing PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasi. Namun dalam pengelolaannya juga terdapat kendala yakni belum semua SKPD memahami akan pentingnya melakukan update data/informasi pada website PPID ini dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik. Untuk kedepannya akan diambil langkah monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah. Pada tahun 2020 telah dilakukan pembaharuan tampilan dan menu pada website PPID Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.3.1  
Tampilan laman website PPID Kabupaten Tanah Laut



Untuk meningkatkan indeks keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk menghimbau setiap



SKPD agar aktif mempublikasikan dokumen dan Informasi pada website PPID diantaranya dengan :

Melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD tentang teknis pelaksanaan publikasi pada website PPID dan Daftar Informasi Publik yang wajib di publikasikan.

1. Membuat surat edaran kepada seluruh SKPD agar aktif mempublikasikan dokumen dan Informasi pada website PPID sebagai dukungan terhadap upaya Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyampaikan rekapitulasi publikasi pada website PPID setiap triwulan sebagai bahan evaluasi bagi SKPD.
3. Mengadakan rapat koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Mengadakan pelatihan pengisian informasi dan dokumentasi pada website PPID Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.3.10  
Rekapitulasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO.	NAMA SKPD	% INDEKS KIP				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	KABUPATEN TANAH LAUT	16	54,375	55,87	58,98	73,70
1	RSUD. KH. MANSYUR KINTAP	-	-	44,44	59,09	100
2	RSUD. H. BOEJASIN	-	-	50	50	86,36
3	SEKRETARIAT DAERAH	10	58,3	50	59,09	90,90
4	SEKRETARIAT DPRD	20	16,7	14,28	45,45	45,45
5	INSPEKTORAT	20	66,7	72,22	36,36	54,54
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10	91,7	66,66	68,18	77,27
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30	8,3	33,33	81,81	81,81
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40	100	71,42	86,36	100
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10	58,3	94,44	77,27	86,36



10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10	91,7	66,66	50	68,18
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	66,7	88,88	72,72	86,36
12	SATPOL PP DAN DAMKAR	10	75	52,38	77,27	90,90
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10	66,7	94,44	63,63	54,54
14	DINAS KESEHATAN	30	50	44,44	77,27	72,72
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	30	91,7	55,55	59,09	86,36
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40	100	77,77	50	81,81
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	20	58,3	27,77	68,18	81,81
18	DINAS PARIWISATA	10	75	94,44	54,54	81,81
19	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	10	83,3	61,11	68,18	59,09
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	10	75	61,11	59,09	81,81
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10	66,7	55,55	59,09	63,63
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20	83,3	77,77	4,54	68,18
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	8,3	0	63,63	81,81
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	30	41,7	72,22	59,09	77,27
25	DINAS PERHUBUNGAN	10	25,0	90,47	63,63	54,54
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	75	44,44	72,72	81,81
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10	91,7	61,11	59,09	54,54
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10	58,3	72,22	63,63	45,45
29	DINAS SOSIAL	20	50	88,88	63,63	81,81
30	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	10	75	100	81,81	86,36
31	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	10	100	72,22	86,36	86,36
32	KECAMATAN BAJUIN	10	33,3	61,9	81,81	77,27
33	KECAMATAN BATI BATI	10	0	0	45,45	81,81
34	KECAMATAN KINTAP	10	8,3	0	81,81	22,42
35	KECAMATAN KURAU	10	41,7	42,85	40,90	54,54



36	KECAMATAN PELAIHARI	10	25	38,09	45,45	81,81
37	KECAMATAN TAKISUNG	10	8,3	14,28	54,54	81,81
38	KECAMATAN BATU AMPAR	10	0	66,66	0	72,72
39	KECAMATAN BUMI MAKMUR	10	0	38,09	50	72,72
40	KECAMATAN JORONG	10	50	4,76	27,27	90,90
41	KECAMATAN PANYIPATAN	10	100	66,66	72,72	81,81
42	KECAMATAN TAMBANG ULANG	10	0	57,14	36,36	31,81

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 60 ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan di dukung oleh 10 Program dengan Pagu Rp. 72,671,720,836.00 dan terealisasi Rp. 65,226,521,979.00 atau sebesar 89,76 %.

Tabel 3.3.11  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38,537,563,532.00	36,309,916,522.00
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,116,482,018.00	1,669,502,684.00
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26,837,458,043.00	22,808,875,098.00
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1,170,848,401.00	996,495,427.00
5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	270,601,215.00	250,488,100.00
6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,340,718,103.00	866,993,957.00
7	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	325,668,521.00	297,560,000.00
8	Program Penatagunaan Tanah	1,907,756,359.00	1,884,606,200.00
9	Program Pengelolaan Arsip	99,895,200.00	89,014,971.00
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64,729,444.00	53,069,020.00
<b>Jumlah</b>		<b>72,671,720,836.00</b>	<b>65,226,521,979.00</b>



Tabel 3.3.12  
Efisiensi Sasaran Strategis 9

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
98,26 %	89,76 %	8,5 %

**MISI IV**

**Mewujudkan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 1 tujuan untuk misi IV yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3.4.1  
Indikator Tujuan dan Target Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Persen	100%

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama.
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 10**

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragam diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4.2  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama	Konflik	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											100%



Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut sebagai mitra dan mempunyai peran signifikan yakni bersama - sama bersinergi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama sehingga diperlukan sikap keterbukaan dari berbagai pihak dan kemampuan untuk memahami dan mencermati serta menganalisa sumber-sumber konflik ataupun potensi-potensi yang bisa mengarah tersulutnya konflik.

Ada tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian agar kerukunan tersebut dapat terwujud dalam masyarakat yang multikultural dan plural seperti Indonesia. Pertama, adanya para pengambil kebijakan publik yang adil dan mampu mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik tersebut terhadap kerukunan beragama. Kedua, adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas. Ketiga, adanya masyarakat yang berpendidikan dan bersikap rasional dalam menyikapi keragaman keagamaan dan perubahan sosial.

Realisasi indikator jumlah konflik intern dan antarumat beragama tahun 2023 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0 konflik dengan tingkat capaian 100%.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mempertahankan agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama selama tahun 2023. Banyak upaya yang dilakukan selama Tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dan FKUB Kecamatan, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
2. Penyuluhan pembinaan kepada desa-desa tentang desa peduli toleransi
3. Penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Penyuluhan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Peluncuran aplikasi SiLAPOR-Ormas yang berfungsi sebagai sarana dan interaksi Ormas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu daerah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, hampir semua Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dihuni beraneka suku, ras dan agama tersebut menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten yang multikultural dan multiagama. Dengan beranekaragam ragam suku, ras dan agama akan sangat mudah terjadinya konflik apabila keragaman tidak dijaga dan dipelihara, oleh karena itu kehidupan harmonis dan rukun harus senantiasa dikokohkan di dalamnya, agar konflik tidak terjadi. Namun dalam perkembangan masih ada terjadi gesekan di kalangan antar suku, antar golongan dan antar agama. Pada Tahun 2023 terdapat beberapa potensi konflik yang telah diselesaikan, yaitu :

1. Ijin Pendirian Rumah Ibadat HKI di Kel. Angsau ada penolakan dari masyarakat dan masih belum bisa diberikan karena pihak dari gereja masih belum bisa memenuhi persyaratan yang diperlukan.





2. Ijin Pendirian Rumah Ibadat Umat Katolik di Kecamatan Bati – Bati, sempat ada kesalahpahaman antara pihak gereja dan masyarakat sekitar, namun setelah dilakukan mediasi oleh FKUB dan Kecamatan Bati – Bati, sehingga disepakati untuk disetujui pembangunan Rumah Ibadat namun tanpa mencantumkan simbol, nama gereja dan bentuk gereja sesuai adat istiadat sekitar.





3. Umat Salabi yang beralamat di Kel. Pabahanan RT 10 RW 4, melarang masyarakat menggunakan Langgar di Kel. Pabahanan RT 10 RW 4 untuk perayaan Maulid dan Isra Miraj, dilakukan mediasi sehingga kemudian Langgar bisa digunakan.



Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik



- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan :
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragaman dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan manunggal tuntung pandang (kegiatan bermalam di desa oleh Bupati, wakil bupati beserta ASN) yang dilaksanakan setiap bulan dengan materi terkait toleransi kehidupan umat beragama.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 26 ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 45,830,656,363.00 dan terealisasi Rp. 45,788,991,790.00 atau sebesar 99,91%.

Tabel 3.4.3  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	45,235,758,769.00	<b>45,224,560,350.00</b>
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	290,120,000.00	<b>288,485,000.00</b>
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	304,777,594.00	<b>275,946,440.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>45,830,656,363.00</b>	<b>45,788,991,790.00</b>



Tabel 3.4.4  
Efisiensi Sasaran Strategis 10

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100 %	99,91 %	0,09 %



## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 11

### Meningkatnya wawasan kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4.5  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah konflik sosial	Konflik	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023											100%

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Realisasi indikator jumlah konflik sosial tahun 2023 adalah 0 konflik atau tidak ada konflik yang terjadi. Konflik sosial tidak pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di Kabupaten Tanah Laut.

Di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik sosial. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya konflik melalui sosialisasi kepada anggota masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan rapat FKDM yang juga melibatkan seluruh anggota FKDM seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan tentang pelaporan Ancaman, Tantangan, Hmbatan dan Gangguan.
2. Pembentukan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), anggotanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan





Sipil, Kejaksaan, Polres, Kodim, BIN, dan Badan intelejen Strategis yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Optimalisasi pencegahan konflik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dengan materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pemangku kepentingan, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
4. Melaksanakan aksi P4GN melalui sidak/raja pada tempat hiburan malam bersama dengan BNN, Keploisian, Satpol PP, deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat yang ada ditempat hiburan di Tanah Laut.
5. Membentuk Perda tentang Fasilitasi Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.
6. Pembentukan satgas internal anti narkoba di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah banyak melakukan upaya dalam mempertahankan agar tidak terjadi konflik sosial selama tahun 2023. Namun ada 2 permasalahan yang berpotensi menjadi konflik/sengketa dan secepat mungkin telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan laporan, terjadi ada 2 (Dua) permasalahan di Tahun 2023 yaitu; sengketa Pengelolaan Taman Permana dan Sengketa Cetak lahan sawah, Kedua permasalahan tersebut telah dimediasi, dengan kronologi sebagai berikut :

a. TAMAN PERMANA DIDESA TELAGA

Manajemen/Pengelola Taman Permana di Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan pertemuan dengan warga sekitar yang juga berdekatan dengan Taman Permana.

Pertemuan bertempat di aula kantor Kecamatan Pelaihari. Dan hadir pula beberapa SKPD terkait. Adapun Agenda pertemuan membahas pelaksanaan

operasional Taman Permana yang dianggap mengganggu warga sekitar karena suara suara musik dari pengunjung yang melakukan perkemahan dilokasi tersebut.

Pada pertemuan tersebut terungkap bahwa operasioanal Taman Permana belum mempunyai izin usahanya, memperbolehkan pengunjung melakukan perkemahan, dan dari pihak pengelola Taman Permana belum mengizinkan pihak warga sekitar berjualan diarea Taman Permana selama operasional dan belum adanya pengurangan harga masuk untuk anak-anak yang masuk yang melakukan outbond.

Operasional Taman Permana untuk sementara dihentikan sambil menunggu pihak pengelola melengkapi perizinan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat apabila semua sudah terpenuhi diperbolehkan lagi untuk operasional.





### BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Harmoni Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dihadiri oleh sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir, telah dilaksanakan rapat koordinasi Forkopimcam Pelaihari dengan agenda : tindak lanjut Surat Ketua RT. 05/II Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Nomor : 04/116/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi aduan mengenai aktifitas Taman Permana yang terletak di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari,

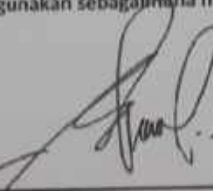
Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Sepakat membangun komunikasi yang baik antara Pengelola Taman Permana dengan Pemerintah Desa dan warga sekitar Taman Permana,
2. Pengelola Taman Permana bersedia menutup sementara Taman Permana sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan adanya kesepakatan membuka kembali berdasarkan hasil musyawarah antara pihak pengelola Taman Permana dengan Pemerintah Desa dan Warga sekitar Taman Permana,
3. Taman Permana dapat menerima rombongan dari Batola yang sudah dijadwalkan pada tanggal 18 Maret 2023, dan tidak menerima dari pihak lain.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
EDY PERMANA.

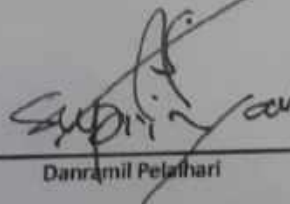
Pengelola Taman Permana

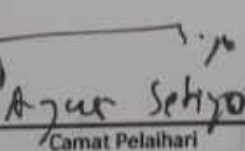


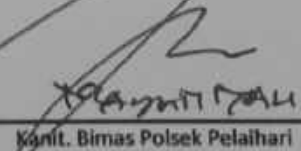
Kades Telaga

  
Ketua RT. 5

Ketua RT. 5

  
Danramil Pelaihari

  
Agus Setyo  
Camat Pelaihari

  
Kanit. Bimas Polsek Pelaihari



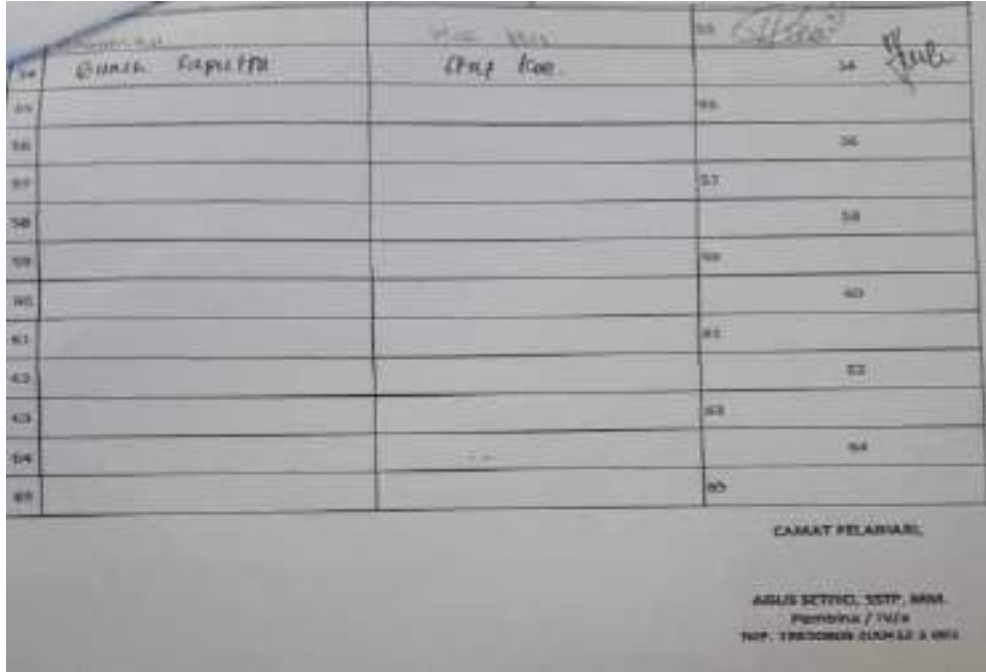


DAFTAR NAMA  
RESEP POLISIRASI PERSIRIHAN

KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	UMUR / INSTANSI	PANGKAD
1	Sugeng	1960	1
2	Heri	1965	2
3	Heri	1970	3
4	Agus	1975	4
5	Agus	1980	5
6	Agus	1985	6
7	Agus	1990	7
8	Agus	1995	8
9	Agus	2000	9
10	Agus	2005	10
11	Agus	2010	11
12	Agus	2015	12
13	Agus	2020	13
14	Agus	2025	14
15	Agus	2030	15
16	Agus	2035	16
17	Agus	2040	17
18	Agus	2045	18
19	Agus	2050	19
20	Agus	2055	20
21	Agus	2060	21
22	Agus	2065	22
23	Agus	2070	23
24	Agus	2075	24
25	Agus	2080	25
26	Agus	2085	26
27	Agus	2090	27
28	Agus	2095	28
29	Agus	2100	29
30	Agus	2105	30
31	Agus	2110	31
32	Agus	2115	32
33	Agus	2120	33
34	Agus	2125	34
35	Agus	2130	35
36	Agus	2135	36
37	Agus	2140	37
38	Agus	2145	38
39	Agus	2150	39
40	Agus	2155	40
41	Agus	2160	41
42	Agus	2165	42
43	Agus	2170	43
44	Agus	2175	44
45	Agus	2180	45
46	Agus	2185	46
47	Agus	2190	47
48	Agus	2195	48
49	Agus	2200	49
50	Agus	2205	50
51	Agus	2210	51
52	Agus	2215	52
53	Agus	2220	53
54	Agus	2225	54
55	Agus	2230	55
56	Agus	2235	56
57	Agus	2240	57
58	Agus	2245	58
59	Agus	2250	59
60	Agus	2255	60
61	Agus	2260	61
62	Agus	2265	62
63	Agus	2270	63
64	Agus	2275	64
65	Agus	2280	65
66	Agus	2285	66
67	Agus	2290	67
68	Agus	2295	68
69	Agus	2300	69
70	Agus	2305	70
71	Agus	2310	71
72	Agus	2315	72
73	Agus	2320	73
74	Agus	2325	74
75	Agus	2330	75
76	Agus	2335	76
77	Agus	2340	77
78	Agus	2345	78
79	Agus	2350	79
80	Agus	2355	80
81	Agus	2360	81
82	Agus	2365	82
83	Agus	2370	83
84	Agus	2375	84
85	Agus	2380	85
86	Agus	2385	86
87	Agus	2390	87
88	Agus	2395	88
89	Agus	2400	89
90	Agus	2405	90
91	Agus	2410	91
92	Agus	2415	92
93	Agus	2420	93
94	Agus	2425	94
95	Agus	2430	95
96	Agus	2435	96
97	Agus	2440	97
98	Agus	2445	98
99	Agus	2450	99
100	Agus	2455	100

NO	NAMA	UMUR / INSTANSI	PANGKAD
1	Agus	1960	1
2	Agus	1965	2
3	Agus	1970	3
4	Agus	1975	4
5	Agus	1980	5
6	Agus	1985	6
7	Agus	1990	7
8	Agus	1995	8
9	Agus	2000	9
10	Agus	2005	10
11	Agus	2010	11
12	Agus	2015	12
13	Agus	2020	13
14	Agus	2025	14
15	Agus	2030	15
16	Agus	2035	16
17	Agus	2040	17
18	Agus	2045	18
19	Agus	2050	19
20	Agus	2055	20
21	Agus	2060	21
22	Agus	2065	22
23	Agus	2070	23
24	Agus	2075	24
25	Agus	2080	25
26	Agus	2085	26
27	Agus	2090	27
28	Agus	2095	28
29	Agus	2100	29
30	Agus	2105	30
31	Agus	2110	31
32	Agus	2115	32
33	Agus	2120	33
34	Agus	2125	34
35	Agus	2130	35
36	Agus	2135	36
37	Agus	2140	37
38	Agus	2145	38
39	Agus	2150	39
40	Agus	2155	40
41	Agus	2160	41
42	Agus	2165	42
43	Agus	2170	43
44	Agus	2175	44
45	Agus	2180	45
46	Agus	2185	46
47	Agus	2190	47
48	Agus	2195	48
49	Agus	2200	49
50	Agus	2205	50
51	Agus	2210	51
52	Agus	2215	52
53	Agus	2220	53
54	Agus	2225	54
55	Agus	2230	55
56	Agus	2235	56
57	Agus	2240	57
58	Agus	2245	58
59	Agus	2250	59
60	Agus	2255	60
61	Agus	2260	61
62	Agus	2265	62
63	Agus	2270	63
64	Agus	2275	64
65	Agus	2280	65
66	Agus	2285	66
67	Agus	2290	67
68	Agus	2295	68
69	Agus	2300	69
70	Agus	2305	70
71	Agus	2310	71
72	Agus	2315	72
73	Agus	2320	73
74	Agus	2325	74
75	Agus	2330	75
76	Agus	2335	76
77	Agus	2340	77
78	Agus	2345	78
79	Agus	2350	79
80	Agus	2355	80
81	Agus	2360	81
82	Agus	2365	82
83	Agus	2370	83
84	Agus	2375	84
85	Agus	2380	85
86	Agus	2385	86
87	Agus	2390	87
88	Agus	2395	88
89	Agus	2400	89
90	Agus	2405	90
91	Agus	2410	91
92	Agus	2415	92
93	Agus	2420	93
94	Agus	2425	94
95	Agus	2430	95
96	Agus	2435	96
97	Agus	2440	97
98	Agus	2445	98
99	Agus	2450	99
100	Agus	2455	100



No	Luas (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )
34	1000	1000
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

b. SENSKETA CETAK LAHAN SAWAH

Sengketa cetak lahan sawah antar dua desa yaitu Desa Tambak Karya dan Desa Padang Luas.

Sengketa tersebut sudah dilakukan beberapa kali mediasi di wilayah kedua desa yang bertempat di kantor Camat Kurau, mediasi dihadiri beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui lebih detail terkait batas desa antar keduanya, karena proyek cetak sawah diprakarsai oleh desa Tambak Karya saat pelaksanaan kegiatan proyek luasan wilayah tidak mencukupi hal ini yang memungkinkan luasan area sampai di desa Padang Luas, inilah yang memicu pihak desa Padang Luas belum menerima batas-batas wilayah desa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan proyek cetak sawah.

Saat ini proyek cetak sawah terhenti menunggu kejelasan batas desa, hal ini mengakibatkan kerugian bagi warga yang mempunyai lahan di area rencana cetak sawah dikarenakan kalau untuk membuka lahan persawahan baru memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga dengan proyek cetak lahan sawah ini warga sangat diuntungkan dan tanpa mengeluarkan biaya dan bisa meningkatkan hasil panen di wilayah kec. Kurau dan Kab. Tanah Laut pada umumnya.

Kegiatan pembukaan lahan pertanian baru dihentikan, hingga disepakatinya batas lahan pertanian di kedua desa.



Koordinasi Ke Balai Desa Tambak Karya terkait sengketa Cetak Lahan sawah

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 26 ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 20,713,926,599.00 dan terealisasi Rp. 18,582,374,825.00 atau sebesar 89,71%.

Tabel 3.4.6  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,313,822,756.00	<b>1,177,829,234.00</b>
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4,265,910,445.00	<b>4,174,778,959.00</b>
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15,134,193,398.00	<b>13,229,766,632.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>20,713,926,599.00</b>	<b>18,582,374,825.00</b>



Tabel 3.4.7  
Efisiensi Sasaran Strategis 11

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100 %	89,71 %	10,29 %



**MISI V**

**Membangun sinegritas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 5 tujuan untuk misi V yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial
2. Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
3. Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan upaya membina desa dan menata kota

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 5 indikator yaitu angka kemiskinan, indeks Pembangunan Infrastruktur, persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks desa membangun.

Tabel 3.5.1  
Tujuan dan indikator tujuan misi V

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Persen	4.35
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	73,00
3	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persen	5.06
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Nilai	61,712
5	Peningkatan upaya membina desa dan menata kota	Indeks Desa Membangun (skor rata-rata)	Nilai	0,720 (Maju)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah

3. Menurunnya tingkat pengangguran
4. Meningkatnya perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
6. Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah
7. Meningkatnya ketahanan pangan
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
9. Meningkatnya pembinaan desa
10. Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diukur melalui 3 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.2  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,5	3.47	99.14	4	5,12	<b>128%</b>	5,05	4,78	94,65%
2	Indeks Gini	Skor	0.255	0.232	109.91	0,254	0,263	<b>96,58%</b>	0,225	0,259	86,87%
3	PDRB Per kapita atas dasar harga konstan	Rp Juta	11,6	29.68	255.86	36,81	30,62	<b>83,18%</b>	39,02	32,10	82,26%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											87,92%

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

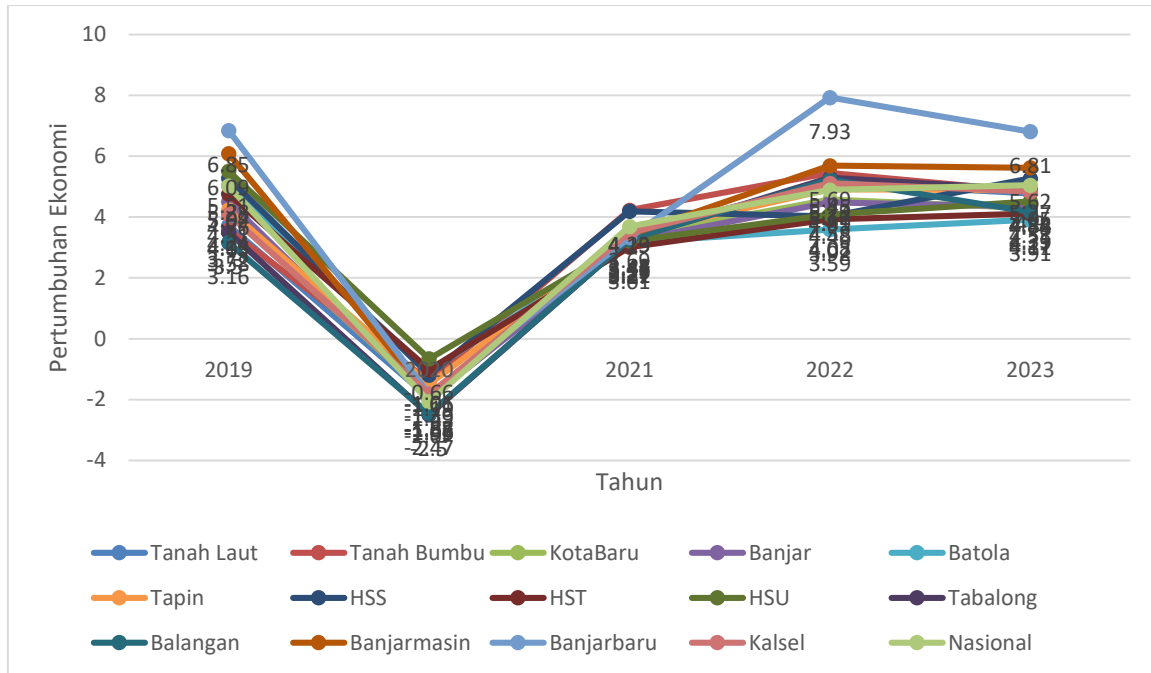
Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 4,78, terjadi penurunan sebesar 0,34 point dari tahun 2022 dengan capaian 94,65%. untuk Tahun 2022 adalah sebesar 5,12 dengan tingkat capaian sebesar 128% dari target sebesar 5,12.



Berikut perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2023.

Grafik 3.5.1

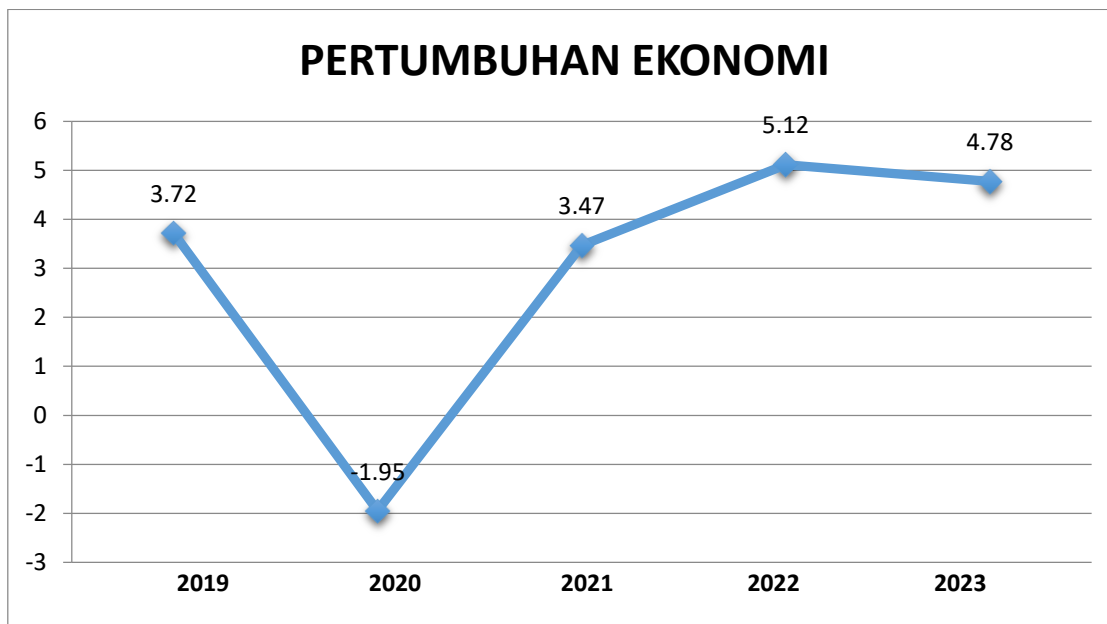
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Di atas disajikan laju pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dan penurunan di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berada dibawah Kabupaten Tanah Bumbu tetapi lebih tinggi dari Kota Baru, sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.5.2  
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil membangkitkan perekonomian daerah. Namun terjadi penurunan di tahun 2023. Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 pada angka 4,78, turun 0,34 point dari tahun 2022 di angka 5,12, tahun 2021 berada di angka 3,47 dan pada tahun 2020 di angka -1,95.

Banyak Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0 % untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM dan lain-lain Sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

Program ini dijalankan melalui penunjukan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai pengelola investasi (Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, dengan Penunjukan Pelaksanaan Pengelolaannya Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanah Laut). Pencapaian program tersebut yaitu :





- a. Dilaunchingnya “GAPURA KAROMAH” (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah)
- b. Tahun 2019 dan disalurkan ke kredit 6 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 4 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar.
- c. Tahun 2020 yang disalurkan ke kredit 4 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 6 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar
- d. Tahun 2021 yang disalurkan ke kredit 2 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 3 Milyar dengan jumlah investasi 5 Milyar.
- e. Tahun 2022 yang disalurkan ke kredit 6 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 4 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar
- f. Tahun 2023 yang di salurkan ke kredit 4 Milyar dan yang di Kelola oleh BPR 6 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar

Sehingga total yang disalurkan ke kredit berjumlah 18 Milyar dan total yang dikelola oleh BPR berjumlah 17 Milyar dari total seluruh investasi berjumlah 35 Milyar.

Penyaluran Gapura Karomah :

- a. Sektor Pertanian total realisasi 1.603 orang dengan nominal Rp.12.687.550.000,-
- b. Sektor Perdagangan total realisasi 403 orang dengan nominal Rp.2.491.000.000,-
- c. Sektor Peternakan total realisasi 522 orang dengan nominal Rp. 5.890.000.000,-
- d. Sektor Perikanan total realisasi 34 orang dengan nominal Rp.209.000.000
- e. Sektor Industri total realisasi 20 orang dengan nominal Rp.118.000.000

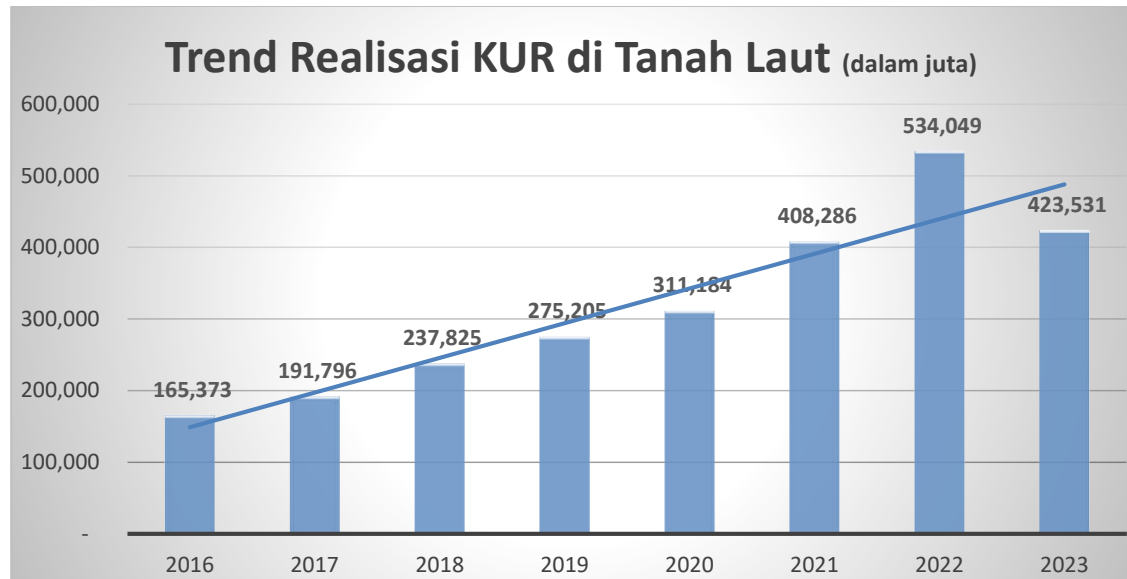
Posisi Akhir Desember 2023 Dana yang dikelola Gapura Karomah dengan total penyaluran kredit kepada 2.259 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Investasi Tahap 1 Dana Masuk 10 Milyar dikembalikan Rp.6.000.000.000,- dan yang dikelola BPR Rp.4.000.000.000
- b. Investasi Tahap 2 Dana Masuk 10 Milyar dikembalikan Rp. 4.000.000.000,- dan yang dikelola BPR Rp.6.000.000.000
- c. Investasi Tahap 3 Dana Masuk 5 Milyar dikembalikan Rp. 2.000.000.000,-



- yang dikelola BPR Rp.3.000.000.000
- d. Investasi Tahap 4 Dana Masuk 10 Milyar dengan alokasi dana yang disalurkan untuk kredit gapura karomah berjumlah Rp.6.000.000.000 dan yang dikelola BPR Rp.4.000.000.000.
  - e. Investasi Tahap 5 Dana Masuk 10 Milyar dengan alokasi dana yang disalurkan untuk kredit gapura karomah berjumlah Rp.4.000.000.000 dan yang dikelola BPR Rp.6.000.000.000.
2. Memperkuat permodalan kepada pelaku UMKM dengan memaksimalkan program Nasional yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Capaian serapan KUR ditahun 2023 adalah sebesar Rp. 418.007.400.008,- (empat ratus delapan belas milyar tujuh juta tujuh ratus ribu delapan rupiah) jumlah ini turun sebesar Rp. 112.548.449.992,- (seratus dua belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dari tahun 2022 yaitu Rp 530.555.850.000,- (lima ratus tiga puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), atau turun sebesar 21,21%. Adapun penurunan realisasi KUR di Tanah laut pada tahun 2023 disebabkan antara lain:
- a) musim kemarau yang berkepanjangan sehingga para petani tidak berani mengajukan pinjaman KUR untuk produksi pertanian;
  - b) adanya kelengkapan syarat tambahan yang diminta oleh pihak penyalur;
  - c) sudah ada pembatasan oleh pihak perbankan terhadap porsi penyaluran KUR Mikro; dan
  - d) melambannya pertumbuhan kredit pada sector UMKM berimbas pada turunnya penyaluran KUR

Sementara data capaian penyaluran pembiayaan UMi (Ultra Mikro) di Tahun 2023 sebesar Rp 5.523.355.000 (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau meningkat 55,91% di bandingkan penyaluran tahun 2022.



Adapun tahapan kegiatan dalam rangka mendorong realisasi KUR dan Umi di Tanah Laut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan jenis usaha dan lokasi usaha pada masing – masing Kecamatan dan Desa sebagai calon debitur potensial untuk dapat dibiayai KUR.
  - b. Melakukan proses upload data hasil identifikasi pelaku usaha ke aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian.
  - c. Melakukan pendampingan/monitoring dan evaluasi atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit.
  - d. Membuat Iklan KUR
  - e. Mensosialisasikan program KUR dan Umi kepada debitur Gapura Karomah yang telah sukses dan potensial untuk naik kelas.
  - f. Mendorong debitur yang tidak bisa dibiayai dengan permodalan Gapura Karomah untuk mendapatkan fasilitas Kredit Umi atau KUR Ultra mikro
  - g. Mendorong koperasi – koperasi yang ada di Tanah Laut untuk menjadi penyalur pembiayaan Umi.
3. Kebijakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha BUMD;  
Dalam rangka peningkatan dan pengembangan BUMD telah dilaksanakan beberapa kebijakan antara lain:
- a) Mengajukan draft rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp



- 53.000.000.000 (lima puluh tiga milyar rupiah) dan telah di setujui oleh DPRD Kabupaten Tanah Laut
- b) Mengajukan draft rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Tanah Laut sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan telah beproses di DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk dibahas dan disahkan
  - c) Melakukan evaluasi kinerja PDAM Tanah Laut bekerja sama dengan BPKP Kalimantan Selatan, Kinerja PDAM Tanah Laut sekarang sudah semakin membaik
  - d) Melakukan evaluasi kinerja PD. Baratala dan melakukan penyusunan kajian analisis untuk penambahan modal Pemerintah Kepada PD. Baratala
  - e) Melaksanakan asistensi dan penilaian terhadap RKAP masing – masing BUMD.
4. Penggunaan Market Place Tanah Laut “SOSIALITA” (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut untuk memberdayakan UKM dan UMKM yang ada di Tanah Laut.
5. Program Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%.  
Peningkatan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk perwujudan visi misi Kabupaten Tanah Laut pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu “Desa Dibina Kota Ditata” dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran 2018-2023 adalah sebesar :
- a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut
  - b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018
  - c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
  - d. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
  - e. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2022 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.

- f. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2023 sebesar Rp. 125.694.990.896 dari total anggaran Rp. 125.694.990.896 dengan persentase capaian 100%.
6. Kegiatan Operasi Pasar merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga terjangkau dengan kata lain **pasar murah** dilakukan dengan menjual bahan pangan pokok secara langsung ke konsumen dengan harga di bawah harga **pasar** atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian Kegiatan Pasar murah di laksanakan Kembali di Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 35 kali Kegiatan dan tercapai melebihi dari target keseluruhan di angka 53 Kali kegiatan, sehingga realisasi capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 151 %.

Rincian Jadwal dan Tempat pelaksanaan pasar murah Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.2  
Daftar pelaksanaan kegiatan pasar murah di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Tanggal	Desa	Kecamatan	Pelaksana	Kegiatan
1	20 Januari 2023	Damit Hulu	Batu Ampar	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
2	25 Januari 2023	Panggung Baru	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
3	27 Januari 2023	Martadah	Tambang Ulang	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
4	1 Februari 2023	Panggung	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
5	3 Februari 2023	Batu Tungku	Panyipatan	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
6	10 Februari 2023	Kintapura	Kintap	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
7	15 Februari 2023	Atu-Atu	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP



8	22 Februari 2023	Sungai Riam	Panyipatan	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
9	24 Februari 2023	Batilai	Takisung	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
10	3 Maret 2023	Damar Lima	Batu Ampar	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
11	6 Maret 2023	Hari Ulang Tahun Satpol PP	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Pasmur Ultah Satpol PP
12	7 Maret 2023	Pemuda	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
13	10 Maret 2023	Sambangan	Bati-Bati	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
14	<b>15 Maret 2023</b>	<b>Lap.Petasi</b>	<b>Pelaihari</b>	<b>Dinas Perdagangan Prov.Kalsel</b>	<b>Menjelang Bulan Ramadhan 1444 H/2023 M</b>
15	17 Maret 2023	Sungai Cuka	Kintap	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
16	31 Maret 2023	Ranggang	Takisung	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
17	3 April 2023	Sungai Pinang	Tambang Ulang	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
18	<b>6 April 2023</b>	<b>Hal.Kantor Kec.Kurau</b>	<b>Kurau</b>	<b>Dinas Perdagangan Prov.Kalsel</b>	<b>Bulan Ramadhan 1444 H/2023 M</b>
19	13 April 2023	Kodim 1009 pelaihari	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Pasmur Mandiri
20	17 April 2023	Ujung Bati	Bati-Bati	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
21	19 April 2023	Lap.Pertasi Kencana Pelaihari	Batu Ampar	Diskopdag Kab.Tala dan Forkopimda)	Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M
22	5 Mei 2023	Kurau Utara	Bumi Makmur	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
23	10 Mei 2023	Ujung Batu	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
24	12 Mei 2023	Maluka Baulin	Bumi Makmur	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
25	17 Mei 2023	Telaga	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
26	19 Mei 2023	Pandahan	Bati-Bati	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
27	20 Mei 2023	Gunung Timah Tanjung Dewa	Panyipatan	Diskopdag Kab.Tala	HUT Divisi 4 Alri



28	29 Mei 2023	Kintap Kecil	Kintap	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
<b>29</b>	<b>08 Juni 2023</b>	<b>Tanjung Dewa</b>	<b>Panyipatan</b>	<b>Bekerjasa Dengan Disdag Prov.Kalsel</b>	<b>Menjelang Idul adha 1444 H/2023 M</b>
30	09 Juni 2023	Batakan	Panyipatan	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
31	14 Juni 2023	Bumi Jaya	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
32	16 Juni 2023	Bentok Kampung	Bati-Bati	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
33	21 Juni 2023	Kunyit	Bajuin	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
34	27 Juni 2023	Kurau	Kurau	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
35	05 Juli 2023	Tampang	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
36	07 Juli 2023	Jilatan	Batu Ampar	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
37	14 Juli 2023	Handil Maluka	Bumi Makmur	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
38	18 Juli 2023	Tambak Karya	Kurau	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
39	21 Juli 2023	Ranggang Dalam	Takisung	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
40	22 Juli 2023	Lap.Pertasi Kencana	Pelaihari	Diskopdag Kab.Tala	Halal Bihalal Barabai Murakata
41	10 Agustus 2023	Telaga Langsung	Takisung	Diskopdag Kab.Tala	Penutupan TMMD Ke - 117 Kodim 1009/Tanah Laut
42	25 Agustus 2023	Pantai Harapan	Bumi Makmur	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
43	4 September 2023	Salaman	Kintap	Diskopdag Kab.Tala	Manunggal TP
44	14 November 2023	Tanjung	Bajuin	Diskopdag Kab.Tala	Mandiri
<b>45</b>	<b>17 November 2023</b>	<b>RTH Kijang Mas Permai Pelaihari</b>	<b>Pelaihari</b>	<b>Bekerjasa Dengan Disdag Prov.Kalsel)</b>	<b>Menjelang NATARU</b>
46	20 November 2023	Bentok Darat	Bati-Bati	Diskopdag Kab.Tala	Mandiri
47	22 November 2023	Jorong	Jorong	Diskopdag Kab.Tala	Mandiri
48	27 November 2023	Kebun Raya	Kintap	Diskopdag Kab.Tala	Mandiri
49	29 November 2023	Batu Mulya	Panyipatan	Diskopdag Kab.Tala	Mandiri



50	1 Desember 2023	Gunung Mas	Batu Ampar	Diskopdag Kab.Tala	Mandiri
51	13 Desember 2023	Lap.Sepak Bola Samping BPTU-HPT Sungai Jelai	Tambang Ulang	Diskopdag Kab.Tala	Turdes Insting
52	14 Desember 2023	SDN Benua Lawas 3	Takisung	Diskopdag Kab.Tala	Turdes Insting
53	15 Desember 2023	Lap.Sepak Bola Batu Ampar	Batu Ampar	Diskopdag Kab.Tala	Turdes Insting

Sumber: Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Perdagangan

Dengan memperhatikan potensi ekonomi serta berbagai hal terkait pencapaian target pembangunan di masa yang akan datang, maka beberapa kebijakan perlu disiapkan, diantaranya:

#### **Perubahan basis ekonomi**

Ketergantungan yang besar pada hasil eksploitasi alam akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam memperhatikan kualitas lingkungan serta keterbatasan dalam potensi yang dimilikinya, sehingga perlu diupayakan kedepan Kabupaten Tanah Laut memiliki basis ekonomi yang berdasarkan pada potensi alam yang dimiliki dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Perlu disiapkan kesepakatan dan perangkat kebijakan yang mendukung perubahan dari basis ekonomi primer menjadi basis ekonomi sekunder dan tersier untuk pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

#### **Pertanian dan Industri**

Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian adalah dengan cara peningkatan nilai tambah. Salah satu caranya adalah menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku industri yang terdapat pada daerah tersebut. Industri pengolahan makanan yang bahan bakunya berasal dari wilayah setempat, selain mampu menggerakkan ekonomi juga mampu melibatkan banyak aktor ekonomi lokal sehingga memungkinkan penciptaan angka pengganda yang tinggi. Perangkat kebijakan yang diperlukan adalah mendorong suasana kondusif bagi kegiatan investasi dalam pengembangan industri





pengolahan hasil pertanian agar lebih mendorong para investor baik lokal maupun nasional untuk masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu diperlukan seperangkat kebijakan untuk mendukung kegiatan investasi di bidang industri melalui penyiapan infrastruktur pendukung untuk membantu kegiatan industri dalam mencapai tingkat efisiensi dalam berusaha.

### **Upaya peningkatan perhatian pada kualitas lingkungan.**

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas ekonomi selalu bersinggungan dengan menurunnya kualitas lingkungan sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Upaya meningkatkan aktivitas industri dalam upaya peningkatan nilai tambah perlu disertai dengan kebijakan lingkungan. Mitigasi resiko atas kegiatan-kegiatan industri yang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan harus diidentifikasi sejak dini.

Seperangkat aturan, baik yang berisi tentang kewajiban dan dukungan pemerintah daerah terkait masalah lingkungan harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

### **Pemanfaatan dan optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pelabuhan laut berstandar internasional**

Jika PSN dan pelabuhan laut di Kabupaten Tanah Laut benar-benar terealisasi sebagaimana rencana yang telah disusun, maka pemanfaatannya harus benar-benar direncanakan dengan baik. PSN ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, pelabuhan laut berstandar internasional ini akan berfungsi sebagai pintu masuk maupun keluar bagi semua barang/produk baik faktor produksi maupun hasil industri bagi Kabupaten Tanah Laut maupun juga bagi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keduanya, diperlukan dukungan kelengkapan infrastruktur ekonomi yang berkualitas sebagai penghubung/penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan,



karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang.

### **Menjaga daya beli masyarakat**

Komponen terpenting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut adalah tingginya konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi masyarakat masih mendominasi aktivitas ekonomi, sehingga kemampuan daya beli masyarakat harus dipertahankan agar komponen konsumsi ini tetap mampu memberikan dukungan pada ekonomi daerah. Oleh karena itu kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat sangat diperlukan. Kebijakan ini dapat melalui pencapaian pendapatan per kapita yang meningkat, kebijakan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), kebijakan pengamanan ketersediaan bahan yang dibutuhkan masyarakat melalui penataan logistik yang sesuai, dan lain sebagainya.

### **Peningkatan peran perbankan**

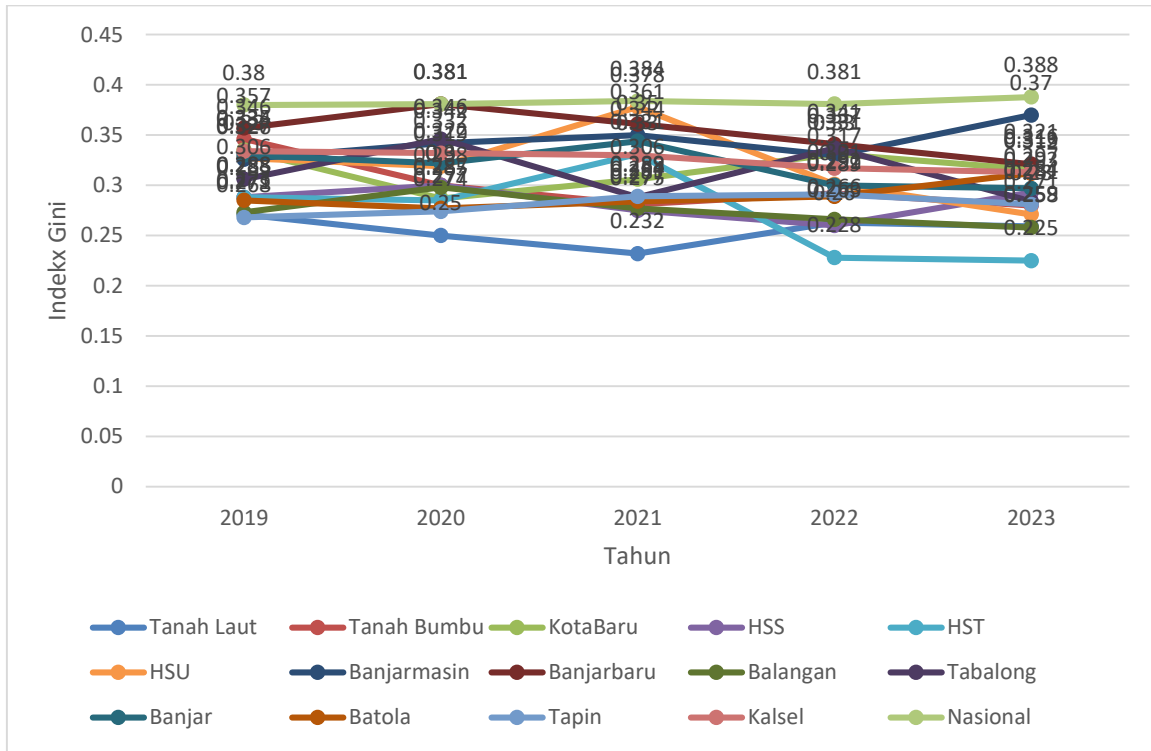
Perbankan yang memainkan peran penting dalam perekonomian perlu diberikan porsi yang lebih besar agar lebih berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi sektoral. Melalui aktivitas perbankan, baik peningkatan sisi simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) maupun penyaluran melalui kredit akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Maka dibutuhkan pendekatan yang sesuai agar perbankan memberikan perhatian dan dukungan bagi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut melalui penyaluran kredit pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian, misalnya industri dan pertanian.

## **b. Indeks Gini**

Indeks Gini Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sebesar 0,259 turun sebesar 0.040 dari tahun 2022 sebesar 0,263. Indeks Gini tahun 2023 belum mencapai target sebesar 0,225 atau tingkat capaiannya sebesar 86,87%.

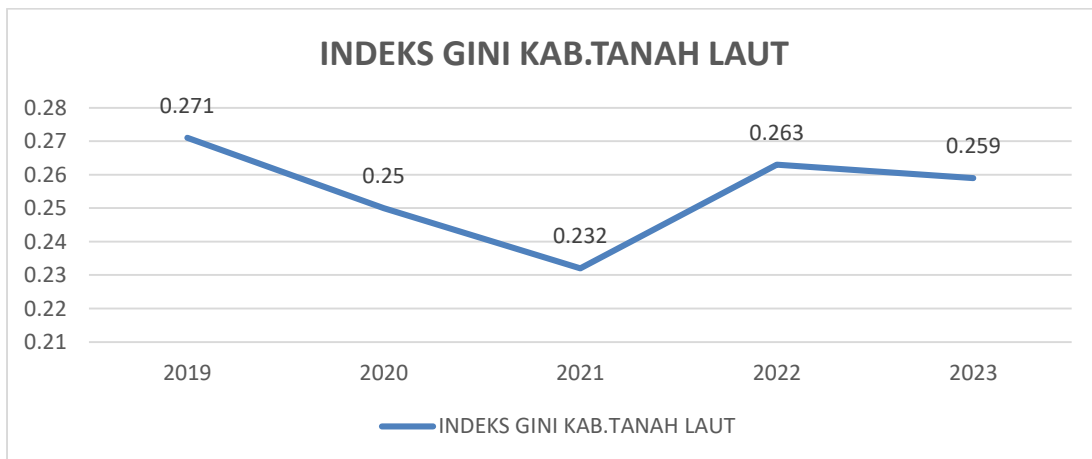


Grafik 3.5.3  
Indeks Gini Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Grafik 3.5.4  
Indeks Gini Kab. Tanah Laut 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama periode 2019-2023 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2020 gini ratio tercatat sebesar 0,250 atau mengalami penurunan sebesar 0,020 dibanding tahun 2019. Pada tahun 2022 gini ratio tercatat



sebesar 0,263 atau mengalami peningkatan sebesar 0,031 dibanding tahun 2021. Sementara pada tahun 2023 gini ratio tercatat sebesar 0,259. Artinya distribusi pengeluaran penduduk Kabupaten Tanah Laut cenderung semakin menimpang. Namun demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah karena nilainya masih dibawah nilai 0,3.

Upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengurangi ketimpangan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan angka stunting berdasarkan eppgbm tahun 2023 dengan prevalansi stunting 4,55 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2022 dengan Prevalansi stunting 5,35 dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari angka 15,5%. Sedangkan berdasarkan SSGI 2022 prevalansi stunting Kabupaten Tanah Laut masih pada angka 26,6%.
2. Pelaksanaan program UHC (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh masyarakat Tanah Laut dengan program JKN KIS melalui APBD bagi masyarakat yang belum tercover oleh APBN, maupun JKN KIS mandiri. Dengan total jumlah penduduk yang belum terdaftar adalah 11.618 jiwa atau sebesar 3,29,% dari seluruh jumlah penduduk yaitu 348.226 jiwa (data penduduk hasil registrasi Disdukcapil Tahun 2022). Sedangkan untuk tahun 2023 total jumlah penduduk yang belum terdaftar adalah 19.803 atau sebesar 5,49% dari seluruh jumlah penduduk yaitu 360.967 jiwa (data penduduk hasil registrasi Disdukcapil Tahun 2023). Mengalami peningkatan jumlah yang belum terdaftar dikarenakan .....
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yaitu dengan pembangunan jalan dan jembatan, box culvert dengan data lengkap sebagaimana tersaji pada indikator indeks pembangunan infrastruktur.
4. berusaha menurunkan angka kemiskinan salah satunya dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat termasuk PMKS. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 3.5.4

## Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

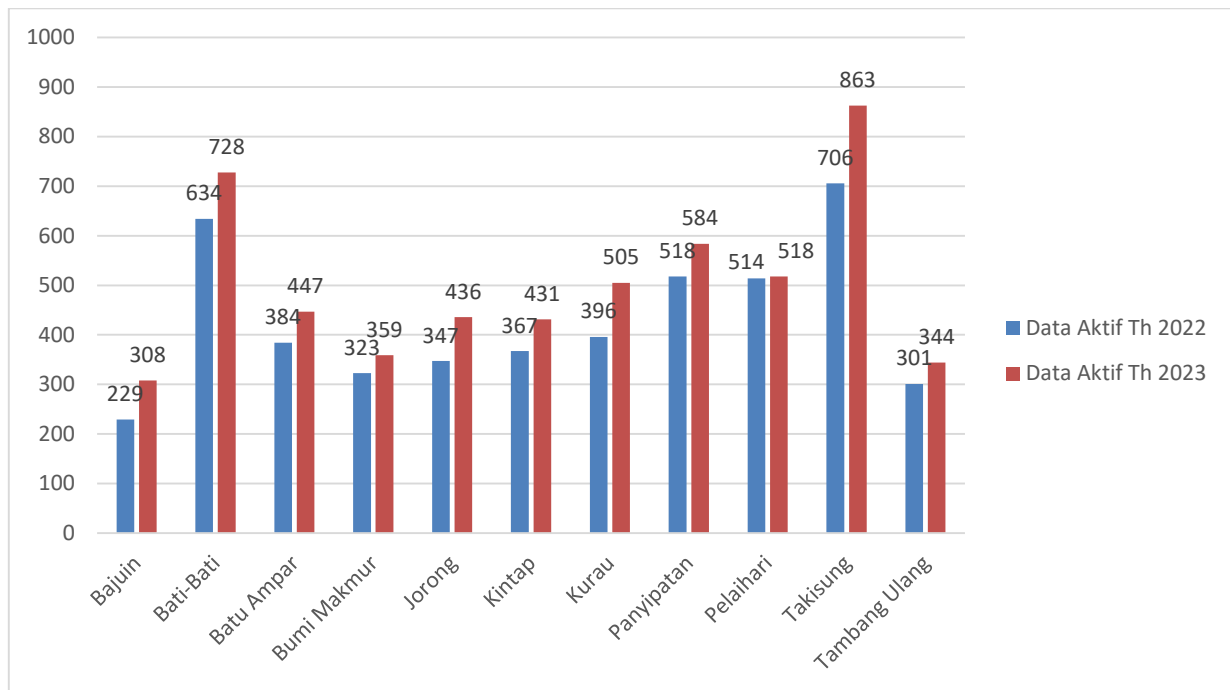
No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber Dana	
				APBN	APBD
1.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	11.597 Jiwa		APBD
2.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	65.177 Jiwa	APBN	
3.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	3.627 Jiwa		APBD
4.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	456 Jiwa		APBD
5.	Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE	9 Orang		APBD
6.	Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar	Anak Terlantar	15 Orang		APBD
7.	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Penyandang Disabilitas	10 orang	APBD Prov.	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi sebanyak 1141 orang selama tahun 2023.

6. Pembinaan IKM oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi IKM yang tumbuh dan berkembang di tahun 2023 dengan total IKM adalah sebanyak 4.719 IKM.

Grafik 3.5.5  
Jumlah IKM Tahun 2023 di Kab. Tanah Laut



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

7. Tumbuhnya pasar-pasar dan toko online yang menjangkau sampai dengan pelosok daerah seperti Pasar Pelaihari Online, Ojek Online, Pasar Takisung Online.
8. Pengalokasian ADD sebesar Rp. 125.694.990.896 terealisasi sebesar Rp. 125.694.990.896 atau sebesar 100%.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan dalam rangka penurunan Gini Ratio adalah:

- a. Terus mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penurunan stunting yg merupakan rencana aksi daerah dalam pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting.
- b. Pelaksanaan penanggulangan stunting dengan memfokuskan pada 27 Locus Desa Stunting pada 6 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2024.

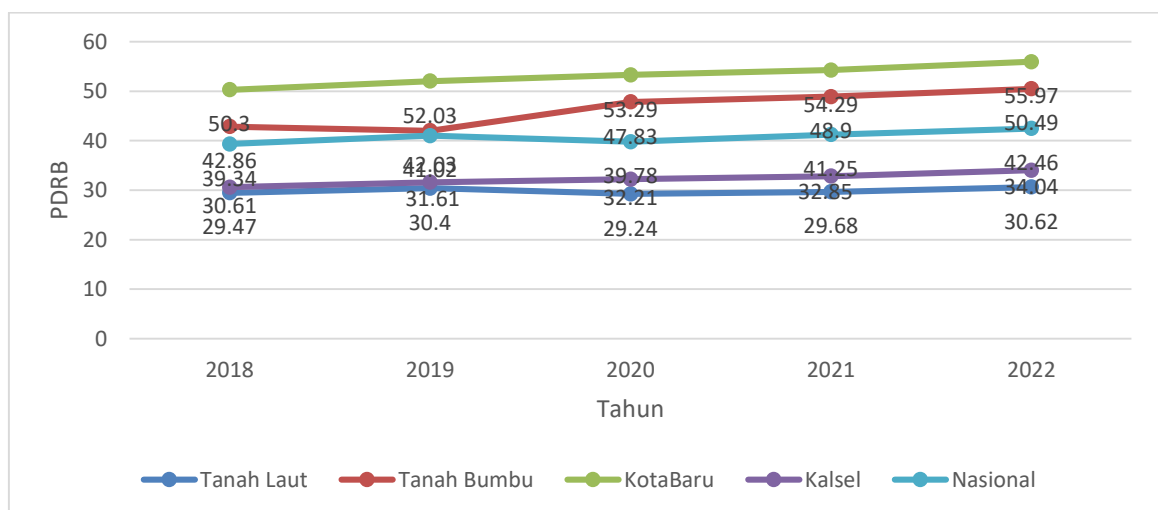


- c. Pembinaan terhadap industri industri kecil dan mikro;
- d. Terus melakukan pelatihan tenaga kerja siap pakai 500 orang setiap tahun yang merupakan program unggulan Bupati.
- e. Pemagangan tenaga kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
- f. Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam hal pemagangan tenaga kerja.

**c. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan**

Realisasi indikator PDRB Perkapita atas dasar harga konstan tahun 2023 sebesar 32,10 juta rupiah. Mengalami peningkatan sebesar 1,48 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 30,62 juta rupiah. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 39,02 juta rupiah dengan tingkat capaian 82,26%. Dikarenakan PDRB perkapita ADHK Kabupaten/Kota tahun 2023 belum rilis seluruhnya, berikut perbandingan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2022.

Grafik 3.5.6  
Perbandingan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Regional  
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan angka 30.62 (juta rupiah) lebih rendah jika dibandingkan



dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka masing-masing 55,97 dan 50,49 (juta rupiah). Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 34,04 (juta rupiah), terpaut berbeda 3,42 (juta rupiah) dan lebih rendah sebesar 11,84 (juta rupiah) jika dibandingkan dengan nasional sebesar 42,46 juta rupiah. Berikut disajikan PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut tahun 2016-2022.

Tabel 3.5.5  
PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Nilai PDRB/GRPD(Milyar Rupiah/Billion rupiahs)</b>							
<b>ADHB/ at current price</b>	12.329,41	13.241,24	13.902,30	13.786,69	15.326,24	<b>19.019,17</b>	20.165,71
<b>ADHK/ at 2010 Constant Price</b>	9.550,76	9.995,21	10.366,65	10.164,06	10.515,15	<b>11.053,37</b>	11.584,22
<b>PDRB per Kapita/Per Capita GRPD (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)</b>							
<b>ADHB/ at current price</b>	36.878,19	39.037,24	40.773,03	39.659,54	43.252,93	<b>52.678,29</b>	55.870
<b>ADHK/ at 2010 Constant Price</b>	28.567,05	29.467,46	30.403,58	29.238,50	29.675,33	<b>30.615,03</b>	32.100
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of per Capita GDRP at 2010Constant Price</b>	3,06	3,15	3,18	-3,83	1,51	<b>3,17</b>	3,57
<b>Jumlah Penduduk (orang)/ Population (people)</b>	334.328	339.195	340.968	347.626	352.466	<b>356.763</b>	360.925
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/ Population Growth (percent)</b>	1,53	1,46	0,52	1,95	1,93	1,89	1,16

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

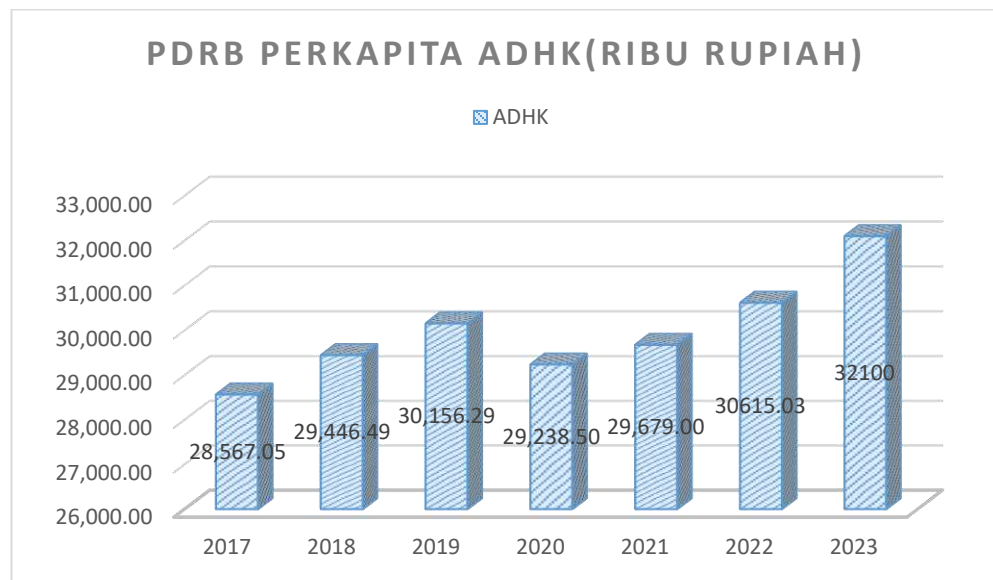
Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel diatas. Selama tahun 2017-2023, PDRB per kapita atas dasar harga konstan Tanah Laut semakin meningkat setiap tahunnya dari 28.567 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 29.467,46 juta rupiah pada tahun 2028. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu dari 30.403 juta rupiah menjadi 29,238 juta rupiah dikarenakan pandemi Covid-19.

PDRB per kapita Tanah Laut selama tahun 2017-2023 sebagian besar mengalami pertumbuhan yang meningkat semenjak tahun 2017. Kondisi tersebut



dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Tanah Laut dalam kurun waktu yang sama.

Grafik 3.5.7  
ADHK/ AT 2010 CONSTANT PRICE



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Peningkatan PDRB perkapita ADHK di tahun 2020 mengalami penurunan dibanding Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang melanda hampir diseluruh dunia dimana diberlakukannya pembatasan ekonomi berskala besar yang membatasi pergerakan masyarakat terhadap kegiatan perekonomian. Covid 19 menyebabkan banyaknya Pekerja yang di PHK mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, selain itu juga bertambahnya penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut, dimana data dari Dinas Sosial jumlah PMKS pada Tahun 2019 sebanyak 31.847 jiwa dan di Tahun 2020 menjadi 45.090 jiwa, dan meningkat lagi di Tahun 2021 menjadi 109.173 dikarenakan terjadinya bencana banjir dan masih adanya pandemic Covid 19 di Kabupaten Tanah Laut.

Pada tahun 2023 PDRB perkapita ADHK di tahun 2023 kembali meningkat pada angka 32,10 juta rupiah.

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 38 ASN pada Dinas Peternakan dan



Kesehatan Hewan, 132 ASN pada Distanhorbun, 28 ASN pada Diskopdag, 18 ASN pada DPMPTSP dan di dukung oleh 19 Program dengan Pagu Rp. 24,665,528,040.00 dan terealisasi Rp. 22,386,844,892.00 atau sebesar 90,76%.

Tabel 3.5.6  
Realisasi Program Penunjang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,152,024,928.00	1,027,307,960.00
2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526,018,244.00	428,941,060.00
3	Program Penyuluhan Pertanian	486,414,193.00	435,211,785.00
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	372,036,290.00	278,751,000.00
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	995,244,459.00	930,952,114.00
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00	13,071,611,279.00
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2,998,281,286.00	2,488,770,109.00
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00	1,957,188,011.00
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	414,955,440.00	375,461,500.00
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	82,080,387.00	71,168,896.00
11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31,294,323.00	18,844,450.00
12	Program Pelayanan Penanaman Modal	137,184,647.00	99,220,480.00
13	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427,799,348.00	367,612,060.00
14	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159,232,261.00	147,036,160.00
15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211,226,039.00	179,322,160.00
16	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	115,196,383.00	82,476,000.00
17	Program Promosi Penanaman Modal	434,828,300.00	426,969,868.00
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,152,024,928.00	1,027,307,960.00
19	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526,018,244.00	428,941,060.00
		24,665,528,040.00	22,386,844,892.00



Tabel 3.5.7  
Efisiensi Sasaran Strategis 12

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
90,76 %	90,76 %	- %



### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 13

#### Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.8  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

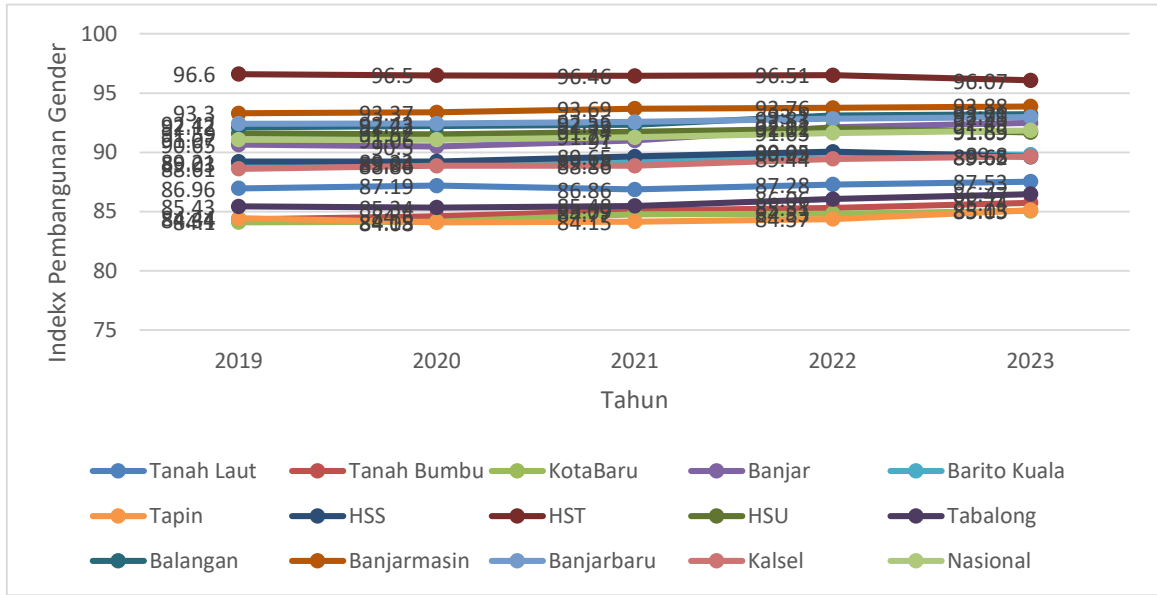
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88.75	86.86	97.87	89	87.28	98.07%	89.50	87,53	97,79
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>97,79 %</b>

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender).

Realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 adalah 87,53 dengan capaian 97,79%. Sedangkan realisasi IPG tahun 2022 adalah 87,28. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 0,25 point jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 87,28. Realisasi tersebut sudah mencapai 97,79% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 89,50. Berikut perbandingan indeks pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2023.



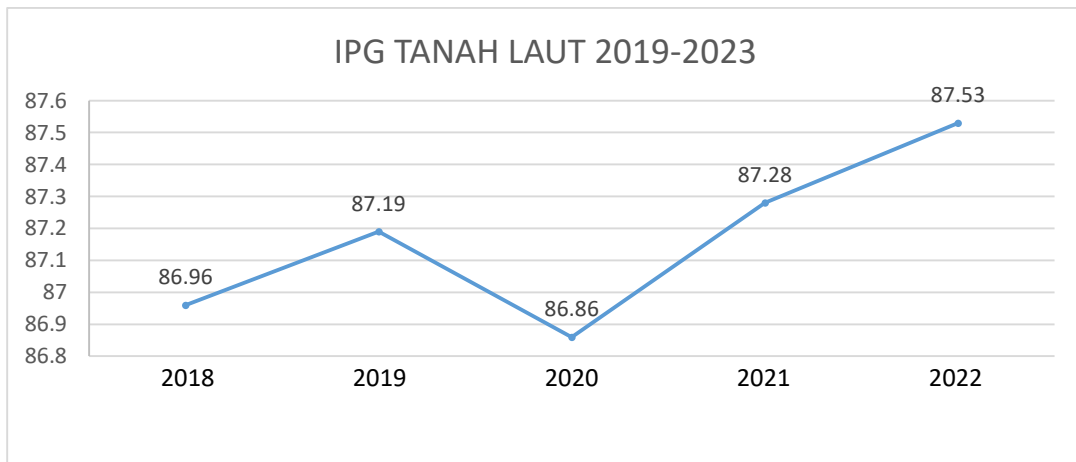
Grafik 3.5.8  
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023



Sumber : BPS Kalimantan Selatan

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indeks pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 pada skor 87,53, lebih rendah 2,12 point jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 89,65. Berikut grafik perkembangan indek pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2018-2022.

Grafik 3.5.9  
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Laut 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut



Indikator komposit yang ada adalah Harapan Lama Sekolah, Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita. Dari sisi pendidikan perempuan Kab.Tala telah mendapat kesempatan yg sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yg menerima ijazah akhir, rasio APM, serta angka HLS, namun jika dilihat dari rata-rata Angka Lama Sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Partisipasi perempuan meningkat dalam pemerintahan yang tercermin dari angka persentase jumlah ASN perempuan yang meningkat, namun dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan masih rendah pada periode 2019-2023 yaitu 20% (7 perempuan dari 35 anggota dewan).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DP2KBP3A dalam penyataran gender diantaranya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender.
2. Pelaksanaan reviu dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender.
3. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG.
4. Perlunya penguatan mekanisme koordinasi, dan sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG.
5. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.
6. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah.
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.
8. Pendekatan pembangunan yang mengkoordinir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
9. Mengupayakan perbaikan terhadap posisi perempuan dalam kependudukan di masyarakat melalui peningkatan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan.
10. Melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk



memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

### 11. SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/511-KUM/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (POKJA PUG) dan Tim Pengarustamaan Gender Tingkat Kabupaten Tanah Laut

The document includes a table of members for the POKJA PUG and the Gender Mainstreaming Team. Below is a transcription of the table content:

NO.	JABATAN DALAM TIM	JANISIAH DALAM TIM
1	Bupati	Wibisono
2	Wakil Bupati	Fitriana
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Setia
4	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Setiawan
5	Kepala Dinas Kesehatan	Anggrita
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang	Anggrita
7	Kepala Dinas Sosial	Anggrita
8	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggrita
9	Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Anggrita
10	Kepala Dinas Perhubungan	Anggrita
11	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggrita
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggrita
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Anggrita
14	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Anggrita
15	Kepala Dinas Kebudayaan	Anggrita
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggrita
17	Kepala Dinas Perencanaan, Urbanisasi, Desa dan Pembangunan	Anggrita
18	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
19	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
20	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
21	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
22	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
23	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
24	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
25	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita
26	Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggrita



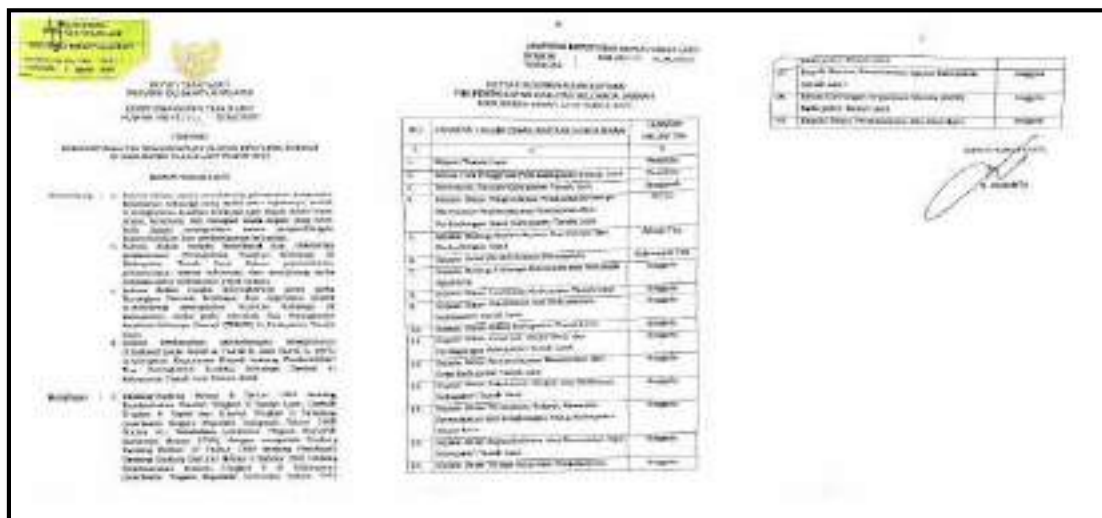
**Keterangan:** Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender dan Bimbingan Teknis Pengarustamaan Gender serta Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

Beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG).
2. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Masih belum meratanya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tatanan pembangunan.
4. Rendahnya presentasi perempuan yang menduduki jabatan di eselon II.

Faktor Pendukung dalam mencapai SDGs 8 yaitu :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, DKPP, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Kantor Kementerian Agama, PKK, GOW) yang tertuang dalam 188.45/503-KUM/2023 tentang Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga.





2. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung TPK2D terlihat dalam aktifnya masyarakat dalam mengikuti pembinaan-pembinaan.



**Keterangan:** Foto Kegiatan Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah di Desa Ujung Batu tahun 2023

3. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.



**Keterangan:** Foto Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di UPTD SDN 1 Ujung Batu, Desa Ujung Batu 2023

4. Pembentukan kelompok-kelompok baru industry rumahan di masyarakat.



**Keterangan:** Foto Kegiatan Pembinaan Kelompok Home Industri Perempuan Pembuatan Tas Anyaman dan Pembuatan Kain Eco Print di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023

5. Mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga.



**Keterangan:** Foto Kegiatan pelatihan pembuatan kain sasirangan di Desa Ujung Batu tahun 2023



**Keterangan:** Foto Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pembuatan Tudung Saji tahun 2023



**Keterangan:** Foto Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pelatihan Pemulasaran Jenazah tahun 2023





**Keterangan:** Foto Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Seminar Kecantikan Skin Quality dan Seminar Parenting Pentingnya Invest-Asi dalam Pencegahan Stunting tahun 2023



**Keterangan:** Foto Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Pembelajaran Organisasi Wanita ke Pusat Kuliner Binaan DISKOPERINDAG dan ke DEKRANASDA Kota Jakarta Pusat tahun 2023



**Keterangan:** Foto Kegiatan Kaji Tiru dan Pembelajaran ke Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya tahun 2023



Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Perlunya penyelarasan waktu dan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi wanita.
2. Pengusulan penambahan tenaga administratif sehingga kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tercapainya realisasi sesuai dengan target.
3. Penambahan dana untuk lebih meningkatkan kegiatan

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 27 ASN pada DP2KBP3A dan di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 758,140,528.00 dan terealisasi Rp. 599,935,025.00 atau sebesar 79,13%.

Tabel 3.5.9  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	517,238,050.00	<b>422,228,211.00</b>
2	Program Perlindungan Perempuan	66,771,180.00	<b>43,322,569.00</b>
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	91,398,340.00	<b>76,357,528.00</b>
4	Program Perlindungan Khusus Anak	82,732,958.00	<b>58,026,717.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>758,140,528.00</b>	<b>599,935,025.00</b>

Tabel 3.5.10  
Efisiensi Sasaran Strategis 13

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
97,79 %	79,13 %	18,66 %

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 14 Menurunnya tingkat pengangguran

Menurunnya tingkat pengangguran diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.11  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

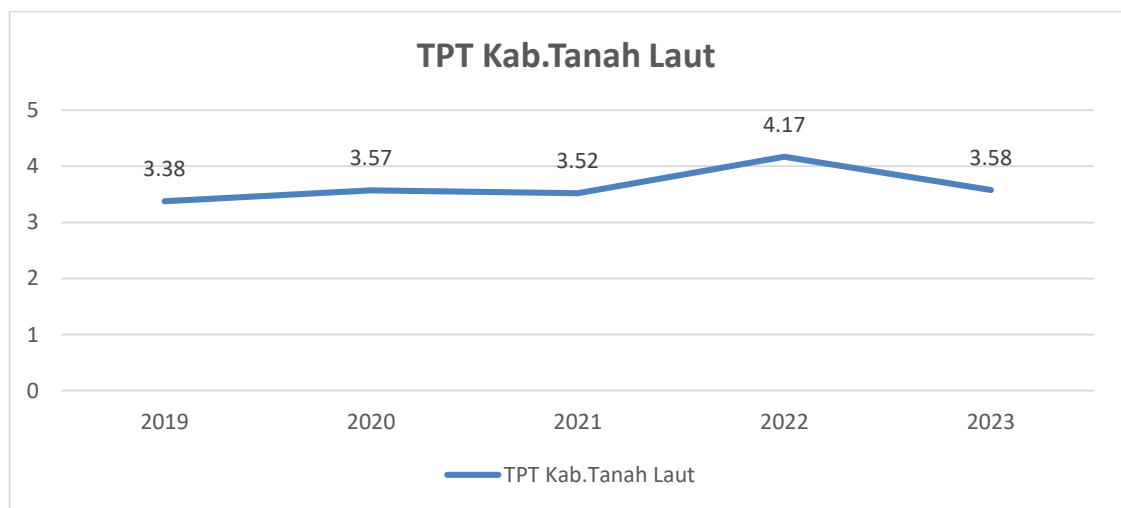
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00	3,52	112%	3,4	4,17	81,53%	2,5	3,58	69,83%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>69,83%</b>

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah sebesar 3,58 mengalami penurunan sebesar 0,59 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 4,17.

Tren perkembangan TPT di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2019-2023 adalah sedikit berfluktuatif, seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Grafik 3.5.9

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut per Agustus 2019-2023



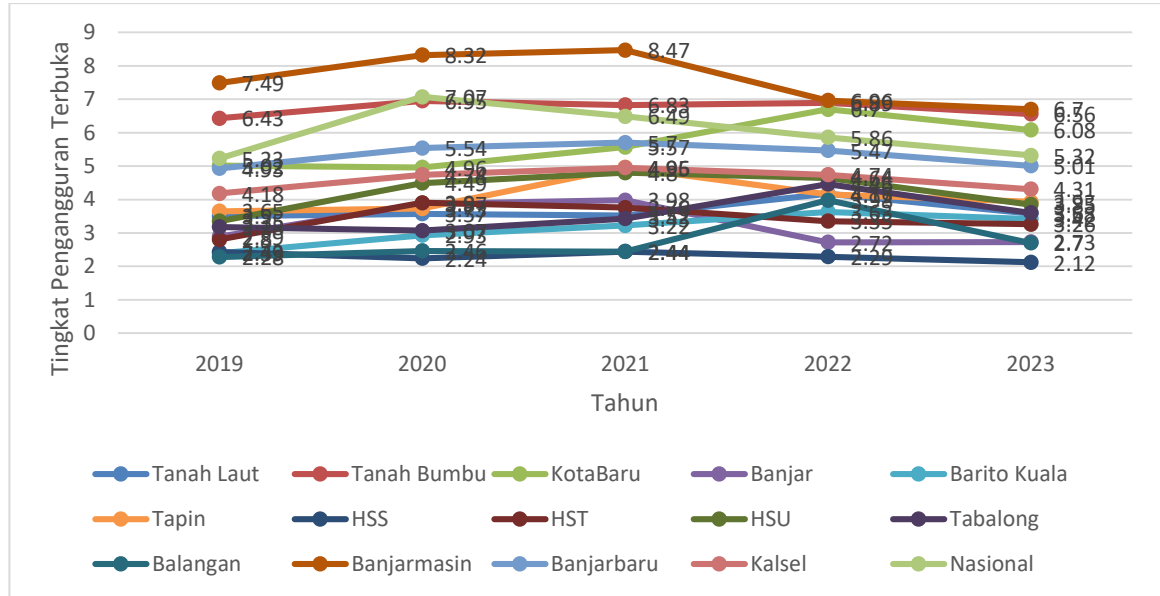
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut



Berikut dibawah ini adalah tabel perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional.

Grafik 3.5.10

Tingkat pengangguran terbuka Kab/Kota di Kalimantan Selatan dan Nasional



Sumber data BPS Kalimantan Selatan

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 untuk lingkup provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **Kabupaten Tanah Laut lebih rendah** dibanding Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 6,56 dan Kabupaten Kotabaru dengan angka 6,08.

Untuk lingkup nasional dan provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yaitu 3,58, **lebih rendah 0,73 poin** jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan** dengan angka 4,31 dan **lebih rendah 1,74** jika di bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka **Indonesia** dengan angka 5,32.

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka (PP) terhadap jumlah angkatan kerja (PAK).



$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Pengangguran Terbuka (PT) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mereka yang mencari pekerjaan
2. Mereka yang mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan
4. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

**Tabel 3.5.12**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Tanah Laut Tahun 2019 s/d Tahun 2023**

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
ANGKATAN KERJA (Orang)	172.161	181.817	185.049	184.133	185.267
BEKERJA (Orang)	166.334	175.337	178.543	176.458	178.635
PENGANGGURAN (Orang)	5.827	6.490	6.506	7.675	6.632
TPAK (%)	69,19	72,03	72,27	70,92	69,61
TPT (%)	3,38	3,57	3,52	4,17	3,58
PENDUDUK USIA 15th ke atas (orang)	248.819	252.428	256.054	259.629	266.148
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,62	96,44	96,48	95,83	96,42

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada tahun





2023 sebesar 3,58%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur.

Pada tahun 2023 meskipun dilanda musim kemarau yang cukup panjang yang mengakibatkan kekeringan akibat Fenomena El Nino, dimana sektor utama Lapangan Usaha Penduduk Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, angka TPT di Kabupaten Tanah Laut ternyata menurun yaitu 3,58% seiring dengan membaiknya perekonomian yang ditandai dengan fenomena :

1. meningkatnya kunjungan wisatawan pada destinasi-destinasi pariwisata sehingga membuka peluang usaha di sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman;
2. Meningkatnya penggunaan media social secara online juga berpengaruh pada sektor perdagangan;
3. Pembangunan Rumah Sakit baru, jembatan baru, jalan kabupaten dan lain sebagainya di Kabupaten Tanah Laut, hal ini membuka peluang kerja pada sektor konstruksi dan jasa lainnya;
4. Penanaman padi varietas loka umur pendek pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dilakukan untuk menghindari resiko gagal panen.

Memperhatikan amanat UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 4 maka **tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** secara lebih spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan pertumbuhan, persebaran, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan usaha** yang diampu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lainnya, yang terdiri atas 17 sektor yaitu :
  - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
  - b. Pertambangan dan Penggalian;
  - c. Industri Pengolahan;
  - d. Pengadaan Listrik dan Gas;
  - e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
  - f. Konstruksi;
  - g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
  - h. Transportasi dan Pergudangan;



- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
  - j. Informasi dan Komunikasi;
  - k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
  - l. Real Estate;
  - m. Jasa Perusahaan;
  - n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
  - o. Jasa Pendidikan;
  - p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
  - q. Jasa Lainnya.
- 2) sehingga terjadi peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi akibat dari ketidakseimbangan antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan
- 3) Meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi serta menyandang status dan jenis ketenagakerjaan lebih baik. Rendahnya kualitas angkatan kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan (kompetensi) menjadi permasalahan bagi tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dengan cara memberi kesempatan lebih luas bagi dunia usaha maupun masyarakat untuk berperan dalam pembangunan tenaga kerja. Pemecahan permasalahan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- 5) Meningkatkan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan tenaga kerja mencakup jaminan pemenuhan hak dasar pekerja, penyediaan jaminan sosial (BPJS) bagi pekerja formal dan informal, pencegahan pekerja anak, dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan diperlukan kebijakan umum yang menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yaitu :

1. *Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan* terutama dari sisi penguatan kebutuhan (*demand*) mencakup:



- 1) Mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja;
  - 2) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
  - 3) Meningkatkan kerja kepada sumber daya produktif;
  - 4) Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan;
  - 5) Memfungsikan pasar tenaga kerja:
2. *Kebijakan umum pengendalian penduduk*, mencakup pembangunan di bidang kesehatan penduduk/masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, dan kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja, termasuk upaya menahan anak untuk tetap bersekolah ketika mereka merupakan Angkatan kerja di usia sekolah. Dengan pendekatan menanamkan pentingnya nilai pendidikan bagi masa depan anak-anak dalam keluarga.
  3. *Kebijakan umum Investasi*. Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja baru.

Pelaksanaan Kebijakan Umum di atas harus di dukung dengan **Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja, karena dengan demikian pada umumnya akan terbuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha didalam maupun luar negeri. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga kegiatan-kegiatan pendidikan informal termasuk pendidikan keluarga, pendidikan agama serta kegiatan yang terkait yang dapat menumbuhkan minat belajar.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.5.13

Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja  
Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kab. Tanah Laut



No	Lembaga Penyelenggara	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Org)			Jumlah Kelulusan (Org)		Sumber Dana	Keterangan
			L	P	Jumlah	Pelatihan / Pemagangan	Uji Kompetensi		
1	BBPLK Kementerian Ketenagakerjaan RI	PBK Institutional Boarding	0	0	0	0	0	APBN	Tidak ada pengiriman peserta
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	PBK Boarding	16	0	16	16	16	APBD	Pelatihan Operator Alat Berat (LPK PT. Alkon Best Mandiri)
3	BLK Pelaihari	PBK Institutional non Boarding	41	103	144	144	144	APBN	9 Paket
		Pelatihan yang dilaksanakan di Desa	136	56	192	192	0	APBD	12 Paket
<b>JUMLAH Pelatihan oleh BLK Pelaihari</b>			<b>177</b>	<b>159</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>144</b>		
4	BLK Komunitas	PBK Institutional non Boarding	28	32	60	55	0	Mandiri	Mandiri
5	LPK Swasta	PBK Institutional Boarding	165	541	706	703	64	Mandiri	
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kal-Sel	Pemagangan Dalam Negeri	2	0	2	2	2	APBN	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pemagangan Dalam Negeri	26	3	29	29	29	APBD	3 Paket (PT. MPI, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT. BGMPA)
<b>JUMLAH PBK</b>			<b>278</b>	<b>679</b>	<b>957</b>	<b>949</b>	<b>255</b>		
<b>JUMLAH PBK &amp; PELATIHAN DI DESA OLEH BLK PELAIHARI</b>			<b>414</b>	<b>735</b>	<b>1149</b>	<b>1141</b>	<b>255</b>		

Adapun kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Tetap melaksanakan Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang Pertahun yang merupakan salah satu dari tujuh program unggulan Bupati Tanah Laut.
2. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada duna kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke Lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.



3. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
4. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa yang diselenggarakan baik dinas pendidikan maupun SKPD teknis lainnya;
5. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
6. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.
7. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melalui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja;
8. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
9. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompetensi);
10. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru (penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana baru maupun non sarjana. Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi pekerja ter-PHK;
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
12. Sertifikasi kompetensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
13. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelatihan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum



kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);

14. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun internasional.

15. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;

Semakin meningkatnya indikator-indikator di atas diharapkan akan memperbesar kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Pada bidang ketenagakerjaan perlu suatu kebijakan yang tidak hanya memperbesar akses dalam informasi pasar kerja melainkan juga terhadap kesiapan tenaga kerja dalam daerah. Salah satu bentuk kesiapan adalah perlunya pemetaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten/kota atau luar provinsi bahkan tenaga kerja asing.

Dalam mencapai sasaran Menurunnya tingkat pengangguran di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 40 ASN pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 7,566,244,528.00 dan terealisasi Rp. 6,194,069,642.00 atau sebesar 81,86%.

Tabel 3.5.14  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	147,119,845.00	133,666,460.00
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,026,657,988.00	1,813,816,012.00
3	Program Rehabilitasi Sosial	4,602,406,293.00	3,515,872,000.00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	775,126,942.00	716,309,870.00
5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	14,933,460.00	14,405,300.00
<b>Jumlah</b>		<b>7,566,244,528.00</b>	<b>6,194,069,642.00</b>



Tabel 3.5.15  
Efisiensi Sasaran Strategis 14

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
69,83 %	81,86 %	- %



## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya perlindungan masyarakat

Meningkatnya perlindungan masyarakat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.16  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Resiko Bencana Daerah	skor	130 (Sedang)	178 (Tinggi)	73.03	125 (sedang)	156,33 (tinggi)	79,95 %	125 (sedang)	169,22 (tinggi)	70,91%
2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri	%	20	49.01	245.05	25	11,99	47,96%	30	29,37	97,9%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											84,40%

### a. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2023 adalah sebesar 169,22 (tinggi) mengalami penurunan sebesar 12,89 point dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 156,33 (tinggi).

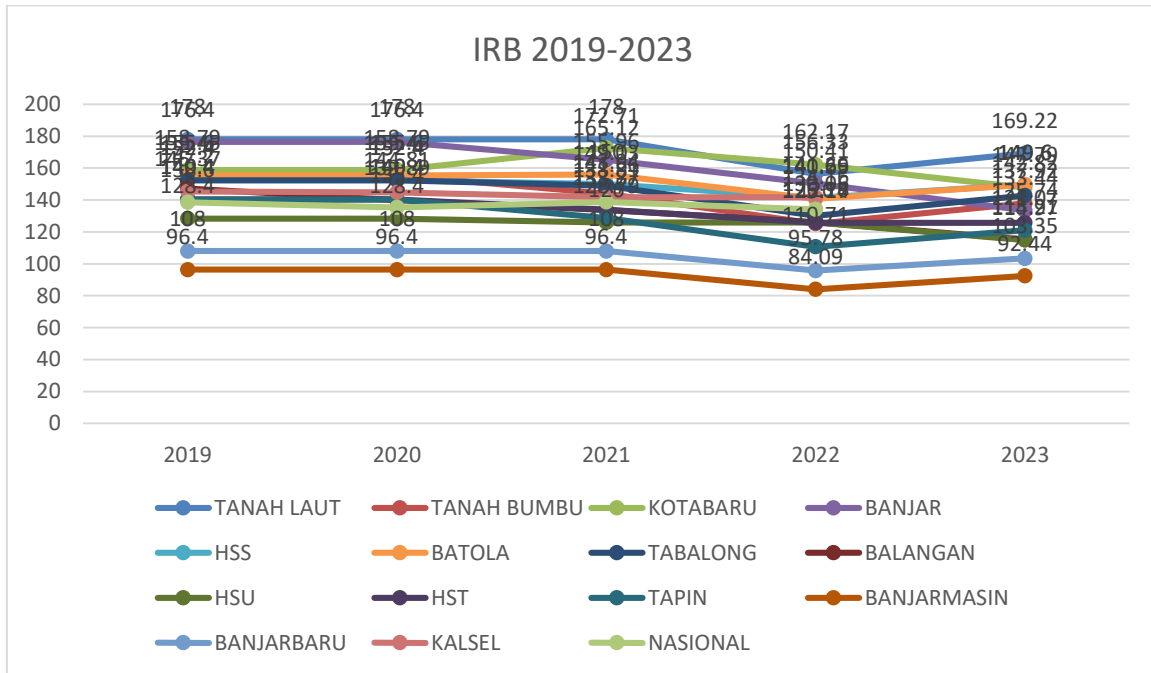
IRB tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dengan IRB paling tinggi dengan angka 169,22 (tinggi).





Grafik 3.5.11

Indeks Resiko Bencana Daerah Kab/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

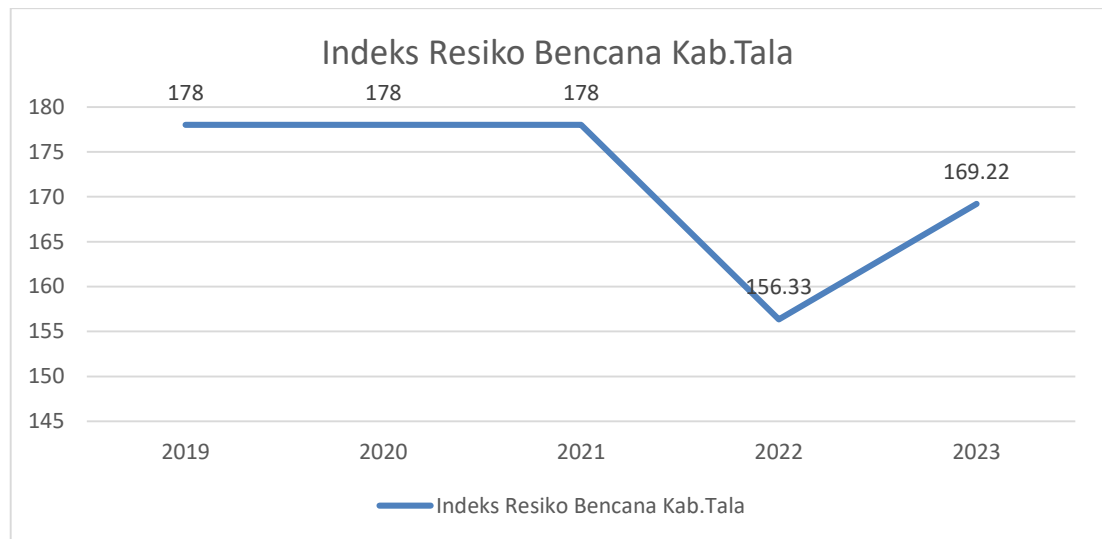
IRB dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard (bahaya)} \times \text{Vulnerability (kerentanan)}}{\text{Capacity (kapasitas)}}$$

IRB Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,89 point dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 156,33 (tinggi). Komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat dan kapasitas pemulihan.



Grafik 3.5.12  
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2019-2023



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut merupakan nilai IRB tertinggi dari Kabupaten lain se Kalimantan Selatan.

Tabel 5.3.17

Nilai IRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	IRB 2023
1	Tanah Laut	169.22
2	Kotabaru	147.79
3	Banjar	133.44
4	Barito Kuala	149.60
5	Tapin	121.07
6	Hulu Sungai Selatan	129.09
7	Hulu Sungai Tengah	125.74
8	Hulu Sungai Utara	114.97
9	Tabalong	142.82
10	Tanah Bumbu	137.92
11	Balangan	115.21
12	Kota Banjarmasin	92.44
13	Kota Banjarbaru	103.35



Nilai IRB Kab. Tanah Laut di dapat berdasarkan pembobotan antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Tingkat bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan ancaman lainnya, komponen bahaya mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011. Komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

Komponen kerentanan adalah komponen yang dihitung berdasarkan parameter kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks risiko bencana.

Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (coping capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Komponen kapasitas dihitung berdasarkan kaapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 Indikator.

BPBD Kab. Tanah Laut pada tahun 2023 melaksanakan program/kegiatan dalam rangka menurunkan Indeks Risiko Bencana melalui pemenuhan 71 indikator IKD dengan melakukan beberapa langkah antarlain :

- a) Pelaksanaan review Rencana Kontijensi Banjir
- b) Penyusunan Laporan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
- c) Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. Kekeringan, dan Penurunan Hasil Produksi Pangan.
- d) Aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Karhutla
- e) Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana.



- f) Pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)
- g) Pemberian bantuan logistik pada korban bencana
- h) Pendataan dan indentifikasi terhadap korban bencana.
- i) Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun tahun sebelumnya dan tetap dilanjutkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Dukungan Pemasangan Peralatan Peringatan Dini
- b) Kajian Risiko Bencana
- c) Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- d) Dukungan Penyusunan Rencana Kontingensi
- e) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)
- f) Pembinaan bagi relawan
- g) Penguatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
- h) Produk Hukum dan Kelembagaan BPBD
- i) Dukungan Dalam Penanganan Darurat Bencana

Pada tahun 2023 BNPB memberikan rekomendasi kebijakan yang harus diambil dalam rangka penurunan Indek Risiko Bencana tahun berikutnya. Adapun rekomendasi tersebut dibagi sesuai prioritas IKD, antarlain :

- a. Prioritas Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
  - Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  - Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
  - Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB



- Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
  - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
  - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
  - Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - Penguatan Forum PRB
  - Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
- b. Prioritas Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
- Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
  - Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
  - Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
  - Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
- Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah
  - Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
  - Komunikasi bencana lintas lembaga
  - Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
  - Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
  - Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
  - Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
  - Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
  - Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
  - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik



- Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
  - Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
- d. Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
  - Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana
  - Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
  - Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
  - Pembangunan Desa Tangguh Bencana
- e. Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
- Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
  - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
  - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
  - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
  - Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan
  - Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir
  - Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan
- f. Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
  - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah



- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
  - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah
  - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
  - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah
  - Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
  - Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
  - Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana
  - Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis
  - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
  - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana
  - Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana
- g. Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
- Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
  - Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana
  - Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana
  - Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut oleh BPBD dan Bappeda diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Kawasan Berpotensi bencana dan Mitigasinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan dokumen mitigasi ini merupakan sebuah upaya untuk mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki kiresiko tinggi terjadinya bencana alam yang dilakukan baik melalui pendekatan keilmuan maupun histori kejadian



serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi wilayah untuk selanjutnya melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah dalam rencana kontijensi. Berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh, didapatkan alternatif solusi terbaik yang dapat diterapkan pada upaya pengurangan risiko dan pencegahan bencana di Kabupaten Tanah Laut melalui meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat melalui program sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pengurangan risiko dan pencegahan bencana melalui pendekatan structural baik alami (upaya vegetative) dan buatan (upaya sipil teknis).
  - b. Penyesuaian pengaturan dalam rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan.
  - c. Penyusunan rencana dan jalur evakuasi.
  - d. Penentuan wilayah aman bencana sebagai arahan lokasi permukiman.
  - e. Pendidikan, penyuluhan dan pembentukan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.
  - f. Pematapan Tim Aksi Cepat Tanggap Bencana.
  - g. Pemantapan system monitoring dan peringatan dini bencana.
3. Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui sosialisasi Peringatan Dini Bencana di Beberapa Kecamatan setiap tahunnya.
  4. Melaksanakan pelatihan Tenaga TRC/ Pusdalops sebanyak 26 orang.
  5. Pelaksanaan penanggulangan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut.
  6. Pembentukan Desa Tangguh bencana pada tahun 2018 ada 3 desa yaitu di Desa Penjaratan kecamatan Pelaihari, Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dan Desa Kali Besar Kecamatan Kurau dan Tahun 2019 ada 1 Desa yaitu Desa Gunung Raja di Kecamatan Tambang Ulang, Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada Pembentukan.
  7. Pelayanan bencana dan pendistribusian logistik kepada korban bencana.
  8. Pelaksanaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada tahun 2022.
  9. Penyusunan dokumen bencana yang tersedia sampai tahun 2022 sebanyak 3 Dokumen Yaitu Dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) Tahun 2019-2023, Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Kontijensi





(Renkon).

Rencana kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kedepan yaitu melaksanakan hasil kajian analisa mitigasi bencana dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Memasukkan rencana kerja mitigasi bencana yang dilakukan SKPD ke dalam rencana kerja Tahun 2023 diantaranya BPBD, Dinas Sosial, DPUPRP, DPRKPLH.
2. Penyesuaian hasil analisa mitigasi bencana ke dalam rencana perubahan Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut.
3. Untuk rekomendasi upaya-upaya yang tidak dapat dilakukan/dijangkau oleh Pemerintah Kabupaten Tanah laut akan digunakan sebagai bahan koordinasi dan konsolidasi kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat serta agar mendapatkan bagaimana solusi pemecahan masalah tersebut.

**b. Persentase PMKS yang mandiri**

Capaian indikator Persentase PMKS yang mandiri tahun 2023 adalah 29,37% hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu 30% dengan tingkat capaian 97,9%.

Pembangunan Kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdapat 26 jenis PPKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PPKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

Tabel 3.5.18  
Rekapitulasi Data PMKS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	58
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	23



4	Anak Jalanan	0
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	37
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	23
8	Lanjut Usia Terlantar	3.636
9	Penyandang Disabilitas	661
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan	11
12	Pengemis	4
13	Pemulung	0
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	0
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	36
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	33
18	Korban Traffiking	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	23.283
22	Korban Bencana Sosial	142
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	9
24	Fakir Miskin (FM)	98.012
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0



26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
<b>TOTAL</b>		<b>125.970</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada penurunan angka PPKS pada tahun 2022 dari 140.367 Jiwa menjadi 125.970 jiwa pada tahun 2023 atau menurun sekitar 14.497 jiwa atau 10,25 %. Menurunnya angka PPKS di Kabupaten Tanah Laut dikarenakan terjadinya verifikasi dan validasi data secara massif dan maenjadikan data PPKS yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menjadi Valid.

Dari 26 jenis PPKS tersebut di atas hanya sekitar 15 (lima belas) jenis PPKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

Tabel 3.5.18  
Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>KAB. TALA</b>
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	58
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	23
4	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	37
5	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	23
6	Lanjut Usia Terlantar	3.636
7	Penyandang Disabilitas	661
8	Tuna Susila	0
9	Gelandangan	11
10	Pengemis	4
11	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	36



12	Korban Penyalahgunaan NAPZA	33
13	Korban Bencana Alam	23.283
14	Korban Bencana Sosial	142
15	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	9
15	Fakir Miskin (FM)	13.480
<b>TOTAL</b>		<b>125.890</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 125.890 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 15 (lima belas) jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 15 (lima belas) jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam sebanyak 23.283 Jiwa atau sekitar 18,5 % dan Fakir Miskin sebesar 13.480 jiwa atau sekitar 10,70 %. Hal ini di pengaruhi oleh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 seperti kemarau panjang yang terjadi di bulan April s/d bulan November 2023 sehingga mengakibatkan kekeringan dan berdampak pada tingginya angka korban bencana dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penanganan berupa penyaluran air bersih bagi korban bencana tersebut.

Program penanganan fakir miskin yang ada di Kabupaten Tanah Laut dilakukan optimalisasi pada tahun 2023 dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemberian Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

**Rumus perhitungan PPKS yang tertangani :**

$$\% \text{ PMKS yang tertangani} = \frac{\text{PPKS tertangani tahun (n)}}{\text{PPKS keseluruhan tahun (n)}} \times 100 \%$$

$$\frac{125.890}{125.970} \times 100 \%$$

**99,93 %**



Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PPKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PPKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanan, pakaian, pendidikan dan kesehatannya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PPKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PPKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

PPKS dikatakan mandiri apabila memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria indikator mandiri. Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Orang dengan HIV/AIDS sebanyak 36 orang
2. Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 33 orang
3. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 9 orang
4. Korban bencana alam sebanyak 23.283 jiwa
5. Korban Bencana Sosial sebanyak 147 orang
6. Fakir Miskin yang mendapatkan program pemerintah seperti :
  - a. PKH Graduasi Mandiri sebanyak 201 orang
  - b. PBI-JK APBN dan APBD sebanyak 13.279 orang

**Jumlah seluruh PMKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak**

**Jumlah 36.998 Jiwa.**

Rumus :



**% PMKS yang menjadi  
mandiri =**

PPKS Mandiri	X 100 %
PPKS keseluruhan	

36.998	X 100 %
<b>125.970</b>	

**29,37%**

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PPKS yang menjadi mandiri setelah ditangani hampir mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 30 % dan tercapai sebesar 29,37 % hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara optimal. PPKS yang masih belum mandiri, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lanjut Usia Terlantar tidak akan mampu memenuhi kriteria mandiri karena selalu bergantung pada bantuan sosial.
2. Penyandang disabilitas juga tidak dikatakan mandiri karena tidak akan mampu memenuhi kriteria mandiri karena selalu bergantung pada bantuan sosial.
3. Untuk anak terlantar dan balita terlantar belum dikatakan mandiri karena masih belum mampu memenuhi kriteria mandiri sehingga bergantung pada bantuan sosial.
4. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) atau anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan pendampingan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selama proses hukum berjalan dan dikatakan belum mandiri karena masih dibawah umur 18 tahun.
5. Gelandangan dan pengemis belum dikatakan mandiri karena salah satu kriteria mandiri yaitu berpenghasilan cukup karena gelandangan dan pengemis masih memerlukan bantuan orang lain dan tidak berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang.



### Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber Dana	
				APBN	APBD
1.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	11.597 Jiwa		APBD
2.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	65.177 Jiwa	APBN	
3.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	3.627 Jiwa		APBD
4.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	456 Jiwa		APBD
5.	Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE	9 Orang		APBD
6.	Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar	Anak Terlantar	15 Orang		APBD
7.	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Penyandang Disabilitas	10 orang	APBD Prov.	
8.	Bantuan Sosial Korban Bencana (Permakanan)	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	50 KK		APBD
9.	Fasilitasi Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Dana BTT	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	121 KK		APBD
10.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Fakir Miskin	8.148 KPM	APBN	
11.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga Fakir Miskin	9.000 KPM	APBN	



Berdasarkan tabel tersebut diatas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan iuran jaminan Kesehatan PBI-JK yang diperuntukkan bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 11.597 Jiwa
2. Penerima Bantuan iuran jaminan Kesehatan PBI-JK yang diperuntukkan bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan bersumber dana dari APBN Kementrian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebanyak 65.177 Jiwa.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 3627 Jiwa.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 456 Jiwa.
5. Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 Orang.
6. Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Terlantar yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 14 orang.
7. Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas terlantar yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak Orang.
8. Bantuan Sosial Korban Bencana berupa Permakanan bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebanyak 50 Kepala Keluarga.
9. Fasilitasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Perbaikan Rumah bersumber dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 121 Kepala Keluarga.
10. Fasilitasi Program Keluarga Harapan dana bersumber dari APBN sebanyak 8.148 KPM dan dapat graduasi mandiri sebanyak 201 KPM.
11. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memfasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga Fakir Miskin sebanyak 9000 KPM dengan dana yang bersumber dari APBN.





Dalam mencapai sasaran Meningkatnya perlindungan masyarakat di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 22 ASN pada Dinas Sosial, 19 ASN pada BPBD dan di dukung oleh 8 Program dengan Pagu Rp. 15,468,872,851.00 dan terealisasi Rp. 12,559,904,110.00 atau sebesar 81,19%.

Tabel 3.5.19  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penanggulangan Bencana	630,685,413.00	500,388,000.00
2	Program Penanganan Bencana	1,862,407,515.00	621,673,100.00
3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6,803,374,002.00	6,469,223,240.00
4	Program Rehabilitasi Sosial	4,602,406,293.00	3,515,872,000.00
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	775,126,942.00	716,309,870.00
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	532,011,202.00	480,116,600.00
7	Program Pemberdayaan Sosial	215,512,058.00	210,854,300.00
8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	47,349,426.00	45,467,000.00
		<b>15,468,872,851.00</b>	<b>12,559,904,110.00</b>

Tabel 3.5.20  
Efisiensi Sasaran Strategis 15

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
84,40 %	81,19 %	3,21 %



## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 16

### Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas

Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.21  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	71	43.13	60.75	89	58,12	65,30%	73	60,24	82,52%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											82,52%

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2023 adalah 60,24 dengan tingkat capaian 82,52%. Mengalami kenaikan 2,12 point jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan angka 58,12.

Untuk mendapatkan indeks pembangunan infrastruktur digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\left( \frac{\text{jumlah panjang jalan nasional} + \text{jalan propinsi} + \text{jalan lokal primer dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang jalan keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang irigasi}} \times 35 \right) + \left( \frac{\text{jumlah luas areal yang dilayani irigasi}}{\text{jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi}} \times 20 \right) + \left( \frac{\text{Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang drainase}} \times 15 \right) + \left( \frac{\text{Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani}}{\text{jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)}} \times 30 \right) + \left( \frac{\text{Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik}}{\text{jumlah gedung kantor}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air limbah}}{\text{jumlah rumah}} \times 100\% \right) / 2 + \left( \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Luas permukiman kumuh yang ditangani}}{\text{luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani}} \times 100\% \right) / 2 + \left( \frac{\text{Panjang jalan bertrottoar di perkotaan}}{\text{panjang jalan di perkotaan}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Panjang jalan berdrainase di perkotaan}}{\text{panjang jalan di perkotaan}} \times 100\% \right) / 2 + \left( \frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \right) / 2$$



$x 100\%)+ ((\text{Jumlah taman dalam kondisi baik} / \text{jumlah keseluruhan Taman} \times 100\%)/2)/4)+(((\text{Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik}/\text{jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya ada} \times 100\%)+(\text{Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik}/\text{Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada} \times 100\%)/2))/5.$

Dari rumus tersebut diperoleh hasil bahwa indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 60,24.

Data indikator perhitungan indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel 3.5.22  
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	2022	2023
1	Jumlah panjang jalan nasional kondisi baik	km	136,08	134,68
2	Jalan propinsi kondisi baik	km	135,82	1.156,90
3	Jalan lokal primer dalam kondisi baik	km	975,97	908,81
4	Jumlah panjang jalan keseluruhan	km	1.342,150	2.612,64
5	Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	m	513.259.920	521.500.389
6	Jumlah panjang irigasi	m	753.940,132	753.940,132
7	Jumlah luas areal yang dilayani irigasi	ha	17.503,00	17.503,00
8	Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi	ha	25.685,98	22.620
9	Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik	m	95.569,20	118.141
10	Jumlah panjang drainase	m	95.569,22	101.254,20
11	Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani	l	5.453.538.000,0	7.459.432.000,0
12	Jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)	l	11.378.320.200,0	10.114.062.400,0
13	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	buah	505	503
14	Jumlah gedung kantor	buah	505	503
15	Panjang jalan bertrottoar di perkotaan	km	6,783	118,14
16	panjang jalan di perkotaan	km	314,02	278.055
17	Panjang jalan berdrainase di perkotaan	km	345,18	6,13
18	panjang jalan di perkotaan	km	314,02	278.055
19	Jumlah sampah yang tertangani	ton	15.111	15.382,13



20	Jumlah produksi sampah	ton	51.807	52.712,42
21	Jumlah taman dalam kondisi baik	buah	32	32
22	Jumlah keseluruhan Taman	buah	32	32
23	Jumlah rumah tangga berakses air bersih	KK	36.843	63.865
24	Jumlah rumah tangga	KK	118.015	123.903
25	Jumlah rumah tangga berakses air limbah	KK	46.533	64.072
26	Jumlah rumah	buah	104.234	109.254
27	Jumlah rumah layak huni	buah	100.659	105.144
28	jumlah seluruh rumah	buah	104.234,00	109.254
29	Luas permukiman kumuh yang ditangani	ha	44,75	69,15
30	luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani	ha	123,49	157,01
31	Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	buah	1.678	1.890
32	Jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya ada	buah	20.000	20.000
33	Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik	buah	17	37
34	Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada	buah	138	119

1) Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik

Jalan lokal primer dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 908,81 km, bila dibandingkan dengan jumlah panjang jalan keseluruhan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

2) Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 sudah mencapai 521.500.389 dari jumlah seluruh irigasi. Jika dibandingkan tahun 2022 Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik mengalami peningkatan yaitu sebesar 513.259.920.

3) Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi

Jumlah luas areal yang telah dilayani irigasi pada tahun 2023 sekitar 77,37% dari seluruh area yang harus dilayani yaitu sekitar 22.620 Ha.

4) Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik



Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2023 telah mencapai 118.141. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 22.572 yaitu 95.569.

5) Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani

Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dari 5.453.538.000 menjadi 7.459.432.000.

6) Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki aset berupa gedung kantor sebanyak 505 buah di tahun 2021, menjadi 503 buah di tahun 2023 dan semua dalam kondisi yang masih baik.

7) Panjang Jalan Bertrottoar Di Perkotaan

Panjang jalan bertrottoar di Perkotaan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 118,14 Km.

8) Panjang Jalan Berdrainase Di Perkotaan

Panjang jalan berdrainase di Perkotaan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 6,13 Km.

9) Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang di produksi di Kabupaten Tanah Laut keseluruhan mencapai 15.382 ton pada tahun 2023.

10) Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang berakses air bersih sekitar 63.865 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023.

11) Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah

Jumlah rumah tangga yang berakses air Limbah sekitar 64.072 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023.

12) Jumlah Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2023 sebanyak 105.144 buah dari seluruh jumlah rumah yang ada di kabupaten tanah laut yaitu sebanyak 109.254 buah.



13) Luas Permukiman Kumuh Yang Ditangani

Luar pemukiman kumuh pada tahun 2023 seluas 69,15 Ha. Luas pemukiman yang bisa ditangani pada 2023 seluas 69,15 Ha.

14) Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada adalah 20.000, sedangkan jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik tahun 2023 hanya 1.890 buah. Pada Tahun 2022 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik adalah 1678 Unit.

Perlengkapan jalan yang seharusnya ada terdiri dari rambu Standart sebanyak 17570 Unit, RPPJ sebanyak 1000 Unit, Marka Jalan sepanjang 300.000 m<sup>1</sup>, Cermin Cembung ( Comvek Mirror ) sebanyak 200 Unit , Warning Light sebanyak 200 Unit APILL sebanyak 30 Unit, Deliniator sebanyak 1000.

15) Jumlah Prasarana Perhubungan Dlm Kondisi Baik

Jumlah Prasarana Perhubungan yang seharusnya ada tahun 2023 adalah 119 buah, akan tetapi pada tahun 2023 hanya 37 buah yang dalam kondisi baik.

Prasarana Perhubungan yaitu, Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Unit, Terminal Type c Lokasi Kantor Dinas 1 Unit, Halte 11 Unit, Mobil Uji Kendaraan Keliling 1 Unit, Pos Pelabuhan 1 Unit.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 66 ASN pada DPUPRP, 36 ASN pada DISHUB, 55 ASN pada DPRKPLH di dukung oleh 11 Program dengan pagu Rp 532,290,475,282.00 dan realisasi sebesar Rp 486,581,045,079.00 atau sebesar 91,41%

Tabel 3.5.23  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	216,167,830,106.00	187,368,852,260.00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,309,587,356.00	46,886,243,568.00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,637,200,000.00	4,623,000,000.00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	25,752,469,834.00	24,298,577,600.00



5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	88,539,525,506.00	<b>83,200,369,715.00</b>
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00	<b>13,071,611,279.00</b>
7	Program Penataan Bangunan Gedung	126,142,920,841.00	<b>121,174,809,432.00</b>
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	415,000,000.00	<b>361,505,685.00</b>
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,325,961,138.00	<b>5,568,845,040.00</b>
10	Program Pengelolaan Pelayaran	27,368,000.00	<b>27,230,500.00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>532,290,475,282.00</b>	<b>486,581,045,079.00</b>

Tabel 3.5.24  
Efisiensi Sasaran Strategis 16

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
82,52 %	91,41 %	- %



**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 17**  
**Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah**

Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.25  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pertumbuhan sektor Pertanian	%	3.52	1.81	51.42	3,53	2,7	<b>76,49 %</b>	3,57	2,06	57,70%
2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	%	7.58	5.01	66.09	7,59	3,86	<b>50,20 %</b>	7,60	5,33	70,13%
3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	orang	285,000	193,671	67.95	300.000	579.878	<b>193,29%</b>	300.000	608.624	202,9%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											110,24%

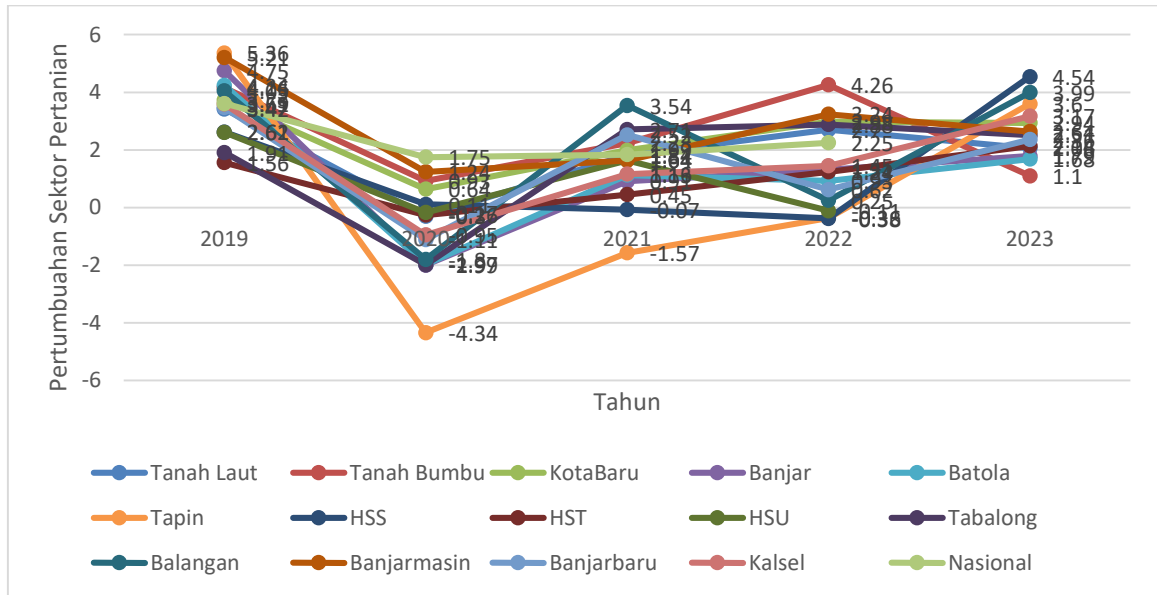
**a. Pertumbuhan Sektor Pertanian**

Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah 2,06%, mengalami penurunan 0,89% dari tahun 2022 yaitu sebesar 0.64%. Berikut perbandingan Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota lain dan provinsi dan nasional tahun 2023.





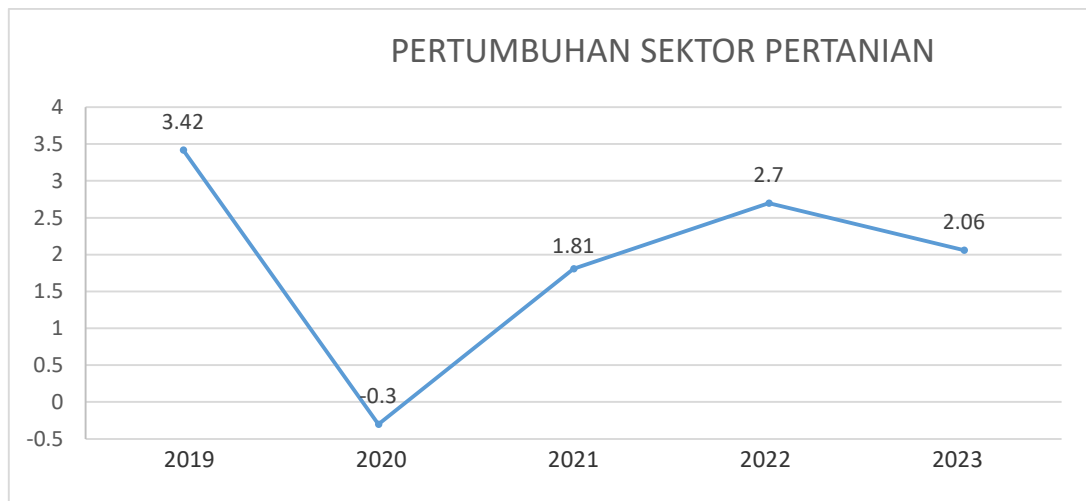
Grafik 3.5.14  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari grafik di atas, Pertumbuhan sector pertanian Kabupaten Tanah Laut berada di bawah provinsi Kalimantan selatan yaitu masing-masing pada angka 3,17 persen.

Grafik 3.5.15  
Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Lapangan usaha ini mencakup tiga subkategori. Pertama, subkategori Pertanian, Perternakan, Perburuan dan jasa Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman Holtikutura, tanaman perkebunan, perternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Subkategori kedua adalah kehutanan dan penebangan kayu, dan yang terakhir adalah subkategori perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2017-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.26

Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen), 2017-2023

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Pertanian, perternakan, Perburuan, Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>							
	a. Distribusi/ <i>Distribution</i>	19,23	18,92	19,02	19,28	18,03	15,56	15,37
	b. Laju Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	3,50	3,64	3,42	(0,30)	1,73	2,63	2,06
	c. Laju Implisit/ <i>Growth Rate of Implicit Price Index</i>	2,30	1,98	2,03	0,84	2,19	4,39	2,58

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sector pertanian baik melalui dana Pusat, Provinsi maupun APBD Kabupaten diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan JUT sebanyak 25 unit
2. Pembangunan JP sebanyak 46 unit



3. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
4. Pembangunan Embung sebanyak 3 unit
5. Pembangunan RJIT sebanyak 5 unit
6. Rehap dan sarana pendukung Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 3 Paket
7. Pelatihan teknis budidaya aneka cabai dan bawang merah
8. Pelatihan pengolahan hasil hortikultura dan National Borneo Orchid Show 2022
9. Pengembangan laboratorium kultur jaringan, temu lapang hortikultura dan pelatihan perbanyak hortikultura
10. Bantuan Sumur Bor Rp. 85.000.000,-

Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. Adanya alih fungsi lahan, dari komoditas tanaman pangan ke komoditas perkebunan dan hortikultura
2. Adanya serangan hama penyakit tanaman (tungro) pada komoditas padi
3. Adanya penurunan bantuan benih dan fasilitas lainnya kepada para petani untuk padi, jagung dan kedelai
4. Adanya penurunan luas baku sawah (LBS)
5. Curah hujan tinggi menyebabkan terkena layu pusarium
6. Serangan layu pusarium, melakukan semai ulang untuk penyulaman
7. Bencana banjir menyebabkan tanaman rusak
8. Perubahan iklim sulit diprediksi
9. Tingginya harga pupuk

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menggerakkan dan mensosialisasikan serta meningkatkan indek pertanaman (IP)
2. Menggerakkan dan mensosialisasikan petani menggunakan pupuk organik dalam jangka panjang
3. Meningkatkan pengetahuan petani tentang informasi iklim dan cuaca (BMKG)
4. Meningkatkan pengetahuan petani mengenai pengendalian opt baik secara hayati maupun kimia
5. Meningkatkan kualitas penggunaan benih dengan membentuk kawasan/ petani mandiri benih
6. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian

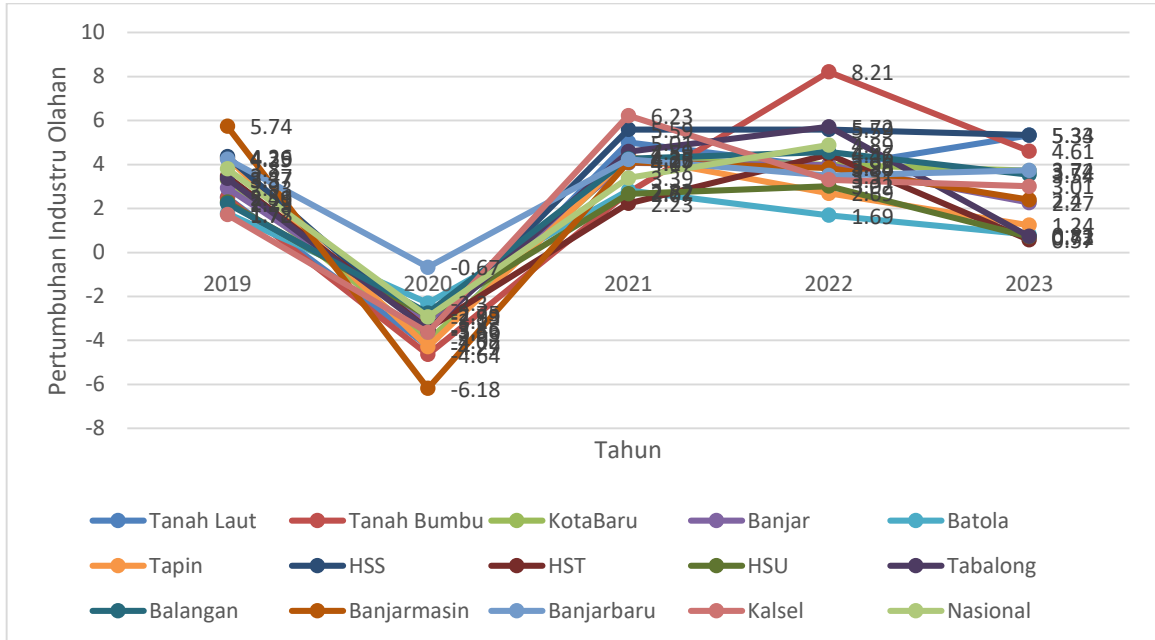


7. Peningkatan luas panen tanaman hortikultura melalui perluasan areal tanam
8. Peningkatan ketersediaan benih bersertifikat
9. Pengendalian serangan opt hortikultura
10. Penanggulangan bencana pertanian
11. Pengembangan penerapan teknologi pertanian
12. Penanggulangan/ pencegahan dampak pengendalian iklim
13. Pengerjaan fisik bangunan dimulai di awal tahun
14. Membuat gerakan pemakaian pupuk organik
15. Menggerakkan lembaga masyarakat lainnya/BUMDES untuk melakukan pelayanan Alsintan melalui program Taxi Alsintan.
16. Pengrekrutan Penyuluh Swadaya
17. Mengerak/mengoptimalkan penggunaan pupuk organik, melalui gerakan pupuk organik mandiri petani sejahtera (pampera) dengan cara melakukan pelatihan kepada petani mengenai pembuatan pupuk organik
18. Pelayanan pinjam pakai alsintan melalui Brigade alsintan dengan cara pengawasan penggunaan alsintan melalui pinjam pakai di Brigade Alsintan.

#### **b. Pertumbuhan Sektor Industri Olahan**

Pertumbuhan sektor industri olahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah 5,33% mengalami peningkatan sebesar 1,47 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 3,86%. Berikut perbandingan Pertumbuhan sektor industri olahan Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota lain dan provinsi dan nasional tahun 2023.

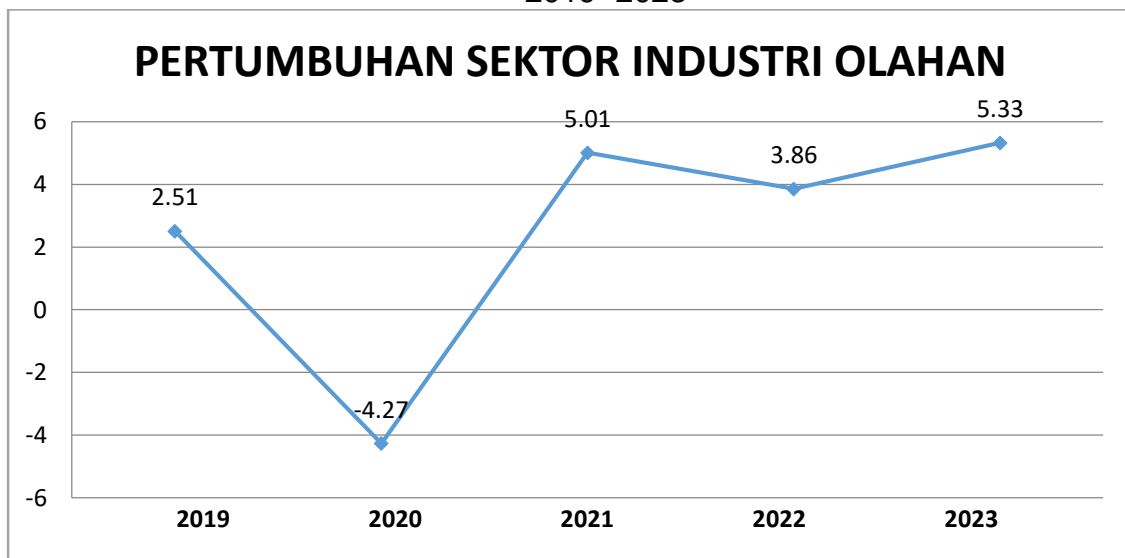
Grafik 3.5.16  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Industri Pengolahan 2023



Sumber: BPS Kalimantan Selatan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut merupakan yang tertinggi dengan angka 5,33%. Sedangkan Kabupaten Tanah Laut berada lebih tinggi jika dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 3,01.

Grafik 3.5.17  
Pertumbuhan Sektor Industri Olahan Kabupaten Tanah Laut  
2019- 2023





Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Kategori manufaktur dalam PDRB atas dasar tahun 2010, dibagi dalam 16 subkategori. Subkategori yang mendominasi kerja industri manufaktur di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan keseluruhan di tanah laut. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman tanah laut adalah crude palm oil (CPO). Komoditas tersebut menjadi kontributor terbesar kedua ekspor Tanah Laut setelah batubara. Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global.

Pada tahun 2019, kinerja subkategori industri makanan dan minuman masih menunjukkan arah yang positif dimana berarti produk yang dihasilkan oleh industri ini masih mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun begitu pada tahun 2019 industri makanan dan minuman mengalami perlambatan yang tajam, hal ini disebabkan karena menurunnya harga komoditas CPO di dunia. Di Tanah Laut Kinerja industri CPO ini didukung oleh kinerja subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong, dan Kintap).

Berikut data peranan lapangan usaha terhadap pdrb kategori industri pengolahan tahun 2017-2023.

Tabel 3.5.27

Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen), 2017-2023

Lapangan Industri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Industri Pengolahan</b>							
<b>a. Peranan</b>	12,89	12,78	12,51	12,30	12,10	<b>10,50</b>	10,59
<b>b. Laju Pertumbuhan</b>	7,56	5,79	2,51	(4,27)	5,01	<b>3,86</b>	5,33
<b>c. Laju Implisit</b>	5,90	0,72	0,20	1,85	4,13	3,76	-0,33

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut



Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan pertumbuhan sector industry olahan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendorong investasi dari pihak ketiga, dengan cara mempermudah persyaratan investasi, melakukan promosi kepada pihak ketiga.
2. Penguatan daya beli masyarakat, dengan cara melakukan promosi kepada masyarakat untuk menggunakan hasil industri dalam daerah melalui berbagai media, baik media sosial, radio, atau melalui dekranasda Tanah Laut.
3. Pengembangan kawasan industry jorong yang juga merupakan isu strategis Kabupaten Tanah Laut, dengan cara mempermudah perizinan pembangunan kawasan industri.
4. Pelatihan dan pendampingan, melaksanakan pelatihan bagi pelaku industri olahan agar dapat menggunakan teknologi dalam proses pengolahan hasil industri, meningkatkan kreativitas hasil industri olahan untuk menarik minat konsumen.
5. Fasilitasi pasar industri olahan, memberikan ruang bagi pelaku industri olahan agar dapat memasarkan hasil industri olahan, baik melalui pasar tradisional, dekranasda, maupun e-market (sosialita).



**c. Jumlah kunjungan wisatawan**

Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah 2023 terealisasi sebesar 608.624 orang dengan tingkat capaian sebesar 202,9%. Mengalami peningkatan sebanyak 28.746 orang pengunjung jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 579.878 orang.

Tabel 3.5.28  
Kunjungan Wisata menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1	Kota Banjarmasin	1.588.884	3.895
2	Kota Banjarbaru	1.914.278	358
3	Kabupaten Banjar	2.253.119	14.681
4	Kabupaten Tapin	2.513.043	0
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	427.795	650
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	96.340	4
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	120.002	0
8	Kabupaten Balangan	45.651	27
9	Kabupaten Tabalong	3.851.766	44.911
10	Kabupaten Tanah Laut	608.624	13
11	Kabupaten Tanah Bumbu	775.057	0
12	Kabupaten Kotabaru	895.644	36
13	Kabupaten Barito Kuala	193.034	280
	<b>Total</b>	<b>15.283.237</b>	<b>64.855</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan, jumlah kunjungan wisata Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2022 pada urutan ke-8 setelah Kabupaten Kota Baru. Jumlah kunjungan wisata terbanyak yaitu Kabupaten Tabalong dengan jumlah pengunjung sebanyak 13.394.158 dan untuk jumlah kunjungan wisata terendah adalah Kabupaten Balangan dengan jumlah kunjungan 40.147 orang.

Objek wisata yang paling dominan dikunjungi wisatawan adalah Pantai Batakan Baru dan Pantai Takisung, karena selain jarak dekat dengan Kota Pelaihari sejumlah





fasilitas sarana prasarana sudah banyak perbaikan dan lengkap. Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan infrastruktur di Obyek Wisata yang sudah ada dan melakukan pengembangan Obyek Wisata baru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, agar masyarakat mempunyai pilihan saat mengunjungi berbagai Destinasi Wisata. Pada tahun 2020 jumlah objek wisata yang ada adalah berjumlah 23 objek wisata, tahun 2021 sebanyak 24 objek wisata dan meningkat menjadi 26 objek wisata pada tahun 2023.

Tabel 3.5.29  
Jumlah Pengunjung Wisata di Objek Wisata di Wilayah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2023

NO	NAMA OBJEK WISATA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH
<b>Dikelola Pemda ( Dinas Pariwisata )</b>				
1	Gunung Kayangan	Desa Ambungan	Pelaihari	270
2	Air Terjun Bajuin	Desa Sungai Bakar	Bajuin	23.114
3	Taman Mina Tirta	Kelurahan Angsau	Pelaihari	2.603
	- Sepeda Air	Kelurahan Angsau	Pelaihari	0
	- Kereta Wisata	Kelurahan Angsau	Pelaihari	0
	- Orchid	Kelurahan Angsau	Pelaihari	1.025
	- Hutan Kota	Kelurahan Angsau	Pelaihari	1.485
4	Pantai Takisung	Desa Takisung	Takisung	27.586
5	Pantai Batakan Baru	Desa Batakan	Panyipatan	175.400
6	Pantai Swarangan	Desa Swarangan	Jorong	10.181
7	Pantai Batu Lima	Desa Kuala Tambangan	Takisung	300
<b>Dikelola Oleh Masyarakat / Desa</b>				
8	Pantai Kintap	Desa Muara Kintap	Kintap	1.825
9	Pantai Cemara Satu	Desa Muara Kintap	Kintap	4.444
10	Pantai Cemara Dua	Desa Muara Kintap	Kintap	3.203
11	Pantai Tanjung Dewa	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	37.876
12	Pantai R.Piungan	Desa Asam Jaya	Jorong	0
13	Pulau Datu	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	20.621
14	Kerbau Rawa	Desa Benua Raya	Bati-Bati	5.867
15	Mangrove Pagatan Besar	Desa Takisung	Takisung	1.859
16	Gunung Birah	Desa Kandangan Lama	Panyipatan	7.859
17	Dewa Katar	Desa Telaga	Pelaihari	2.445
18	Sungai Bekantan Panjaratan	Desa Panjaratan	Pelaihari	1.137
19	Wisata Mahuni	Desa Padang	Bati-Bati	18.874
<b>Dikelola oleh Pribadi</b>				
20	Pantai Karindangan	Desa Pagatan Besar	Takisung	26.300

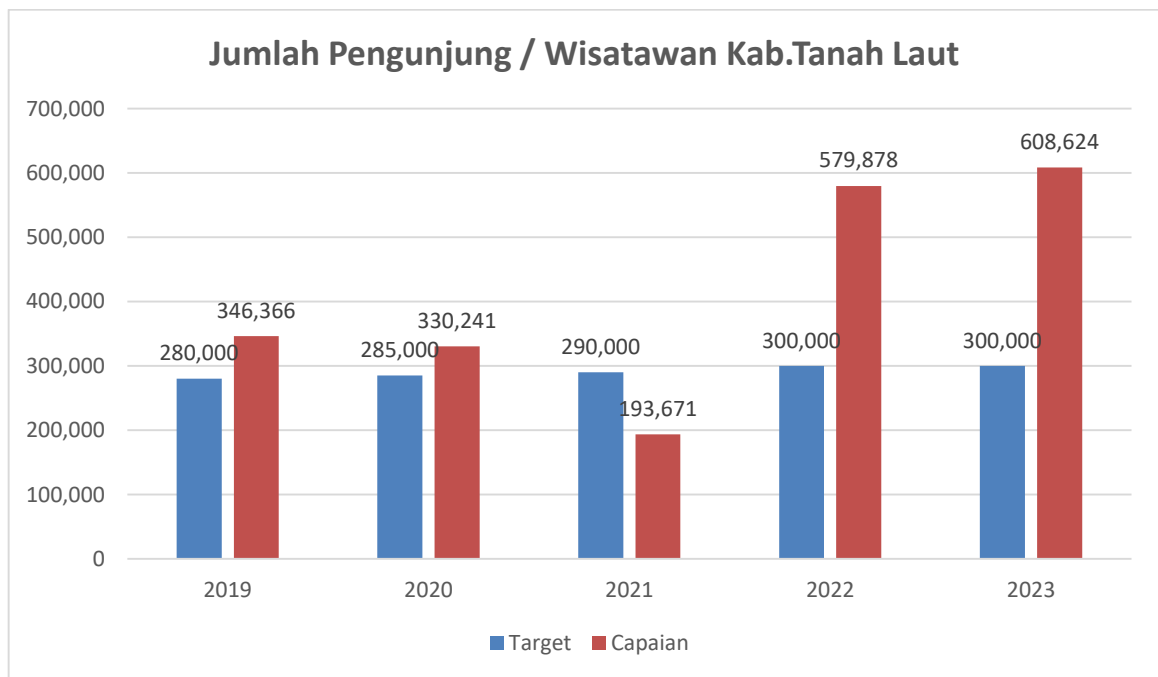


NO	NAMA OBJEK WISATA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH
21	Pantai THR	Desa Pagatan Besar	Takisung	23.135
22	Pantai Turki	Desa Swarangan	Jorong	21.340
23	Pantai Asmara	Desa Muara Asam-Asam	Jorong	26.030
24	Pantai Tabanio	Desa Tabanio	Takisung	16.623
25	Bukit Timah	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	94.298
26	Taman Permana	Desa Telaga	Pelaihari	50.669
27	Pantai Borneo Beach	Jorong	Jorong	2.255
	<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>608.624</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Grafik 3.5.18

Jumlah kunjungan wisata Tanah Laut tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Laut :

1. Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan infrastuktur di obyek wisata yang sudah ada, pada tahun 2023 telah melakukan pembenahan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pada 5 objek wisata yaitu pada Pantai Batakan Baru, Air Terjun Bajuin, Pantai Takisung, Gunung Kayangan dan Taman Mina Tirta.

a. Pantai Batakan Baru



Kegiatan Rehabilitasi Landmark  
Batakan Baru



Kegiatan Pengecatan Mushola dan  
Pendopo

b. Air Terjun Bajuin



Kegiatan Rehabilitasi Tangga Ulin

c. Pantai Takisung



Kegiatan Rehabilitasi Menara  
Pantau

d. Gunung Kayangan



Kegiatan Pemasangan Lampu  
Menara Pandang

e. Taman Mina Tirta



Kegiatan Pemeliharaan Taman  
Orchid dan Mina Tirta



2. Melakukan pembuatan dokumen appraisal Pantai Batakan Baru, Takisung, Gunung Kayangan dalam rangka penilaian untuk kepentingan transaksi atau pelaporan keuangan atas objek properti nilai sewa (Rental Value).
3. Melakukan pembuatan dokumen Masterplan Pantai Batakan Baru dan Masterplan Pantai Takisung, dimana tujuannya untuk identifikasi fasilitas, sarana dan prasarana eksisting terminal, identifikasi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun, rencana pengembangan fasilitas utama dan dan fasilitas penunjang terminal, rencana detail perencanaan siap bangun (DED) untuk fasilitas yang ditentukan dan disepakati, rencana estimasi kebutuhan biaya, rencana kerja dan spesifikasi teknis serta rencana pemantapan pengembangan seluruh fasilitas dan tahapan kebutuhan pembiayaan makro.
4. Melakukan pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi pariwisata, melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dan melakukan penyediaan dan penyampaian data dan informasi pariwisata.
5. Dinas Pariwisata melakukan koodinasi dengan BKSDA dan pihak terkait sehingga ada kesepakatan dalam pendistribusian karcis obyek wisata Pantai Batakan,
6. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli.
7. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan, dan
8. Melaksanakan promosikan/pemasaran pariwisata d kabupaten tanah Laut melalui media social, media cetak, pembuatan film dalam rangka promosi wisata daerah Kabupaten Tanah Laut serta mengikuti pameran wisata di dalam provinsi maupun diluar provinsi Kalimantan Selatan.
9. Melaksanakan pengembangan SDM kepariwisataan diantaranya pelatihan fotografi, pelatihan resque, pelatihan tour guide, dll.
10. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif melalui kegiatan ekraf go to school and campus, lomba kuliner khas lokal, pendataan seluruh ekonomi kreatif serta melaksanakan penyusunan dokumen Rodmap Ekraf





yang bertujuan untuk mengidentifikasi subsektor ekonomi kreatif (industri kreatif) yang ada di Kabupaten Tanah Laut, mengidentifikasi subsektor unggulan ekonomi kreatif, mengidentifikasi karakteristik ekonomi kreatif, mengetahui potensi dan kontribusi industri kreatif untuk rencana pengembangan ekonomi kreatif serta mengetahui arah kebijakan, strategi, program dan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Laut.

11. Menghimbau kepada seluruh SKPD agar setiap event yang ada di Kabupaten Tanah Laut disertai dengan melibatkan sarana akomodasi/pihak hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
12. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan perbaikan jalan menuju objek wisata sesuai dengan program unggulan Bupati Wakil Bupati Tanah Laut yaitu peningkatan/pengaspalan minimal 85% pada akhir tahun RPJMD (2018-2023).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diantaranya :

1. Masih banyaknya infrastruktur yang rusak di objek-objek wisata.
2. Minimnya dana operasional pemeliharaan sarana prasarana yang ada di objek-objek wisata.
3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pengunjung wisata untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.
4. Belum adanya investor yang berpartisipasi mengembangkan objek wisata.
5. Keterbatasan dana dalam mengembangkan objek wisata menjadi objek wisata berkualitas atau sebuah kawasan wisata yang terkelola dengan baik.

Upaya yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata yaitu:
  - 1) Pengembangan potensi pariwisata yang telah mempunyai dokumen kajian dan perencanaan agar dituntaskan (rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Masterplan terumbu karang dan penataan sungai)
  - 2) Optimalisasi Kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) untuk potensi pariwisata yang belum dikelola maupun yang sudah dikelola pemerintah daerah.
  - 3) Optimalisasi promosi potensi pariwisata melalui event-event tahunan, pameran-pameran, promosi melalui media cetak, media elektronik dan media



- sosial serta memberdayakan penggiat seni dan budaya (influencer) yang ada untuk menarik minat wisatawan.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sdm dan komunitas-komunitas penggiat seni, budaya dan pariwisata.
  - 5) Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dalam rencana pengembangan pariwisata, sedangkan pelaksana pengembangan didorong pihak ke tiga (investor) sebagai operator.
2. Meningkatkan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat sekitar obyek wisata dan para pelaku usaha jasa kepariwisataan
  3. Memperbaiki jalan-jalan yang rusak dengan berkoordinasi kepada instansi terkait.
  4. Melaksanakan monitoring ke objek-objek wisata dan melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli dan membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).
  5. Meningkatkan promosi bidang kepariwisataan agar dapat menarik investor yang masuk ke Tanah Laut.
  6. Melaksanakan koordinasi dengan Tim TAPD mengenai permasalahan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis pada saat pembahasan anggaran mengenai program/kegiatan untuk ditahun yang akan datang dapat lebih intensif.
  7. Mengembangkan dan terus membina UMKM dan industri kreatif yang ada di Tanah Laut.
  8. Meningkatkan pengembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang standarisasi dan refresentatif di objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.
  9. Meningkatkan pengembangan/penggalian potensi wisata baru. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli, koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  10. Melakukan pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan.
  11. Terus melakukan promosi/pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut, baik melalui media cetak (brosur, pamflet, buku profil, media sosial (Webside, FB, Instagram, Twitter, Youtube), media elektronik (Radio Fantastic Tanah Laut).



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 65 ASN pada DKPP, 132 ASN pada DISTANHORBUN, 38 ASN pada DISNAKESWAN, 40 ASN pada DISNAKERIND, 22 ASN pada DISPAR dan di dukung oleh 9 Program dengan Pagu Rp. 15,397,863,216.00 dan terealisasi Rp. 13,029,370,320.00 atau sebesar 84,61%.

Tabel 3.5.30  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00	1,957,188,011.00
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	162,468,705.00	155,419,080.00
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,500,379,207.00	1,376,466,894.00
4	Program Pemasaran Pariwisata	6,226,423,184.00	5,167,432,892.00
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	112,995,000.00	101,183,750.00
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	115,414,805.00	98,221,900.00
7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,116,482,018.00	1,669,502,684.00
8	Program Pengendalian Izin Usaha Insutri Kabupaten/Kota	16,320,000.00	15,185,000.00
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2,998,281,286.00	2,488,770,109.00
		<b>15,397,863,216.00</b>	<b>13,029,370,320.00</b>

Tabel 3.5.31  
Efisiensi Sasaran Strategis 17

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
110,24 %	84,61 %	25,63 %





## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.32  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	95	84.1	88.53	95	90,7	95,47 %	95	89,7	94,42%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											94,42%

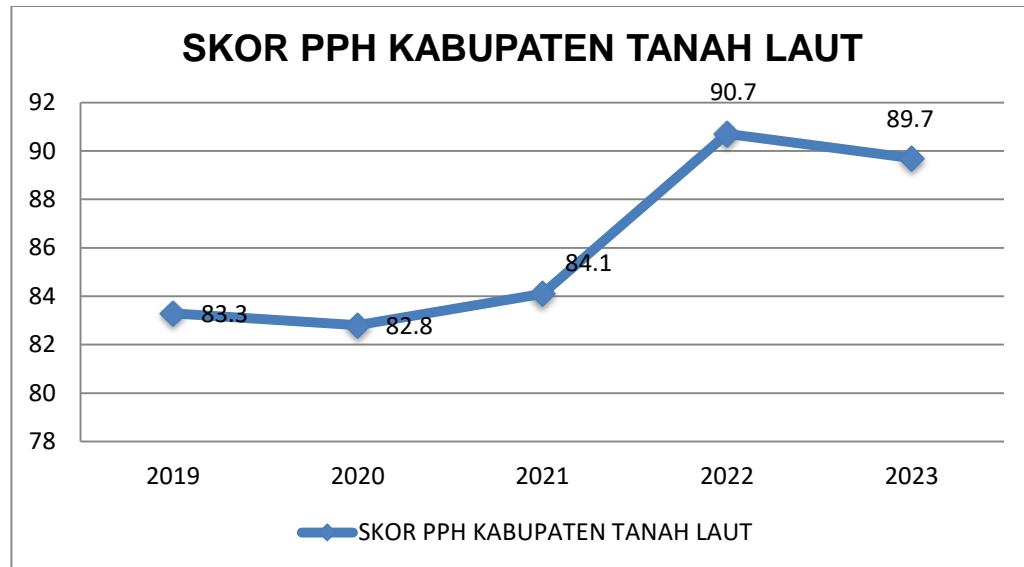
**Skor PPH** Ketersediaan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui Konsumsi pangan setiap rumah tangga yang berbeda baik jumlah, mutu gizi dan keberagaman pangan adalah dengan menggunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH. Skor PPH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Indonesia Skor maksimal yang dicapai 100 (skor ideal). Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1 point dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 90,7 dengan tingkat capaian sebesar 94,42%.

Grafik 3.5.19  
Skor PPH Kabupaten Tanah Laut 2019-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Secara umum ada 9 kelompok pangan dalam PPH, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut, dimasukkan ke lain-lain. Jumlah kalori harian ideal yang dikonsumsi orang Indonesia dalam hal ini Kabupaten Tanah Laut Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 2150 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kap/hari. Meskipun standar kecukupan lebih besar namun hasil data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Skor PPH kabupaten Tanah Laut yakni 89,7 lebih kecil nilainya jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 90,7.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, diantaranya: (a) tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendapatan dapat digunakan untuk dua tujuan yaitu konsumsi dan tabungan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi pola konsumsi. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula; (b) selera konsumen, Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya; (c) harga barang, Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami penurunan,



maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan; (d) tingkat pendidikan masyarakat, Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya; (e) jumlah keluarga, Besar kecilnya jumlah keluarga akan mempengaruhi pola konsumsinya dan (f) lingkungan, keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan akan mempengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat.

Hasil dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut ini meliputi Data-data Baseline, Konsumsi Hasil Pangan Hasil Susenas, hasil Analisis Pola Konsumsi, Kecukupan Gizi, skor PPH, Sasaran PPH, Proyeksi Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan wilayah berdasarkan pendekatan PPH sebagaimana terlampir. Adapun data hasil konsumsi aktual pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Susenas jika dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan maka tingkat konsumsi energi dan skor PPH aktual penduduk Kabupaten Tanah Laut masih sebesar 90,7 %, belum mencapai nilai Standar Minimal yaitu 95 %. Pada Tahun 2023 capaian skor PPH sebesar 89,7, jika capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dibandingkan dengan target sebesar 91,2 maka menunjukkan ada selisih sekitar 1,5 point peningkatan yakni Skor PPH 89,7, artinya capaian tersebut masih belum berhasil mencapai target yang ingin dicapai. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terdapat selisih yang cukup tinggi pada kelompok konsumsi pangan tertentu dibandingkan dengan standar kecukupan konsumsi, antara lain :

- Masih tingginya konsumsi beras
- Masih rendahnya konsumsi umbi umbian, sayur dan buah
- Pola konsumsi masyarakat yang sukar dirubah terutama dalam konsumsi sayur dan buah
- Ketersediaan pangan untuk kelompok pangan tertentu masih kurang, misalnya di wilayah perikanan sayur dan buah kurang tersedia.

Skor pola pangan harapan (PPH) masih belum mencapai target karena belum meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbangan dan aman (B2SA). Dengan demikian masih



diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang intensif agar tingkat konsumsi pangan masyarakat mencapai skor pola pangan harapan yang diharapkan.

Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein. Namun kontribusi energi-energi dari 9 kelompok pangan belum menunjukkan keseimbangan, artinya konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi kaidah konsumsi beragam, begizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5.33**  
**Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk**  
**Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1.295	58.5	64.8	1000	900.0
2	Umbi-umbian	40	1.8	2.0	120	108.0
3	Pangan Hewani	296	13.4	14.8	240	216.0
4	Minyak dan Lemak	280	12.6	14.0	200	180.0
5	Buah/Biji Berminyak	16	0.7	0.8	60	54.0
6	Kacang-kacangan	45	2.0	2.2	100	90.0
7	Gula	108	4.9	5.4	100	90.0
8	Sayur dan Buah	87	3.9	4.3	120	108.0
9	Lain-lain	49	2.2	2.4	60	54.0
Total		2.215	100.0	110.7	2000	1,800.0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2000 Kkal/Kapita/Hari

SPM : Standar Pelayanan Minimum

**Tabel 3.5.34**  
**Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk**  
**Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1,224.9	54.6	58.3	1050	945.0
2	Umbi-umbian	43.1	1.9	2.1	126	113.4
3	Pangan Hewani	366.2	16.3	17.4	252	226.8



4	Minyak dan Lemak	273.0	12.2	13.0	210	189.0
5	Buah/Biji Berminyak	10.9	0.5	0.5	63	56.7
6	Kacang-kacangan	53.8	2.4	2.6	105	94.5
7	Gula	107.5	4.8	5.1	105	94.5
8	Sayur dan Buah	116.6	5.2	5.6	126	113.4
9	Lain-lain	48.0	2.1	2.3	63	56.7
Total		2.244	100.0	106.9	2100	1,890.0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2100 Kkal/Kapita/Hari

SPM : Standar Pelayanan Minimum

Tabel 3.5.35

Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1,218	53,2	58.0	1075	945.0
2	Umbi-umbian	44	1.9	2.1	29	113.4
3	Pangan Hewani	388	17.0	18.5	258	226.8
4	Minyak dan Lemak	290	12.7	13.8	215	189.0
5	Buah/Biji Berminyak	14	0.6	0.7	64,5	56.7
6	Kacang-kacangan	51	2.2	2.4	107,5	94.5
7	Gula	120	5,2	5.7	107,5	94.5
8	Sayur dan Buah	113	4,9	5.4	129	113.4
9	Lain-lain	52	2,3	2.5	64,5	56.7
Total		2.290	100.0	109	2150	1,890.0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2150 Kkal/Kapita/Hari

SPM : Standar Pelayanan Minimum

Berdasarkan data Tahun 2022 diketahui ada peningkatan Tingkat Konsumsi Energi yakni 2.244 Kkal/kapita jika dibandingkan tahun 2021 yakni 2.215 Kkal/kapita. Hasil Data Tahun 2023 diketahui bahwa dari 9 (sembilan) kelompok pangan asupan energi yang paling tinggi disumbangkan oleh kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.218 Kkal per kapita per hari kemudian disusul dari pangan hewani sebesar 388 Kkal perkapita per hari kemudian minyak dan lemak



sebesar 290 kkal perkapita per hari, gula sebesar 120 kkal/kap/hari, 4 jenis ini semuanya sudah melebihi standar/ nilai idealnya untuk asupan perharinya. Sayur dan buah, kacang-kacangan sedangkan umbi-umbian masih sedikit sekali dan yang paling kecil adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 14 Kkal perkapita per hari sedangkan idelanya konsumsi adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 64,5 Kkal perkapita per hari

Bila dilihat dari pencapaian energi menurut kelompok pangan. Maka tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Tanah Laut telah mencapai tingkat konsumsi energi yang lebih dari ideal beberapa kelompok pangan. Namun masih terdapat ada beberapa kelompok pangan yang lebih kecil nilainya dari batas ideal. Standar normative konsumsi padi-padian perkapita per hari adalah 1.075Kkal sementara masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi jenis padi-padian hingga 1.218 Kkal. Konsumsi padi-padian idealnya adalah 50% sedangkan di Tanah Laut sebesar 58,0 %. Sedangkan standar normative konsumsi pangan sejenis umbi-umbian per kapita per hari adalah 129 Kkal, sementara masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengkonsumsi pangan jenis ini baru mencapai 44 kkal per kapita per hari.

Pangan hewani mestinya dikonsumsi 258 Kkal per kapita per hari, sementara masyarakat Tanah Laut telah dapat mengkonsumsi pangan hewani sebanyak 388 Kkal. Minyak dan Lemak mestinya dikonsumsi 215 kkal per kapita perhari, masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi lemak hingga 290 Kkal. Buah/biji berminyak mesti dikonsumsi 64,5 Kkal perkapita per hari, namun masyarakat Tanah Laut hanya 14 Kkal per kapita per hari.

Kacang kacang mestinya dikonsumsi 107,5 Kkal per kapita per hari, namun warga Tanah Laut hanya mengkonsumsi 51 Kkal. Demikian pun halnya Gula mestinya dikonsumsi hingga 107,5 Kkal per kapita per hari. Namun dikonsumsi sebanyak 120 Kkal.

Sayur dan Buah-buahan mesti dikonsumsi 129 Kkal per kapita per hari faktanya yang dikonsumsi 113 Kkal perkapita per hari. Sedangkan bumbu-bumbuan dan minuman mestinya dikonsumsi 64,5 Kkal perkapita per hari, sayangnya masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi bumbu-bumbuan dan minuman sebesar 52Kkal Per kapita per hari.



Secara Keseluruhan Pola konsumsi pangan Kabupaten Tanah Laut masih belum optimal dikarenakan :

- Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
- Masih rendahnya konsumsi pangan buah/biji berminyak, umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur dan buah
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
- Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (nutrition sensitive production system).

Apabila konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah tinggi skor PPH Konsumsi akan meningkat karena bobot dari kelompok pangan sayur dan buah dalam skor PPH konsumsi tinggi. Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

- Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye gerakan mengurangi konsumsi beras yang dilaksanakan secara terus menerus dan masif di seluruh Kabupaten Tanah Laut serta dukungan dari seluruh stakeholder yang ada agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras, dengan bahan pengganti beras bersumber bahan pangan local, seperti jagung, umbi-umbian, atau sagu.
- Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH konsumsi yang ideal agar hidup menjadi sehat, aktif dan produktif.
- Meningkatkan pembinaan pada masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui sosialisasi di kelompok wanita tani (KWT) dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), PKK dan posyandu.
- Melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sehingga masyarakat dapat menyediakan pangan dan gizi secara mandiri tidak harus pergi ke pasar atau warung yang jaraknya cukup jauh untuk dijangkau masyarakat yang bermukim



di kawasan pesisir dan di pegunungan jauh dari penduduk, serta akses transportasi yang sulit.

Untuk mengatasi tantangan belum idealnya konsumsi pangan perlu dilakukan secara masif peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pola konsumsi pangan B2SA dalam membangun generasi penerus yang sehat, aktif, dan produktif. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, promosi, dan edukasi terhadap berbagai kelompok masyarakat. Selain itu dapat dilakukan pemberdayaan ibu rumah tangga/wanita dalam penyiapan pangan B2SA untuk keluarganya yang dikelola oleh kader PKK. DKPP kabupaten Tanah Laut mendukung upaya penanggulangan masalah gizi di Tanah Laut melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa B2SA. Kegiatan Pengembangan Desa B2SA merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam satu desa/wilayah yang setara, terdiri dari teras B2SA, gerai pangan B2SA dan Rumah Pangan B2SA. Kegiatan Pengembangan Desa B2SA diharapkan dapat menyediakan bahan pangan, memudahkan akses pangan, mengolah menu makanan B2SA dan memanfaatkan hasil olahan menu makanan B2SA dengan memanfaatkan pangan sesuai kearifan lokal yang selanjutnya diberikan kepada sasaran program pencegahan stunting (calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0-24 bulan), anak gizi buruk dan gizi kurang yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai kader dalam mensosialisasikan konsumsi pangan B2SA.

Setelah dilakukan penilaian terhadap kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) dengan rentang skor 0 hingga 100, dengan asumsi semakin tinggi skor PPH menunjukkan bahwa mutu atau kualitas pangan yang dikonsumsi semakin beragam, bergizi dan seimbang. Dari hasil perhitungan skor pola pangan harapan (PPH) mutu konsumsi masyarakat Tanah Laut mendapat skor PPH pada Tahun 2021 sebesar 84,1. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Skor PPH mencapai 90,7 dan tahun 2023 yakni 89,7.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat Tanah Laut selama 5 tahun terakhir berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) maka pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan dari tahun





sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor PPH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018– 2023, namun pada Tahun 2023 ada penurunan sebesar 1 point.

Tabel 3.5.36

Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2018 – 2023

Tahun	Energi Justifikasi	Skor PPH Justifikasi
2018	2.058	86.6
2019	2.211	83.3
2020	2.130	82.8
2021	2.215	84,1
2022	2.244	90,7
2023	2.290	89,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat skor PPH tahun 2018 senilai 86.6 dan tahun 2019 skor PPH turun menjadi 83,3. Pada tahun 2020 skor PPH kembali mengalami penurunan menjadi 82,8. sedangkan tahun 2021 skor PPH naik lagi menjadi 84,1. dan Tahun 2022 meningkat menjadi 90,7, sedangkan tahun 2023 turun menjadi 89,7 hal ini karena standar kecukupan Energi juga dinaikkan menjadi 2150 Kkal, sedangkan Tahun 2022 hanya 2100 Kkal,. Dilihat dari komposisi Angka Kecukupan Ebergi, Konsumsi Dalam RPJMN 2020 -2024. Angka perkembangan Konsumsi Energi terus mengalami kenaikan, hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan. Ada beberapa alternatif yang mungkin menyebabkan skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Tanah Laut masih belum sesuai dengan skor ideal yang diharapkan, hal tersebut disebabkan kemungkinan antara lain kurang beragamnya pola konsumsi pangan keluarga, demikian juga tingkat inflasi yang tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan hal ini sangat berimbas kepada pola konsumsi pangan, faktor lainnya adalah pendidikan, dan pantangan makanan.



Selain hal tersebut upaya untuk mencapai target skor PPH, Kabupaten Tanah Laut melalui program dan kegiatan melakukan antara lain:

- Pengembangan Desa B2SA di setiap kecamatan secara bertahap.
- Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan dibidang mutu dan keamanan pangan
- Dukungan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan berimbang, dan pangan rawan beragam, bergizi dan berimbang ,
- Dukungan Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas,kualitas, keragaman gizi berimbang dan keamanannya
- Dukungan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan untuk mengetahui ketersediaan dan ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktutertentu
- Dukungan ketersediaan informasi distribusi, harga, dan akses pangan di daerah merupakan salah satu indikator yang bisa menjelaskan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah pengamatan terhadap kondisi ketersediaan informasi distribusi, dan harga berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, daya beli masyarakat dan akses pangan beragam, bergizi dan berimbang didaerah.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 25 ASN pada DKPP, 132 ASN pada DISTANHORBUN dan di dukung oleh 16 Program dengan Pagu Rp. 155,390,906,739.00 dan terealisasi Rp. 126,606,596,652.00 atau sebesar 81,48%.

Tabel 3.5.37  
 Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	218,563,570.00	212,572,120.00
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	650,015,007.00	552,064,815.00
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	68,920,000.00	33,685,000.00
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	125,844,535.00	106,654,429.00
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	910,991,611.00	844,328,749.00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134,898,085,829.00	107,812,334,361.00
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	995,244,459.00	930,952,114.00
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00	13,071,611,279.00
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,152,024,928.00	1,027,307,960.00
10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526,018,244.00	428,941,060.00
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	372,036,290.00	278,751,000.00
12	Program Penyuluhan Pertanian	486,414,193.00	435,211,785.00
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	544,625,562.00	451,836,506.00
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	289,185,817.00	270,178,574.00
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	64,909,388.00	51,945,000.00
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	115,414,805.00	98,221,900.00
		<b>155,390,906,739.00</b>	<b>126,606,596,652.00</b>

Tabel 3.5.38  
 Efisiensi Sasaran Strategis 18

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
94,42 %	81,48 %	13,46 %

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 19

### Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.39  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	60,960	68,70	112,7%	71,27	67,78	95,10 %	61,712	68,65	111,24%
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	%	87,00	87,00	100%	92	97	105,43 %	98	94,79	96,94%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>104,09%</b>

#### a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah 68,65 mengacu pada IKLH secara nasional termasuk dalam kategori sedang. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 61,712 dengan tingkat capaian 111,24%. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,87 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 67,78 (sedang).

Indeks kualitas lingkungan hidup selama tahun 2016 – 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5.40  
IKLH Kabupaten Tanah Laut tahun data 2016 – 2023

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	IKLH	Kategori
2016	88,63	45,56	41,14	56,71	Kurang
2017	95,81	50	40,40	59,90	Kurang



<b>2018</b>	90,88	51	39,78	58,48	Kurang
<b>2019</b>	90,68	50	39,65	58,06	Kurang
<b>2020</b>	91,29	66,67	45,83	69,82	Sedang
<b>2021</b>	91,85	58,42	43,54	68,70	Sedang
<b>2022</b>	92,10	55,38	44,08	67,78	Sedang
<b>2023</b>	95,84	53,57	44,27	68,65	Sedang

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Laut dan hasil analisis tahun 2023

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi IKLH 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2021 menjadi 68,70 yang sebelumnya tahun 2022 sebesar 67,70, sedangkan tahun 2023 lebih rendah yakni 68,65 dan secara keseluruhan dalam kategori sedang.

Perubahan tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh nilai IKU yang cukup baik yakni sebesar 95,84 dan IKA sebesar 53,57, sedangkan IKL sebesar 44,27.

Untuk periode pemantauan 2019 untuk IKLH mengalami penurunan sebesar - 0,42 poin. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka IKLH yaitu sebesar 69,82 atau meningkat sebesar 11,76 poin. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan IKA sebesar -2,25 point dan penurunan IKL sebesar -2,29 poin. Namun terjadi peningkatan IKU sebesar 0,56 poin. Sehingga angka IKLH mengalami penurunan 1,12 poin. Pada tahun 2022, terjadi penurunan capaian IKLH yaitu menurun sebesar -0,92 poin dari capaian tahun 2021. Penurunan disebabkan oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengalami penurunan cukup besar yaitu -3,04 poin. Walaupun Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin dan Indeks Kualitas Lahan juga meningkat sebesar 0,54 poin.

Pada tahun 2023 nilai IKLH mengalami peningkatan sebesar 0,87 poin. Peningkatan ini disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yang meningkat sebesar 3,74 poin. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat sebesar 3,23 poin dan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) meningkat sebesar 0,19 poin.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kualitas Air**

Air khususnya air sungai mempunyai peran yang sangat strategis dalam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sungai bagi sebagian besar masyarakat merupakan sumber air minum rumah tangga. Selain itu air sungai menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit listrik. Di sisi lain sungai juga menjadi tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka kualitas air sungai menjadi salah satu penting yang menjadi indikator kualitas lingkungan hidup.

Pemantauan kualitas air permukaan periode I dan 2 dilakukan pada 12 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah Total Coliform, TSS, BOD, Fecal Coliform, TDS, COD dan Amoniak.

Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui terdapat 8 (delapan) dengan status memenuhi dan 17 (tujuh belas) titik pantau dengan status cemar ringan dan 3 (tiga) titik pantau dengan status sedang.



Tabel 3.5.41

Analisa kualitas parameter air Daerah Aliran Sungai (DAS) Periode I Tahun 2023 berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	DAS KINTAP		DAS ASAM ASAM		DAS TABANIO		DAS MALUKA		DAS SABUHUR		DAS SWARANGAN	
				HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR
1	Temperature	oC	Dev 3	30,0	32,0	27	31,4	26,1	27,2	26,4	29,8	29	29	31,9	<b>30,1</b>
2	pH	-	6-9	7,19	7,94	7,15	7,11	7,09	6,22	6,02	7,20	7	6,75	6,54	7,03
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	7,43	4,7	20	9	6,25	722,5	45	10,57	27,67	7,43	8,83	65,33
4	TDS (Total Padatan Terlarut)	mg/L	1000	107	78	262	212	202	168,3	90	4.666	96	52	74	118
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	144,30	389,0	139,40	370	233	104,00	88	7.880	130,30	68,00	163,80	85,20
6	DO (Oksigen Terlarut)	mg/L	4	10,0	4,8	5,6	9,0	6,5	7,5	6,6	5,7	6,75	6,15	4,7	5,8
7	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	2,04	2,56	3,54	2,75	3,84	2,32	3,36	3,04	2,83	2,04	3,84	2,44
8	COD (Cemical Oxygen Demand)	mg/L	25	16,72	15,77	14,36	17,19	13,41	37,96	19,55	33,24	14,83	18,13	16,72	82,33
9	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	0,113	1.074	0,496	0,380	0,040	4,66	1,12	0,655	1,08	1.527	1.079	0,040
10	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	0,002	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325
12	Total Fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0030	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
13	Amoniak (NH3-N)*	mg/L	0,2	1.289	1.289	0,7329	0,730	1.332	1.421	0,8315	0,7330	1.049	0,9630	1.383	0,5695
14	Nitrat (NO3-N)*	mg/L	10	0,0020	0,0020	0,2047	0,0303	0,0020	0,1903	0,3265	0,0657	0,1876	0,1230	0,0976	0,0020
15	Nitrit ( NO2-N)	mg/L	0,06	0,0013	0,0013	0,0036	0,0030	0,0013	0,0046	0,0145	0,0020	0,0069	0,0050	0,0035	0,0025
16	Fecal Coliform*	MPN/100 ml	1000	33.000	1,8	5.400	11.000	13.000	17.000	7.000	1.600	920	340	3.500	460
17	Total Coliform*	MPN/100 ml	5000	130.000	1,8	9.200	3.500	92.000	70.000	35.000	35.000	5.400	3.500	3.500	2.200

Tabel 3.5.42

Analisa Kualitas Parameter Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Periode II Tahun 2023 berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	DAS KINTAP		DAS ASAM ASAM		DAS TABANIO		DAS MALUKA		DAS SABUHUR		DAS SWARANGAN	
				HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR
1	Temperature	oC	Dev 3	27,5	27,2	30,4	28,7	26,8	32,1	32,3	31,5	27,9	31,4	29,7	28,1
2	pH	-	6-9	6,75	6,29	6,74	6,52	6,96	7,53	7,53	6,01	7,54	7,54	6,19	6,01
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	6,50	5,20	14,67	14,43	7,71	162,73	17,33	97,67	8	79,5	6,75	89,67
4	TDS (Total Padatan Terlarut)	mg/L	1000	346	169	148	1960	152	510	1998	3138	1240	2264	142	2280
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	183,3	267,0	158,3	3520	247	225	91,1	50200	4490	225	254,0	50800
6	DO (Oksigen Terlarut)	mg/L	4	5,1	5,2	7,8	6,5	6,4	4,6	5,4	6,7	7,4	5,8	7,4	6,8
7	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	0,77	0,77	0,77	0,90	1,06	0,82	0,82	1,14	1,22	0,82	0,82	1,06
8	COD (Cemical Oxygen Demand)	mg/L	25	6,66	16,37	4,75	22,03	11,51	24,45	19,60	25,26	32,54	13,94	22,03	47,10



9	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	0,040	0,052	0,261	0,040	0,040	2.151	0,471	1.607	0,370	1.185	0,091	0,366
10	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	0,002	0,000325	0,0009501	0,000325	0,0015078	0,000325	0,000325	0,009553	0,000325	0,000325	0,000325	0,0059182	0,000553
12	Total Fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13	Nitrat (NO3-N)*	mg/L	10	0,0203	0,0821	0,2843	0,1272	0,0525	0,5212	0,2003	0,2089	0,1433	0,7729	0,1322	0,1766
14	Nitrit ( NO2-N)	mg/L	0,06	0,0036	0,0057	0,0128	0,0100	0,0028	0,0189	0,0143	0,0303	0,0161	0,1639	0,0091	0,0143
15	Amoniak (NH3-N)*	mg/L	0,2	0,4850	0,4139	0,8188	0,8978	0,1608	0,4926	0,6509	0,9646	0,2651	0,6584	0,6270	0,7079
16	Fecal Coliform*	MPN/100 ml	1000	920,8	549,3	571,7	412,0	529,8	490,7	10970	353,8	24,360	1119,9	2419,6	2419,6
17	Total Coliform*	MPN/100 ml	5000	920,8	549,3	1011,2	412,0	550,4	550,4	17000	353,8	54,930	1732,9	2419,6	2419,6

Pemantauan kualitas air permukaan dilakukan pada 12 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

Dari hasil pemantauan pada 12 (dua belas) titik pantau air permukaan dan analisa berdasarkan baku mutu air sungai kelas II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Sungai Kelas II pada periode 1 (satu) diketahui bahwa jumlah parameter yang diperiksa sebanyak 204 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 153 parameter sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar dengan 75,00 % dari total paramater sebanyak 204 parameter. Sedangkan pada periode 2 (dua) diketahui bahwa jumlah parameter yang diperiksa sebanyak 204 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 161 parameter sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar dengan 78,92 % dari total paramater sebanyak 204 parameter.

Dari hasil analisa pada setiap titik pantau diketahui bahwa pada periode I & II dari 408 parameter terdapat 7 jenis parameter yang tidak memenuhi baku mutu yang terdiri dari TSS pada 6 titik pantau, COD pada 6 titik pantau, Fecal Coliform pada 13 titik





pantau, Total Coliform pada 9 titik pantau, BOD pada 5 titik pantau, TDS pada 7 titik pantau, Amoniak pada 23 titik pantau, dan temperatur pada 24 titik pantau.

Dari hasil perhitungan pada aplikasi IKLH nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahap I dan Tahap II untuk 12 (dua belas) titik pantau dengan kategori sungai kelas II Tahun 2023 didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) kategori sungai kelas II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar 53,57

Dari hasil evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II diketahui bahwa nilai IKA pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 1,81 dari 55,38 menjadi 53,57 dimana hal ini dipengaruhi perubahan status mutu air dari setiap pemantauan.

### **Indeks Kualitas Udara**

Berdasarkan deskripsi, analisis data hasil perhitungan dan pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan pada 4 kawasan Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kualitas udara ambien di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Tanah Laut semua memenuhi baku mutu.

Tingkat kebisingan di Kabupaten Tanah Laut pada 4 (Empat) titik pengukuran pada periode I sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu dan hanya 1 (satu) titik pengambilan sampel yang melebihi baku mutu tingkat kebisingan yaitu pada kawasan padat transportasi di Jl. A.Yani KM 123 Simpang Empat Asam Asam. Sedangkan pada periode II ada 2 (dua) titik pengambilan sampel yang melebihi baku mutu tingkat kebisingan yaitu pada kawasan padat transportasi di Jl. A.Yani KM 123 Simpang Empat Asam Asam dan pada kawasan permukiman di depan Mesjid Al Ikhlas Jl. Komplek Kijang Mas

Tingginya nilai tingkat kebisingan dapat berdampak terhadap masyarakat yaitu pada gangguan psikologis tahap ringan yaitu terhadap gangguan tidur.

**Tabel 3.5.43**
**Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam Asam	Pemukiman Depan Mesjid Al-Ikhlash Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran Depan Kantor Bupati Tanah Laut	Perindustrian Depan PT. Indofood Tbk	Keterangan
1.	Suhu	°C	-	32,7	31,2	31,2	32,4	Manual Alat
2.	Kecepatan Angin	m/s	-	1,6092	0,80	0,13	1,70	Manual Alat
3.	Arah Angin	dari	-	Barat – Timur	Barat – Timur	Barat – Timur	Barat – Timur	Manual Alat
4.	Kelembaban	% RH	-	72	71	60	71	Manual Alat
5.	TSP	µg/Nm <sup>3</sup>	230 (24 Jam)	0,67	0,05	0,10	0,47	SNI 7119.3-2017
6	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	200 (1 Jam)	27,02	1,05	3,63	21,81	SNI 7119.2-2017
7	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	150 (1 Jam)	19,90	3,33	7,20	15,99	SNI 7119.7-2017
8	Oksidan sebagai Ozon (O <sub>3</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	150 (1 Jam)	15,01	0,00	0,00	10,69	SNI 7119.8-2017
9	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm <sup>3</sup>	10000 (1 Jam)	<115	<115	<115	<115	SNI 7119.10-2010
10	Kebisingan	Db(A)		70,7	49,3	59,3	66,3	SNI 8427-2017

**Tabel 3.5.44**
**Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam Asam	Pemukiman Depan Mesjid Al-Ikhlash Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran Depan Kantor Bupati Tanah Laut	Perindustrian Depan PT. Indofood Tbk	Keterangan
1.	Suhu	°C	-	33	32,3	31,0	32,8	Manual Alat
2.	Kecepatan Angin	m/s	-	0,22	0,54	0,84	0,84	Manual Alat
3.	Arah Angin	dari	-	Tenggara – Barat Laut	Barat – Timur	Barat – Timur	Barat – Timur	Manual Alat
4.	Kelembaban	% RH	-	71	65	57	68	Manual Alat
5.	TSP	µg/Nm <sup>3</sup>	230 (24 Jam)	0,61	0,14	0,08	0,83	SNI 7119.3-2017
6	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	200 (1 Jam)	21,87	0,14	3,64	29,82	SNI 7119.2-2017
7	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	150 (1 Jam)	16,03	60,9	2,36	19,06	SNI 7119.7-2017
8	Oksidan sebagai Ozon (O <sub>3</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	150 (1 Jam)	12,16	0,00	0,00	15,11	SNI 7119.8-2017
9	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm <sup>3</sup>	10000 (1 Jam)	<115	3,65	<115	<115	SNI 7119.10-2010



10	Kebisingan	Db(A)		65,8	60,9	51,5	66,3	SNI 8427-2017
----	------------	-------	--	------	------	------	------	---------------

### Hasil Uji Tingkat Kebisingan Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Baku Mutu Sesuai Lokasi Pengambilan Sampel (db)	Hasil Analisa (dB)	Ket
1	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	60	59,3	
2	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	55	49,3	
3	Depan PT. Indofood Raya Tbk	70	66,3	
4	Jl.A.Yani KM.123 Simpang 4 Asam Asam	70	70,7	

### Hasil Uji Tingkat Kebisingan Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Baku Mutu Sesuai Lokasi Pengambilan Sampel (db)	Hasil Analisa (dB)	Ket
1	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	60	51,5	
2	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	55	60,9	
3	Depan PT. Indofood Raya Tbk	70	66,3	
4	Jl.A.Yani KM.123 Simpang 4 Asam Asam	70	65,8	

### Tutupan Lahan

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk diwujudkan, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukannya. Angka kualitas lahan mengalami peningkatan yang semula 44,08 menjadi 44,27. Luas Tutupan Lahan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.5.45  
Perbandingan hasil perhitungan indeks kualitas lahan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan tahun 2023

Tutupan	Tahun 2022	Tahun 2023
	Luas (Ha)	
Luas Tutupan Hutan	58743,94	59949,80
Luas Belukar dalam Kawasan Hutan	36140,73	31882,17
Luas Belukar pada Kawasan berfungsi Lindung	2844,12	3172,71
Luas RTH	14247,39	9712,41
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3519,21	7554,73
IKL	44,08	44,27

Sumber: KLHK, 2023

Tabel 3.5.46  
Daftar pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
1	Kec. Jorong	2023	PT. Arutmin Indonesia Tambang Asam-Asam	12 Januari 2023	Taat
2	Kec. Kintap	2023	PT. Anugerah Lumbung Energi	17 Januari 2023	Tidak Taat
3	Kec. Jorong	2023	PT. Jorong Barutama Grestone	19 Januari 2023	Taat
4	Kec. Kintap	2023	PT. Surya Sakti Darma Kencana	25 Januari 2023	Tidak Taat
5	Kec. Jorong	2023	PT. Geoservices	30 Januari 2023	Tidak Taat
6	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit 22	8 Februari 2023	Tidak Taat
7	Kec. Tambang Ulang	2023	PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit 30	8 Februari 2023	Tidak Taat
8	Kec. Tambang Ulang	2023	PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit 38	8 Februari 2023	Tidak Taat
9	Kec. Panyipatan	2023	PT. Shore	21 Februari 2023	Tidak Taat
10	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Bintang Jasa Abadi	13 Maret 2023	Tidak Taat
11	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Karimata Timur	13 Maret 2023	Tidak Taat
12	Kec. Kintap	2023	PT. Arutmin Indonesia Tambang Kintap	14 Maret 2023	Taat
13	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	15 Maret 2023	Tidak Taat
14	Kec. Pelaihari	2023	Rumah Sakit Ammariz	05 April 2023	Tidak Taat
15	Kec. Pelaihari	2023	Azka Medical Centre	06 April 2023	Tidak Taat
16	Kec. Pelaihari	2023	Laboratorium Lingkungan Tanah Laut	10 April 2023	Taat
17	Kec. Kintap	2023	PT. Megah Mulia Persada Jaya	11 April 2023	Tidak Taat
18	Kec. Pelaihari	2023	PT. Mitra Sehat Borneo (RSBCM)	11 April 2023	Taat



19	Kec. Pelaihari	2023	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) PTPN XIII	12 April 2023	Tidak Taat
20	Kec. Bajuin	2023	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Bajuin	13 April 2023	Tidak Taat
21	Kec. Pelaihari	2023	Rumah Sakit Ibu dan Anak Ibunda	14 April 2023	Taat
22	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	10 Mei 2023	Tidak Taat
23	Kec. Kintap	2023	PT. Jati Baru	15 Mei 2023	Tidak Taat
24	Kec. Jorong	2023	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Jorong	16 Mei 2023	Tidak Taat
25	Kec. Jorong	2023	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Asam-Asam	16 Mei 2023	Tidak Taat
26	Kec. Kintap	2023	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kintap	16 Mei 2023	Tidak Taat
27	Kec. Takisung	2023	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Takisung	17 Mei 2023	Tidak Taat
28	Kec. Takisung	2023	PT. Indosat	17 Mei 2023	Tidak Taat
29	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Ciomas Adisatwa (RPA)	24 Mei 2023	Tidak Taat
30	Kec. Tambang Ulang	2023	PT. Neo Citra Mandiri	24 Mei 2023	Tidak Taat
31	Kec. Tambang Ulang	2023	PT. Putra Kanca	25 Mei 2023	Tidak Taat
32	Kec. Tambang Ulang	2023	PT. Bimo Laksana Group	25 Mei 2023	Tidak Taat
33	Kec. Pelaihari	2023	TPA Bakunci	26 Mei 2023	Tidak Taat
34	Kec. Batu Ampar	2023	Koperasi Sawit Makmur (PT. BGMPA)	20 Juni 2023	Taat
35	Kec. Kintap	2023	Endik Medical Clinic	21 Juni 2023	Tidak Taat
36	Kec. Kintap	2023	RSUD KH. Mansyur	21 Juni 2023	Tidak Taat
			RSUD KH. Mansyur	20 Oktober 2023	
37	Kec. Pelaihari	2023	RSUD H. Boejasin	22 Juni 2023	Tidak Taat
38	Kec. Kurau	2023	UD. Surya Baru	26 Juni 2023	Tidak Taat
39	Kec. Pelaihari	2023	PT. Perkebunan Nusantara XIII	11 Juli 2023	Tidak Taat
40	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Patriot Intan Abadi Ds. Liang Anggang	12 Juli 2023	Tidak Taat
41	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Patriot Intan Abadi Ds. Bentok Kampung	12 Juli 2023	Tidak Taat
42	Kec. Tambang Ulang	2023	PT. Patriot Intan Abadi Ds. Pulau Sari	12 Juli 2023	Tidak Taat
43	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Penguin Indonesia	13 Juli 2023	Tidak Taat
44	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Panen Embun Kemakmuran	18 Juli 2023	Tidak Taat
45	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Rukun Abadi Sejahtera	20 Juli 2023	Tidak Taat
46	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Lihin Rustafa	20 Juli 2023	Tidak Taat
47	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Dutasatrya Adhipersada	20 Juli 2023	Tidak Taat
48	Kec. Kintap	2023	PT. Kintap Jaya Wattindo PKS	24 Juli 2023	Tidak Taat
49	Kec. Bajuin	2023	PT. Kintap Jaya Wattindo Ds. Tebing Siring	25 Juli 2023	Tidak Taat
50	Kec. Takisung	2023	PT. Kintap Jaya Wattindo Ds. Ranggung	26 Juli 2023	Tidak Taat
51	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Kintap Jaya Wattindo PKR	27 Juli 2023	Tidak Taat
52	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Sinar Nusantara Industries	7 Agustus 2023	Tidak Taat



53	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Charoen Pokphan Jaya Farm Ds. Nusa Indah	8 Agustus 2023	Tidak Taat
54	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Charoen Pokphan Jaya Farm Ds. Sambangan	8 Agustus 2023	Tidak Taat
55	Kec. Tambang Ulang	2023	PT. Charoen Pokphan Jaya Farm Ds. Bingkulu	9 Agustus 2023	Tidak Taat
56	Kec. Kurau	2023	Puskesmas Kurau	10 Agustus 2023	Tidak Taat
57	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Tri Industri Alami	23 Agustus 2023	Tidak Taat
58	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Tuju Kuda Hitam Sakti	23 Agustus 2023	Tidak Taat
59	Kec. Jorong	2023	PT. Sarana Subur Agrindotama	24 Agustus 2023	Tidak Taat
60	Kec. Jorong	2023	PT. Mandiri Perkasa Plant	24 Agustus 2023	Tidak Taat
61	Kec. Tambang Ulang	2023	H. Hasanuddin	29 Agustus 2023	Tidak Taat
62	Kec. Tambang Ulang	2023	CV. AL	30 Agustus 2023	Tidak Taat
63	Kec. Pelaihari	2023	PD. Baratala Tuntung Pandang	05 September 2023	Tidak Taat
64	Kec. Bati-Bati	2023	CV. Saprotan Utama	12 September 2023	Tidak Taat
65	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Hepi Bornio	12 September 2023	Tidak Taat
66	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Mitra Sinar Jaya Ds. Ujung	13 September 2023	Tidak Taat
67	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Mitra Sinar Jaya Ds. Ujung Baru	13 September 2023	Tidak Taat
68	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Ciomas Adisatwa Farm 1	13 September 2023	Tidak Taat
69	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Ciomas Adisatwa Farm 2	13 September 2023	Tidak Taat
70	Kec. Bati-Bati	2023	UD. Kandang Biru	14 September 2023	Tidak Taat
71	Kec. Bati-Bati	2023	PT. A'Dhom Farm Indonesia	14 September 2023	Tidak Taat
72	Kec. Bati-Bati	2023	Doddy Budiyanto (PT. Dalfena Borneo Famili)	20 September 2023	Tidak Taat
73	Kec. Bati-Bati	2023	CV. Bintang Banua Abadi	21 September 2023	Tidak Taat
74	Kec. Pelaihari	2023	PT. Pelaihari Cipta Laksana	2 Oktober 2023	Tidak Taat
75	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Sapta Jasa Kontruksi	18 Oktober 2023	Tidak Taat
76	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Kelana Multi Kontruksi	19 Oktober 2023	Tidak Taat
77	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Pugung Raya Blok A1	19 Oktober 2023	Tidak Taat
78	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Pugung Raya Blok A2	19 Oktober 2023	Tidak Taat
79	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Pugung Raya Blok A3	19 Oktober 2023	Tidak Taat
80	Kec. Kintap	2023	PT. Citra Putra Kebun Asri Salaman	24 Oktober 2023	Tidak Taat
81	Kec. Kintap	2023	PT. Citra Putra Kebun Asri Riam Adungan I	24 Oktober 2023	Tidak Taat
82	Kec. Kintap	2023	PT. Citra Putra Kebun Asri Riam Adungan II	24 Oktober 2023	Tidak Taat
83	Kec. Jorong	2023	PT. Citra Putra Kebun Asri PKS	25 Oktober 2023	Tidak Taat
84	Kec. Jorong	2023	PT. Citra Putra Kebun Asri Ds. Swarangan	25 Oktober 2023	Tidak Taat
85	Kec. Pelaihari	2023	PT. Citra Putra Kebun Asri Ds. Pemuda	25 Oktober 2023	Tidak Taat



86	Kec. Kintap	2023	PT. Pola Kahuripan Inti Sawit	26 Oktober 2023	Taat
87	Kec. Kintap	2023	PT. Smart, Tbk	31 Oktober 2023	Tidak Taat
88	Kec. Kintap	2023	PT. Indoraya Everlatex Ds. Pandansari	01 November 2023	Tidak Taat
89	Kec. Kintap	2023	PT. Indoraya Everlatex Ds. Pasir Putih	01 November 2023	Tidak Taat
90	Kec. Jorong	2023	PT. Indoraya Everlatex Ds. Swarangan	01 November 2023	Tidak Taat
91	Kec. Jorong	2023	PT. Indoraya Everlatex Ds. Batalang	01 November 2023	Tidak Taat
92	Kec. Jorong	2023	PT. Indoraya Everlatex Ds. Jorong	01 November 2023	Taat
93	Kec. Batu Ampar	2023	PT. Candi Artha	03 November 2023	Taat
94	Kec. Jorong	2023	PT. Lunik Anugerah	06 November 2023	Tidak Taat
95	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Ciomas Adisatwa Farm 1 Bentok	08 November 2023	Tidak Taat
96	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Ciomas Adisatwa Farm 2 Bentok	08 November 2023	Tidak Taat
97	Kec. Tambang Ulang	2023	Waluyo	4 Desember 2023	Tidak Taat
98	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Tanjung Raya Bersama	4 Desember 2023	Tidak Taat
99	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Salamandra Petramuya	5 Desember 2023	Tidak Taat
100	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Hasrat Jaya Utama	5 Desember 2023	Tidak Taat
101	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Lidy's Artha Borneo	6 Desember 2023	Tidak Taat
102	Kec. Bati-Bati	2023	PT. Maju Perkasa Indonesia	6 Desember 2023	Tidak Taat

1. Pembentukan bank sampah

Tabel 3.5.47

Pembentukan bank sampah tahun 2023

No	Nama Bank Sampah	Alamat	SK
1	Tambang Ulang Asri	Desa Tambang Ulang, Tambang Ulang	SK Kades no 12 Tahun 2023
2	Kayu Habang Bersih	Kayu Habang, Tambang Ulang	SK Kades no 24 tahun 2023
3	Melati Berkah	Desa Gunung Melati , Batu Ampar	SK Kades no 27 Tahun 2023
4	Bank Sampah Citra Indah Permai/CIP	Perumahan CIP , Atu - Atu	SK Kades no 18 Tahun 2023
5	Bank Sampah Gagah Permai	Perumahan Gagah , Angsau	SK Lurah no 21 Tahun 2023

2. Legalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.





3. Evaluasi dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan/ pemanfaatan air limbah, dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi bagi usaha/ kegiatan.

**b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten**

Indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW tahun 2023 adalah sebesar 94,79% dari target yang ditetapkan yaitu 98%, dengan tingkat capaian 96,94%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 2,21 % dari tahun 2022 yaitu sebesar 97%.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk dapat meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten. Saat ini masih terdapat 5,21% pemanfaatan tata ruang yang dimohonkan oleh pelaku usaha/masyarakat melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang tidak sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR dikarenakan lokasi yang di mohonkan terletak pada zonasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut dan Perbub Rencana Detail tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan indikasi pola ruang diatas, yang tidak sesuai dengan peruntukannya terindikasi seluas 5,21% dari luas permohonan pemanfaatan ruang yang di mohonkan atau seluas ± 1.841,93 Ha, dan terindikasi pemanfaatan ruang yang telah berkesesuaian dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR mencapai ± 94,79 % atau seluas ± 33.503,92 Ha.





No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan	Kawasan Peruntukan	Luas	Tanggal Pertimbangan Teknis	Nomor	Keterangan	
								Sesuai/ber syarat (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Terminal Pelaihari Tipe C	Zona Transportasi	± 9,3 Ha	04 Januari 2023	591.1/027-TR/DPUPRP	9,3	
2	PT. Laterite Karunia abadi	Desa Nusa indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	IUP Galian C Tanah Laterit	Zona Perkebunan	± 14,6 Ha	06 Januari 2023	050.13/0092-TR/DPUPRP	14,6	
3	PT. Ariqa Mega Tama	Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Toko dan Perumahan Subsidi	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	± 4,4 Ha	16 Januari 2023	591.1/066-TR/DPUPRP	4,4	
4	PT. Mekar Rezeki Jaya	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pabrik Air Minum Dalam Kemasan	Sub Zona Perkebunan	± 2,5 Ha	20 Januari 2023	591.1/080-TR/DPUPRP	2,5	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	Sertifikasi Tanah	Jaringan jalan kabupaten (Jalan Lokal)	± 973.455 M <sup>2</sup>	20 Januari 2023	591.1/082-TR/DPUPRP	97,35	
6	PT. Tuju Kuda Hitam Sakti	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Industri Briket Arang Serbuk Kayu	Zona Kawasan Peruntukan Industri	± 7,1 Ha	27 Januari 2023	050.13/0301/DPUPRP	7,1	
7	PT. Dalfena Borneo Famili	Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Peternakan	Sub Zona Peternakan	± 21,47	27 Januari 2023	050.13/0302/DPUPRP	21,47	
8	PT. Ciomas Adisatwa	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Peternakan Ayam Broiler	Sub Zona Peternakan	± 2,54 Ha	30 Januari 2023	591.1/108-TR/DPUPRP	2,54	
9	Koperasi Konsumen Swadaya Nelayan Sejahtera	Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan dan Pengelolaan Kembali SPDN/SPBUN	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 288 M <sup>2</sup>	06 Februari 2023	591.1/129-TR/DPUPRP	0,03	



10	PT. Fastha Jaya Properti	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Rencana Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	± 14.889 M <sup>2</sup>	06 Februari 2023	591.1/130-TR/DPUPRP	1,49	
11	PT. Kelana Multi Konstruksi	Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Operasional Asphalt Mixing Plant dan Batching Plant	Zona Kawasan Peruntukan Industri	± 3,2 Ha	06 Februari 2023	591.1/131-TR/DPUPRP	3,20	
12	Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Pembuatan Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai Desa Muara Kintap	Kawasan Peruntukan permukiman seluas ± 637 M, Kawasan perikanan budidaya seluas ± 112 M, Kawasan peruntukan pariwisata seluas ± 737 M, Kawasan Sempadan Pantai seluas ± 552 M dan Kawasan Sempadan sungai seluas ± 216. Total luas ± 2.254 M.	2.254 M	14 Februari 2023	591.1/205-TR/DPUPRP		
13	PT. Sahabat Borneo Maju Bersama	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	± 3,58 Ha	14 Februari 2023	591.1/206-TR/DPUPRP	3,58	
14	PT. Hasrat jaya Utama.	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pergudangan, Asphalt Mixing Plant dan Batching Plant	Kawasan Peruntukan Industri	± 7,39 Ha	17 Februari 2023	050.13/0520/DPUPRP	7,39	
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembuatan Dokumen Lingkungan Kantor DPRKPLH	Zona Perkantoran dengan Kode KT seluas ± 6.247 M <sup>2</sup> , Sub Zona Perumahan Kepadatan sedang dengan Kode R-3 seluas ± 505 M <sup>2</sup>	6.752 M <sup>2</sup>	20 Februari 2023	600/228-TR/DPUPRP	0,67	
16	Koperasi Sawit Makmur	Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah	Kawasan Perkebunan	± 1,6 Ha	22 Februari 2023	600.3.3.2/250-TR/DPUPRP	1,60	



17	Yayasan Az Zikrul Hakim Tanah Laut	Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Pesantren	Pertanian Lahan Kering	± 4,6 Ha	27 Februari 2023	600.3.3.2/276-TR/DPUPRP	4,60	
18	CV. Lison Jaya Persada	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Penambangan Batuan	Kawasan Perkebunan	± 2,4	09 Maret 2023	600.3.3.2/309-TR/DPUPRP	2,40	
19	a.n Stanly Gunawan	Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pariwisata, Hotel dan Resort	Sempadan pantai=3,591 Ha dan Kawasan Peruntukan Permukiman=1,432 Ha	± 5,022 Ha	13 Maret 2023	600.3.3.2/747-TR/DPUPRP	5,02	
20	Yayasan Nurul Muhibbin Tanah Laut	Desa Tirtajaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan TK dan SD Islam Nurul Muhibbin	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 7.300 M <sup>2</sup>	14 Maret 2023	600.3.3.2/344-TR/DPUPRP	0,73	
21	PT. Utama Megah Industri	Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Batu Gunung	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 40,25 Ha	13 Maret 2023	600.3.3.2/748-TR/DPUPRP	40,25	
22	PT. Mitra Citra Gemilang	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Peternakan Unggas (Penetasan dan Pembibitan Ayam Ras Pedaging)	Zona Kawasan Peruntukan Industri	± 4 Ha	31 Maret 2023	600.3.3.2/394-TR/DPUPRP	4,00	
23	PT. Sarana Subur Agrindotama	Desa Bumi Asih, Kandangan Lama, Desa Kuringkit dan Desa Batu Tungku di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan Kelapa Sawit	Kawasan Hutan Produksi=13,01 Ha, Kawasan Perkebunan=138 Ha dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=467,61 Ha	± 618,62 Ha	03 April 2023	600.3.3.2/929-TR/DPUPRP	618,62	
24	CV. Surya Prima	Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari	Perdagangan dan Bengkel Sparepart Sepeda Motor Merek Yamaha	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	± 432 M <sup>2</sup>	11 April 2023	600.3.3.2/459-TR/DPUPRP	0,04	
25	PT. Geoservices (Ltd)	Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Kantor dan Laboratorium Pengujian	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 5.885 M <sup>2</sup>	11 April 2023	600.3.3.2/460-TR/DPUPRP	0,59	
26	PT. Fastha Jaya Properti	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (Kode R-3) seluas ± 1,6 Ha dan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Sub Zona Taman Kecamatan (Kode RTH-3) seluas ± 0,1 Ha	1,7 Ha	11 April 2023	600.3.3.2/461-TR/DPUPRP	1,60	0,10



27	CV. Joyo	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Peternakan Budidaya Ayam Ras Petelur	Sub Zona Peternakan	± 1.5 Ha	11 April 2023	600.3.3.2/462- TR/DPUPRP	1,50	
28	PT. Panen Embun Kemakmuran	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Industri Air Minum Dalam Kemasan	Zona Kawasan Peruntukan Industri seluas ± 1,94 Ha, sub zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas ± 0,34 Ha dan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP ) seluas ± 0,02 Ha	± 2,31 Ha	11 April 2023	600.3.3.2/463- TR/DPUPRP	2,31	
29	PT. Batu Gunung Mulia	Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	Perluasan WIUP Batuan	Kawasan Perkebunan	± 19,2 Ha	17 April 2023	600.3.3.2/1038- TR/DPUPRP	19,20	
30	PT. Aura Megah Property	Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan Subsidi MBR	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas ± 4.470 M <sup>2</sup> , Sub Zona Perkebunan seluas ± 8.294 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Peternakan seluas ± 1.519 M <sup>2</sup>	± 14.283 M <sup>2</sup>	27 April 2023	600.3.3.2/522- TR/DPUPRP	1,28	0,15
31	PT. Cahaya Mandiri Regensi	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas ± 9.393 M <sup>2</sup> , Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang) seluas ± 97 M <sup>2</sup> , Sub Zona Perkebunan seluas ± 5.044 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Taman Kota seluas ± 3.546 M <sup>2</sup>	± 18.626 M <sup>2</sup>	27 April 2023	600.3.3.2/523- TR/DPUPRP	1,45	0,35
32	PT. Anugerah Widya Utama	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Rumah MBR	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah ) seluas ± 320 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Taman RW seluas ± 5.130 M <sup>2</sup>	± 5.450 M <sup>2</sup>	11 Mei 2023	600.3.3.2/571- TR/DPUPRP	0,03	0,51



33	an. Sumarseh	Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Sarang Burung Walet	Kawasan Perkebunan	± 24 M <sup>2</sup>	11 Mei 2023	600.3.3.2/572- TR/DPUPRP	0,00	
34	CV. Rizky Dwi Utama	Desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah laut	Perluasan WIUP Batubara	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 89,81 Ha	24 Mei 2023	600.3.3.2/1430- TR/DPUPRP	89,81	
35	an. Gumarawan Susanto	Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Tempat Ibadah Vihara	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	± 801 M <sup>2</sup>	14 Juni 2023	600.3.3.2/658- TR/DPUPRP	0,08	
36	Madrasah Ibtidaiyah (MIN) 3 Tanah Laut	Kelurahan Pabahanan Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Gedung Madrasah	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas ± 2.117 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP seluas ± 465 M <sup>2</sup>	± 2.582 M <sup>2</sup>	19 Juni 2023	600.3.3.2/665- TR/DPUPRP	0,25	
37	PT.Gambut Bumi Makmur	Desa Batakan dan Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Hutan Produksi (HP)	± 2.149	20 Juni 2023	600.3.3.2/1646- TR/DPUPRP	2149,00	
38	PT.Pelaihari Makmur Bersama	Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Kawasan Perkebunan= 350 Ha dan Kawasan pertanian lahan basah=186 Ha	± 536 Ha	20 Juni 2023	600.3.3.2/1647- TR/DPUPRP	536,00	
39	PT.Pelaihari Silika Jaya	Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Hutan Produksi (HP)	± 689 Ha	20 Juni 2023	600.3.3.2/1648- TR/DPUPRP	689,00	
40	PT.Pelaihari Berkah Sejahtera	Desa Mekar Raya dan Desa Sebamban Baru Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Kawasan Perikanan Budidaya	± 350 Ha	20 Juni 2023	600.3.3.2/1649- TR/DPUPRP	350,00	
41	PT. Galian Mulia Sejahtera	Desa Batakan dan Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Hutan Produksi (HP)	± 964 M <sup>2</sup>	21 Juni 2023	600.3.3.2/1686- TR/DPUPRP	964,00	
42	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut	Pembuatan Reservoar di Kecamatan Takisung	Kawasan Peruntukan permukiman	± 2.000 M <sup>2</sup>	23 Juni 2023	600.3.3.2/673- TR/DPUPRP	0,20	



43	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut	Kelurahan Pabahanan Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	± 770 M <sup>2</sup>	05 Juli 2023	600.3.3.2/707-TR/DPUPRP	0,08	
44	PT. Hadwan Sejahtera Niaga	Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pabrik Kelapa Sawit Mini	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 1 Ha	05 Juli 2023	600.3.3.2/706-TR/DPUPRP	1,00	
45	PT. Cahaya Embun Persada utama	Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas ± 0,31 Ha dan Sub Zona Perkebunan seluas ± 3,9 Ha	± 4,2 Ha	05 Juli 2023	600.3.3.2/708-TR/DPUPRP	4,20	
46	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut	Operasional Puskesmas Panyipatan	Kawasan Peruntukan Permukiman.	± 1.987 M <sup>2</sup>	17 Juli 2023	600.3.3.2/749-TR/DPUPRP	0,20	
47	Bidang Bina Marga DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah laut	Pembebasan Lahan Jalan Desa	Kawasan Peruntukan Permukiman=0,28 Ha, Kawasan Pertanian Lahan Kering=1,58 Ha dan Kawasan Perkebunan=2,89 Ha	± 4,75 Ha	17 Juli 2023	600.3.3.2/750-TR/DPUPRP	4,75	
48	Yayasan Al Anshari Kalimantan Selatan	Desa Batu Tungku di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Maqbarah Al Anshari (Komplek Pemakaman)	kawasan pertanian lahan kering	± 7.500 M <sup>2</sup>	25 Juli 2023	600.3.3.2/774-TR/DPUPRP	0,75	
49	CV. Mitra Resoluitioun Group	Desa Maluka Baulin di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	Kawasan Perkebunan	± 3,7 Ha	25 Juli 2023	600.3.3.2/776-TR/DPUPRP	3,70	
50	PT.Harapan Sumber Silika	Desa Batakan, Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan dan Desa Sabuhur di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Hutan Produksi (HP)	± 2.599Ha	25 Juli 2023	600.3.3.2/1922-TR/DPUPRP	2599,00	



51	PT.Sumber Makmur Silika	Desa Sabuhur, Desa Alur, Desa Swarangan dan Desa Jorong di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Hutan Produksi=±2.819 Ha, Kawasan Perikanan Budidaya=±35 Ha, Kawasan Perkebunan=± 318 Ha, Kawasan Pertanian Lahan Basah=± 291 Ha, Kawasan Pertanian Lahan Kering=± 1.339 Ha dan Sempadan Sungai=± 9 Ha	± 4.814 Ha	25 Juli 2023	600.3.3.2/1923-TR/DPUPRP	4805,00	9,00
52	PT.Sumber Jaya Silika	Desa Batakan di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika	Hutan Produksi=±3.346 Ha, Kawasan Peruntukan Permukiman=± 6 Ha, Kawasan Pertanian lahan basah=± 140 Ha, Kawasan Pertanian Lahan Kering=± 35 Ha, dan Sempadan Sungai=± 1 Ha	± 3.528 Ha	25 Juli 2023	600.3.3.2/1924-TR/DPUPRP	3527,00	1,00
53	Desa Damar lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten tanah Laut	Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah laut	Pembangunan Kantor Desa	kawasan peruntukan Permukiman	± 883 M <sup>2</sup>	04 Agustus 2023	600.3.3.2/811-TR/DPUPRP	0,01	
54	Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera	Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 0,795 Ha	04 Agustus 2023	600.3.3.2/812-TR/DPUPRP	0,79	
55	PT. Fastha Jaya Properti	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang= 975 M <sup>2</sup> , Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah=437 M <sup>2</sup> , dan Sub Zona Perkebunan= 9.308 M <sup>2</sup>	± 10.720 M <sup>2</sup>	04 Agustus 2023	600.3.3.2/813-TR/DPUPRP	1,07	
56	PT. Fastha Jaya Properti	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	± 8.590 M <sup>2</sup>	04 Agustus 2023	600.3.3.2/814-TR/DPUPRP	0,86	



57	PT. Kawasan Industri Jorong	Desa Karang Rejo dan Desa Swarangan di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Kawasan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (-Di dalam Deliniasi RDTR WP Sekitar KI Jorong=± 185 dan - Di dalam Deliniasi wilayah PT. Wahyu Putra Ramadhan (Pemegang PKKPR KI Jorong)=± 197 Ha), Kawasan Peruntukan Permukiman=± 160 Ha, Kawasan Perkebunan=± 62 Ha	± 604 Ha	09 Agustus 2023	600.3.3.2/2039-TR/DPUPRP		604,00
58	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Ushuluddin Martapura	Desa Banyu Irang di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Sarana Pendukung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas 9.412 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Perkebunan seluas ± 34.326 M <sup>2</sup>	± 43.738 M <sup>2</sup>	14 Agustus 2023	600.3.3.2/857-TR/DPUPRP	3,43	0,94
59	PT. Laterite Sukses Makmur	Desa Bentok Kampung di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Tanah Uruk	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 10,4 Ha	15/0282023	600.3.3.2/2067-TR/DPUPRP	10,40	
60	PT. Silica Megah Raya	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.	Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Pertanian Lahan Basah	± 49,9 Ha	15 Agustus 2023	600.3.3.2/2065-TR/DPUPRP	49,90	
61	PT. Borneo Silika Pasifik	Desa Muara Asam-Asam di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Pertanian Lahan Basah= ± 49,18 Ha dan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil= ± 0,42 Ha	± 49,6 Ha	15 Agustus 2023	600.3.3.2/2066-TR/DPUPRP	49,18	0,42
62	Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Kawasan Pertanian Lahan basah=15,15 Ha dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=0,02 Ha	± 15,17 Ha	21 Agustus 2023	600.3.3.2/871-TR/DPUPRP	15,17	
63	Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.	Pembuatan Siring Pengaman Sungai Mina Tirta	Zona Badan Air sepanjang ± 273,9 M dan Zona Perlindungan Setempat sepanjang 410,1 M	± 684 M	21 Agustus 2023	600.3.3.2/872-TR/DPUPRP		





64	Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	Desa Kunit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	Pembuatan Siring Sungai Tabanio	Kawasan sempadan sungai	± 126 M	21 Agustus 2023	600.3.3.2/873-TR/DPUPRP		
65	PT. Silika Pasifik Indonesia	Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Hutan Produksi=46,81, Kawasan Suaka Margawatwa=452,81	± 498,89 Ha	28 Agustus 2023	600.3.3.2/2170-TR/DPUPRP	498,89	
66	PT. Hamparan Silika Kalimantan	Desa Sabuhur dan Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Hutan Produksi=10,47, Kawasan Suaka Margawatwa=1.157,65, Kawasan Perlindungan setempat=27,56 dan sempadan sungai=2,84	± 1.198,53 Ha	28 Agustus 2023	600.3.3.2/2172-TR/DPUPRP	1168,59	30,40
67	PT. Talaga Silika Pasifik	Desa Telaga langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Peruntukan Permukiman=35,11 dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=48,09 dan Kawasan Pertanian Lahan Basah=69,28	± 152,47 Ha	28 Agustus 2023	600.3.3.2/2173-TR/DPUPRP	117,37	35,11
68	PT. Pugung Raya	Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Perkebunan Kelapa Sawit	Sub Zona Perkebunan seluas ± 10,36 Ha dan Zona Badan Air seluas 0,10 Ha	seluas ± 10,46 Ha	31 Agustus 2023	600.3.3.2/896-TR/DPUPRP	10,36	0,10
69	PT. Dzar Permata banua	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 15.500 M2	31 Agustus 2023	600.3.3.2/897-TR/DPUPRP	1,550	
70	PT. Berkat Bersaudara Berlima Sejahtera	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP seluas ± 692 M <sup>2</sup> dan P Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas ± 6.554 M <sup>2</sup> seta Zona Kawasan Peruntukan Industri seluas ± 1.870 M <sup>2</sup>	± 9.117 M	31 Agustus 2023	600.3.3.2/898-TR/DPUPRP	0,91	



71	Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Tanah Laut	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut	Operasional dan Peningkatan Sarana Prasarana MAN IC Tanah Laut	Sub Zona SPU Skala Kota seluas ± 35.088 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP seluas ± 5.664 M <sup>2</sup> serta Sub Zona Perkebunan ) seluas 59.231M <sup>2</sup> .	± 99.983 M <sup>2</sup>	31 Agustus 2023	600.3.3.2/900-TR/DPUPRP	9,99	
72	PT. Hamparan Silika Indonesia	Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan dan Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Perlindungan Setempat=± 46,75 Ha, Kawasan suaka Margasatwa=± 837,97 Ha dan Hutan Produksi (HP)=± 110,56 Ha	± 995,28 Ha	28 Agustus 2023	600.3.3.2/2171-TR/DPUPRP	948,53	46,75
73	PT. Surya Sembilan Delapan	Lokasi 1: di Desa Sumber Makmur, Desa Pagatan Besar dan Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Lokasi 2: Desa Taelaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Dan Lokasi 3: Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Silika/Kuarsa	Lokasi 1: Kawasan Peruntukan Permukiman=± 206,62, Kawasan Perkebunan= ± 2,81, Kawasan Pertanian Lahan basah = ± 226,37, KP2B=170,91 ; Lokasi:2: Kawasan Peruntukan Permukiman=± 78,16, Kawasan Perkebunan= ± 99,94, Kawasan Pertanian Lahan Kering = ± 96,90, Kawasan Pertanian Lahan basah = ± 389,30, KP2B=4,87 Ha; Lokasi 3: Kawasan Peruntukan Permukiman=± 634,80, Kawasan Perkebunan= ± 18,91, Kawasan Pertanian Lahan basah = ± 217,29.	Loasi 1: ± 435,81 Ha, Loasi 2: ± 664,30, Lokasi 3: ± 871,00	04 September 2023	600.3.3.2/2275-TR/DPUPRP	1051,52	1095,36
74	PT. Rakat Bersama Selalu	desa kandangan lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Kuarsa	Kawasan Perkebunan =± 30,15 Ha dan Kawasan Pertanian Lahan Basah=± 13,14 Ha	± 43,29 Ha	04 September 2023	600.3.3.2/2276-TR/DPUPRP	43,29	



75	PT. Anugerah Artha Borneo	desa sabuhur Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Pasir Kuarsa	KawasanPertanian Lahan Kering	± 100,38 Ha	04 September 2023	600.3.3.2/2277-TR/DPUPRP	100,38	
76	CV. Aqrab	desa bentok darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Bahan Galian Kuarsa	Kawasan Perkebunan	± 113,24 Ha	04 September 2023	600.3.3.2/2278-TR/DPUPRP	113,24	
77	PT. Sentosa Suksesutama	a. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 148 tanggal 4 Maret 2020, NIB 17.08.00.00166 seluas 221,90 Ha yang terletak di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149 tanggal 10 Maret 2020, NIB 17.08.00.00162 seluas 197,00 Ha, yang terletak di Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. c. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 150 tanggal 10 Maret 2020, NIB 17.08.00.00167 seluas 63,070 Ha, yang terletak di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. d. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 151 tanggal 10 Maret 2020, NIB 17.08.00.00164 seluas 135,00 Ha, yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. e. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 tanggal 10 Maret	Perkebunan Kelapa Sawit	a. HGU No148: Kawasan Perkebunan=± 219,00 dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=± 2,90, b. HGU Nomor 149: Kawasan Peruntukan Industri=± 197,00, c. HGU Nomor 150: Kawasan Peruntukan Industri=± 63,07, c. HGU Nomor 151: Kawasan Perkebunan=± 126,86 dan Kawasan Pertanian Lahn Kering=± 8,14, e. HGU Nomor 152: Kawasan Perkebunan=± 16,34, f. HGU Nor 153: Kawasan Peruntukan Permukiman=± 17,36, Kawasan Perkebunan=± 171,20 dan Kawasan Pertanian Lahan Basah: ± 9,30, HGU Nor 154: Kawasan Perkebunan=± 176,26 dan Kawasan Pertanian Lahan Basah=± 1,84 Ha	± 1.009,27 Ha	04 September 2023	600.3.3.2/2279-TR/DPUPRP	10029,27	



		2020, NIB 17.08.00.00165							
		seluas 16,340 Ha, yang terletak di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. f. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 153 tanggal 12 Maret 2022, NIB 17.08.00.00163 seluas 197,860 Ha, yang terletak di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. g. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 154 tanggal 18 Maret 2020, NIB 17.08.00.00161 seluas 178,100 Ha, yang terletak di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut							
78	PT. Galian Mulia Sejahtera	desa kampung baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Galian C/Batu Gunung	Zona Pariwisata	± 38,5 Ha	04 September 2023	600.3.3.2/2280-TR/DPUPRP	38,50	
79	UPT Puskesmas Angsau	Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut	Aktivitas Puskesmas Angsau	Zona Perkantoran	1.005 M <sup>2</sup> .	18 September 2023	600.3.3.2/940-TR/DPUPRP	0,01	
80	UPT Puskesmas Tanjung Habulu	Desa Tanjung Kecamatan Bajuinn Kabupaten Tanah laut	Aktivitas Puskesmas Angsau	Kawasan Peruntukan Permukiman	1.886 M <sup>2</sup>	18 September 2023	600.3.3.2/942-TR/DPUPRP	0,020	
81	UPT Puskesmas Batakan	Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut	Aktivitas Puskesmas Batakan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 1.967 M <sup>2</sup>	18 September 2023	600.3.3.2/943-TR/DPUPRP	0,020	



82	PT. Putri Tala Berkarya	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Kode R-4) seluas ± 7.996 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Taman Kelurahan (Kode RTH-4) seluas ± 1.206 M <sup>2</sup>	± 9.203 M <sup>2</sup>	20 September 2023	600.3.3.2/952-TR/DPUPRP	0,79	0,12
83	PT. Tower Bersama	RT.01 RW.01 Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Menera Telekomunikasi	Kawasan Peruntukan Permukiman	-	20 September 2023	600.3.3.2/953-TR/DPUPRP	0,00	
84	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Pariwisata RT.16 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Menera Telekomunikasi	Kawasan Peruntukan Pariwisata	-	20 September 2023	600.3.3.2/954-TR/DPUPRP	0,00	
85	Badan Narkotika Nasional kabupaten Tanah Laut	Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut	Pembangunan Gedung BNN Kabupaten Tanah laut	Zona Perkantoran	5.000 m2	25 September 2023	600.3.3.2/967-TR/DPUPRP	0,50	
86	UPT. Puskesmas Jorong	Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut.	Aktivitas Puskesmas Jorong	Sub Zona SPU Skala Kecamatan (Kode SPU-2) seluas 2.039 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Perdagangan dan jasa Skala WP (Kode K-2) seluas 2.759 M <sup>2</sup> .	± 4.798 M <sup>2</sup>	29 September 2023	600.3.3.2/974-TR/DPUPRP	0,48	
87	An. Risca Maulia Giada	Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Rencana Kegiatan Rumah Makan	Kawasan Peruntukan Permukiman	± 2.697 M2	29 September 2023	600.3.3.2/975-TR/DPUPRP	0,27	
88	An. Suprayitno	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Wahana Wisata dan Sarana Pendukungnya	Kawasan Perkebunan	± 2 Ha	29 September 2023	600.3.3.2/976-TR/DPUPRP	2,00	



89	PT. Talaga Silika Pasifik	Telaga langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Pertanian Lahan Kering: ± 7,22, Kawasan Pertanian Lahan Basah: ± 123,81 dan Kawasan Perkebunan: ± 21,45	± 152,48 Ha	29 September 2023	600.3.3.2/2517-TR/DPUPRP	152,48	
90	UPT Puskesmas Tambang Ulang	Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	Aktivitas Puskesmas Tambang Ulang	Kawasan Peruntukan permukiman	± 5.168 M <sup>2</sup>	06 Oktober 2023	600.3.3.2/1021-TR/DPUPRP	0,52	
91	UPT Puskesmas Kait-Kait	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	aktivitas Puskesmas kait-kait	Kawasan Peruntukan permukiman	± 2.000 M <sup>2</sup>	06 Oktober 2023	600.3.3.2/1022-TR/DPUPRP	0,20	
92	UPT Puskesmas Tajau Pecah	Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	aktivitas Puskesmas kait-kait	Kawasan Peruntukan permukiman=± 4.602 M <sup>2</sup> dan Kawasan Pertanian Lahan Kering=± 210 M <sup>2</sup>	± 4.812 M <sup>2</sup>	06 Oktober 2023	600.3.3.2/1023-TR/DPUPRP	0,48	
93	Yayasan Hasanuddin Madjedie Banjarmasin	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Tanah Alkah	Sub Zona Perkebunan	± 3,96 Ha	06 Oktober 2023	600.3.3.2/1031-TR/DPUPRP	3,96	
94	An. H.Muhammad Yani	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	pembuatan kolam ikan	Sub Zona Perkebunan	± 8 Ha	06 Oktober 2023	600.3.3.2/1030-TR/DPUPRP	8,00	
95	CV. Anugerah Borneo Mineral	Desa martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Non Logam (Pasir Silika)	Kawasan Perkebunan	± 10,31 Ha	09 Oktober 2023	600.3.3.2/2632-TR/DPUPRP	10,31	
96	CV. Berkah Swarangan Berseri	Desa Swarangan di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Wisata Pantai	Kawasan Sempadan Pantai	9,46 Ha	09 Oktober 2023	600.3.3.2/2633-TR/DPUPRP	9,46	
97	Detasemen Zeni Bangunan 2/VI Zidam VI Mulawarman	Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Rumah Babinsa Bentok Darat	Kawasan Perkebunan	± 197 M <sup>2</sup>	10 Oktober 2023	600.3.3.2/1069-TR/DPUPRP	0,00	
98	UPT Puskesmas Sungai Riam	Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Aktivitas Puskesmas Sungai Riam	Kawasan Peruntukan permukiman	± 4.995 M <sup>2</sup>	10 Oktober 2023	600.3.3.2/1070-TR/DPUPRP	0,50	



99	Rumah Sakit Ibu dan Anak 'Ibunda'	Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Aktifitas Rumah Sakit Swasta Untuk Perluasan dan Perubahan Dokumen Lingkungan	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP seluas ± 3.256 M <sup>2</sup> dan Z Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan d seluas ± 1.515 M <sup>2</sup>	± 4.771 M <sup>2</sup>	13 Oktober 2023	600.3.3.2/1079-TR/DPUPRP	0,48	
100	CV. Siliconas Multi Mining	Desa Batakan dan Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pengelolaan/ Pertambangan Pasir Silika	Kawasan suaka Margasatwa =2 Ha dan Hutan Produksi (HP)= 1.983 Ha	± 1.985 Ha	16 Oktober 2023	600.3.3.2/2709-TR/DPUPRP	1983,00	2,00
101	CV. Sinergi Alam Nusantara	Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Bukan Logam Silika/Pasir Kuarsa	Hutan Produksi (HP)	± 125 Ha	16 Oktober 2023	600.3.3.2/2710-TR/DPUPRP	125,00	
102	CV. Alnetra	Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pertambangan Mineral Bukan Logam Silika/Pasir Kuarsa	Hutan Produksi (HP)	± 179 Ha	16 Oktober 2023	600.3.3.2/2711-TR/DPUPRP	179,00	
103	Yayasan Pendidikan Islam Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut	kelurahan karang taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Istiqomah	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 15.580 M <sup>2</sup>	18 Oktober 2023	600.3.3.2/1084-TR/DPUPRP	2,60	
104	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembibitan Ayam Ras	Zona Kawasan Peruntukan Industri seluas ± 2,3 Ha, Sub Zona Perkebunan dengan Kode P-3 seluas ± 0,2 Ha, Badan Air seluas ± 0,03 Ha dan Badan Jalan seluas 0,07 Ha	± 2,6 Ha	30 Oktober 2023	600.3.3.2/1118-TR/DPUPRP	0,27	
105	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Tembus Kuburan RT.003 Rw.001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Menera Telekomunikasi	Kawasan Pertanian Lahan Kering	-	30 Oktober 2023	600.3.3.2/1119-TR/DPUPRP	0,00	
106	PT. PLN (Persero) UPT Kalselteng	desa jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebanyak 5 titik tower	Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Perkebunan	-	30 Oktober 2023	600.3.3.2/1120-TR/DPUPRP	0,00	



107	PT. Putri Tala Berkarya	Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Kode R-4) seluas ± 7.939 M <sup>2</sup> dan Sub Zona Taman Kelurahan (Kode RTH-4) seluas ± 4.441 M <sup>2</sup>	± 12.380 M <sup>2</sup>	30 Oktober 2023	600.3.3.2/1121-TR/DPUPRP	0,80	0,44
108	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Desa sungai pinang Kecamatan tambang ulang Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pembibitan Ayam Ras	Kawasan Perkebunan= 33,4 Ha dan Kawasan Pertanian Lahan Kering= 4,1 Ha	± 37,5 Ha	31 Oktober 2023	600.3.3.2/2812-TR/DPUPRP	37,50	
109	PT.Hepi Bornio	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Budidaya Peternakan Unggas Petelur	Sub Zona Peternakan dengan Kode P-4 seluas ± 33,9 Ha dan Sub Zona Perkebunan dengan Kode P-3 Seluas ± 1,7 Ha	± 35,6 Ha	31 Oktober 2023	600.3.3.2/2813-TR/DPUPRP	35,60	
110	PT. PLN (Persero) UPT Kalselteng	Desa jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 titik tower	Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Perkebunan	-	06 November 2023	600.3.3.2/1128-TR/DPUPRP	0,00	
111	An. Agus Winarko	Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pembangunan Rumah/Deret G5 Semi Permanen	Kawasan Perkebunan	± 225 M <sup>2</sup>	06 November 2023	600.3.3.2/1130-TR/DPUPRP	0,02	
112	PT. Cahaya Mandiri Regensi	Kelurahan Tarang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembuatan IUP OP Batuan	Sub Zona Taman Kecamatan (Kode RTH-3) seluas ± 4 Ha dan Sub Zona Peruntukan Pertambangan Batuan (Kode MTB) seluas ± 5 Ha serta Zona Pengelolaan Persampahan (Kode PP) seluas ± 11 Ha.	± 20 Ha	24 November 2023	600.3.3.2/1234-TR/DPUPRP	5,00	15,00
113	an. H.M. Yunus	Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Perumahan	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala	± 6.083 M <sup>2</sup>	24 November 2023	600.3.3.2/1235-TR/DPUPRP	0,61	
114	PD. Baratala Tuntung Pandang	Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut	Pembangunan Kantor	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	± 800 M <sup>2</sup>	07 Desember 2023	600.3.3.2/1296-TR/DPUPRP	0,08	





115	PT. Cahaya Mandiri Regensi	Kelurahan Tarang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembuatan IUP OP Batuan	Sub Zona Peruntukan Pertambangan Batuan (Kode MTB) seluas ± 25,85 Ha dan dan Badan Jalan (Kode BJ) seluas ± 0,18 Ha	± 26 Ha	28 Desember 2023	600.3.3.2/1390-TR/DPUPRP	25,85	0,18
116	PT. Sarana Doa Bersama	Desa sungai jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Quarry Besar Batu Andesit dan Batching Plant	Kawasan Perkebunan	8,5 Ha	28 Desember 2023	600.3.3.2/3459-TR/DPUPRP	8,50	
117	CV. Rahman Berkah Parazakian	Desa sabuhur Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Kuarsa	Kawasan Pertanian Lahan Kering	± 51,62 Ha	28 Desember 2023	600.3.3.2/3460-TR/DPUPRP	51,62	
							<b>TOTAL</b>	<b>33503,92</b>	<b>1841,93</b>
							<b>TOTAL SELURUHNYA</b>	<b>35345,85</b>	



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016- 2036 dan pada tanggal 14 Desember Tahun 2023 telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN atas rancangan Perda Kabupaten Tanah Laut tentang RTRW Tahun 2023-2042 dan telah mendapat persetujuan dan di paripurnakan Oleh DPRD Kab. Tanah Laut. Pada tahun 2022 juga telah ditetapkan 3 Peraturan Bupati dan pada tahun 2023 telah ditetapkan 2 Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang yaitu:

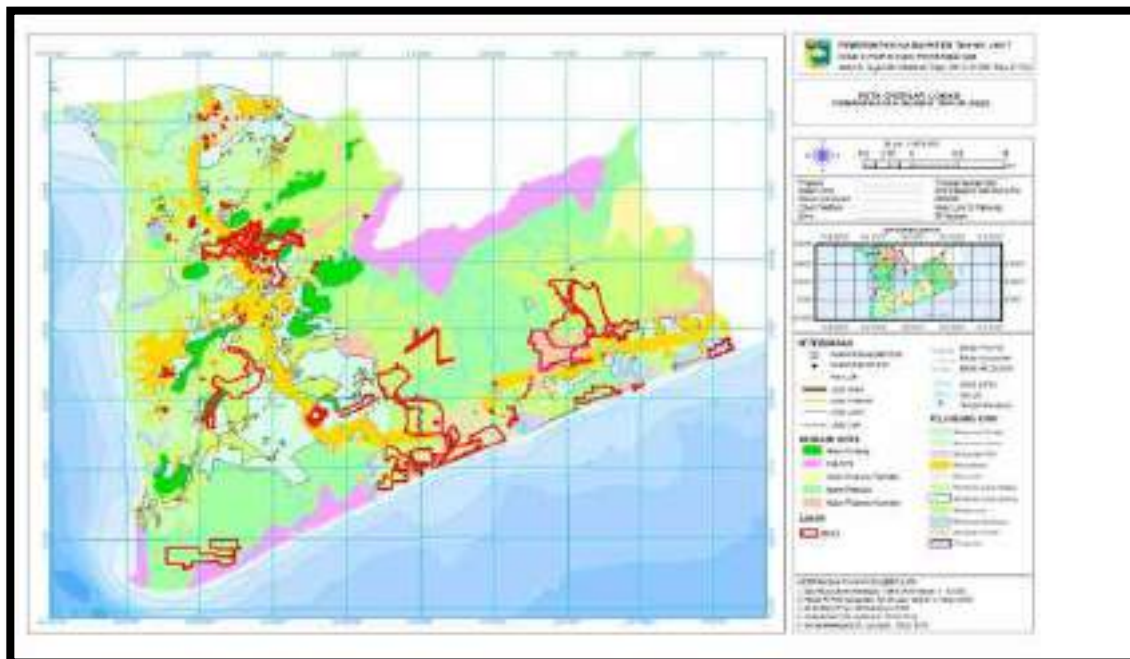
1. Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042.
2. Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbup No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042.
3. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022.
4. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jorong.
5. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Di Sekitar Kawasan industri Jorong.

Dengan dasar Perda dan Perbup tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melakukan upaya-upaya agar tata ruang wilayah sesuai dengan Perda RTRW dan perbub RDTR minimal 98% yaitu :

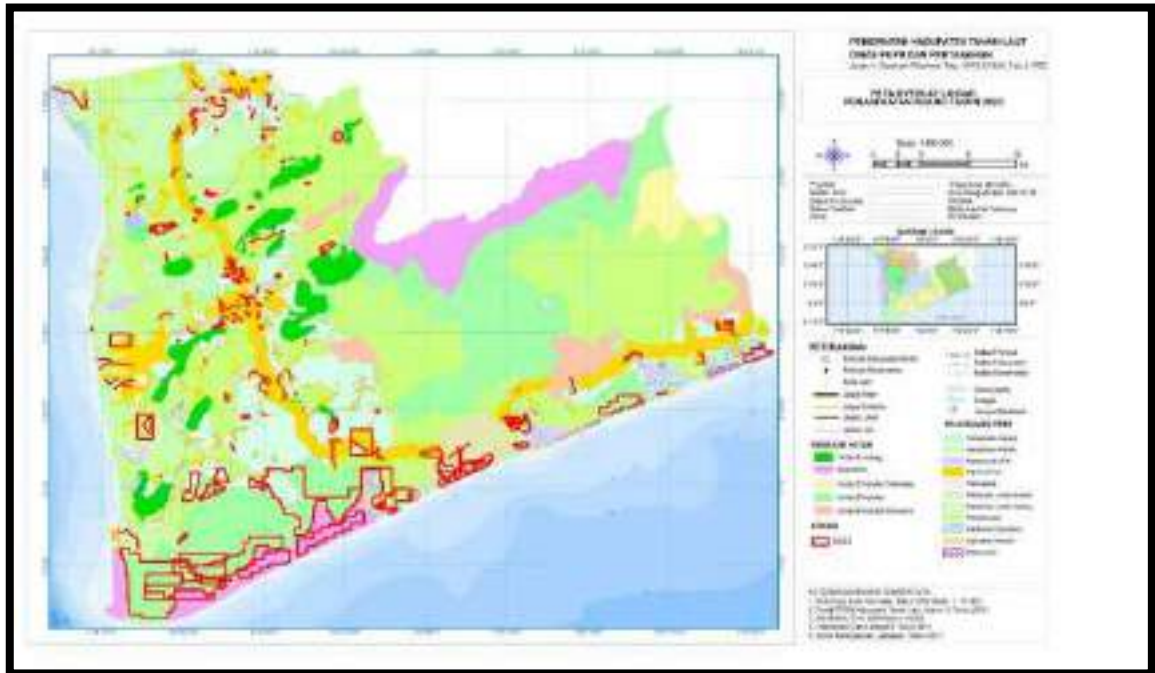
- 1) Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbup RDTR.

- 2) Mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3) Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4) Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 5) Pendampingan Proses Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut.
- 6) Validasi KLHS RTRW Kabupaten Tanah Laut.
- 7) Penyusunan RDTR BWP Panyipatan, Tambang Ulang dan Jorong
- 8) Penyusunan Database RDTR
- 9) Pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Kurau.
- 10) Pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar Kecamatan Kurau.
- 11) Penyusunan KLHS RDTR Jorong, Panyipatan dan Tambang Ulang.

Peta overlay lokasi pemanfaatan ruang tahun 2022



Peta overlay lokasi pemanfaatan ruang tahun 2023



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 66 ASN pada DPUPRP, 55 ASN pada DPRKPLH dan di dukung oleh 8 Program dengan Pagu Rp. 15,195,226,218.00 dan terealisasi Rp. 15,987,785,249.00 atau sebesar 105,22%.

Tabel 3.5.48  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	393,534,113.00	365,311,854.00
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,062,336,513.00	1,076,229,606.00
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,322,000,300.00	3,022,848,363.00
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	245,666,918.00	238,998,282.00



5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	74,356,810.00	71,869,476.00
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	59,464,163.00	57,037,176.00
7	Program Pengelolaan Persampahan	6,376,128,764.00	7,168,150,840.00
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,661,738,637.00	3,987,339,652.00
<b>Jumlah</b>		<b>15,195,226,218.00</b>	<b>15,987,785,249.00</b>

Tabel 3.5.49  
Efisiensi Sasaran Strategis 19

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
104,09 %	- %	- %



## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 20

### Meningkatnya pembinaan desa

Meningkatnya pembinaan desa diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.50  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Desa Kategori Maju	%	24	33.08	137.83	26	46,15	177,5 %	28	70,76	252,71 %
2	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa	5	6	120.00	5	7	140 %	5	7	140%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>196,35%</b>

#### a. Persentase Desa Kategori Maju

Untuk menghitung persentase desa kategori maju adalah dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa.

Realisasi indikator persentase desa kategori maju tahun 2023 adalah 70,76 %, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 28% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 252,71%. Mengalami peningkatan sebesar 24,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 46,15%.

Perhitungan persentase desa kategori maju diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase desa kategori maju

$$= \frac{\text{Jumlah desa kategori maju (Maju dan Mandiri)}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$$

Jumlah desa

$$= \frac{92 \text{ Desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$$



130 Desa  
= 70,76%

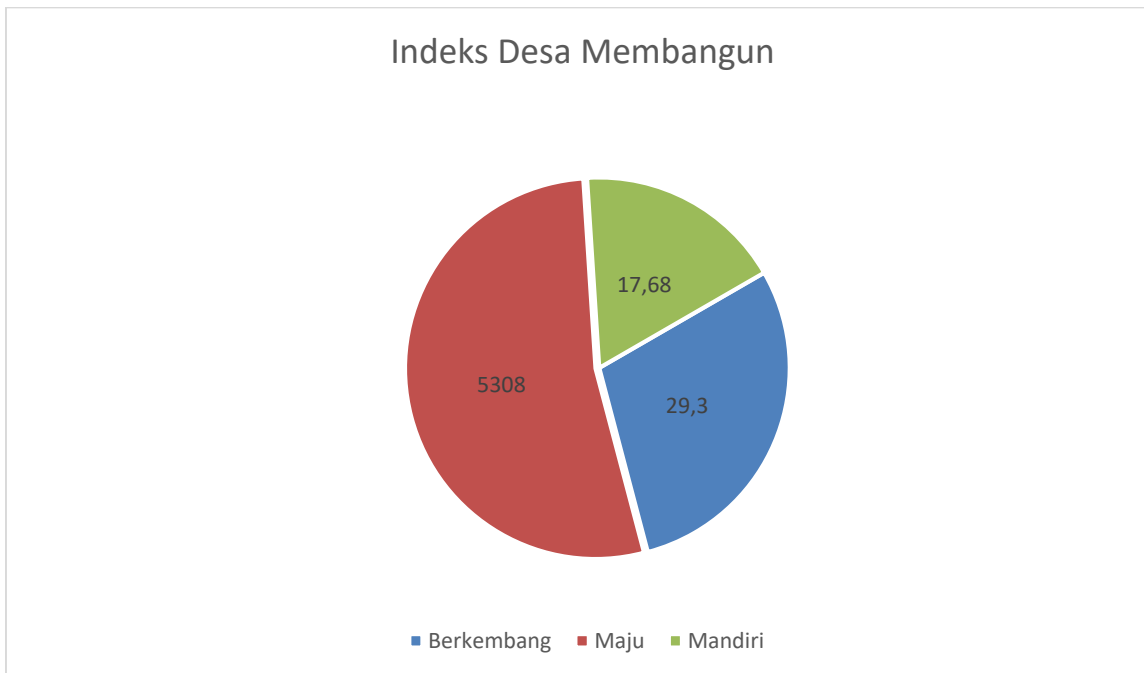
Tabel 3.5.51  
Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan se Kabupaten  
Tanah Laut Tahun 2023

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	TAKISUNG	12	-	-	5	5	2-
2	JORONG	11	-	-	2	6	3
3	PELAIHARI	15	-	-	6	7	2
4	KURAU	11	-	-	1	9	1-
5	BATI-BATI	14	-	-	0	12	2
6	PANYIPATAN	10	-	-	3	4	3
7	KINTAP	14	-	-	4	7	3
8	TAMBANG ULANG	9	-	-	6	2	1-
9	BATU AMPAR	14	-	-	3	7	4
10	BAJUIN	9	-	-	1	7	-1
11	BUMI MAKMUR	11	-	-	7	3	1-
<b>JUMLAH</b>		<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>23</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sudah tidak ada lagi Desa kategori sangat tertinggal dan tertinggal, 38 Desa kategori berkembang, 69 Desa kategori maju dan 23 Desa kategori mandiri dari total 130 desa se Kabupaten Tanah Laut.

Grafik 3.5.20  
Indeks Desa Membangun



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Desa Kategori Maju Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terealisasi sebesar 70,76%, mengalami peningkatan sebesar 24,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 46,15%. Untuk tahun 2022 terdapat 8 desa mandiri dan 0 desa tertinggal sedangkan di tahun 2023 terdapat 23 desa dengan kategori mandiri dan sudah tidak ada lagi desa dengan kategori tertinggal.

Tabel 3.5.52

Kriteria Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
2	Tertinggal	15	4	2	0	0
3	Berkembang	89	98	85	70	38
4	Maju	25	26	40	52	69
5	Mandiri	0	2	3	8	23





Jumlah	130	130	130	130	130
--------	-----	-----	-----	-----	-----

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa membangun adalah IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan ( Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni : (i) Desa sangat tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Tabel 3.5.53  
Klasifikasi Desa

No	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat tertinggal	$\leq 0,4907$
2.	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3.	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4.	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5.	Mandiri	$> 0,8155$

Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan dan pilihan masyarakat desa dalam upaya menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva. Sampai saat ini masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah ketidakberdayakan dan marjinalisasi. Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan diwilayah pedesaan. Oleh sebab itu diharapkan dengan Jaring Komunitas Desa ini mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan Lokal Desa.



Kedua, Lumbung Ekonomi Desa. Desa sebagai jenis entitas wilayah terkecil. Dalam suatu Negara, memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam. Ketika potensi tersebut mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri maka akan menjadi lumbung komoditas ekonomi. Pengembangan lumbung ekonomi tidak akan pernah lepas dengan masalah modal, jaringan dan informasi. Oleh karena itu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa harusnya sudah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sudah mumpuni. Dalam Konteks ini BUMDesa ( Badan Usaha Milik Desa ) sebagai penggerak perekonomian harus mampu dan tanggap dengan kesempatan dan peluang ekonomi yang bias dikembangkan. Ketiga, Lingkar Budaya Desa. Budaya desa merupakan ruh keterkaitan emosional warga yang terbentuk dari kebersamaan persaudaraan, kekerabatan dan kolektivitas yang mengakar lama dalam masyarakat. Budaya desa yang seperti ini akan mampu mengarahkan, membimbing secara kolektif untuk tetap pada jalur dan tujuan program pembangunan. Norma dan nilai budaya desa yang telah ada sejak lama secara otomatis akan mengontrol program tersebut hingga menghasilkan kemajuan hingga sampai pada kesejahteraan masyarakat. Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan).

Tabel 3.5.54  
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	0
3	Berkembang	38
4	Maju	69
5	Mandiri	23
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>



Derap pembangunan di wilayah perdesaan di Kabupaten Tanah Laut terus melaju pesat. Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mulai terus ditingkatkan dari tahun 2020 sampai sekarang, khususnya mengenai perkembangan kemajuan di 130 Desa. Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, maka diperlukan ketersediaan data dasar Pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana ketentuan Permendes PDPT-RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Target kenaikan status Desa selain didasarkan pada capaian prestisius tahun lalu, juga dikarenakan masifnya pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Tanah Laut. Baik yang mempergunakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Dari 130 desa di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari 11 Kecamatan, pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal. Untuk Desa Berkembang pada tahun 2022 sebanyak 70 Desa (53,85 persen) turun menjadi 38 Desa (29,23 persen) pada tahun 2023. Desa Maju pada tahun 2022 sebanyak 52 Desa (40,00 persen) naik menjadi 69 Desa (53,08 persen) pada tahun 2023. Dan Desa Mandiri pada tahun sebelumnya ada 8 Desa (6,15 persen) sekarang pada tahun 2023 menjadi 23 Desa (17,69 persen).

Dalam upaya menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut telah dibuat dan diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Dimana perlu dilakukan secara terpadu dan koordinasi, dengan melibatkan berbagai SKPD, terkait sasaran pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil analisa IDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dan Keputusan Menteri Desa, PDT & Trans RI Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, di Kabupaten Tanah Laut terdapat 23



(Dua Puluh Tiga) Desa Mandiri, 69 (Enam Puluh Sembilan) Desa Maju dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Desa Berkembang, tidak ada lagi Desa berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Dan pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Kabupaten terbaik pertama atas prestasi pembangunan dalam peningkatan status dan kemandirian Desa, dalam menolak / tidak ada lagi Desa berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, dan Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2022 dari Menteri Desa, PDT dan Trans kepada Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar, Desa Kait-Kait Baru dan Desa Padang Kec. Bati-Bati, Desa Jorong dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong, Desa Bukit Mulya Kec. Kintap, Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan dan Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Trans RI Nomor 105 Tahun 2022, dan ada 23 (dua puluh tiga) Desa mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas prestasi dalam pembangunan sebagai Desa dengan Peningkatan Status Desanya, dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah pada semua tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dan tidak ketinggalan partisipasi para Pendamping Desa serta semua pihak yang terkait. Karena itu, sinergi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga status Desa Tertinggal tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut ini, semuanya sudah naik menjadi Desa Berkembang, Maju dan Desa Mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga banyak upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Program peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%, dari tahun 2018 – hingga 2023. Pada tahun 2021 dan 2022 Desa dapat membangun desa dalam segala dimensi, baik itu pembangunan infrastruktur (jalan desa, saluran irigasi, jalan pertanian) yang memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan pagelaran budaya di desa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa melalui kegiatan pelatihan kepada pemuda di desa misalnya tata rias, memasak, perbengkelan dan lain-lain. Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran



2018-2021 adalah sebesar :

- a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut.
  - b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018.
  - c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
  - d. Tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
  - e. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2022 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
  - f. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2023 sebesar Rp. 125.694.990.896 dari total anggaran Rp. 125.694.990.896 dengan persentase capaian 100%.
2. Bupati mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten sejak Tahun 2019 untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keuangan dan kinerja, dan di tahun 2019 telah dilakukan audit kepada 109 Desa dari total 130 Desa dan di tahun 2020 telah dilaksanakan audit kepada 29 Desa, Tahun 2021 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa dikarenakan 2 tahun terakhir terjadi adanya pandemi Covid 19, pada tahun 2022 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa, dan pada tahun 2023 dilaksanakan di 38 Desa.
- Kegiatan-kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:
- a. Pengawasan kebijakan pengelolaan APBDesa yang lebih mengutamakan pada pemberdayaan tenaga kerja dan potensi lokal secara mandiri dalam pengerjaan kegiatan pembangunan dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi yang menggunakan anggaran dana desa.
  - b. Pengawasan pengelola administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan BPD dalam pengelolaan APBDesa sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah.
  - c. Pemberian sosialisasi dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Perangkat



- dan BPD Desa.
- d. Melakukan Reviu penyaluran dan Penggunaan APBDesa setiap Triwulan.
  - e. Pengawasan pengelola Penatausahaan Aset Desa.
  - f. Pengawasan terhadap efektifitas kinerja Perangkat Desa, Penggunaan tenaga kerja, organisasi desa yang telah dibentuk.
  - g. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
  - h. Melakukan koordinasi terhadap dugaan adanya penyelewengan dana desa dari masyarakat diantaranya dengan meminta hasil laporan audit dari Inspektorat.
3. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan upaya sebagai berikut:
- a. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lain (Focus Group Discussion/FGD) dalam rangka bersama-sama menjadikan desa-desa yang berkembang menjadi maju dan mandiri yang merupakan sasaran dari forum ini sehingga semua program yang ada di masing-masing SKPD dapat bersinergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa tersebut.
  - b. Mengawal penggunaan ADD desa dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah pada desa-desa yang status desanya masih sangat tertinggal dan tertinggal apakah sudah sesuai dan mendukung dalam peningkatan status desanya.
  - c. Melakukan penguatan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta BumDes melalui kegiatan bimtek/pelatihan/pembinaan agar mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendukung percepatan peningkatan status desa.
  - d. Melaksanakan pembinaan desa yang memiliki ciri khas untuk terus meingkatkan potensi desa melalui kerjasama dengan SKPD terkait, agar menumbuhkan usaha-usaha kecil di desa.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain terus melaksanakan kegiatan kegiatan yang baik yang telah



dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang juga akan menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa yaitu meningkatkan keterpaduan, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut.

**b. Jumlah Desa Dibina Berciri Khas**

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa, di Kabupaten Tanah Laut juga telah terbentuk Desa Berciri Khas. Desa Berciri Khas yaitu Desa yang memiliki karakteristik khusus yang dapat ditinjau dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa setempat masih mempertahankan tradisi turun temurun dalam kehidupan sosial dan budaya. Sementara pada aspek geografi tergantung dari potensi alam tempat tinggal masyarakat Desa. Kebanyakan masih menggantungkan hidup dengan kondisi alam setempat sesuai potensi alamnya, misalnya daerah pesisir yang rata-rata adalah nelayan.

Sedangkan warga yang hidup dipinggiran hutan akan mengandalkan potensi hutan setempat utk bertahan hidup. Sementara dari aspek SDM yaitu masyarakat Desa setempat memiliki keterampilan khusus sebagai mata pencaharian yang mana mereka hidup dari industri kerajinan atau Desa pengrajin dan rata-rata biasanya bersifat homogen.

Jadi Desa Berciri Khas sesuai karakteristik desa masing-masing tersebut dengan potensi yang ada perlu digali, dipertahankan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa setempat dan sekaligus pelestarian alam dapat terjaga dengan baik.

Realisasi indikator Jumlah Desa di bina berciri khas di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terealisasi sebanyak 7 desa dari target 5 desa, sehingga capaian kinerja jumlah desa dibina berciri khas adalah sebesar 140%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu total 25 Desa.

Ke 7 (tujuh) desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan
2. Desa Telaga Kecamatan Pelaihari
3. Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung



4. Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari
5. Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari
6. Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur
7. Desa Batakan Kecamatan Panyipatan

Jumlah Desa dibina berciri khas tahun 2023 adalah sebanyak 7 Desa. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 7 Desa. Berikut daftar desa di bina berciri khas tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.5.55  
Desa dibina berciri khas 2021 – 2023

No	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau	Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur	Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan
2	Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati	Desa Telaga Kecamatan Pelaihari
3	Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan	Desa Kali Besar Kecamatan Kurau	Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung
4	Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang	Desa Damit Kecamatan Batu Ampar	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari
5	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin	Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari	Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari
6	Desa Tungkaran kecamatan Pelaihari	Desa Tabanio Kecamatan Takisung	Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur
7		Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap	Desa Batakan Kecamatan Panyipatan

Pada Tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pencaanangan desa berciri khas di Tanah Laut yang kemudian dilakukan pembinaan. Untuk desa yang dibina berciri khas dari 5 desa yang ditargetkan dan yteralisasi sebanyak 7 desa berciri khas.

Berikut kegiatan koordinasi Desa Berciri Khas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2023 :

1. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Kepala SKPD/ yang mewakili, Tujuh Kecamatan yang dtunjuk berciri khas. Kecamatan tersebut memilih Desa yang mempunyai ciri khasnya.
2. Rapat koordinasi dan konsolidasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala SKPD/ yang mewakili, Tujuh Kecamatan dan Tujuh Kepala Desa yang ditunjuk berciri khas yaitu Desa Sukaramah Kec.





Panyipatan, Desa Telaga Kec. Pelaihari, Desa Ranggung Dalam Kec. Takisung, Desa Ambungan Kec. Pelaihari, Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur dan Desa Batakan Kec. Panyipatan. Desa tersebut mempunyai beragam karakteristiknya masing-masing Desa, wisata, Kountur budaya dan alamnya.

3. Pencanaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Suramah Kecamatan Panyipatan, desa yang memiliki potensi beragam tumbuh-tumbuhan. Yang diputuskan dinamakan Kampung Holtikultura. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
4. Pencanaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, desa yang memiliki potensi beragam budi daya madu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Madu Lebah. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
5. Pencanaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung, desa yang memiliki potensi pembuatan serta pembakaran kayu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Harang. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
6. Pencanaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari, desa yang memiliki potensi ternak sapi. Yang diputuskan dinamakan Kampung Susu Sapi Murni. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
7. Pencanaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari, desa yang memiliki potensi beragam tanaman pisang. Yang diputuskan dinamakan Kampung Pisang Tundang. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut dan undangan.
8. Pencanaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur, desa yang memiliki potensi beragam buah-buahan. Yang diputuskan dinamakan Kampung Kasturi. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut dan undangan.



9. Pencanaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan, desa yang memiliki potensi beragam hasil tangkapan ikan. Yang diputuskan dinamakan Kampung Kerupuk. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut dan undangan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pembinaan desa di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 29 ASN pada DPMD dan di dukung oleh 7 Program dengan Pagu Rp. 16,184,317,184.00 dan terealisasi Rp. 14,501,101,631.00 atau sebesar 89,60%.

Tabel 3.5.56  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5,211,588,138.00	4,565,498,668.00
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	48,892,532.00	45,496,050.00
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9,037,879,093.00	8,235,194,311.00
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	910,991,611.00	844,328,749.00
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	723,433,798.00	612,896,400.00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	251,532,012.00	197,687,453.00
		<b>16,184,317,184.00</b>	<b>14,501,101,631.00</b>

Tabel 3.5.57  
Efisiensi Sasaran Strategis 20

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
196,35 %	89,60 %	106,75 %



**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 21**  
**Meningkatnya cakupan penataan perkotaan**

Meningkatnya cakupan penataan perkotaan melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.58  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	69,30	69,59	87,67%	3	0,21	1428,57 %	1%	0,42%	239,58%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023</b>											<b>239,58%</b>

Realisasi indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2023 adalah 0,42 %, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 1,0% dengan tingkat capaian 239,58%. Indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan indikator terbalik, dimana apabila tingkat capaian semakin rendah maka kinerja semakin baik.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan revisi terhadap SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/657-KUM/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Tanah Laut dan di ganti dengan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/473-KUM/2022 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Tanah Laut, dimana luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 211,93 Ha yang meliputi 8 Kawasan (17 desa/kelurahan ), dan pada tahun 2023 telah terjadi pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sehingga tersisa menjadi 158,38 Ha melalui intervensi dan investasi yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh. Sedangkan luasan kota Pelayari adalah 37.945 Ha sehingga diperoleh data persentase luasan kumuh di kawasan perkotaan tahun 2023 adalah :



Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan =

$\frac{\text{Luas permukiman kumuh}}{\text{Luas perkotaan}} \times 100\%$

Luas permukiman kumuh

158,38 Ha x 100% = 0,42 %

Luas perkotaan  
37.945 Ha

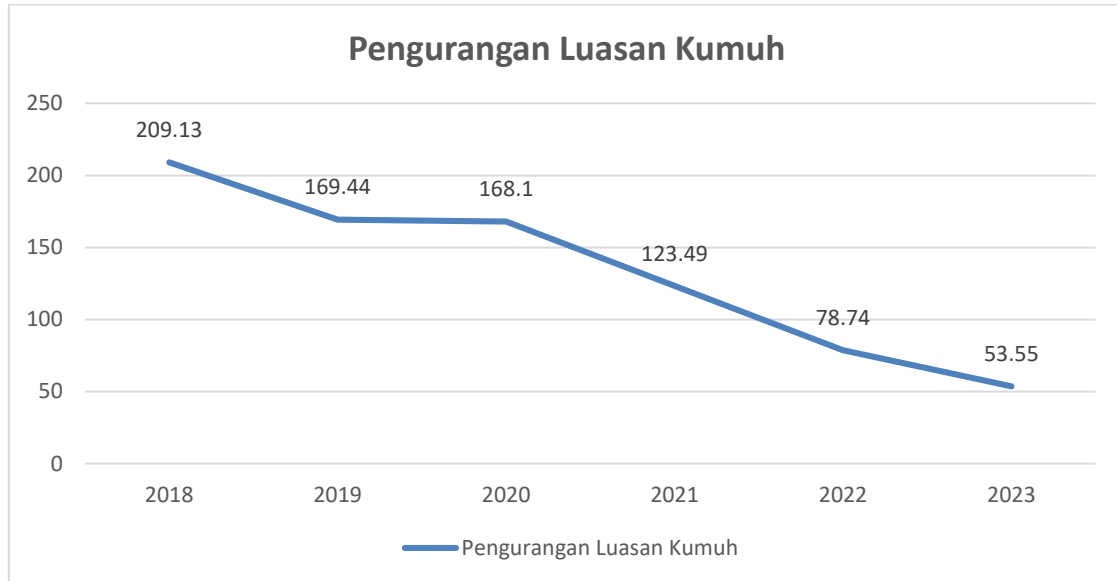


Tabel 3.5.59  
Pengurangan kawasan kumuh perkotaan Tahun 2023

No	Kawasan	Lokasi	Luas Kumuh Kawasan SK 2022	Luas Kumuh Kelurahan/ Desa SK 2022	Tingkat Kekumuhan sesuai SK	Total Nilai Kumuh	Pengurangan Kumuh 2023	Sisa Luasan Kumuh 2023/ Luasan Kumuh Awal 2024	Tingkat Kekumuhan	Total Nilai Kumuh
<b>Kecamatan Pelaihari</b>										
1	RK 23	Pelaihari	9,71	9,71	Kumuh sedang	45	0,00	9,71	Kumuh Ringan	26
2	RK 24	Sarang Halang	90,34	45,95	Kumuh Ringan	23	18,42	71,92	Kumuh Ringan	17
		Angsau		4,80						
		Karang Taruna		25,33						
		Atu-atu		14,26						
3	RK 25	Bumi Jaya	16,49	16,49	Kumuh Ringan	23	0,00	16,49	Kumuh Ringan	23
4	RK 26	Kampung Baru	25,16	11,88	Kumuh Ringan	33		25,16	Kumuh Ringan	25
		Sumber Mulia		13,28						
5	RK 27	Guntung Besar	2,29	1,06	Kumuh Ringan	21	2,29	0,00	Tidak Kumuh	12
		Telaga		1,23						
6	RK 28	Panggung	32,84	2,48	Kumuh Ringan	22	32,84	0,00	Tidak Kumuh	12
		Ambungan		6,80						
		Pabahanan		13,79						
		Pemuda		9,77						
7	RK 29	Panggung Baru	22,05	14,45	Kumuh Ringan	30	0,00	22,05	Kumuh Ringan	28
		Panjaratan		7,60						
8	RK 30	Sungai Riam	13,05	13,05	Kumuh Ringan	19	0,00	13,05	Kumuh Ringan	19
<b>TOTAL</b>			<b>211,93</b>	<b>211,93</b>			<b>53,55</b>	<b>158,38</b>		
<b>Persentase pengurangan kumuh</b>							<b>25%</b>			

Grafik 3.5.21

## Pengurangan Luasan Kumuh 2018-2023



Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di Indonesia. Telaah tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berapa langkah diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh yang ada di perkotaan yaitu Kota pelaihari, meskipun Kota Pelaihari yang merupakan Ibu



Kota Kabupaten Tanah Laut adalah dalam kategori kota kecil namun masih terdapat titik-titik kawasan kumuh. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
  - Pembangunan jalan lingkungan
  - Penanganan Persampahan
- 1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pada Bidang Perumahan dan Permukiman kegiatan BSPS yang dilaksanakan, yaitu:

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Adapun sumber pendanaan dalam kegiatan BSPS ini terbagi menjadi 2 (dua) sumber, yaitu :

a. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bantuan ini bersumber dari dana APBN RI oleh Kementerian Keuangan RI, yang dikelola oleh Kementerian PUPR RI, yang selanjutnya dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut

Bantuan ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan BSPS ini sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa/Kelurahan mengusulkan nama-nama Calon Penerima Bantuan.
2. Nama-nama Calon Penerima Bantuan diverifikasi dengan data base yang berpacu pada data TNP2K.



3. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial yang mempunyai Kegiatan yang sama.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melakukan tinjauan lapangan kondisi sebenarnya rumah Calon Penerima Bantuan.
5. Nama-nama Calon Penerima Bantuan yang sudah diverifikasi dan tinjauan lapangan dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan kemudian diusulkan ke TAPD Kabupaten Tanah Laut (untuk alokasi DAK dan APBD Kabupaten).
6. Sosialisasi dengan Penerima Bantuan perihal alur proses pelaksanaan kegiatan.

Pada Tahun 2023 intervensi yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh melalui BPS ini yang bersumber APBD Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebagai berikut :

Lokasi	Luas			Lingkup Administratif			Jumlah (unit)
	Luas Kumuh Kawasan	Luas Kumuh Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh RT	RT	Desa/ Lurah	Kecamatan	
		1			2		
RK23	9,71	9,71	1,12	RT 19	Pelaihari	Pelaihari	1
			4,66	RT 22			
			3,93	RT 23			
RK24	90,34	45,95	5,52	RT 04	Sarang Halang	Pelaihari	
			22,01	RT 05			
			9,12	RT 07			
			9,3	RT 14			
		4,8	4,8	RT 24	Angsau	Pelaihari	1
		25,33	6,25	RT 08A	Karang Taruna	Pelaihari	
			7,7	RT 08B			
			11,38	RT 10			
		14,26	3,92	RT 01	Atu-Atu	Pelaihari	
			2,9	RT 02			
7,44	RT 08						
RK25	16,49	16,49	10	RT 02	Bumi Jaya	Pelaihari	
			6,49	RT 04			





Lokasi	Luas			Lingkup Administratif			Jumlah (unit)
	Luas Kumuh Kawasan	Luas Kumuh Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh RT	RT	Desa/ Lurah	Kecamatan	
		3			4		
1	2	3	4	7	8	9	10
RK26	25,16	11,88	6,7	RT 01	Kampung Baru	Pelaihari	1
			5,18	RT 04			
		13,28	4,38	RT 07	Sumber Mulia	Pelaihari	
			4,42	RT 09			
			4,48	RT 12			
RK27	2,29	1,06	1,06	RT 04	Guntung Besar	Pelaihari	
		1,23	1,23	RT 09	Telaga	Pelaihari	
RK28	32,84	2,48	2,48	RT 02	Panggung	Pelaihari	
		6,8	2,34	RT 03	Ambungan	Pelaihari	
			4,46	RT 04			
		13,79	2,57	RT 03	Pabahanan	Pelaihari	1
			11,22	RT 09			
		9,77	5,68	RT 08	Pemuda	Pelaihari	
4,09	RT 09						
RK29	22,05	14,45	5,65	RT 04	Panggung Baru	Pelaihari	
			8,8	RT 05			
		7,6	1,21	RT 04	Panjaratan	Pelaihari	
			0,7	RT 05			
			0,63	RT 06			
			1,1	RT 07			
			1,78	RT 08			
			2,18	RT 09			
RK30	13,94	13,94	6,27	RT 02	Sungai Riam	Pelaihari	
			3,43	RT 03			
			4,24	RT 04			



Gambar Sebelum direhab



Gambar Setelah direhab

## 2) Pembangunan Jalan Lingkungan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan ini merupakan jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. Kegiatan ini berupa pengaspalan / paving block jalan lingkungan perumahan dan jalan lingkungan permukiman. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Program/Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dan developer perumahan mengajukan proposal permohonan pengaspalan atau perkerasan jalan lingkungan perumahan atau



- permukiman, dimana untuk developer perumahan harus menyerahkan sertifikat untuk fasum dan fasos perumahan tersebut.
- Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan survey lapangan perihal usulan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti Dinas PUPRP.
  - Setelah dilakukan survey dan koordinasi, kemudian dapat ditentukan apakah usulan tersebut memang tupoksi kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, apabila telah sesuai maka dapat dilakukan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
  - Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada.
  - Perencanaan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

Peningkatan/pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula peningkatan/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasaran sarana utilitas umum pada beberapa lokasi yang termasuk pada lokasi kawasan kumuh perkotaan sebagai bentuk intervensi terhadap pengurangan dan penanganan terhadap kawasan kumuh perkotaan, yaitu :

Lokasi	Luas			Lingkup Administratif			Pekerjaan
	Luas Kumuh Kawasan	Luas Kumuh Desa/	Luas Kumuh RT	RT	Desa/	Kecamatan	
		Kelurahan			Lurah		
1	2	3	4	7	8	9	10
RK23	9,71	9,71	1,12	RT 19	Pelaihari	Pelaihari	
			4,66	RT 22			



Lokasi	Luas			Lingkup Administratif			Pekerjaan
	Luas Kumuh Kawasan	Luas Kumuh Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh RT	RT	Desa/ Lurah	Kecamatan	
		1			2		
			3,93	RT 23			
RK24	90,34	45,95	5,52	RT 04	Sarang Halang	Pelaihari	
			22,01	RT 05			
			9,12	RT 07			
			9,3	RT 14			
		4,8	4,8	RT 24	Angsau	Pelaihari	
		25,33	6,25	RT 08A	Karang Taruna	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Teluk Baru RT,8b dan RT.9a(sari Masam) Kelurahan Karang Taruna
			7,7	RT 08B			
			11,38	RT 10			
		14,26	3,92	RT 01	Atu-Atu	Pelaihari	
			2,9	RT 02			
			7,44	RT 08			
		RK25	16,49	16,49	10	RT 02	Bumi Jaya
6,49	RT 04						
RK26	25,16	11,88	6,7	RT 01	Kampung Baru	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kampung Baru RT.01, RT.04, RT.05, RT.06
			5,18	RT 04			
		13,28	4,38	RT 07	Sumber Mulia	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 001 Sampai RT. 006, RT. 007 & 009 Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari
			4,42	RT 09			
			4,48	RT 12			
RK27	2,29	1,06	1,06	RT 04	Guntung Besar	Pelaihari	
		1,23	1,23	RT 09	Telaga	Pelaihari	



Lokasi	Luas			Lingkup Administratif			Pekerjaan
	Luas Kumuh Kawasan	Luas Kumuh Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh RT	RT	Desa/ Lurah	Kecamatan	
		1			2		
RK28	32,84	2,48	2,48	RT 02	Panggung	Pelaihari	
		6,8	2,34	RT 03	Ambungan	Pelaihari	
			4,46	RT 04			
		13,79	2,57	RT 03	Pabahanan	Pelaihari	
			11,22	RT 09			
		9,77	5,68	RT 08	Pemuda	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pemuda RT 04, 08, 09 Kec. Pelaihari
4,09	RT 09						
RK29	22,05	14,45	5,65	RT 04	Panggung Baru	Pelaihari	
			8,8	RT 05			
		7,6	1,21	RT 04	Panjaratan	Pelaihari	
			0,7	RT 05			
			0,63	RT 06			
			1,1	RT 07			
			1,78	RT 08			
			2,18	RT 09			
RK30	13,94	13,94	6,27	RT 02	Sungai Riam	Pelaihari	
			3,43	RT 03			
			4,24	RT 04			

Dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, perlu adanya suatu penanganan yang segera sebelum kerusakan meluas / meningkat. Hal ini dapat dilakukan bila koordinasi antara semua pihak yang terkait



dengan masalah pemeliharaan rutin (operasional pemeliharaan) prasarana sarana utilitas umum berjalan secara baik dan lancar. Perlu diperhatikan bahwa dalam mengelola suatu prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, program yang telah direncanakan umumnya adalah program pembangunan dan program pemeliharaan. Program pemeliharaan justru merupakan keharusan pada setiap prasarana sarana utilitas umum, setiap prasarana sarana utilitas umum harus dilakukan pemeliharaan rutin dalam setiap periode/waktu dalam setahun, sesuai dengan tujuan pemeliharaan yang telah ditetapkan, yaitu mempertahankan prasarana sarana utilitas umum yang terjaga dan tercapai umur rencana serta tingkat pelayanan.

### 3) Penanganan Persampahan

Penanganan persampahan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh dilakukan beberapa upaya di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis daerah Kebersihan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
2. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam Kota Pelaihari
3. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Sewa Tanah Untuk Kontainer Sampah
4. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
5. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA



- Kabupaten/Kota yaitu Pemeliharaan Bangunan dan Halaman TPA Bakunci
6. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Pemeliharaan TPS (20 TPS)
  7. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Kendaraan Roda 3
  8. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Kontainer Penampung Sampah
  9. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Pembuatan Halte Sampah
  10. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Gedung Komposting TPS3R Angsau dan Komposting TPA Bakunci
  11. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
  12. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Pemeliharaan Kontener Sampah
  13. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yaitu Belanja Pemeliharaan Berat Kendaraan Roda 6
  14. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan, melalui kegiatan:
    - Belanja Makan dan Minum Rapat
    - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan



- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Belanja Sepatu Lapangan

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri 55 ASN pada DPRKPLH dan di dukung oleh 9 Program dengan Pagu Rp. 142,796,495,969.00 dan terealisasi Rp. 136,007,651,938.00 atau sebesar 95,25%.

Tabel 3.5.60  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,309,587,356.00	<b>46,886,243,568.00</b>
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,637,200,000.00	<b>4,623,000,000.00</b>
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,661,738,637.00	<b>3,987,339,652.00</b>
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	68,551,856,963.00	<b>65,470,434,497.00</b>
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00	<b>1,957,188,011.00</b>
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,803,374,002.00	<b>6,469,223,240.00</b>
7	Program Pengembangan Perumahan	118,640,000.00	<b>49,222,970.00</b>
8	Program Kawasan Permukiman	6,565,000,000.00	<b>6,565,000,000.00</b>
		<b>142,796,495,969.00</b>	<b>136,007,651,938.00</b>

Tabel 3.5.61  
Efisiensi Sasaran Strategis 21

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
239,58 %	95,25 %	144,33 %





## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.739.292.358.915,00 dan anggaran belanja sebesar Rp. 2.502.266.740.528,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar minus Rp. 762.974.381.613,00.

Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 906.703.550.940,00. Penerimaan pembiayaan juga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 58.318.896.928,00.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.255.874.454.363,81 dan belanja sebesar Rp. 1.996.213.317.281,00 serta belanja transfer sebesar Rp. 244.652.753.666,00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 15.008.383.416,81.

Realisasi Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 907.489.428.940,00 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 58.318.896.928,00 maka sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp. 849.170.532.012,00.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp. 864.178.915.428,81 ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp. 849.170.532.012,00, maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2023 posisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.713.349.447.440,81.



**MISI I**

Tabel 3,8  
Berkarya meningkatkan kualitas SDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07	7.92	1	Program Pengelolaan Pendidikan	158,851,401,107,00	97,698,843,833,00	61,50
						2	Program Pembinaan Perpustakaan	772,754,784,00	690,341,923,00	89,33
						3	Program Pengembangan Kurikulum	374,930,356,00	214,355,500,00	57,17
								159,999,086,247,00	98,603,541,256,00	61,62
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,8	70.11	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	25,494,424,413.00	18,039,245,360.00	70,75
						2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134,898,085,829.00	107,812,334,361.00	79,92
						3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	361,893,945.00	108,073,750.00	29,86
						4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	744,111,805.00	212,438,200.00	28,54
								161,498,515,992.00	126,172,091,671.00	78,12
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87.33	1	Program Pendaftaran Penduduk	250,606,034.00	247,339,017.00	98.70
						2	Program Pencatatan Sipil	81,266,150.00	70,248,000.00	86.44



						3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	388,191,959.00	375,073,584.00	96.62
						4	Program Pengendalian Penduduk	327,140,605.00	293,450,627.00	89.70
						5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,043,244,219.00	5,558,579,861.00	91.98
						6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,380,739,367.00	2,164,726,428.00	90.93
								9,471,188,334.00	8,709,417,517.00	91.95
<b>4</b>	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	100	100	1	Program Pengembangan Kebudayaan	936,335,708.00	905,192,610.00	87.49
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	89	200	2	Program Pembinaan Sejarah	345,119,464.00	333,580,860.00	96.67
						3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	349,961,862.00	341,282,500.00	96.66
						4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,970,750,538.00	1,845,219,884.00	97.52
						5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27,858,501,852.00	22,912,135,500.00	93.63
						6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	600,000,000.00	600,000,000.00	82.24
						7	Program Pengembangan Kebudayaan	936,335,708.00	905,192,610.00	100.00
								32,060,669,424.00	26,937,411,354.00	84.02
<b>5</b>	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Presentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3,525,009,634.00	3,158,421,719.00	89.60

					2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	17,685,000.00	16,185,000.00	91.52
					3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32,276,510.00	30,020,000.00	93.01
					4	Program Aplikasi Informatika	6,510,058,342.00	6,120,343,560.00	94.01
							10,085,029,486.00	9,324,970,279.00	92.46

## MISI II

Tabel 3,9

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

No,	Sasaran Strategis	Indktor Kinerja		Target	Realisasi	Program Prioritas				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase	
							Rp	Rp	%	
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	8	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1,012,604,982,458.00	856,867,060,910.00	84.62
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang (untill)	25	188	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	858,871,944.00	814,937,943.00	94.88
						2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80,016,376.00	46,607,440.00	58.25
						3	Program Hubungan Industrial	898,842,600.00	887,307,600.00	98.72



							1,837,730,920.00	1,748,852,983.00	95.16
--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------

### MISI III

Tabel 3,10  
Membangun tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (70,01)	B(67,52)	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38,537,563,532.00	36,309,916,522.00	94.22
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	270,000,377,529.00	133,516,612,671.00	49.45
						3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	18,600,703,525.00	17,360,281,323.00	93.33
						4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,192,787,996.00	1,706,734,025.00	77.83
						5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,142,147,592.00	1,012,165,500.00	88.62
						6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	738,098,908.00	630,863,710.00	85.47
						7	Program Kepegawaian Daerah	2,187,269,980.00	1,941,219,687.00	88.75
						8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,521,627,701.00	2,314,007,311.00	91.77
							335,920,576,763.00	194,791,800,749.00	57.98	



9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	75	73,70	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38,537,563,532.00	36,309,916,522.00	94.22
						2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,116,482,018.00	1,669,502,684.00	78.88
						3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26,837,458,043.00	22,808,875,098.00	84.99
						4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1,170,848,401.00	996,495,427.00	85.11
						5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	270,601,215.00	250,488,100.00	92.57
						6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,340,718,103.00	866,993,957.00	64.67
						7	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	325,668,521.00	297,560,000.00	91.37
						8	Program Penatagunaan Tanah	1,907,756,359.00	1,884,606,200.00	98.79
						9	Program Pengelolaan Arsip	99,895,200.00	89,014,971.00	89.11
						10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64,729,444.00	53,069,020.00	81.99
						72,671,720,836.00	65,226,521,979.00	89.76		



**MISI IV**

Tabel 3,11

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

No,	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Program Prioritas					
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase		
							Rp	Rp	%		
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	45,235,758,769.00	45,224,560,350.00	99.98	
							2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	290,120,000.00	288,485,000.00	99.44
							3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	304,777,594.00	275,946,440.00	90.54
									45,830,656,363.00	45,788,991,790.00	99.91
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,313,822,756.00	1,177,829,234.00	89.65	
							2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4,265,910,445.00	4,174,778,959.00	97.86



						3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15,134,193,398.00	13,229,766,632.00	87.42
								20,713,926,599.00	18,582,374,825.00	89.71

### MISI V

Tabel 3,12

Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No,	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Program Prioritas				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	5,05	4,78	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,152,024,928.00	1,027,307,960.00	89.17
		2	IndekGini (skor)	0,225	0,259	2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526,018,244.00	428,941,060.00	81.54
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	39,02	32,10	3	Program Penyuluhan Pertanian	486,414,193.00	435,211,785.00	89.47
						4	Program Perizinan Usaha Pertanian	372,036,290.00	278,751,000.00	74.93
						5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	995,244,459.00	930,952,114.00	93.54
						6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00	13,071,611,279.00	93.55
						7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	2,998,281,286.00	2,488,770,109.00	83.01





						8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00	1,957,188,011.00	91.07
						9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	414,955,440.00	375,461,500.00	90.48
						10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	82,080,387.00	71,168,896.00	86.71
						11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31,294,323.00	18,844,450.00	60.22
						12	Program Pelayanan Penanaman Modal	137,184,647.00	99,220,480.00	72.33
						13	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427,799,348.00	367,612,060.00	85.93
						14	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159,232,261.00	147,036,160.00	92.34
						15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211,226,039.00	179,322,160.00	84.90
						16	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	115,196,383.00	82,476,000.00	71.60
						17	Program Promosi Penanaman Modal	434,828,300.00	426,969,868.00	98.19
								24,665,528,040.00	22,386,844,892.00	90.76
<b>13</b>	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,50	87,53	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	517,238,050.00	422,228,211.00	81.63
						2	Program Perlindungan Perempuan	66,771,180.00	43,322,569.00	64.88



						3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	91,398,340.00	76,357,528.00	83.54
						4	Program Perlindungan Khusus Anak	82,732,958.00	58,026,717.00	70.14
								758,140,528.00	599,935,025.00	79.13
<b>14</b>	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	3,58	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	147,119,845.00	133,666,460.00	90.86
						2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,026,657,988.00	1,813,816,012.00	89.50
						3	Program Rehabilitasi Sosial	4,602,406,293.00	3,515,872,000.00	76.39
						4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	775,126,942.00	716,309,870.00	92.41
						5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	14,933,460.00	14,405,300.00	96.46
								7,566,244,528.00	6,194,069,642.00	81.86
<b>15</b>	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)	169,22 (Tinggi)	1	Program Penanggulangan Bencana	630,685,413.00	500,388,000.00	79.34
		2	Presentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30,00	29,37	2	Program Penanganan Bencana	1,862,407,515.00	621,673,100.00	33.38
						3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6,803,374,002.00	6,469,223,240.00	95.09
						4	Program Rehabilitasi Sosial	4,602,406,293.00	3,515,872,000.00	76.39
						5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	775,126,942.00	716,309,870.00	92.41
						6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	532,011,202.00	480,116,600.00	90.25



						7	Program Pemberdayaan Sosial	215,512,058.00	210,854,300.00	97.84
						8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	47,349,426.00	45,467,000.00	96.02
								15,468,872,851.00	12,559,904,110.00	81.19
<b>16</b>	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks pembangunan infrastruktur	73,00	60,24	1	Program Penyelenggaraan Jalan	216,167,830,106.00	187,368,852,260.00	86.68
						2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,309,587,356.00	46,886,243,568.00	93.20
						3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,637,200,000.00	4,623,000,000.00	99.69
						4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	25,752,469,834.00	24,298,577,600.00	94.35
						5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	88,539,525,506.00	83,200,369,715.00	93.97
						6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00	13,071,611,279.00	93.55
						7	Program Penataan Bangunan Gedung	126,142,920,841.00	121,174,809,432.00	96.06
						8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	415,000,000.00	361,505,685.00	87.11
						9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,325,961,138.00	5,568,845,040.00	88.03
						10	Program Pengelolaan Pelayaran	27,368,000.00	27,230,500.00	99.50
								532,290,475,282.00	486,581,045,079.00	91.41
<b>17</b>	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,57	2,06	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00	1,957,188,011.00	91.07
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,60	5,33	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	162,468,705.00	155,419,080.00	95.66



		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembngkan pemerintah (orang )	350,000	608,624	3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,500,379,207.00	1,376,466,894.00	91.74
						4	Program Pemasaran Pariwisata	6,226,423,184.00	5,167,432,892.00	82.99
						5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	115,414,805.00	98,221,900.00	85.10
						6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,116,482,018.00	1,669,502,684.00	78.88
						7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	112,995,000.00	101,183,750.00	89.55
						8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	16,320,000.00	15,185,000.00	93.05
						9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	2,998,281,286.00	2,488,770,109.00	83.01
								15,397,863,216.00	13,029,370,320.00	84.61
<b>18</b>	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	89,7	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	218,563,570.00	212,572,120.00	97.26
						2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	650,015,007.00	552,064,815.00	84.93
						3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	68,920,000.00	33,685,000.00	48.88
						4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	125,844,535.00	106,654,429.00	84.75
						5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	910,991,611.00	844,328,749.00	92.68



						6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134,898,085,829.00	107,812,334,361.00	79.92
						7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	995,244,459.00	930,952,114.00	93.54
						8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,972,612,501.00	13,071,611,279.00	93.55
						9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,152,024,928.00	1,027,307,960.00	89.17
						10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	526,018,244.00	428,941,060.00	81.54
						11	Program Perizinan Usaha Pertanian	372,036,290.00	278,751,000.00	74.93
						12	Program Penyuluhan Pertanian	486,414,193.00	435,211,785.00	89.47
						13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	544,625,562.00	451,836,506.00	82.96
						14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	289,185,817.00	270,178,574.00	93.43
						15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	64,909,388.00	51,945,000.00	80.03
						16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	115,414,805.00	98,221,900.00	85.10
								155,390,906,739.00	126,606,596,652.00	81.48
<b>19</b>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68,47	68,65	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	393,534,113.00	365,311,854.00	92.83
		2	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98,00	94,79	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,062,336,513.00	1,076,229,606.00	101.31
						3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,322,000,300.00	3,022,848,363.00	90.99
						4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	245,666,918.00	238,998,282.00	97.29



							Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)			
						5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	59,464,163.00	57,037,176.00	95.92
						6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74,356,810.00	71,869,476.00	96.65
						7	Program Pengelolaan Persampahan	6,376,128,764.00	7,168,150,840.00	112.42
						8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,661,738,637.00	3,987,339,652.00	108.89
								15,195,226,218.00	15,987,785,249.00	105.22
<b>20</b>	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Presentase Desa Kategori Maju	28	70,76	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5,211,588,138.00	4,565,498,668.00	87.60
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	7	2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	48,892,532.00	45,496,050.00	93.05
						3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9,037,879,093.00	8,235,194,311.00	91.12
						4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	910,991,611.00	844,328,749.00	92.68
						5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	723,433,798.00	612,896,400.00	84.72
						6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	251,532,012.00	197,687,453.00	78.59
								16,184,317,184.00	14,501,101,631.00	89.60
<b>21</b>	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Presentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00	0,42	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,309,587,356.00	46,886,243,568.00	93.20



					2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,637,200,000.00	4,623,000,000.00	99.69
					3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,661,738,637.00	3,987,339,652.00	108.89
					4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	68,551,856,963.00	65,470,434,497.00	95.50
					5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,149,099,011.00	1,957,188,011.00	91.07
					6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,803,374,002.00	6,469,223,240.00	95.09
					7	Program Pengembangan Perumahan	118,640,000.00	49,222,970.00	41.49
					8	Program Kawasan Permukiman	6,565,000,000.00	6,565,000,000.00	100.00
							142,796,495,969.00	136,007,651,938.00	95.25



Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 143,75% dengan realisasi keuangan sebesar 85,99% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

### MISI I

Tabel 3,13  
Berkarya meningkatkan kualitas SDM

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	61,62%	96,005%	34,38%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	78,12%	100,44%	22,32%
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	91,96%	109,16%	17,21%
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	84,02%	162,35%	78,33%
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	92,46%	100%	7,54%

### MISI II

Tabel 3,14  
Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	84,62%	400%	315,38%
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	95,16%	752%	656,84%





### MISI III

Tabel 3,15  
Membangun tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	57.98%	98,22%	<b>40,24%</b>
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	89.76%	98,26%	<b>8,5%</b>

### MISI IV

Tabel 3,16  
Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	99.91%	100%	0,09%
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	89.71%	100%	10,29%

### MISI V

Tabel 3,17  
Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	90,76 %	87,92%	-
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	79,13 %	<b>97,79%</b>	18,66%

14	Menurunnya tingkat pengangguran	81,86 %	69,83%	-
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	81,19 %	84,40%	3,21%
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	91,41 %	82,52%	-
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	84,61 %	110,24%	25,63%
18	Meningkatnya ketahanan pangan	81,48 %	94,42%	13,46%
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	105,22 %	104,09%	-
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	89,6 %	196,35%	106,75%
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	95,25 %	239,58%	144,33%

Tabel 3,18

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,739,292,358,915</b>	<b>2,205,492,399,173.45</b>	<b>126.8</b>	<b>2,159,239,661,100.08</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>215,796,462,766</b>	<b>201,344,112,158.18</b>	<b>93.3</b>	<b>193,890,015,754.08</b>
4.1.01	Pajak Daerah	49,300,000,000	52,648,545,663.68	106.79	45,363,440,225.80
4.1.02	Retribusi Daerah	8,506,734,000	7,675,205,350.00	90.23	6,971,598,007.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,005,308,674	12,005,672,488.00	100	11,010,810,384.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	145,984,420,092	129,014,688,656.50	88.38	130,544,167,137.28
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>215,796,462,766</b>	<b>201,344,112,158.18</b>	<b>93.3</b>	<b>193,890,015,754.08</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,522,295,931,980</b>	<b>2,003,859,813,167.27</b>	<b>131.63</b>	<b>1,963,205,983,275.00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,400,436,231,980	1,803,144,970,475.00	128.76	1,781,587,762,522.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121,859,700,000	200,714,842,692.27	164.71	181,618,220,753.00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1,199,964,169</b>	<b>288,473,848.00</b>	<b>24.04</b>	<b>2,143,662,071.00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,199,964,169	225,955,623.00	18.83	2,143,662,071.00



4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	62,518,225.00	0	0
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1,199,964,169</b>	<b>288,473,848.00</b>	<b>24.04</b>	<b>2,143,662,071.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,739,292,358,915</b>	<b>2,205,492,399,173.45</b>	<b>126.8</b>	<b>2,159,239,661,100.08</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,502,266,740,528</b>	<b>2,193,923,015,145.00</b>	<b>87.68</b>	<b>1,863,861,922,192.18</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,574,603,639,931</b>	<b>1,359,452,420,784.00</b>	<b>86.34</b>	<b>1,241,627,856,198.18</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	775,304,987,027	680,411,633,066.00	87.76	653,956,945,688.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682,220,290,124	577,978,609,184.00	84.72	520,933,208,907.18
5.1.05	Belanja Hibah	106,017,572,780	91,030,358,534.00	85.86	44,321,201,603.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11,060,790,000	10,031,820,000.00	90.7	22,416,500,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1,574,603,639,931</b>	<b>1,359,452,420,784.00</b>	<b>86.34</b>	<b>1,241,627,856,198.18</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>659,146,721,106</b>	<b>589,276,940,696.00</b>	<b>89.4</b>	<b>397,257,596,454.00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26,312,057,067	1,792,454,291.00	6.81	240,492,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130,751,870,998	111,428,842,883.00	85.22	91,151,091,039.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193,456,505,513	182,439,638,124.00	94.31	104,788,622,560.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	301,479,559,023	287,413,716,711.00	95.33	200,681,712,555.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	839,257,500	732,986,495.00	87.34	16,548,300.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6,307,471,005	5,469,302,192.00	86.71	379,130,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>659,146,721,106</b>	<b>589,276,940,696.00</b>	<b>89.4</b>	<b>397,257,596,454.00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22,172,915,145</b>	<b>540,899,999.00</b>	<b>2.44</b>	<b>746,426,000.00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22,172,915,145	540,899,999.00	2.44	746,426,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>22,172,915,145</b>	<b>540,899,999.00</b>	<b>2.44</b>	<b>746,426,000.00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>246,343,464,346</b>	<b>244,652,753,666.00</b>	<b>99.31</b>	<b>224,230,043,540.00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,124,680,450	6,111,780,450.00	99.79	4,895,286,950.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	240,218,783,896	238,540,973,216.00	99.3	219,334,756,590.00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>246,343,464,346</b>	<b>244,652,753,666.00</b>	<b>99.31</b>	<b>224,230,043,540.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,502,266,740,528</b>	<b>2,193,923,015,145.00</b>	<b>87.68</b>	<b>1,863,861,922,192.18</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-762,974,381,613</b>	<b>11,569,384,028.45</b>	<b>-1.52</b>	<b>295,377,738,907.90</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>848,384,654,012</b>	<b>849,169,732,012.00</b>	<b>100.09</b>	<b>536,325,812,032.83</b>
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	906,703,550,940	907,488,628,940.00	100.09	611,325,812,032.83



6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	831,703,550,940	831,703,550,940.00	100	604,990,188,933.83
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	75,000,000,000	75,000,000,000.00	100	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	785,078,000.00	0	6,335,623,099.00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>906,703,550,940</b>	<b>907,488,628,940.00</b>	<b>100.09</b>	<b>611,325,812,032.83</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58,318,896,928</b>	<b>58,318,896,928.00</b>	<b>100</b>	<b>75,000,000,000.00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20,000,000,000	20,000,000,000.00	100	40,000,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28,318,896,928	28,318,896,928.00	100	25,000,000,000.00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000	10,000,000,000.00	100	10,000,000,000.00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58,318,896,928</b>	<b>58,318,896,928.00</b>	<b>100</b>	<b>75,000,000,000.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>848,384,654,012</b>	<b>849,169,732,012.00</b>	<b>100.09</b>	<b>536,325,812,032.83</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>85,410,272,399</b>	<b>860,739,116,040.45</b>	<b>1,007.77</b>	<b>831,703,550,940.73</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3,19

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,205,492,399,173.45</b>	<b>2,159,239,661,100.08</b>	2.14
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>201,344,112,158.18</b>	<b>193,890,015,754.08</b>	3.84
4.1.01	Pajak Daerah	52,648,545,663.68	45,363,440,225.80	16.06
4.1.02	Retribusi Daerah	7,675,205,350.00	6,971,598,007.00	10.09
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,005,672,488.00	11,010,810,384.00	9.04
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	129,014,688,656.50	130,544,167,137.28	(1.17)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>201,344,112,158.18</b>	<b>193,890,015,754.08</b>	3.84
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,003,859,813,167.27</b>	<b>1,963,205,983,275.00</b>	2.07
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,803,144,970,475.00	1,781,587,762,522.00	1.21



4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200,714,842,692.27	181,618,220,753.00	10.51
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>288,473,848.00</b>	<b>2,143,662,071.00</b>	(86.54)
4.3.01	Pendapatan Hibah	225,955,623.00	2,143,662,071.00	(89.46)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62,518,225.00	0	100.00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>288,473,848.00</b>	<b>2,143,662,071.00</b>	(86.54)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,205,492,399,173.45</b>	<b>2,159,239,661,100.08</b>	2.14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,193,923,015,145.00</b>	<b>1,863,861,922,192.18</b>	17.71
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,359,452,420,784.00</b>	<b>1,241,627,856,198.18</b>	9.49
5.1.01	Belanja Pegawai	680,411,633,066.00	653,956,945,688.00	4.05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577,978,609,184.00	520,933,208,907.18	10.95
5.1.05	Belanja Hibah	91,030,358,534.00	44,321,201,603.00	105.39
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10,031,820,000.00	22,416,500,000.00	(55.25)
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1,359,452,420,784.00</b>	<b>1,241,627,856,198.18</b>	9.49
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>589,276,940,696.00</b>	<b>397,257,596,454.00</b>	48.34
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,792,454,291.00	240,492,000.00	645.33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111,428,842,883.00	91,151,091,039.00	22.25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182,439,638,124.00	104,788,622,560.00	74.10
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287,413,716,711.00	200,681,712,555.00	43.22
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	732,986,495.00	16,548,300.00	4,329.38
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5,469,302,192.00	379,130,000.00	1,342.59
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>589,276,940,696.00</b>	<b>397,257,596,454.00</b>	48.34
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>540,899,999.00</b>	<b>746,426,000.00</b>	(27.53)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	540,899,999.00	746,426,000.00	(27.53)
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>540,899,999.00</b>	<b>746,426,000.00</b>	(27.53)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>244,652,753,666.00</b>	<b>224,230,043,540.00</b>	9.11
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,111,780,450.00	4,895,286,950.00	24.85



5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238,540,973,216.00	219,334,756,590.00	8.76
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>244,652,753,666.00</b>	<b>224,230,043,540.00</b>	9.11
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,193,923,015,145.00</b>	<b>1,863,861,922,192.18</b>	17.71
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>11,569,384,028.45</b>	<b>295,377,738,907.90</b>	(96.08)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>849,169,732,012.00</b>	<b>536,325,812,032.83</b>	58.33
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>907,488,628,940.00</b>	<b>611,325,812,032.83</b>	48.45
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	831,703,550,940.00	604,990,188,933.83	37.47
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	75,000,000,000.00	0	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	785,078,000.00	6,335,623,099.00	(87.61)
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>907,488,628,940.00</b>	<b>611,325,812,032.83</b>	48.45
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58,318,896,928.00</b>	<b>75,000,000,000.00</b>	(22.24)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20,000,000,000.00	40,000,000,000.00	(50.00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28,318,896,928.00	25,000,000,000.00	13.28
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58,318,896,928.00</b>	<b>75,000,000,000.00</b>	(22.24)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>849,169,732,012.00</b>	<b>536,325,812,032.83</b>	58.33
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>860,739,116,040.45</b>	<b>831,703,550,940.73</b>	3.49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun kelima terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **21 Sasaran 31 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 142,27% dengan rincian **24 (dua puluh empat)** indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%, **3 (tiga)** indikator dengan tingkat capaian **Memuaskan** dengan rentang capaian di atas 80% s.d 90%, **2 (dua)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik** dengan rentang capaian di atas 70% s.d 80%, **1 (satu)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Baik** dengan rentang capaian di atas 60% s.d 70%, dan **1 (satu)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup** dengan rentang capaian di atas 50% s.d 60%.

#### **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh kepala SKPD dalam meningkatkan penerapan SAKIP di masing-masing SKPD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengintegrasikan system berbasis elektronik tentang Perjanjian Kinerja kedalam aplikasi penilaian kinerja seluruh PNS sehingga lebih memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan kinerja yang telah diperjanjikan.
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.



4. Melakukan perencanaan kinerja tahunan SKPD yang selaras dengan RPJMD.
5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level Eselon III, Eselon IV dan individu pegawai.
6. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
7. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
8. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan.
9. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *outcome* dan *output* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
10. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegritasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
12. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
13. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;





14. memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan kinerja organisasi.

Pelaihari, Maret 2024

Pj. Bupati Tanah Laut,

**H. SYAMSIR RAHMAN**



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 126 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
7. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

#### **Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL SH, MH**  
**NIP.19750203 199903 2 008**

Di tetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 23 September 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 23 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1 Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Minimum 0 tahun, maksimal 15 tahun (sesuai standar global)  $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun telah bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun yang mendapatkan ijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	2 Harapan lama sekolah (tahun)	$HSL_t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :  <math>HSL_t</math> = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t  <math>E_i^t</math> = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p>	1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah IKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	1. Bagian Organisasi 2. Seluruh SKPD



	masyarakat lainnya				
4	Meningkatnya pelestarian/pekerjaan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah budaya daerah yang dikembangkan dan dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya daerah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah Atlet yang berprestasi dalam kompetisi minimal kompetisi tingkat provinsi	Dinas Keperumudaan dan Olah Raga
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang diindaklanjuti oleh SKPPD (%)	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang diindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang masuk}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	Inovasi Pelayanan Publik yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan publik minimal tingkat provinsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (untill)	Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun n	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat 3. Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektorat
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik antar umat maupun seagama	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB tahun ke-n-PDRB tahun (n-1)}}{\text{PDRB tahun (n-1)}} \times 100\%$	1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Peternakan



			<p>dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>4. Diskopdag</p>
	2	Indeks Gini (skor)	$G - 1 - \sum_{i=1}^i P_i(Q_i + Q_{i+1})$ <p>Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi = Persentase kumulatif total pendapat atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>G &lt; 0,3 = Ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang</p> <p>G &gt; 0,5 = Ketimpangan tinggi</p> <p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>4. Diskopdag</p>
	3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	<p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan</p> <p style="text-align: center;"><b>PPRR</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Penduduk Pertengahan Tahun</u></b></p>

					Perkebunan 4. Diskopdag
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	$\text{Indeks Pembangunan Gender} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$	1. Sumber data BPS 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	$\text{TPR} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15+) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran</li> <li>- Pengangguran = mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja</li> </ul>	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	Data Indeks Resiko Bencana Kabupaten pada tahun n	Badan Penanggulangan Bencana daerah
		3	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial

16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	<p>((Jumlah panjang jalan nasional + jalan propinsi + jalan lokal primer dalam kondisi baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%)+((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik/jumlah panjang irigasi x 35) + (Jumlah luas areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi x 20) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik/jumlah panjang drainase x15)+(Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30))+((Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah gedung kantor x100%)+(((Jumlah rumah berakses air bersih/Jumlah rumah tangga x100%)+(Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah rumah x 100%))/2)+((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100% )+ (Luas permukiman kumuh yang ditangani/ luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani x 100%))/2)+((Panjang jalan bertrotar di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100% )/2)+(Jumlah jalan berdrainase di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100% )/2)+((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksi sampah x 100%)+( Jumlah taman dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan Taman x 100%))/2)/4)+((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya adax100%)+(Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik/Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada x 100%)/2))/5</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>2. Dinas Perhubungan</li> <li>3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</li> </ol>
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	<p>Growth Pertanian =</p> $\frac{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } n - \text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</li> <li>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</li> <li>4. Dinas Pariwisata</li> <li>5. Dinas Koptag</li> </ol>
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	<p>Pertumbuhan sector industry olahan dalam PDRB Growth Industri Olahan (GIO)</p> $\text{GIO} = \frac{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan</li> </ol>



				3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	Dinas Pariwisata
			Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n	
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) × bobot masing-masing kelompok pangan	
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang Sesuai RTRW}}{\text{Luas Perumahan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	

20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa di bina berciri khas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	$\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, S.H. MH**  
**NIP.19750203 199903 2 008**

**BUPATI TANAH LAUT,**  
**Ttd**

**H. SUKAMTA**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp ( 0512 ) 21384 Pelaihari

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pelaihari, 6 Maret 2024

Inspektur,  
  
Drs. Joko Wuryanto, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650116 199203 1 008





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp ( 0512 ) 21384

Pelaihari, 6 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/36 /LHR-LKjIP/Insp/ 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Kepada Yth.  
Bupati Tanah Laut  
di-  
Pelaihari

## I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memastikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disusun sesuai aturan yang berlaku dan menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas, maka perlu dilakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan prinsip sebagai berikut :

1. Memastikan kesesuaian Visi dan Misi Tujuan dan sasaran dan target antara LKjIP dengan RPJMD;
2. Memastikan sasaran, indikator sasaran dan target dalam LKjIP telah sesuai dokumen IKU;
3. Memastikan sumber data yang sajikan dalam LKjIP telah andal dan sesuai dengan data OPD penanggungjawab;
4. Memastikan PK yang telah dibuat, diformalkan, ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sasaran, indikator dan target sesuai dengan program, kegiatan dan anggaran;
5. Memastikan penyajian pengukuran keberhasilan/ kegagalan di setiap pencapaian target kinerja;
6. Membandingkan antara realisasi target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah/ RPJMD;
7. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

8. Memastikan penyajian analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan dan penjelasan-penjelasan lain yang terkait di setiap pencapaian target kinerja, pendukung target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan serta analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah.

## **II. Simpulan Reviu**

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan, sebagaimana telah kami tuangkan dalam lembar pernyataan telah direviu oleh APIP.

Substansi informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sepenuhnya menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Hal-hal yang bersifat perbaikan dan penyempurnaan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut, kami tuangkan dalam saran.

## **III. Uraian Hasil Reviu.**

### **1. Data Umum**

#### **a. Dasar Pelaksanaan Reviu.**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 4) Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 08 Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Reviu



- 5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024;
- 6) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 000.8.6.3/456/ORG tanggal 22 Februari 2024 tentang Permohonan Reviu LKjIP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- 7) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/96/Insp/2024 tanggal 22 Februari 2024.

**b. Waktu Pelaksanaan Reviu.**

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari s/d 6 Maret 2024 (10 hari).

**c. Tujuan Reviu**

- 1) Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Memberikan keyakinan terbatas dan saran mengenai akurasi, kendalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut yang berkualitas.

**d. Ruang Lingkup Reviu.**

- 1) Pengumpulan data/ informasi yang akan digunakan untuk pengujian terhadap keandalan dan akurasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.
- 2) Penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan;

**IV. Catatan Hasil Reviu.**

Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Memastikan kesesuaian Visi dan Misi Tujuan dan sasaran dan target antara LKjIP dengan RPJMD, sebagai berikut :
  - a. Visi, Misi dan Tujuan pada LKjIP telah sesuai dengan RPJMD;
  - b. Indikator tujuan dan indikator sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan RPJMD;
  - c. Target yang tercantum pada LKjIP sebagian besar telah sesuai dengan RPJMD, tetapi ada yang belum sesuai meskipun telah dilakukan revisi di LKjIP.

2. Memastikan sasaran, indikator sasaran dan target dalam LKjIP sesuai dokumen IKU, sebagai berikut :  
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target dalam LKjIP telah sesuai dokumen IKU;
3. Memastikan PK yang telah dibuat, diformalkan, ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sasaran, indikator dan target sesuai dengan program, dan anggaran :  
PK yang telah dibuat yang memuat Sasaran, indikator dan target telah sesuai dengan program dan anggaran.
4. Memastikan penyajian analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan dan penjelasan lain yang terkait, di setiap pencapaian target kinerja :
  - a. Terdapat beberapa uraian capaian yang belum disertai dengan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, yaitu pada PDRD Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan,
  - b. Tidak ada penjelasan dan alasan yang bersifat teknis pada LKjIP terkait perubahan target pada tahun 2023, sesuai dengan PK Perubahan.
  - c. Pada dokumen LKjIP belum terdapat sub bagian atau poin tersendiri terkait dengan penyebab kegagalan atau keberhasilan capaian target, serta alternatif solusi yang telah dilakukan sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan informatif.
  - d. Belum terdapat predikat/ katagori yang menjelaskan pada setiap capaian indikator sebagaimana pada BAB III Bagian A tentang Akuntabilitas Kinerja, poin 1 : Capaian kinerja Utama belum terdapat informasi terkait dengan Predikat/Katagori Capaian per indikator.
4. Membandingkan antara realisasi target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan target jangka menengah/ RPJMD;  
Terdapat beberapa Indikator yang tidak tercapai dan belum ada data realisasi sehingga tidak dapat membandingkan capaian dengan tahun sebelumnya, yaitu :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.07	7.92	98.14
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13.22	12.41	93.87
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (70,01)	B(67,52)	96.44
4	Indeks keterbukaan informasi publik	75	73.70	98.26
5	Pertumbuhan Ekonomi	5.05	Tidak ada data	Tidak ada data
6	Indeks Gini (skor)	0.225	0.225	sda
7	PDRB per kapita atas dasar	39.02	39.02	sda



	harga konstan (Rp Juta)			
8	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,50	Tidak ada data	sda
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	3,58	sda
10	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)	Tidak ada data	sda
11	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30,00	29,37	sda
12	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,00	60,24	sda
13	Pertumbuhan sektor Petanian	3,57	Tidak ada data	sda
14	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,60	sda	sda
15	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	89,70	sda
16	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98,00	94,79	sda
17	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Tidak ada data	sda
18	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00	Tidak ada data	sda

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Pada beberapa capaian kinerja telah tersaji perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

6. Memastikan penyajian target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dalam laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan perubahan target Sasaran yang ada di RPJMD dan RKPD, hal ini dikarenakan adanya realisasi yang melebihi dari tahun 2022, tetapi masih terdapat data target kinerja/ realisasi yang disajikan di LKjIP belum sesuai yang telah dilakukan revisi, yaitu :

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target/realisasi	Tertulis	Target/realisasi	Tertulis
1	Indikator Angka rata-rata lama sekolah (tahun) (target)	10	8,05	-	-
2	Harapan lama sekolah (tahun) (target)	-	-	13,22	12,18
3	Jumlah Atlet yang berprestasi (realisasi)	534	315	89	85
4	Pertumbuhan Ekonomi	-	-	-	5,05
5	Indeks Pembangunan Gender (skor) (realisasi)	89,0	89,50	-	-
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (target)	2,6	3,4	-	-
7	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%) (realisasi)	13,32	11,99	-	-
8	Jumlah kunjungan				

	wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang) (target)	-	-	350.000	300.000
9	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%) Th 2021 (target)	69,30	7	-	-
	(realisasi) th 2021	69,59	0,33	-	-

**7. Memastikan keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan LKJ terhadap RKPD dan RPJMD.**

a. Belum terdapat penjelasan terkait 2 (dua) arah kebijakan yang telah dirumuskan, sebagai kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi selama 5 tahun pada RPJMD, Tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut, dan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut setiap tahun dituangkan dalam RKPD untuk menyepakati anggaran dalam rangka merealisasikan Program dan Kegiatan, yaitu :

- 1) Pemantapan Kebijakan BERINTERAKSI dalam MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA sebagai Pondasi Pembangunan Periode Berikutnya.
- 2) Pada tahun 2023 ini, fokus kebijakan adalah untuk penyelesaian sisa target kinerja yang pencapaiannya masih belum optimal serta penyiapan pondasi pembangunan periode berikutnya.

Dan ada 2 arah kebijakan yang terdapat di RKPD, yaitu :

- 1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yaitu :
  - a) Indeks Pertumbuhan Ekonomi : 4.0 - 5.05
  - b) Indeks Pembangunan Manusia : 70.4 – 70.72
  - c) Tingkat Pengangguran Terbuka : 3.21 - 2.50
  - d) Tingkat Kemiskinan : 4.35 - 4.30
  - e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 68.47
  - f) Indeks Gini Ratio : 0.225
- 2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah, yaitu :
  - a) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah);
  - b) Arah Kebijakan Belanja Daerah, digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, (Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tidak terduga, Belanja transfer);

- c) Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- b. Belum ada penjelasan dan implementasi terhadap 10 isu strategis tersebut, mengingat tahun 2023 adalah tahun terakhir, yaitu :
  - 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
  - 2) Kawasan Industri Jorong
  - 3) Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
  - 4) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  - 5) Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
  - 6) Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
  - 7) Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
  - 8) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik.
  - 9) Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal.
  - 10) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

8. Memastikan bahwa dalam dokumen LKjIP telah menyajikan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan PK.

Terdapat beberapa dokumen yang dalam penyajian program, kegiatan dan anggaran belum sesuai, yaitu :

- a. Pada dokumen PK, Program pengembangan iklim penanaman modal terdapat pagu anggaran sedangkan pada dokumen LKjIP tidak terdapat anggaran pada program tersebut.
- b. Tidak terdapat program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri pada dokumen PK, namun tersaji pada dokumen LKjIP.
- c. Tidak terdapat program penataan desa pada dokumen PK, namun tersaji pada dokumen LKjIP.
- d. Pada dokumen LKjIP sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya pembinaan desa, penyajian realisasi anggaran melebihi pagu.

#### V. Saran :

Dari beberapa catatan hasil revidi disarankan kepada Tim penyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut untuk segera menindaklanjuti:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data yang belum disajikan sesuai capaian kinerja RPJMD.



- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk data capaian Indeks Pembangunan Gender;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait data capaian Indeks Resiko Bencana Daerah;
  - d. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terkait data capaian Pertumbuhan Sektor Pertanian;
  - e. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut terkait data yang belum rilis untuk dimasukkan ke capaian indikator.
2. Melakukan perbaikan, pemenuhan data, analisa disetiap capaian target dan memberikan penjelasan sebagaimana yang disampaikan pada **Catatan Hasil Reviu.**

#### VI. Status tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya.

Dari beberapa rekomendasi hasil rewiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun sebelumnya, Tim Penyusun laporan telah melakukan tindak lanjut atas hasil rewiu dengan melakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi.

#### VII. Penutup.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, disampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan perbaikan selanjutnya.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga rewiu dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.

  
Inspektur,  
Drs. Joko Wuryanto, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650116 199203 1 006



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2023**



# BUPATI TANAH LAUT

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : H. SUKAMTA**

**Jabatan : Bupati Tanah Laut**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, Januari 2023

**BUPATI TANAH LAUT,**

**H. SUKAMTA**



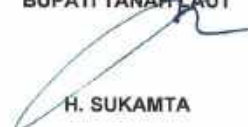
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,22	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,80	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	89	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (70,01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Daerah Inspektorat
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik

12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	5,05	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0,225	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	39,02 (dalam juta)	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,50	Sumber data BPS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30,00	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,00	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,57	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,60	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	350 (dalam ribu)	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategori Maju (%)	28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

**BUPATI TANAH LAUT**



**H. SUKAMTA**



No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	143,553,153,606
2	Program Pengembangan Kurikulum	374,930,356
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	123,795,766,425
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	25,615,278,656
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	53,780,800
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	65,849,240
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	79,642,679,940
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,148,457,820
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,637,200,000
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	13,199,995,820
11	Program Penataan Bangunan Gedung	122,502,457,200
12	Program Penyelenggaraan Jalan	160,893,644,936
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	400,000,000
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,599,994,985
15	Program Pengembangan Perumahan	118,640,000
16	Program Kawasan Permukiman	6,565,000,000
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	57,506,837,649
18	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6,229,925,574
19	Program Penanggulangan Bencana	587,795,915
20	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	282,328,000
21	Program Pemberdayaan Sosial	173,855,906
22	Program Rehabilitasi Sosial	4,646,406,293
23	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	737,576,942
24	Program Penanganan Bencana	1,762,409,480
25	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	47,349,426
26	Program Perencanaan Tenaga Kerja	14,933,460
27	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,063,646,039
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	147,119,845
29	Program Hubungan Industrial	101,985,000
30	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	554,789,671
31	Program Perlindungan Perempuan	33,126,140
32	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	91,398,340
33	Program Perlindungan Khusus Anak	45,837,958
34	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	218,563,570
35	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	579,756,680
36	Program Penanganan Kerawanan Pangan	68,920,000
37	Program Pengawasan Keamanan Pangan	125,844,535
38	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1,007,848,844
39	Program Penatagunaan Tanah	2,282,730,132
40	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	582,989,412
41	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	976,071,801
42	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2,530,709,871
43	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	214,830,643
44	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	72,318,259
45	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	57,425,612



46	Program Pengelolaan Persampahan	4,712,797,640
47	Program Pendaftaran Penduduk	235,651,034
48	Program Pencatatan Sipil	99,173,993
49	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	239,391,958
50	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	519,871,528
51	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9,592,411,015
52	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	682,991,811
53	Program Pengendalian Penduduk	327,140,605
54	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5,941,346,256
55	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,430,436,259
56	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,403,228,816
57	Program Pengelolaan Pelayaran	27,368,000
58	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,833,894,280
59	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,445,277,230
60	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	63,299,694
61	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	406,527,769
62	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2,183,017,085
63	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31,294,323
64	Program Promosi Penanaman Modal	434,828,300
65	Program Pelayanan Penanaman Modal	150,684,647
66	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427,799,348
67	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	174,998,277
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,541,324,155
69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17,388,091,251
70	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	600,000,000
71	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32,276,510
72	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	17,685,000
73	Program Pengembangan Kebudayaan	549,966,645
74	Program Pembinaan Sejarah	324,993,204
75	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	349,961,862
76	Program Pembinaan Perpustakaan	534,754,784
77	Program Pengelolaan Arsip	59,895,200
78	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	544,625,562
79	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	160,154,659
80	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	64,909,388
81	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	115,414,805
82	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	373,924,248
83	Program Pemasaran Pariwisata	5,762,445,635
84	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	112,995,000
85	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	112,492,035
86	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	789,280,910
87	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11,028,921,347
88	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,098,199,148
89	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	276,159,903
90	Program Perizinan Usaha Pertanian	22,082,200
91	Program Penyuluhan Pertanian	461,393,743



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2023**



# BUPATI TANAH LAUT

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : SYAMSIR RAHMAN**

**Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, Oktober 2023

**Pj. BUPATI TANAH LAUT,**

**SYAMSIR RAHMAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,22	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,80	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	89	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (70,01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Daerah Inspektorat
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik



12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	5,05	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0,225	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	39,02 (dalam juta)	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,50	Sumber data BPS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	120 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30,00	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,00	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,57	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,60	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	350 (dalam ribu)	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	68,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	98	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategori Maju (%)	28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	1,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pj. BUPATI TANAH LAUT

  
SYAMSIR RAHMAN

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,012,604,982,458
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	158,851,401,107
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	374,930,356
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	134,898,085,829
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25,494,424,413
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	361,893,945
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	744,111,805
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	88,539,525,506
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	50,309,587,356
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,637,200,000
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	25,752,469,834
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	126,142,920,841
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	216,167,830,106
14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	415,000,000
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,661,738,637
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	118,640,000
17	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6,565,000,000
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	68,551,856,963
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,803,374,002
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	630,685,413
21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	532,011,202
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	215,512,058
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4,602,406,293
24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	775,126,942
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1,862,407,515
26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	47,349,426
27	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	14,933,460
28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,026,657,988
29	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	147,119,845
30	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	898,842,600
31	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	517,238,050
32	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	66,771,180
33	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	91,398,340
34	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	82,732,958
35	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	218,563,570
36	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	650,015,007
37	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	68,920,000
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	125,844,535
39	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,170,848,401
40	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1,907,756,359
41	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	393,534,113
42	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,062,336,513
43	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3,322,000,300



44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	245,666,918
45	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	74,356,810
46	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	59,464,163
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6,376,128,764
48	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	250,606,034
49	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	81,266,150
50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	388,191,959
51	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	723,433,798
52	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9,037,879,093
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	910,991,611
54	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	327,140,605
55	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6,043,244,219
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,380,739,367
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6,325,961,138
58	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27,368,000
59	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,525,009,634
60	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6,510,058,342
61	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	115,196,383
62	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	211,226,039
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,998,281,286
64	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	31,294,323
65	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	434,828,300
66	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	137,184,647
67	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	427,799,348
68	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	159,232,261
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,970,750,538
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	27,858,501,852
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	600,000,000
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	32,276,510
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	17,685,000
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	936,335,708
75	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	345,119,464
76	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	349,961,862
77	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	772,754,784
78	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	99,895,200
79	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	544,625,562
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	289,185,817
81	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	64,909,388
82	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	115,414,805
83	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,500,379,207
84	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6,226,423,184
85	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	112,995,000
86	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	162,468,705

87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	995,244,459
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13,972,612,501
89	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,152,024,928
90	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	526,018,244
91	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	372,036,290
92	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	486,414,193
93	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,149,099,011
94	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	414,955,440
95	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	82,080,387
96	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	858,871,944
97	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	16,320,000
98	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80,016,376
99	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	38,537,563,532
100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,116,482,018
101	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26,837,458,043
102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,340,718,103
103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	270,601,215
104	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	270,000,377,529
105	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18,600,703,525
106	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,192,787,996
107	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,187,269,980
108	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,521,627,701
109	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	325,668,521
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,142,147,592
111	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	738,098,908
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64,729,444
113	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,211,588,138
114	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48,892,532
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,134,193,398
116	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	251,532,012
117	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,313,822,756
118	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	45,235,758,769
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	290,120,000
120	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	304,777,594
121	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4,265,910,445
	<b>TOTAL</b>	<b>2,502,266.740.528.00</b>

Pelaihari, Oktober 2023

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

  
SYAMSIR RAHMAN



## DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

### 1. SUKAMTA TERIMA PENGHARGAAN BAKTI KOPERASI DAN UKM



Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta menerima medali dan piagam penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki. Penghargaan tersebut diterima Sukamta disela-sela kunjungan Menteri Teten Masduki ke Tala dalam rangka meresmikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Koperasi Sawit Makmur PT BGMPA di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Selasa (31/1/2023).

## 2. SUKAMTA RAIH DUA PENGHARGAAN IGA 2023



Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta, meraih dua kategori penghargaan pada Indonesia Green Award (IGA) 2023 oleh La Tofi School Of Social Responsibility. Bertempat di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski, Rabu (22/2/2023) malam.

### 3. PEMKAB TALA RAIH PENGHARGAAN UHC AWARD



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Tala dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan.

Penghargaan bertajuk "Wujud nyata komitmen pemda dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Indonesia," diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wakil Bupati Tala Abdi Rahman disaksikan secara langsung Menteri PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Bappenas, Direktur BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di Balai Sudirman Tebet Jakarta Selatan pada Selasa (14/3/2022).



#### 4. Tala Peringkat IV Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Sebagai Peringkat IV Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022 Kategori Kabupaten pada Ajang APBD AWARD 2023, penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni kepada Bupati Tala yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tala Safarin M.Si di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta pada Kamis (16/3/2023).

## 5. BUPATI SUKAMTA TERIMA PENGHARGAAN TOP PEMBINA BUMD 2023



Peran aktif Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta dalam membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat perhatian asesor bisnis nasional mitra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Sukamta pun terpilih sebagai salah satu kepala daerah peraih penghargaan nasional TOP Pembina BUMD pada ajang TOP BUMD Awards 2023, bertempat di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (5/4/2023).

## 6. RSUD HADJI BOEJASIN RAIH AKREDITASI PARIPURNA BINTANG LIMA



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Kabupaten Tanah Laut (Tala) meraih predikat paripurna bintang lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Sertifikat Akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Eksekutif KARS Dr. Dr. Sutoto, M.Kes, FISQua kepada Bupati Tala HM Sukamta didampingi Direktur RSUD Hadji Boejasin Drg. Budi Rukhiyat di Kantor KARS, Gedung Epiwalk Jakarta Selatan, pada Rabu (3/5/2023).

## 7. BUPATI TANAH LAUT HM SUKAMTA MENERIMA ANUGERAH TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA



Bupati Tanah Laut HM Sukamta menerima anugerah tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI H Joko Widodo atas kontribusinya di Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting. Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin pada peringatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023).



## 8. PENGHARGAAN PGM AWARD.



## 9. PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3T



Bupati Tanah Laut HM Sukamta atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerima penghargaan pada ajang Apresiasi TEMPO kategori pembangunan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kementerian Desa melalui Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023.

## 10. Penghargaan UKPBJ Kabupaten/Kota Kategori Pencapaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan Kategori Baik



Pj Bupati Tanah Laut (Tala) yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Safarin menerima Penghargaan UKPBJ Kabupaten/Kota Kategori Pencapaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan Kategori Baik. Penghargaan diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor diwakili Sekretaris Provinsi, Roy Rizali Anwar, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tahun 2023 mengenai Peningkatan Level Kematangan UKPBJ Menuju Tata Kelola Pengadaan yang Baik, di Ballroom Kuini Hotel Harper Banjarmasin Rabu (18/10/2023).



## 11. PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)



Pj Bupati H Syamsir Rahman menerima Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam Program Kampung Iklim (ProKlim), pada acara puncak Festival Iklim Tahun 2023, di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta Selatan Selasa (24/10/2023).

## 12. Penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2022



Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman Kabupaten Tanah Laut (Tala) kembali menorehkan prestasi tingkat nasional yaitu Penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dalam acara Penganugrahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2023 di Hotel Pullman Grand Central Bandung, Jumat (10/11/2023).

### 13. PENGHARGAAN DESA ANTI KORUPSI



Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Tala) dinobatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai Desa Anti Korupsi tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Penghargaan Desa Anti Korupsi tersebut diserahkan Sandy Firdaus, ST., M.Bus., selaku Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang diterima langsung oleh Kepala Desa Bumi Jaya di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (28/11/2023).